



LKPJ

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024

KEPADA :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Probolinggo

PEMERINTAH
PROBOLINGGO



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

2025



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....I - 1

1.1 DASAR HUKUM I - 1

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH I - 3

1.2.1 VISI I - 3

1.2.2 MISI I - 4

1.3 DATA UMUM DAERAH I - 4

1.3.1 Data Geografis Wilayah.....I - 4

1.3.2 Gambaran Umum Demografis I - 9

1.3.3 Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara I - 10

1.3.4 Kondisi Ekonomi..... I - 11

1.3.5 Kondisi Sosial..... I - 25

1.3.6 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan I - 26

1.3.7 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja I - 27

1.3.8 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan I - 28

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH II - 1

1. Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan II - 2

2. Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB II - 22

3. Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman II - 36

4. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja II - 41

5. Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah..... II - 45

6. Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.... II - 48

7. Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja II - 57

8. Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan II - 60

9. Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup II - 65

10. Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil II - 72

11. Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan II - 75

12. Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika..... II - 79

13. Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan II - 83

14. Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata..... II - 88

15. Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan II - 92

16. Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah..... II - 95

17. Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD II - 99

18. Perangkat Daerah : Inspektorat II - 105



19. Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan II - 108

20. Perangkat Daerah : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah II - 112

21. Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia II - 116

22. Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..... II - 119

123. Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja..... II - 122

24. Perangkat Daerah : Kecamatan Wonoasih..... II - 127

25. Perangkat Daerah : Kecamatan Kademangan II - 130

26. Perangkat Daerah : Kecamatan Mayangan II - 134

27. Perangkat Daerah : Kecamatan Kedopok..... II - 131

28. Perangkat Daerah : Kecamatan Kanigaran II - 148

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN

DAERAH III - 1

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN III - 1

3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA.....III - 1

3.1.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) III - 1

3.1.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD).....III - 7

3.1.1.3 Realisasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah III - 29

3.1.1.3.1 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....III - 29

3.1.1.3.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar III - 41

3.1.1.3.3 Pelaksanaan Unsur Pilihan III - 64

3.1.1.3.4 Pelaksanaan Unsur Staf.....III - 67

3.1.1.3.5 Pelaksanaan Unsur Pengawasan III - 69

3.1.1.3.6 Pelaksanaan Fungsi Penunjang III - 73

3.1.1.3.7 Pelaksanaan Fungsi Koordinasi III - 78

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN III - 81

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA III - 85

3.4 PRESTASI YANG TELAH DIRAIH.....III - 100

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN IV – 1

BAB V PENUTUP V – 1



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Geologi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan I - 6

Tabel 1. 2 Nama dan Panjang Sungai di Kota Probolinggo..... I - 7

Tabel 1. 3 Sumber Mata Air di Kota Probolinggo I - 7

Tabel 1. 4 Kedalaman Air Tanah Berdasarkan Kecamatan..... I - 8

Tabel 1. 5 Penggunaan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2024..... I - 9

Tabel 1. 6 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024 (dalam ribu jiwa) I - 10

Tabel 1. 7 Jumlah Pegawai ASN Kota Probolinggo Tahun 2019-2024..... I - 10

Tabel 1. 8 Luas Wilayah berdasarkan Penggunaan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2024..... I - 11

Tabel 1. 9 Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan Tahun 2019-2024..... I - 12

Tabel 1. 10 Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2019–2024..... I - 13

Tabel 1. 11 Data Produksi Peternakan Tahun 2019 - 2024 I - 14

Tabel 1. 12 data Produksi Perikanan Tahun 2019 - 2024..... I - 17

Tabel 1. 13 Data Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 I - 18

Tabel 1. 14 Data Profil Industri Tahun 2019 - 2024..... I - 18

Tabel 1. 15 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 . I - 19

Tabel 1. 16 Profil Penyediaan Air Bersih Tahun 2019 - 2024 I - 19

Tabel 1. 17 Perkembangan Pasar dan Toko di Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 I - 20

Tabel 1. 18 Jumlah UMKM Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 I - 20

Tabel 1. 19 Perkembangan Investasi di Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 I - 20

Tabel 1. 20 Jumlah Bank Menurut Kelompok di Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024..... I - 21

Tabel 1. 21 Potensi Wisata Kota Probolinggo I - 22

Tabel 1. 22 Kunjungan Pada Destinasi Pariwisata Kota Probolinggo Tahun 2019–2024..... I - 22

Tabel 1. 23 Data Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024..... I - 23

Tabel 1. 24 Jumlah Penduduk Miskin Kota Probolinggo Tahun 2019–2024 I - 24

Tabel 1. 25 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2024..... I - 27

Tabel 1. 26 Target dan Realisasi Belanja Daerah TA. 2024 I - 27

Tabel 1. 27 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA. 2024 I - 28

Tabel 2. 1 Target dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah TA. 2024..... II - 2

Tabel 2. 2 Data Kinerja Anggaran 2023 – 2024 II - 144

Tabel 3. 1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo Tahun 2024 III - 1

Tabel 3. 2 Realisasi Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2024..... III - 7

Tabel 3. 3 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Pendidikan) III - 30

Tabel 3. 4 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Kesehatan) III - 33



Tabel 3. 5 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)III - 37

Tabel 3. 6 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman)III - 38

Tabel 3. 7 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat) III - 39

Tabel 3. 8 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Sosial) III - 41

Tabel 3. 9 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Tenaga Kerja) III - 42

Tabel 3. 10 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) III - 42

Tabel 3. 11 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Pangan) III - 43

Tabel 3. 12 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Pertanahan)..... III - 45

Tabel 3. 13 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Lingkungan Hidup) III - 45

Tabel 3. 14 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil) III - 49

Tabel 3. 15 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Pemberdayaan Masyarakat) III - 49

Tabel 3. 16 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) III - 51

Tabel 3. 17 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Perhubungan)..... III - 54

Tabel 3. 18 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Komunikasi dan Informatika) III - 55

Tabel 3. 19 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah)... III - 56

Tabel 3. 20 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Penanaman Modal) III - 58

Tabel 3. 21 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Pemuda dan Olahraga)..... III - 59



Tabel 3. 22 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Statistik) III - 60

Tabel 3. 23 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Persandian) III - 61

Tabel 3. 24 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Kebudayaan) III - 62

Tabel 3. 25 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Perpustakaan) III - 63

Tabel 3. 26 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Kearsipan) III - 63

Tabel 3. 27 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Kelautan dan Perikanan) III - 64

Tabel 3. 28 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Pariwisata)..... III - 65

Tabel 3. 29 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Pertanian)..... III - 65

Tabel 3. 30 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Perdagangan) III - 66

Tabel 3. 31 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Perindustrian)..... III - 66

Tabel 3. 32 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Unsur Staf_Setda)..... III - 67

Tabel 3. 33 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Unsur Staf_Setwan) III - 68

Tabel 3. 34 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Pengawasan) III - 69

Tabel 3. 35 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Unsur Perencanaan) III - 73

Tabel 3. 36 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Unsur Keuangan) III - 73

Tabel 3. 37 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) III - 74

Tabel 3. 38 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Penelitian dan Pengembangan) III - 76

Tabel 3. 39 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Fungsi Penunjang Lainnya) III - 77



Tabel 3. 40 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Fungsi Koordinasi).....III – 78

Tabel 3. 41 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan III - 81

Tabel 3. 42 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya..... III - 85

Tabel 3. 43 PRESTASI YANG TELAH DIRAIH TAHUN 2024..... III - 100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Wilayah Kota Probolinggo I - 4

Gambar 1. 2 Peta Topografi Kota Probolinggo..... I - 5

Gambar 1. 3 Transek Wilayah Kota Probolinggo..... I - 5

Gambar 1. 4 Peta Jenis Tanah Kota Probolinggo I - 6

Gambar 1. 5 Peta Hidrologi Kota Probolinggo I - 8

Gambar 1. 6 Peta Penggunaan Lahan Kota Probolinggo..... I - 9

Gambar 1. 7 Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo Tahun 2019–2024 I - 24

Gambar 1. 8 Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo Tahun 2019- 2024 I - 25

Gambar 1. 9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Probolinggo Tahun 2019 –2024..... I - 26

Gambar 1. 10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 I - 26



BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang terdiri dari hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. LKPJ Tahun 2024 disampaikan oleh Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo, berisi tentang capaian kinerja hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan berupa program dan kegiatan, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024. Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;



4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019–2024;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
24. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024.

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1.2.1 VISI

Visi Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke-5 Selain itu visi harus melihat dinamika pembangunan di Kota Probolinggo yang direpresentasikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di Tahun berkenaan, maka Visi Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang merupakan Visi Politik yang diusung Kepala Daerah terpilih yaitu:

**“Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera,
Transparan, Aman dan Berkelanjutan”**



1.2.2 MISI

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 tersebut, maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dielaborasi sebagai berikut :

- Misi Pertama : Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial
- Misi Kedua : Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas
- Misi Ketiga : Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- Misi Keempat : Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik

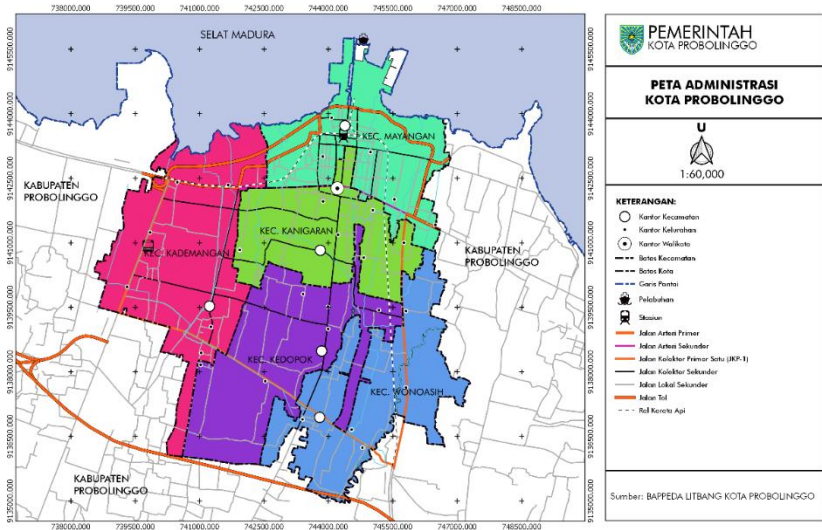
1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1 Data Geografis Wilayah

A. Administrasi Wilayah

Kota Probolinggo merupakan kota sedang yang berfungsi sebagai pusat dari WP Probolinggo–Lumajang dalam konstelasi perwilayahan Provinsi Jawa Timur dan bagian dari tlatah atau kawasan kebudayaan Pendalungan yang berbatasan langsung dengan Selat Madura. Secara geografis Kota Probolinggo berada diantara 7°43’41” sampai 7°49’04” Lintang Selatan dan 113°10’ sampai dengan 113°15’ Bujur Timur. Berdasarkan Kepmendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau bahwa Luas wilayah Kota Probolinggo adalah 54,676 km². Secara administrasi, Kota Probolinggo terdiri dari 5 kecamatan dan 29 kelurahan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara : Selat Madura
- 2. Sebelah Timur : Kecamatan Dringu (Kabupaten Probolinggo)
- 3. Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, Bantaran, dan Sumberasih (Kabupaten Probolinggo)
- 4. Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih (Kabupaten Probolinggo)

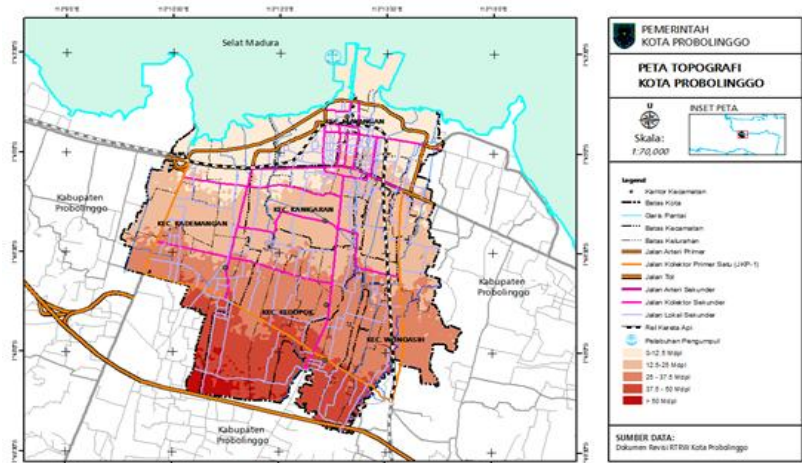


Gambar 1. 1 Peta Administrasi Wilayah Kota Probolinggo

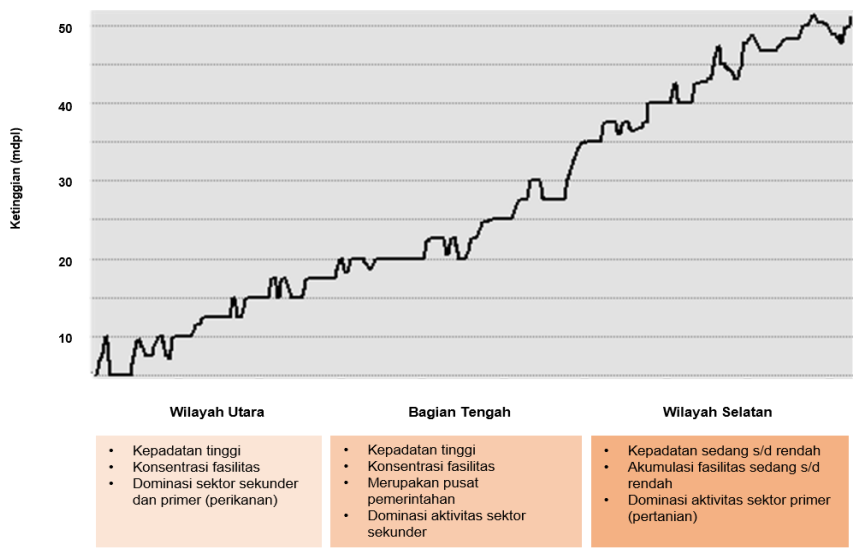


A. Topografi

Berdasarkan data dari BPS ketinggian Kota Probolinggo berkisar pada 0 s.d 36 mdpl. Jika ditinjau dari aspek kelerengan maka wilayah Kota Probolinggo berada pada kelerengan 0 – 2% atau dapat dikatakan memiliki wilayah yang relatif datar dan memungkinkan untuk pengembangan kawasan, khususnya kawasan budidaya. Topografi yang semakin tinggi di wilayah selatan berdampak pada arah limpasan air yang mengarah ke wilayah utara dan berpotensi menyebabkan banjir bila tidak didukung oleh sistem drainase yang memadai.



Gambar 1. 2 Peta Topografi Kota Probolinggo



Gambar 1. 3 Transek Wilayah Kota Probolinggo

B. Geologi

Wilayah Kota Probolinggo dibentuk dari bahan induk batuan vulkanik dan zaman quarter muda (young quarternary volcanic product) dan batuan endapan (alluvium). Bahan induk tersebut terbentuk dengan fisiografi yang relatif datar. Geologi jenis young quarternary volcanic tersebar merata di kecamatan Kota Probolinggo sebesar 65,05% dari luas wilayah sedangkan jenis batuan aluvium sekitar 34,95%, tersebar di Kecamatan Kademangan, Wonoasih, Mayangan dan Kanigaran.



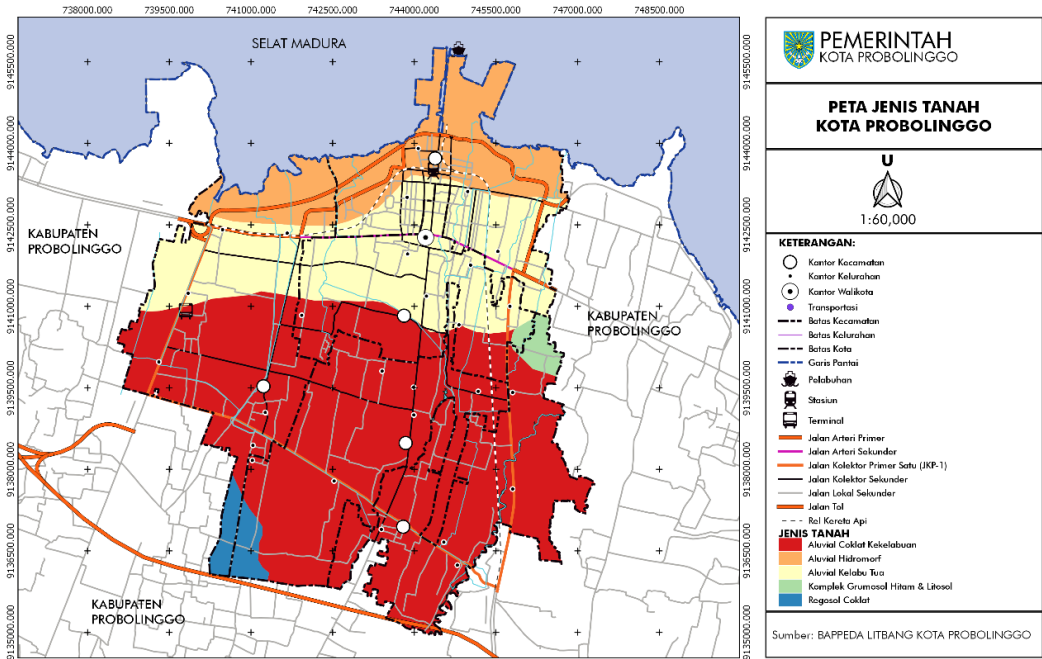
Tabel 1. 1 Geologi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Batuan (geologi)	
		Alluvium	Young Quarternary Volcanic
1	Kademangan	12,62%	12,8%
2	Wonoasih	1,38%	18,2%
3	Mayangan	17,10%	0,7%
4	Kanigaran	3,86%	11,9%
5	Kedopak	0,00%	21,4%
	Kota Probolinggo	34,95%	65,0%

Sumber: Bappeda Litbang, 2025

C. Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Kota Probolinggo terdiri dari Alluvial, Grumosol dan Regosol. Jenis tanah alluvial regosol terdapat pada daerah paling utara yaitu daerah pantai. Alluvial kelabu tua pada bagian tengah ke utara. Jenis tanah yang terluas pada wilayah Kota Probolinggo adalah alluvial coklat keabuan, yaitu dari bagian tengah hingga selatan kota. Jenis tanah regosol coklat terdapat sebagian kecil di bagian timur kota, sedangkan kompleks grumosol hitam dan litosol pada bagian barat daya. Jenis tanah aluvial merupakan tanah yang sangat baik untuk usaha pertanian, karena pada jenis ini tersedia cukup mineral yang diperlukan untuk tumbuh-tumbuhan. Demikian pula jika digunakan untuk bangunan, jenis tanah ini mempunyai daya tahan yang kuat karena merupakan endapan tanah liat.



Gambar 1. 4 Peta Jenis Tanah Kota Probolinggo

D. Hidrologi

Kondisi hidrologi dapat menunjukkan kondisi sumber daya air yang terdapat di wilayah perencanaan. Kota Probolinggo mempunyai potensi sumber air yang cukup banyak, pada umumnya sungai-sungai yang ada mempunyai aliran yang cukup. Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh 6 (enam) sungai, antara lain Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah dan



Pancur. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah Selatan ke Utara sesuai dengan kelerengan wilayah.

Tabel 1. 2 Nama dan Panjang Sungai di Kota Probolinggo

NO	NAMA SUNGAI / KALI	PANJANG (Km)	NO	NAMA SUNGAI / KALI	PANJANG (Km)
1	Kedunggaleng	3,097	11	Afvoer Bromo	3,297
2	Umbul	5,138	12	Pakis	3,225
3	Banger	2,865	13	Gladak Serang	4,392
4	Legundi	5,439	14	Akub	3,693
5	Kasbah	2,037	15	Belo'an	5,539
6	Pancor	4,239	16	Esan	4,137
7	Pesisir	3,693	17	Bangsingan	2,844
8	Dringu	5,949	18	Barat TPA	2,51
9	Tempuran	2,059	19	Kedunggaleng 1	3,206
10	Afvoer Brantas	3,704			

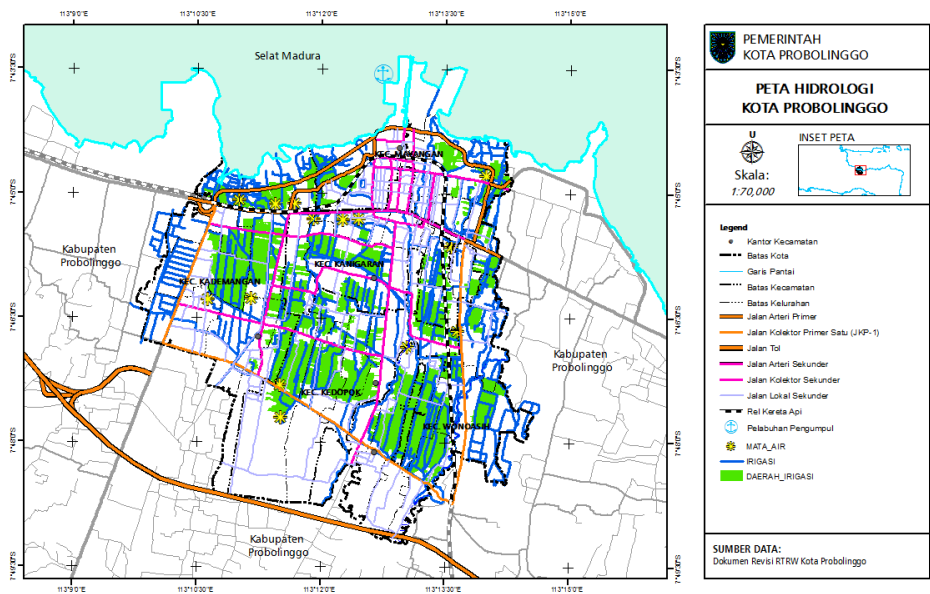
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Selain memanfaatkan aliran air sungai untuk irigasi usaha di sektor pertanian, kondisi hidrologi Kota Probolinggo juga didukung oleh keberadaan sumber mata air seperti yang tercantum pada Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2023 yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian serta berpotensi sebagai obyek wisata.

Tabel 1. 3 Sumber Mata Air di Kota Probolinggo

NO	SUMBER MATA AIR	LOKASI	
		KELURAHAN	KECAMATAN
1	Sumber Mata Air Langse	Triwung Lor	Kademangan
2	Sumber Mata Air Pilang Renes	Pilang	Kademangan
3	Sumber Mata Air Jalil	Ketapang	Kademangan
4	Sumber Mata Air Tiban	Pilang	Kademangan
5	Sumber Mata Air Genthong	Pilang	Kademangan
6	Sumber Mata Air Umbul/Ganesha	Curah Ginting	Kanigaran
7	Sumber Mata Air Sumber Pacar	Tisnonegaran	Kanigaran
8	Sumber Mata Air Sumber kekok	Tisnonegaran	Kanigaran
9	Sumber Mata Air Arum	Mangunharjo	Mayangan
10	Sumber Mata Air Jati	Sukoharjo	Kanigaran
11	Sumber Mata Air Sumber Taman	Sumber Taman	Wonoasih
12	Sumber Mata Air Sumber Ardi	Wonoasih	Wonoasih
13	Sumber Mata Air Grinting, Sumber Wetan	Sumber Wetan	Kedopak
14	Sumber Mata Air Senthong	Jrebeng Wetan, Jrebeng Kidul	Kedopak
15	Sumber Mata Air Sumber Pilang	Pilang	Kademangan
16	Sumber Mata Air Sumber Gayam	Pilang	Kademangan
17	Sumber Mata air Sumber Curah Grinting	Kedopak	Kedopak

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025



Gambar 1. 5 Peta Hidrologi Kota Probolinggo

E. Kedalaman Air Tanah

Kedalaman air tanah Kota Probolinggo didominasi oleh kedalaman 4 – 8 m sebesar 40,36% sedangkan kedalaman di bawah 4 m sebesar 26,87% dari luas wilayah. Dapat dikatakan semakin ke selatan maka kedalaman air tanah akan semakin tinggi.

Tabel 1. 4 Kedalaman Air Tanah Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Kedalaman Air Tanah		
		Kedalaman < 4 Meter	Kedalaman 4 - 8 Meter	Kedalaman 8 - 12 Meter
1	Kademangan	7,90%	12,80%	4,75%
2	Wonoasih	0,00%	5,72%	13,88%
3	Mayangan	16,99%	0,78%	0,00%
4	Kanigaran	2,08%	13,64%	0,00%
5	Kedopok	0,00%	7,42%	14,03%
	KOTA PROBOLINGGO	26,97%	40,36%	32,66%

Sumber : Bappeda Litbang, 2025

F. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Probolinggo didominasi oleh penggunaan lahan tidak terbangun baik berupa perairan, sawah maupun mangrove sebesar 74,33% dari luas wilayah. Adapun kawasan terbangun adalah seluas 25,67% dari luas wilayah yang didominasi oleh kawasan perumahan. Kecamatan Mayangan dan Kanigaran merupakan wilayah dengan luas lahan terbangun lebih besar dibandingkan lahan tidak terbangun.

Secara keruangan konsentrasi aktivitas cenderung terpusat terkonsentrasi di Kecamatan Mayangan dan Kanigaran sebagai pusat kota dengan kepadatan penduduk dan bangunan yang tinggi serta didominasi oleh aktivitas di sektor sekunder. Sebaliknya Kecamatan Kademangan, Kedopok dan Wonoasih memiliki kepadatan yang relatif rendah dengan dominasi kegiatan di sektor primer khususnya pertanian. Pola penggunaan lahan tersebut menjadikan struktur ruang Kota Probolinggo cenderung monocentric dimana bentuk struktur ruang ini hanya memiliki satu pusat pelayanan. Apabila di wilayah utara berkembang perumahan dengan kepadatan tinggi dan

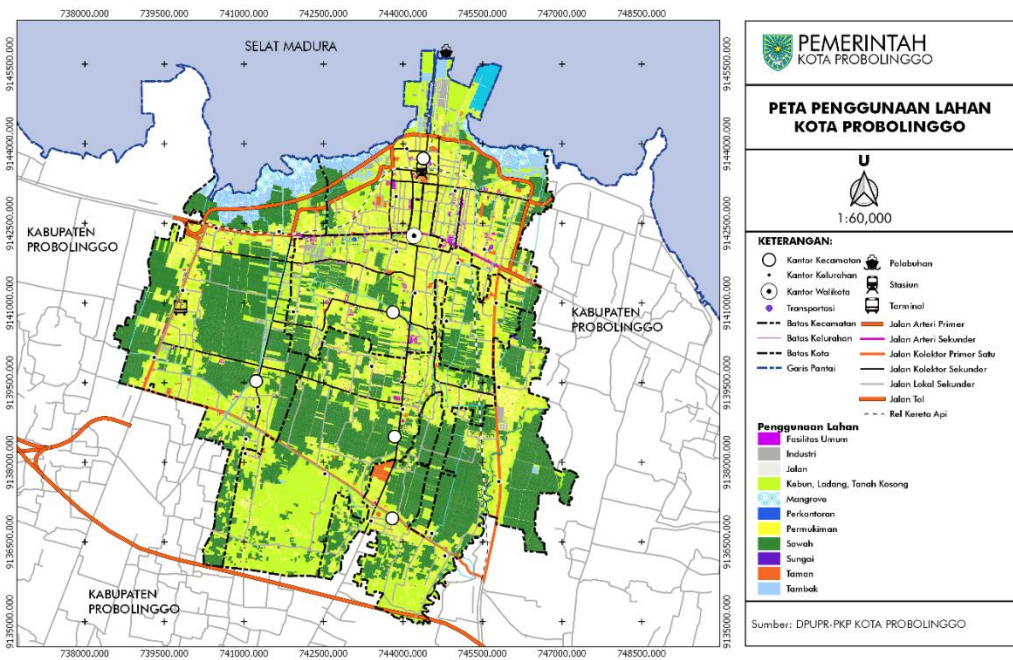


berkarakteristik kekotaan maka di wilayah selatan khususnya di Kecamatan Wonoasih berkembang perumahan yang lebih berkarakteristik pedesaan yang pada umumnya mengelompok dalam suatu kawasan dan dikelilingi oleh kawasan pertanian atau berkembang secara linier di sepanjang jalan utama yang ada.

Tabel 1. 5 Penggunaan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2024

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Perairan	174,46	3,16%
2	Fasilitas Umum	18,58	0,34%
3	Fasilitas Peribadatan	5,39	0,10%
4	Industri	112,03	2,03%
5	Jalan	211,25	3,82%
6	Kebun dan Tegalan	1.848,18	33,45%
7	Makam	34,57	0,63%
8	Mangrove	112,46	2,04%
9	Perkantoran	6,80	0,12%
10	Permukiman	1.013,52	18,34%
11	Perdagangan dan Jasa	28,96	0,52%
12	Fasilitas Kesehatan	2,46	0,04%
13	Sawah	1.937,35	35,06%
14	Fasilitas Pendidikan	19,72	0,36%

Sumber : DPUPR-PKP, 2025



Gambar 1. 6 Peta Penggunaan Lahan Kota Probolinggo

1.3.2 Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kota Probolinggo pada Tahun 2024 berdasarkan data BPS adalah sejumlah 243.746 orang yang terdiri atas 121.121 orang penduduk laki-laki dan 122.625 orang penduduk perempuan. Adapun gambaran penduduk berdasarkan usia dan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 1. 6 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024 (dalam ribu jiwa)

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	8.971	8.667	17.638
2	5-9	9.925	9.535	19.460
3	10-14	10.385	9.929	20.314
4	15-19	10.167	9.591	19.758
5	20-24	10.427	9.773	20.200
6	25-29	9.783	9.276	19.059
7	30-34	8.800	8.785	17.585
8	35-39	8.440	8.587	17.027
9	40-44	9.270	9.690	18.960
10	45-49	8.406	8.791	17.197
11	50-54	7.958	8.249	16.207
12	55-59	6.648	7.410	14.048
13	60-64	4.702	5.554	10.256
14	65-69	3.476	3.848	7.324
15	70-74	2.190	2.401	4.591
16	75+	1.573	2.539	4.112
	Total	121.121	122.625	243.746

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2025, BPS

Dari data diatas dapat diilustrasikan bahwa jumlah penduduk terbanyak pada usia produktif dengan kategori umur 15-60 tahun yang merupakan subyek / pelaku pembangunan utama, merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah. Dengan banyaknya penduduk pada usia produktif, maka pemerintah dituntut untuk dapat mengarahkan program-program pembangunan daerah guna memberdayakan masyarakat serta upaya-upaya peningkatan kualitas SDM yang masuk dalam kelompok usia ini mengingat bonus demografi ini menjadi modal untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Penduduk 15 tahun ke atas menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan Tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase terbesar tingkat pendidikan masyarakat Kota Probolinggo adalah lulusan Sekolah Menengah Atas.

1.3.3 Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk jumlah data Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam kurun waktu tiga tahun terakhir bisa dilihat pada tabel 1.7 dibawah ini:

Tabel 1. 7 Jumlah Pegawai ASN Kota Probolinggo Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Pegawai ASN
2019	3.503 orang
2020	3.344 orang
2021	3.338 orang
2022	3.567 orang
2023	3.639 orang
2024	3686 orang

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan



Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Probolinggo sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 3.686 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang paling banyak dari Tahun 2019 hingga 2023.

1.3.4 Kondisi Ekonomi

1.3.4.1 Potensi Unggulan Daerah

Kota Probolinggo menyimpan berbagai potensi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan terlebih potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset investasi penting dan kompetitif bagi dunia usaha, berbagai potensi investasi yang dimiliki tersebar luas diberbagai sektor, diantaranya:

1. Pertanian

Pada wilayah selatan Kota Probolinggo jumlah luasan lahan pertanian masih bisa dioptimalkan untuk mendukung total produksi pangan. Namun demikian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kota Probolinggo cenderung menurun. Hal ini dimungkinkan karena adanya pergeseran struktur perekonomian kota dari sektor primer ke sektor sekunder (jasa dan industri). Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor menurunnya jumlah luasan lahan pertanian. Adapun luasan lahan pertanian di Kota Probolinggo Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1. 8 Luas Wilayah berdasarkan Penggunaan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2024

PENGGUNAAN LAHAN	KECAMATAN					Total (Ha)
	Kademangan	Kedopok	Wonoasih	Mayangan	Kanigaran	
LAHAN PERTANIAN	655	829,75	646,6	190,6	324,76	2646,71
Lahan Sawah	535	399,5	422	117	268	1741,5
Irigasi Teknis	535	399,5	422	117	268	1741,5
Irigasi Setengah Teknis						0
Irigasi Sederhana						0
Irigasi Desa/ Non PU						0
Tadah Hujan						0
Pasang Surut						0
Lebak						0
Polder dan Lainnya						0
Bukan Lahan Sawah	120	430,25	224,6	73,6	56,76	905,21
Tegal/Kebun	66	367,5	190			623,5
Ladang/Huma						
Perkebunan						
Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	4	57,2	20,8	17,1	6,5	105,6
Padang Penggembalaan Rumput						0
Sementara tak diusahakan						0
Lain – lain (tambak, kolam, pekarangan, ditanami tanaman pertanian dll)	50	5,55	13,8	56,5	50,26	176,11
BUKAN LAHAN PERTANIAN	620,36	531,87	451,49	674,94	740,55	3019,21
Jumlah	1275,36	1361,62	1098,09	865,54	1065,31	5665,92

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2025



Alih fungsi lahan merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan serta berimplikasi terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, dan kesejahteraan masyarakat petani. Oleh karenanya, pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga dan mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, termasuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan petani. Kota Probolinggo telah menunjukkan upaya sungguh-sungguh dan komitmen dalam melindungi kawasan pertanian pangan berkelanjutan melalui serangkaian peraturan yang komprehensif. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2040. Dalam peraturan tersebut, pasal 42 secara jelas menyebutkan bahwa luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Probolinggo adalah sebesar 1099 hektar, setara dengan 46,47% dari total luas pertanian pangan di Kota Probolinggo yaitu seluas 2365 hektar.

Untuk memperkuat komitmen ini, Kota Probolinggo juga menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pada pasal 8 kembali menegaskan bahwa luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebesar 1099 hektar yang terbagi di 5 Kecamatan.

Aturan-aturan yang dibuat ini mencerminkan dedikasi Kota Probolinggo dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan sebagai salah satu sumber daya penting bagi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan daerah. Dengan adanya regulasi yang jelas dan terperinci, diharapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Probolinggo dapat terlindungi dengan baik, memastikan produktivitas dan kelestariannya untuk generasi mendatang.

Sedangkan gambaran umum produktivitas sektor pertanian Kota Probolinggo selama Tahun 2024 sebagaimana pembahasan di bawah ini :

a. Tanaman Pangan

Adapun Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan dari tanaman Pangan di Kota Probolinggo pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.9 di bawah ini. Untuk produksi, luas panen dan rata-rata produksi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam seperti cuaca, hama, curah hujan, dll sehingga produktivitasnya cenderung fluktuatif.

Tabel 1. 9 Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan Tahun 2019-2024

Jenis	Produksi (ton)						Luas Panen (ha)						Rata-rata Produksi (kw/ha)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Padi	13.991,69	12.150,60	13.492,85	12.535,18	11.639,23	12.786,26	2.088,00	1.841,00	2.034,00	1.886,00	1718	1868	67,01	66	66,34	66,46	67,75	68,45
Jagung	32.195,90	34.993,00	34.587,82	36.901,54	34.795,49	40.336,09	4.534,00	4.999,00	4.800,00	5.196,00	4896	5315	71	70	72,06	71,02	71,07	75,89
Bawang Merah	4.556,10	5.254,50	6.017,80	6.109,90	8.487,30	5.434,60	510	599	676	697	940	637,5	89,34	87,72	89,02	87,66	90,29	85,25

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2025



b. Perkebunan

Perkebunan bukan merupakan komoditas utama di Kota Probolinggo mengingat Kota Probolinggo tidak termasuk kategori wilayah yang memiliki lahan perkebunan. Secara umum, untuk komoditi perkebunan rakyat yang dilakukan menggunakan luas lahan kecil, perseorangan, pengelolaan masih sederhana dan tradisional, serta belum berorientasi bisnis.

Tabel 1. 10 Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2019–2024

Jenis	Produksi (ton)						Luas Panen (ha)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tembakau	-	-	-	-	-	5,97	-	-	-	-	-	3,71
Tebu	1.661,06	1.568,70	1.629,60	1.182,30	1.672,60	1.686,32	21,547	20,366	18,6	15,23	18,541	19,373
Kelapa	14,5	12,53	16	5,35	0,4	0	72,79	56,43	48,08	4,43	0,5	0
Kapuk Randu	0,16	0,08	0,04	0,03	0	0	3,23	2,22	2,2	0,8	0	0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2025

Komoditas tembakau di Kota Probolinggo sudah tidak ada lagi sejak tahun 2017, tetapi di Tahun 2024 terdapat lagi tanaman tembakau dengan luas 3,71 Ha dan produksi sebanyak 5,97 ton di wilayah Kecamatan Wonoasih, Kademangan, dan Kedopok. Untuk komoditas tebu tingkat produksi meningkat menjadi 1.686,32 berbanding lurus dengan luas panen yang juga meningkat di tahun 2024. Petani menamam tebu bekerjasama dengan PG menggunakan pola kemitraan tebu rakyat sistem bagi hasil. Manfaat kemitraan dengan sistem bagi hasil ini akan mendorong meningkatnya kesejahteraan petani, kualitas tebu yang masuk lebih terjamin sehingga rendemen tinggi dan harga meningkat, petani terdorong untuk meningkatkan kualitas tebu sehingga kadar gulanya tinggi dan pabrik gula mendapatkan bahan baku tebu yang memadai dengan hasil gula yang berkualitas.

c. Peternakan

Peternakan merupakan salah satu sektor yang masih cukup potensial untuk dikembangkan di Kota Probolinggo. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, potensi peternakan di Kota Probolinggo Tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel 1.11 berikut ini.



Tabel 1. 11 Data Produksi Peternakan Tahun 2019 - 2024

JENIS TERNAK	JUMLAH POPULASI						DAGING (Kg)						TELUR (Kg)						SUSU (Kg)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi Potong	10.764	10.934	11.061	4.582	4.083	4.122	492.577	422.340	372.563	362.628	473.105	471.913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sapi Perah	223	224	108	161	116	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.577	461.153	394.129	309.767	284.974	231.931
Kambing	8.177	3.226	3.247	1.027	1.052	1.074	34.369	37.542	37.675	165.969	35.705	33.183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Domba	9.815	5.427	5.459	3.728	3.781	3.861	148.522	149.332	164.462	31.279	159.424	178.346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuda	12	13	16	24	20	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayam Buras	83.701	85.139	86.437	86.603	87.852	88.739	95.811	96.027	110.686	140.570	161.095	152.184	56.078	57.194	57.871	58.068	58.942	59.724	-	-	-	-	-	-
Ayam Ras Petelur	15.700	12.000	12.700	11.350	9.550	13.665	1.885	6.003	5.544	4.375	14.940	10.612	141.377	140.946	135.369	101.400	106.850	134.925	-	-	-	-	-	-
Ayam Ras Pedaging	56.100	27.000	87.000	63.000	60.000	78.000	1.639.514	1.398.176	1.724.393	1.820.710	1.961.386	2.128.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Itik	887	976	998	1.119	1.582	2.676	23.556	25.668	26.108	27.214	29.475	30.369	6.502	6.722	7.097	7.427	10.564	15.043	-	-	-	-	-	-
Entog	298	372	311	306	467	362	-	-	-	-	-	-	370	475	471	398	546	485	-	-	-	-	-	-
Puyuh	150	-	245	300	5.000	900	-	-	-	-	-	-	615	-	210	282	2.853	3600	-	-	-	-	-	-
Kelinci	149	180	193	216	163	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Merpati	2.383	2.362	2.408	2.475	2.580	2630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2025



- Populasi sapi potong mengalami sedikit kenaikan dari 4.083 ekor pada 2023 menjadi 4.122 ekor pada 2024 atau sebesar 0,9%. Peningkatan ini didorong oleh mulai tumbuhnya kepercayaan peternak untuk kembali memulai usaha memelihara sapi, karena gencarnya upaya vaksinasi dan pengobatan sebagai tindakan pencegahan dan penyembuhan ternak dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku yang merebak mulai pertengahan tahun 2021. Upaya mengembalikan kepercayaan peternak untuk memulai usaha beternaknya lagi tetap harus dilakukan secara teliti dan hati-hati karena potensi terjadinya lagi wabah PMK masih sangat dimungkinkan terjadi akibat lalu lintas perdagangan ternak yang kurang terawasi dan mayoritas pola beternak yang masih tradisional dengan kurangnya kepedulian terhadap higiene sanitasi kandang dan peternak.
- Peningkatan populasi sapi potong tidak serta merta menaikkan produksi daging yang malah menurun dari 473.105 kg pada tahun 2023 menjadi 471.913 kg. Hal ini dimungkinkan karena pola konsumsi masyarakat dari sumber protein hewani khususnya daging sapi diganti dengan sumber protein lain, misal telur. Penurunan konsumsi ini mungkin diakibatkan masih adanya kekhawatiran masyarakat untuk mengkonsumsi daging seiring masih terjadinya kasus PMK di wilayah.
- Populasi sapi perah mengalami penurunan sebesar 3,45% di tahun 2024 dibanding tahun 2023 disebabkan oleh tidak ada/kurangnya regenerasi peternak sapi perah di sentra peternakan sapi perah yaitu wilayah Mayangan. Selain faktor tersebut, beberapa faktor lain yang mengakibatkan penurunan populasi sapi perah antara lain : terjadinya wabah PMK yang menyerang sapi perah, adanya potensi penyakit *brucellosis* yang menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, dan penurunan produksi susu, peternak menjual ternaknya karena kekurangan modal untuk biaya budidaya ternaknya atau mengganti ternak sapi yang sudah kurang produktif serta tidak memiliki modal untuk menambah jumlah ternaknya. Penurunan populasi sapi perah ini berbanding lurus dengan penurunan produksi susu sebesar 18,61%.
- Populasi kambing mengalami kenaikan sebesar 2,09% di tahun 2024 dibanding tahun 2023 disebabkan oleh peralihan jenis ternak yang dipelihara oleh peternak, dari yang sebelumnya sapi ke kambing karena kambing lebih tahan penyakit seperti PMK yang sedang mewabah. Selain itu, perputaran penghasilan dari penjualan kambing untuk usaha pembibitan dan penggemukan juga lebih cepat, kambing tidak membutuhkan lahan luas dan pakan yang rumit serta kemampuan adaptasi yang baik terhadap kondisi lingkungan. Peningkatan populasi kambing berbanding terbalik dengan produksi dagingnya yang menurun disebabkan banyak dilalu-lintaskan untuk dijual ke luar kota, sehingga tidak tercatat di pemotongan wilayah kota.
- Populasi domba juga mengalami kenaikan sebesar 2,12% di tahun 2024 dibanding tahun 2023. Penyebabnya hampir sama dengan kenaikan populasi kambing, karena sebagian besar peternak kambing dan domba dijadikan satu kandang oleh peternak, sedangkan untuk produksi daging domba mengalami peningkatan karena konsumen lebih memilih daging domba untuk diolah sebagai masakan dikarenakan daging domba memiliki tekstur lebih



lembut, aroma dan rasa yang lebih "ringan" dibandingkan kambing sehingga sesuai utamanya dalam masakan yang membutuhkan tekstur daging yang lembut dan tidak pekat seperti daging kambing.

- Populasi kuda mengalami kenaikan sebesar 10% di tahun 2024 dibanding tahun 2023 disebabkan oleh kebutuhan untuk tampilan kesenian seperti persewaan kuda atau kuda kencak serta dimanfaatkan sebagai sarana olahraga, seperti pacuan kuda dan panahan berkuda.
- Populasi ayam buras mengalami peningkatan 1,01% di tahun 2024 dibanding tahun 2023 disebabkan oleh pola budidaya ayam buras yang umbaran/tidak intensif dan bukan skala bisnis, sehingga faktor-faktor luar tidak berpengaruh terhadap budidaya ayam buras ini seperti misalnya harga pakan karena ayam dibiarkan bebas mencari makan sendiri dari sisa-sisa makanan, serangga, dan rumput, dengan sedikit tambahan pakan seperti dedak atau jagung. Untuk produksi daging ayam buras mengalami penurunan sebesar 5,53%, akan tetapi produksi telur meningkat 1,33%. Hal ini disebabkan dengan pola budidaya umbaran dan bukan skala bisnis, peternak tidak terikat dengan kondisi permintaan di pasar. Artinya kebutuhan akan daging ayam buras atau telur menyesuaikan dengan keinginan peternak dan biasanya hanya untuk kebutuhan konsumsi pribadi, hajatan, atau kegiatan keagamaan.
- Populasi ayam ras petelur mengalami kenaikan sebesar 43,09% di tahun 2024 dibanding tahun 2023 karena adanya kenaikan permintaan telur. Kebutuhan masyarakat yang tinggi akan telur sebagai sumber protein yang murah dan bergizi mendorong peternak untuk meningkatkan jumlah ayam ras petelur atau skala usaha peternakannya. Hal ini juga didorong beralihnya pola konsumsi masyarakat dari daging sapi ke telur karena adanya kekhawatiran konsumsi daging sapi seiring masih adanya kasus PMK yang berpengaruh terhadap kualitas daging sapi. Kenaikan populasi ayam ras petelur juga sebanding dengan kenaikan produksi telur sebesar 26,28%.
- Populasi ayam ras pedaging mengalami kenaikan sebesar 30% di tahun 2024 dibanding tahun 2023 karena tingginya permintaan daging ayam oleh konsumen. Terlihat dari produksi daging ayam ras pedaging yang juga meningkat sebesar 8,54%. Permintaan daging ayam ras pedaging meningkat sebagai pengganti daging sapi yang permintaannya di waktu yang sama menurun. Daging ayam cukup diminati karena harganya lebih murah dibanding daging sapi, bergizi, mudah diolah dan ketersediannya stabil sepanjang waktu. Hal ini juga didorong oleh semakin baiknya manajemen kesehatan hewan sehingga meningkatkan efisiensi, produktivitas dan mengurangi kematian. Selain itu, semakin banyaknya rumah makan, restoran, PKL dan warung yang menyajikan olahan ayam seperti ayam geprek yang cukup diminati masyarakat ikut mendongkrak permintaan daging ayam rasa pedaging yang imbasnya juga mendorong peternak untuk terus meningkatkan populasi ayam dan produksi dagingnya.



- Populasi itik mengalami kenaikan sebesar 69,15% di tahun 2024 dibanding tahun 2023 disebabkan oleh adanya penambahan beberapa peternak baru dalam usaha itik baik penggemukan maupun petelur. Untuk produksi daging itik mengalami kenaikan sebesar 3,03% dan telur juga mengalami kenaikan sebesar 42,40% disebabkan karena semakin banyaknya usaha kuliner yang menggunakan daging dan telur itik untuk diolah dan disajikan.

2. Perikanan

Potensi Perikanan laut di Kota Probolinggo memiliki peluang yang sangat besar untuk dioptimalkan. Peluang ini disebabkan karena letak geografis Kota Probolinggo yang di sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Madura dan memiliki panjang pantai sejauh 7 km. Produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan sebesar 1,03% di tahun 2024 dibanding tahun 2023. Produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan Perairan Umum Daratan (PUD). Kenaikan produksi perikanan tangkap disebabkan karena semakin baiknya keberlanjutan Sumber Daya Ikan dengan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan sehingga menghindari over fishing (penangkapan ikan berlebih) dan menjaga keberlangsungan ekosistem kelautan serta adanya kegiatan restocking (tebar benih ikan) di sumber mata air dan sungai yang ikut menunjang produksi perikanan tangkap.

Sejalan dengan itu, untuk produksi perikanan budidaya juga mengalami kenaikan sebesar 2,08% di tahun 2024 dibanding tahun 2023. Produksi perikanan budidaya berasal dari produksi perikanan budidaya kolam dan tambak. Kenaikan produksi perikanan budidaya disebabkan karena tingginya permintaan ikan konsumsi utamanya lele untuk pemenuhan kebutuhan warung dan rumah makan. Lele menjadi komoditas utama karena lele dikenal memiliki pertumbuhan yang cepat, biaya pemeliharaan yang relatif rendah, dan pasar yang masih terbuka luas di Kota Probolinggo. Adanya adaptasi teknologi seperti penggunaan kolam bioflok ikut menunjang kenaikan efisensi dan produksi perikanan budidaya. Selain itu, beberapa tahun ini juga rutin dilaksanakan kegiatan Sekolah Lapang (SL) Budidaya Lele dengan peserta dari kelompok tani dan pondok pesantren sebagai upaya penumbuhan pembudidaya baru.

Berikut ini data produksi perikanan di Kota Probolinggo dalam kurun waktu Tahun 2019-2024

Tabel 1. 12 data Produksi Perikanan Tahun 2019 - 2024

JENIS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perikanan Tangkap						
Jumlah Produksi (Ton)	17.782,20	12.720,40	853	880,69	919,27	928,72
Nilai Produksi (Rp. x000)	299.264.770	191.162.011,4	19.676.938,7	21.263.264	22.891.768	25.133.039
Perikanan Budidaya						
Jumlah Produksi (Ton)	423,77	312,83	337,41	355,06	415,50	424,14
Nilai Produksi (Rp. x000)	8.375.980	7.365.793	7.889.536,4	9.190.007,5	12.157.624,964	12.275.564,8

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2025



3. Pendidikan

Pendidikan suatu daerah akan mencerminkan kualitas penduduk daerah tersebut. Saat ini pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk, sehingga ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berikut ini data fasilitas Pendidikan Dasar Menengah di Kota Probolinggo. Dalam proses pembangunan peranan pendidikan sangatlah strategis. Tingkat

Tabel 1. 13 Data Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024

NO	VARIABEL	SD/MI						SMP/MTs						SMA/SMK						Jumlah Prasarana 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Sekolah	114	112	118	114	115	115	48	47	47	49	49	48							163
2	Rombongan Belajar (Kelas)	923	909	956	962	973	973	465	466	470	465	467	458							1431
3	Ruang Kelas	951	939	977	988	986	986	503	498	498	507	480	471							1457
4	Perpustakaan	122	122	103	103	105	105	28	28	29	29	31	31							136
5	Ruang UKS	107	107	94	94	94	94	25	25	28	28	28	28							122
6	Ruang Komputer	71	71	0	0	0	0	29	29	0	0	27	27							27
7	Laboratorium	4	4	4	4	4	4	24	24	28	28	34	34							38
8	Ruang Olahraga	118	118	105	105	105	105	9	9	19	19	19	18							123

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,2025

Berdasarkan data prasarana pendidikan Tahun 2019 - 2024, diketahui bahwa untuk jenjang pendidikan tingkat SD / MI pada tahun 2024 terdapat tidak ada peningkatan jumlah sekolah. Untuk jenjang pendidikan tingkat SMP / MTS terdapat penurunan prasarana berupa ruang kelas dikarenakan adanya ahli fungsi ruang namun ada peningkatan prasarana pada ruang komputer dan ruang laboratorium. Sedangkan untuk jenjang pendidikan tingkat SMA / SMK tidak terdapat data yang tersedia dalam tiga tahun terakhir karena SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi.

4. Industri

Pembangunan sektor industri di Kota Probolinggo selama Tahun 2019-2024 menunjukkan kinerja positif. Sektor industri diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional dan telah menempatkan industri manufaktur sebagai penghela sektor riil. Perkembangan kinerja sektor industri dapat dilihat dari perkembangan unit usaha industri,nilai produksi dan nilai investasi yang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2020-2024. Adapun data Perkembangan sektor industri dapat dilihat dalam tabel 1.14

Tabel 1. 14 Data Profil Industri Tahun 2019 - 2024

JENIS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Industri agro dan kimia (IAK)	986	1.004	1.012	926	1001	1.041
Industri logam, mesin, tekstil dan aneka (ILMTA)	165	166	188	251	253	256
Industri alat transportasi elektronika dan telematika (IATT)	11	11	11	11	12	11
Total Industri	1.162	1.181	1.211	1.188	1.266	1.308
Nilai produksi	3.479.689.872.885	3.375.299.176.698	3.402.301.570.112	5.851.006.690.969	5.902.604.233.165	5.952.575.508.104
Nilai Investasi	199.834.831.184	200.088.387.807	201.889.183.297	3.296.744.990.733	3.297.173.064.758	3.298.066.012.922

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025



5. Kelistrikan

Listrik menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan data BPS, jumlah pelanggan listrik PLN Kota Probolinggo pada periode Tahun 2024 meningkat 3,79% dibandingkan Tahun 2023. Pada tahun 2024, daya listrik terpasang di Kota Probolinggo sebesar 154,309 KW dengan jumlah pelanggan listrik di Kota Probolinggo pada tahun 2024 sebesar 88.827 pelanggan.

Tabel 1. 15 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2019-2024

KECAMATAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kademangan	14.369	14.881	15.416	15.854	16.188	16.732
Kedopak	20.752	21.431	12.015	13.002	13.449	14.071
Wonoasih	11.357	11.989	9.279	9.991	10.236	10.588
Mayangan	21.273	21.794	21.104	22.733	22.757	23.449
Kanigaran	9.311	9.657	21.636	22.450	22.953	23.987
Total	77.062	79.752	79.450	84.030	85.583	88.827

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2025, BPS

6. Air Minum

Kapasitas air bersih yang dapat disediakan atau yang diproduksi secara keseluruhan dan cakupan layanannya PUDAM Bayuangga Kota Probolinggo selama kurun waktu tahun 2019–2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. 16 Profil Penyediaan Air Bersih Tahun 2019 - 2024

NO	VARIABEL	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapasitas Air Bersih yang disediakan / diproduksi	8.722.300	8.431.000	8.461.100	7.853.100	7.410.200	7.085.700
2	Kapasitas Air Bersih yang disalurkan	4.967.914	4.823.565	4.656.416	4.573.349	4.427.968	4.447.396
3	Jumlah Sambungan Rumah (SR)	19,92	19,979	20,41	20,36	20,754	20,847
4	Jumlah Pelanggan	19,92	19,979	20,41	20,36	20,754	20,847
5	Cakupan Pelayanan (%)	40,54	46,6	47,82	34,08	34,06	39,22

Sumber : PUDAM Bayuangga, 2025

Berdasarkan data PUDAM Bayuangga dimaksud, diketahui bahwa terdapat kenaikan jumlah sambungan rumah, jumlah pelanggan selama lima tahun terakhir. Hal tersebut berbanding lurus terhadap cakupan pelayanan pada tahun 2024. Namun dari sisi debit air terdapat penurunan Kapasitas Air Bersih yang disediakan / diproduksi namun kapasitas air bersih yang disalurkan meningkat dan masih dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

7. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang di Kota Probolinggo. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kota Probolinggo untuk melakukan penataan dan pembangunan pusat-pusat perdagangan yang ada. Data perkembangan pasar dan toko di Kota Probolinggo sebagaimana tabel 1.17.



Tabel 1. 17 Perkembangan Pasar dan Toko di Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024

JENIS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pasar Tradisional / Rakyat (Milik Pemerintah Kota Probolinggo)	11	11	11	11	17	18
Toko Modern /swalayan	10	3	51	48	64	65
Pasar Hewan (sapi,kambing)	1	1	1	1	1	2
Pasar Ikan	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Kecamatan dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2025

8. UMKM

Data perkembangan jumlah UMKM di Kota Probolinggo dari tahun 2019 s.d 2024 bisa dilihat dari tabel 1.18

Tabel 1. 18 Jumlah UMKM Kota Probolinggo Tahun 2019-2024

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Usaha Mikro	6.035	19.253	19.753	20.056	20.753	21253
Usaha Kecil	127	127	127	134	134	136
Usaha Menengah	36	36	36	38	38	40
Total UMKM	6.198	19.416	19.916	20.228	20.925	21.429

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, 2025

Dari data UMKM pada tabel 1.18 terjadi peningkatan jumlah usaha mikro. Hal dilatarbelakangi oleh kebijakan untuk menumbuhkan 500 UMKM baru per tahun yang mulai tercetus dari tahun 2019 guna merespon lesunya perekonomian global, serta keterbatasan lapangan pekerjaan sektor formal (industri dan perkantoran) dalam menampung pencari kerja di Kota Probolinggo.Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya kinerja perekonomian sektor formal menyebabkan banyaknya peralihan mata pencaharian sektor usaha mandiri masyarakat yang mendorong inisiasi usaha mikro baru yang didukung kemudahan perijinan usaha baru serta adanya fasilitasi stimulan usaha dari pemerintah untuk UMKM.

9. Perizinan dan Penanaman Modal

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengangguran dan akan menjadi salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PDMN) di Kota Probolinggo pada Tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel 1.19

Tabel 1. 19 Perkembangan Investasi di Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024

NO	TAHUN	NILAI INVESTASI	INVESTOR
1	2019	Rp740.612.581.171	64
2	2020	Rp4.121.827.395.289	69
3	2021	Rp3.552.447.161.184	41
4	2022	Rp.3.264.327.369.051	279
5	2023	Rp.4.890.950.753.134	77
6	2024	Rp.1.505.080.045.532	144

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025



10. Perbankan

Kinerja perbankan di Kota Probolinggo menunjukkan kecenderungan menurun selama kurun waktu 2021 – 2024. Perkembangan ekonomi nasional serta berbagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dengan menciptakan iklim yang lebih baik bagi perkembangan usaha dibidang Perbankan di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya perbankan untuk tahun-tahun kedepannya.

Tabel 1. 20 Jumlah Bank Menurut Kelompok di Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024

NO	KEPEMILIKAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bank Persero	13	13	14	12	11	11
2	Bank Pembangunan Daerah	2	3	3	3	3	3
3	Bank Umum Syariah	3	3	3	3	3	2
4	Bank Swasta	7	7	7	7	7	7
Total		18	19	27	25	24	23

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2025,BPS

11. Transportasi

Pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Probolinggo didukung pula dengan pembenahan Infrastruktur jalan oleh Pemerintah Kota Probolinggo serta sarana transportasi yang ada di Probolinggo seperti Terminal Bus Bayuangga, Stasiun Kereta Api Probolinggo, Pelabuhan Tanjung Tembaga dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang merupakan merupakan ujung tombak fasilitas transportasi Kota Probolinggo. Modal transportasi dalam kota seperti *shuttle travel*, angkutan dalam kota yang merupakan angkutan jarak dekat, becak dan ojek memberikan pilihan kepada masyarakat untuk dapat lebih cepat menuju tempat tujuan. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025 diketahui bahwa dari total panjang jalan yang berada di bawah wewenang Pemerintah Kota Probolinggo pada Tahun 2024 sebesar 218,13 km, terdapat jaringan jalan sepanjang 1,24 km dalam kondisi rusak berat, 4,17 km dalam kondisi rusak dan sepanjang 78,855 km dalam kondisi sedang, sedangkan sisanya sepanjang 133,868 km dalam kondisi baik.

12. Pariwisata

Kota Probolinggo merupakan Kota transit yang menghubungkan kota-kota di wilayah sebelah barat dan timur di Provinsi Jawa Timur. Sehingga dalam perkembangannya Kota Probolinggo telah berkembang menjadi Kota tujuan wisata, hiburan dan kuliner, dengan berbagai fasilitas yang tersedia bagi para wisatawan karena menjadi tempat transit bagi wisatawan yang akan melakukan perjalanan dari kota-kota di Jawa dan Bali. Selain itu Kota Probolinggo juga telah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru sehingga mampu meningkatkan promosi potensi wisata dan jumlah kunjungan wisata Kota Probolinggo. Berikut potensi wisata yang ada di Kota Probolinggo



Tabel 1. 21 Potensi Wisata Kota Probolinggo

No.	Jenis Obyek Wisata	Nama Obyek Wisata	Alamat
1	Wisata Alam	Sumber Mata Air Sentong	Jl. Ranu, Jrebeng Wetan, Kec. Kedopak, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67233
		Pantai Permata	Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67221
2	Wisata Budaya	Museum Probolinggo	Jl. Suroyo, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211
		Museum Dr. Moh Saleh	Jl.dr.Moh.Saleh No 1, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219
3	Wisata Religi	Gereja Merah	Jl. Suroyo No.32, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
		Klenteng Tri Dharma	Jl. Wr. Supratman No.127, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
4	Wisata Buatan	Pelabuhan Perikanan Pantai	Pelabuhan PPP Mayangan, Kota Probolinggo 67217 Jawa Timur, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
		Kolam Renang Bayuangga	Jl. Hayam Wuruk, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
		Kolam Renang Olympic	Kedopak, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67231
		Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL)	Jl. Basuki Rachmad, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
		Bee Jay Bakau Resort (BJBR)	Pelabuhan PPP Mayangan, Kota Probolinggo 67217 Jawa Timur, Indonesia, Wisata Primadona, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
		Putra Papua Water Park	Pakistaji, Kec. Wonoasih Kota probolinggo, Jawa Timur 67239

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2025

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka mengembangkan wisata di Kota Probolinggo diantaranya melalui kegiatan-kegiatan yang menjadi daya tarik wisata yaitu Semipro, Pameran dalam rangka Hari Jadi Kota Probolinggo, Cokro Fair dan Pawai Budaya Kota Probolinggo. Berikut tabel kunjungan wisatawan di Kota Probolinggo.

Tabel 1. 22 Kunjungan Pada Destinasi Pariwisata Kota Probolinggo Tahun 2019–2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	Wisatawan Domestik	1.084.317	474.546	449.517	841.369	948.803	1.023.240
2	Wisatawan Mancanegara	1.698	69	0	235	3.157	57.292
	Total Wisatawan	1.086.015	474.615	449.517	841.604	951.960	1.080.532

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2025

1.3.4.2 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Probolinggo baik Atas Dasar Harga berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 periode Tahun 2021-2023 menunjukkan peningkatan signifikan namun terjadi penurunan pada tahun 2024 untuk pertanian, kehutanan dan perikanan. Data Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel 1.23.



Tabel 1. 23 Data Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024

NO	LAPANGAN USAHA	ADHK						ADHB					
		2019	2020	2021	2022	2023*	2024**	2019	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	455,26	450,75	430,04	463,84	494,08	474,96	679,87	683,16	669,33	773,15	857,97	859,34
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	1.290,72	1.230,07	1.272,57	1.349,30	1.439,94	1.496,45	1.659,26	1.601,75	1.715,86	1.886,67	2.094,63	2.248,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,40	9,28	9,55	10,29	10,88	11,03	13,14	12,90	13,40	14,82	15,82	15,95
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	19,18	19,99	21,05	21,60	21,90	22,92	22,75	23,77	25,18	26,92	27,94	30,36
F	Konstruksi	529,84	495,68	500,59	526,27	561,23	599,29	669,87	629,50	640,48	707,20	776,27	857,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.080,21	1.960,80	2.080,34	2.206,74	2.326,59	2.438,69	2.968,05	2.846,72	3.082,47	3.424,18	3.748,95	4.028,61
H	Transportasi dan Pergudangan	1.206,48	1.140,33	1.241,29	1.406,40	1.519,27	1.644,86	1.595,52	1.519,80	1.648,32	1.970,05	2.300,72	2.502,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	295,52	270,61	276,50	296,29	315,22	339,29	446,63	414,18	444,83	495,52	548,87	615,93
J	Informasi dan Komunikasi	518,57	556,63	589,63	609,75	646,91	682,69	563,27	611,49	648,46	672,54	725,08	770,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	489,46	488,74	494,05	497,39	521,94	540,07	742,65	742,98	769,89	827,29	902,96	941,71
L	Real Estat	258,41	265,79	271,92	284,28	297,58	305,05	347,49	359,96	370,39	392,88	416,17	432,11
M,N	Jasa Perusahaan	54,59	50,99	52,14	51,76	60,05	64,50	74,55	70,88	73,26	75,85	90,91	103,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	380,26	366,19	367,04	365,89	367,29	402,78	577,12	584,27	583,68	585,14	622,05	713,23
P	Jasa Pendidikan	392,46	406,64	414,52	415,21	435,59	453,59	524,86	549,38	556,53	564,32	603,48	640,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,42	83,35	89,68	89,95	95,16	100,77	100,09	110,49	120,38	124,19	136,60	147,85
R,S,T,U	Jasa Lainnya	281,99	239,43	250,23	277,88	294,89	316,32	336,65	364,03	337,45	390,67	428,05	467,36
	PDRB	8.338,77	8.035,27	8.361,14	8.872,84	9.408,51	9.893,27	10.521,39	11.349,15	11.699,90	12.931,38	14.296,47	15.374,98

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2025, BPS



1.3.4.3 Kemiskinan

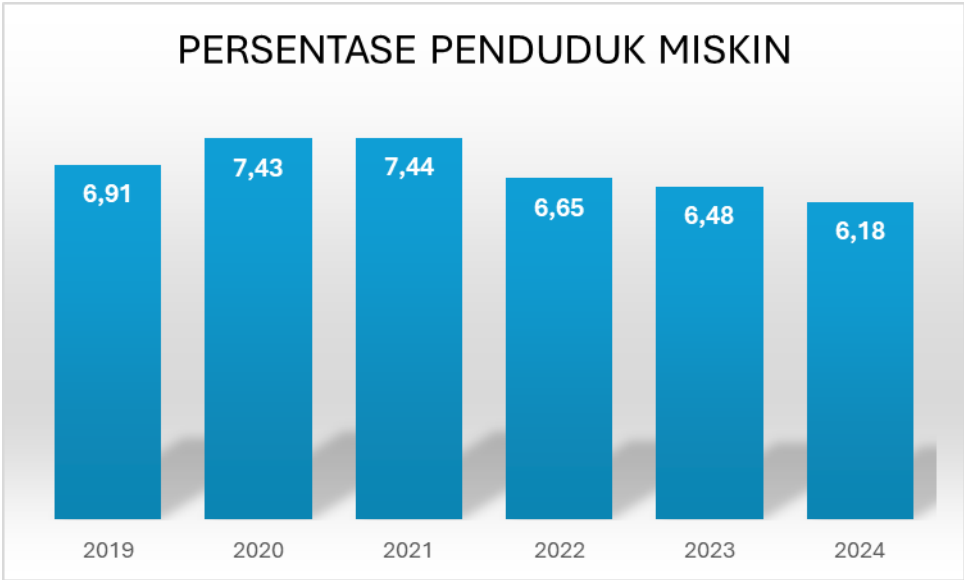
Berdasarkan data BPS Kota Probolinggo, persentase penduduk miskin di Kota Probolinggo yaitu 6,48 persen. Penurunan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2024 tidak lepas dari upaya pemerintah Kota Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya :

- ✓ Penyediaan Permakanan dalam program rantang sehat kepada 50 orang Lanjut Usia Terlantar (2kali/sehari);
- ✓ Bantuan sosial berupa sembako kepada eks Napi, ODGJ, Disabilitas, dan ODHA, Anak Yatim, Fakir Miskin;
- ✓ Bantuan Pangan Non Tunai pada program PKH dan BPNT;
- ✓ Penyediaan Beras dalam rangka Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
- ✓ Bantuan Sosial Sembako bagi Anak Yatim;
- ✓ Bantuan sosial uang tunai @300.000,- yang disalurkan melalui 2 tahap (bersumber pada DBHCHT). Tahap I kepada 3076 orang dan Tahap II kepada 3222 orang dalam kurun waktu 6 bulan

Tabel 1. 24 Jumlah Penduduk Miskin Kota Probolinggo Tahun 2019–2024

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2019	16,37	6,91
2	2020	17,72	7,43
3	2021	17,91	7,44
4	2022	16,16	6,65
5.	2023	15,86	6,48
6.	2024	15,24	6,18

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2025, BPS



Gambar 1. 7 Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo Tahun 2019–2024



1.3.5 Kondisi Sosial

1.3.5.1 Kualitas SDM

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas sumberdaya manusia daerah adalah nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Berdasarkan data BPS nilai IPM Kota Probolinggo selama Tahun 2019-2024 menunjukkan peningkatan dimana pada Tahun 2024 nilai IPM Kota Probolinggo sebesar 77,79. Pertumbuhan IPM 2024 Kota Probolinggo mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang dan hidup sehat dan standar hidup layak. Adapun jika ditinjau dari komponen pembentuk IPM, diketahui bahwa Usia Harapan Hidup Masyarakat Kota Probolinggo Tahun 2024 sebesar 74,31 tahun, Harapan Lama Sekolah sebesar 13,98 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,72 tahun, dan pengeluaran perkapita.



Gambar 1. 8 Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo Tahun 2019- 2024

1.3.5.2 Ketenagakerjaan

Ditinjau dari aspek ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Probolinggo berdasarkan data BPS Kota Probolinggo pada Tahun 2024 adalah sebesar 67,55% atau mengalami penurunan dibanding Tahun 2023 sebesar 3,06%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Penduduk usia kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. TPAK diukur sebagai persentase jumlah Angkatan Kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Probolinggo Tahun 2024 sebesar 4,44%. Hal tersebut karena adanya program yang telah dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengatasi Tingkat Pengangguran diantaranya:

- ✓ Kegiatan Job Market Fair. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja melalui JOB MARKET FAIR, yang bertujuan untuk mempertemukan antara perusahaan dan pencari kerja dalam proses penempatan tenaga kerja,



- ✓ Millenial Job Center, berupa kegiatan sosialisasi kepada Pelajar dan Mahasiswa, MJC sebagai wadah pertukaran informasi dan jaringan diantara klien, mentor dan talent, yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem freelance yang kompetitif dan kondusif;
- ✓ Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dalam upaya peningkatan keterampilan dan kompetensi pencari kerja telah dilaksanakan pelatihan sebanyak 9 paket pelatihan (Pelatihan Tata Rias Pengantin, Pelatihan Bordir, Pelatihan Tata Rias Salon, Pelatihan Barbershop, Pelatihan Kopi Barista, Pelatihan Las Listrik, Pelatihan pembuatan makanan dan minuman);
- ✓ Sosialisasi kepada perusahaan terkait Peraturan Perusahaan dan ketenagakerjaan.



Gambar 1. 9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Probolinggo Tahun 2019 –2024



Gambar 1. 10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024

1.3.6 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pada dasarnya pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya seiring peningkatan perekonomian



nasional dan daerah yang pada gilirannya akan semakin membuka peluang potensi pendapatan negara maupun daerah. Hal ini terutama dari kenaikan komponen dana perimbangan, juga dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD diharapkan tetap meningkat sebagai wujud kemandirian daerah. Kenaikan PAD dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi daerah tetap kondusif terutama saat perekonomian sedang lesu.

Target dan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.25

Tabel 1. 25 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2024

No.	URAIAN	TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	PENDAPATAN DAERAH	964.190.898.946,00	992.700.935.100,29	102,96
1	Pendapatan Asli Daerah	206.780.169.715,00	206.341.036.779,29	99,79
	Pajak Daerah	60.341.856.147,00	63.360.763.657,57	105,00
	Retribusi Daerah	16.832.371.420,00	20.581.563.691,00	122,27
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.609.872.868,00	1.539.068.149,53	95,60
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	127.996.069.280,00	120.859.641.281,19	94,42
2	Pendapatan Transfer	757.410.729.231,00	786.359.898.321,00	103,82
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	652.863.816.731,00	672.344.864.121,00	102,98
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.546.912.500,00	114.015.034.200,00	109,06
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0

Sumber Data: BPPKAD Kota Probolinggo, cut of 17 Februari 2025 (unaudited)

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah Tahun 2024 mencapai target bahkan lebih, yakni sebesar 102,96% dari target pendapatan daerah sebesar Rp. **964.190.898.946,00** dengan realisasi pendapatan daerah Rp. **992.700.935.100,29**

1.3.7 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan.

Secara umum target dan realisasi belanja Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan pada tabel 1.26 sebagai berikut

Tabel 1. 26 Target dan Realisasi Belanja Daerah TA. 2024

No.	URAIAN	TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	BELANJA DAERAH	1.099.642.611.061,00	1.039.189.025.613,39	94,50
1	Belanja Operasi	1.014.932.587.287,00	962.025.905.595,45	94,78
	Belanja Pegawai	496.046.067.248,00	482.680.530.154,99	97,31
	Belanja Barang dan Jasa	422.193.195.492,00	385.430.948.232,01	91,29
	Belanja Hibah	96.456.424.547,00	93.723.268.208,45	97,17
	Belanja Bantuan Sosial	236.900.000,00	191.159.000,00	80,69
2	Belanja Modal	82.622.886.044,00	75.418.956.796,94	91,28



	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.412.410.459,00	38.597.721.026,00	91,01
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.960.283.463,00	16.393.751.764,94	86,46
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.024.796.622,00	18.229.916.560,00	95,82
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.075.395.500,00	2.050.139.196,00	98,78
	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	147.428.250,00	98,29
3	Belanja Tidak Terduga	2.087.137.730,00	1.744.163.221,00	83,57
	Belanja Tidak Terduga	2.087.137.730,00	1.744.163.221,00	83,57
4	Belanja Transfer	0	0	0
	Belanja Bagi Hasil	0	0	0

Sumber Data : BPPKAD Kota Probolinggo, cut of 17 Februari 2025 (unaudited)

Realisasi belanja daerah Kota Probolinggo pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **1.039.189.025.613,39** dengan demikian capaian realisasi belanja daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar 94,50% dari target Rp. **1.099.642.611.061,00** Postur belanja pada Tahun 2024 meliputi: 92,29% untuk belanja operasi, belanja modal 7,51%, belanja tidak terduga 0,18% dan 0% untuk belanja transfer. Pos anggaran terbesar adalah pada belanja pegawai sebesar 45,1% dari total belanja.

1.3.8 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Selain pendapatan dan belanja daerah, juga dilaporkan pembiayaan daerah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam struktur APBD. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 1. 27 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA. 2024

No	Uraian	2024		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Pembiayaan Daerah			
	Penerimaan Pembiayaan	135.451.712.115,00	135.451.712.115,01	100,00
2.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	135.451.712.115,00	135.451.712.115,01	100,00
3.	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
4.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	135.451.712.115,00	135.451.712.115,01	100,00

Sumber Data : BPPKAD Kota Probolinggo, cut off 17 Februari 2025 (unaudited)



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggung-jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pada Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggung-jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.

Adapun target dan realisasi anggaran hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 :



Tabel 2. 1 Target dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah TA. 2024

1. Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH			100	73,21	73,21	50.000.000,00	36.603.500,00	73,21	1) Untuk Sewa Rumah Dinas SD disebabkan tidak semua Rumah Dinas SD layak untuk disewakan, dari 79 Rumah Dinas yang ada hanya 59 Rumah Dinas yang dapat disewakan; 2) Pemanfaatan gedung kesenian untuk Pusat Kreatif Anak. Jika digunakan sebagai penyelenggaraan event, terkendala penyediaan akses dan sarana prasarana gedung kesenian yang belum memadai.
BELANJA									
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar	%	100,00	97,69	97,69	75.489.694.378,00	66.666.426.686,00	88,31	
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD dan Nonformal	%	100,00	90,72	90,72				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI	%	100,00	98,81	98,81	37.228.413.629,00	32.042.164.129,00	86,07	
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	63,68	64,85	101,84				
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	45,24	48,11	106,34				
	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	100,00	99,51	99,51				
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	2	2	100,00	254.182.000,00	228.328.700,00	89,83	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	1	100,00	153.452.000,00	119.466.000,00	77,85	Belanja Pengadaan sarana prasarana ULD (Bidang Miring) tidak dapat terlaksana karena terkendala waktu disebabkan Perwali ULD terbit di akhir Bulan November 2024
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	1	100,00	84.788.000,00	72.303.167,00	85,28	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	1	100,00	80.000.000,00	64.408.165,00	80,51	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	4	4	100,00	360.000.000,00	346.804.668,00	96,33	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta	peserta didik	51	51	100,00	183.975.000,00	155.320.000,00	84,42	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
	Didik								
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik	50	50	100,00	93.265.000,00	36.686.793,00	39,34	Terdapat belanja perjalanan dinas untuk pendampingan O2SN Tingkat Nasional yang tidak terlaksana, dikarenakan jadwal pelaksanaan sebelum penetapan Perubahan APBD 2024
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	150	150	100,00	14.925.000,00	13.469.000,00	90,24	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	150	150	100,00	30.500.000,00	19.052.000,00	62,47	terdapat belanja mamin yang tidak terealisasi, terkendala dengan proses pengadaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	115	115	100,00	5.217.120.000,00	5.162.880.000,00	98,96	
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI CURAHGRINTING 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	51.030.000,00	43.603.000,00	85,45	
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI CURAHGRINTING 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	66.999.510,00	36.397.000,00	54,32	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JATI 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	286.370.540,00	128.958.656,00	45,03	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JATI 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	67.971.510,00	54.415.700,00	80,06	
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG KIDUL	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	111.763.740,00	88.310.000,00	79,01	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG KULON 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	100.183.510,00	40.548.064,00	40,47	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG KULON 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	107.279.010,00	71.430.944,00	66,58	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG LOR 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	148.728.760,00	130.442.564,00	87,71	
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG LOR 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	149.271.260,00	128.940.542,00	86,38	
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG LOR 7	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	107.755.020,00	95.016.084,00	88,18	
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG WETAN	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	100.471.740,00	86.090.100,00	85,69	
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KADEMANGAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	109.323.010,00	34.003.614,00	31,10	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KADEMANGAN 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	120.973.020,00	49.746.320,00	41,12	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KADEMANGAN 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	119.552.520,00	60.903.408,00	50,94	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KANIGARAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	299.216.280,00	221.431.550,00	74,00	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KANIGARAN 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	238.968.540,00	130.517.500,00	54,62	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KANIGARAN 6	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	167.023.740,00	50.630.880,00	30,31	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KARENG LOR 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	126.788.250,00	105.224.000,00	82,99	
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KARENG LOR 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	91.299.510,00	40.150.500,00	43,98	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang	Satuan	1	1	100,00	233.440.270,00	170.315.500,00	72,96	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEBONSARI KULON 1	Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Pendidikan							SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEBONSARI KULON 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	281.927.540,00	116.039.354,00	41,16	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEBONSARI KULON 6	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	95.532.510,00	54.484.500,00	57,03	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEBONSARI WETAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	66.513.510,00	53.055.800,00	79,77	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEBONSARI WETAN 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	55.821.510,00	30.970.914,00	55,48	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEDOPOK 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	97.131.510,00	77.671.714,00	79,97	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
									& setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEDOPOK 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	138.763.480,00	113.729.900,00	81,96	
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEDUNGASEM 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	203.548.760,00	142.404.244,00	69,96	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEDUNGASEM 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	129.869.520,00	99.806.890,00	76,85	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEDUNGGALENG	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	114.073.020,00	112.523.999,00	98,64	
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KETAPANG 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	118.381.750,00	59.728.100,00	50,45	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KETAPANG 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	119.707.020,00	80.950.300,00	67,62	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KETAPANG 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	77.045.000,00	11.789.000,00	15,30	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
									perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	99.454.260,00	37.533.500,00	37,74	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024.Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 10	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	61.236.000,00	55.242.000,00	90,21	
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 12	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	142.886.530,00	84.750.071,00	59,31	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024.Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	123.375.510,00	96.863.000,00	78,51	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024.Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	105.263.250,00	96.364.258,00	91,55	
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 5	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	116.017.020,00	62.605.480,00	53,96	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024.Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	121.202.520,00	108.055.450,00	89,15	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
MANGUNHARJO 6	manajemen sekolah								
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 7	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	208.329.480,00	111.733.000,00	53,63	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MAYANGAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	113.169.510,00	50.740.064,00	44,84	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MAYANGAN 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	273.560.530,00	136.449.692,00	49,88	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MAYANGAN 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	38.880.000,00	17.412.000,00	44,78	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI PAKISTAJI 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	109.705.740,00	55.544.703,00	50,63	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI PAKISTAJI 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	110.191.740,00	80.487.500,00	73,04	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP,



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
									Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI PILANG 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	105.733.650,00	32.237.000,00	30,49	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI PILANG 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	50.544.000,00	15.918.000,00	31,49	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI PILANG 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	74.234.460,00	19.968.000,00	26,90	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI POHSANGIT KIDUL 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	77.283.510,00	56.247.564,00	72,78	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI POHSANGIT KIDUL 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	108.309.510,00	97.999.000,00	90,48	
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUKABUMI 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	224.378.760,00	119.443.920,00	53,23	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
									terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUKABUMI 10	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	118.029.510,00	42.540.500,00	36,04	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUKABUMI 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	384.788.990,00	70.787.500,00	18,40	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUKABUMI 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	228.028.760,00	145.672.500,00	63,88	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUKABUMI 6	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	91.299.510,00	76.452.500,00	83,74	
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUKABUMI 7	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	96.645.510,00	55.195.914,00	57,11	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUKOHARJO 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	213.703.020,00	121.583.228,00	56,89	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUKOHARJO 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	194.040.440,00	165.864.590,00	85,48	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUKOHARJO 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	98.103.510,00	85.828.400,00	87,49	
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUMBER WETAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	123.092.460,00	92.381.800,00	75,05	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUMBER WETAN 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	116.989.020,00	101.278.200,00	86,57	
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUMBERTAMAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	113.169.510,00	85.103.064,00	75,20	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUMBERTAMAN 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	184.206.250,00	105.333.830,00	57,18	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI TISNONEGARAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	226.644.040,00	119.253.600,00	52,62	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI TISNONEGARAN 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	230.740.040,00	155.976.998,00	67,60	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
									terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	116.291.240,00	31.156.600,00	26,79	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	106.851.510,00	41.605.290,00	38,94	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	121.459.020,00	43.966.128,00	36,20	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI TRIWUNG LOR 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	97.912.230,00	93.685.175,00	95,68	
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI TRIWUNG LOR 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	54.918.000,00	13.499.000,00	24,58	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI TRIWUNG LOR 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	87.966.000,00	23.511.500,00	26,73	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI WIROBORANG 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	252.940.530,00	158.596.070,00	62,70	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI WIROBORANG 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	67.006.230,00	18.831.500,00	28,10	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI WONOASIH 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	116.571.510,00	43.878.500,00	37,64	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI WONOASIH 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	131.083.020,00	79.889.000,00	60,95	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	86	86	100,00	16.929.150.919,00	16.747.352.611,00	98,93	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	172	172	100,00	301.560.000,00	251.275.000,00	83,33	
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	2	2	100,00	701.520.000,00	647.473.100,00	92,30	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	15	15	100,00	692.670.000,00	520.371.694,00	75,13	terdapat Belanja Pengadaan sarana prasarana ULD tidak dapat terlaksana disebabkan Perwali ULD disahkan pada akhir Bulan November 2024



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	paket	20	20	100,00	500.000.000,00	429.038.850,00	85,81	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	paket	1506	1404	93,23	551.520.000,00	458.893.151,00	83,21	Realisasi Output Seragam berdasarkan hasil pemadanan DTKS Kota Probolinggo, untuk pengadaan seragam sekolah dilaksanakan dengan proses pengadaan barang dan jasa sistem mini kompetisi.
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	86	86	100,00	940.825.000,00	741.345.000,00	78,80	1) Belanja Jasa Guru Pendidikan Karakter tidak semua terealisasi disesuaikan dengan SK Penetapan 2) Belanja untuk penyediaan aplikasi GASPRO CETAR PERKASA tidak terealisasi berdasarkan hasil konsultasi dengan ULP Barang dan Jasa dikarenakan Kode Rekening Belanja tidak sesuai.
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SMP/MTs	Persentase	100,00	96,33	96,33	22.731.848.509,00	19.542.342.862,00	85,97	
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	76,86	75,00	97,58				
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,66	64,80	89,18				
	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	100,00	96,51	96,51				
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Ruang	1,00	1,00	100,00	346.000.000,00	285.942.400,00	82,64	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	29,00	29,00	100,00	108.875.000,00	65.400.000,00	60,07	Pelaksanaan Launching ULD Pendidikan tidak dapat terlaksana karena terkendala waktu disebabkan Perwali ULD terbit di akhir Bulan November 2024
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik	75	65	86,67	39.950.000,00	28.195.000,00	70,58	Terdapat belanja perjalanan dinas untuk pendampingan O2SN Tingkat Nasional yang tidak terlaksana, dikarenakan jadwal pelaksanaan sebelum penetapan Perubahan APBD 2024
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	150	150	100,00	11.250.000,00	6.650.000,00	59,11	Belanja Mamin tidak terserap maksimal terkendala dengan proses pengadaan barang jasa disebabkan penyedia jasa yang kurang cepat respon.
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	150	125	83,33	58.700.000,00	29.232.000,00	49,80	Belanja cetak buku tidak terlaksana disebabkan administrasi pengajuan ISBN belum siap
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	45	45	100,00	5.398.600.000,00	5.398.600.000,00	100,00	
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 1	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	575.814.080,00	273.807.500,00	47,55	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
									& setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 10	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	566.718.320,00	390.982.420,00	68,99	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024.Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 2	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	467.125.570,00	277.812.670,00	59,47	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024.Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 3	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	537.165.540,00	247.458.400,00	46,07	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024.Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 4	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	565.810.560,00	220.187.080,00	38,92	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024.Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 5	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	491.818.280,00	359.675.450,00	73,13	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024.Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang	Satuan	1	1	100,00	453.185.630,00	414.451.700,00	91,45	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 6	Dilaksanakan Pembinaan	Pendidikan							
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 7	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	458.467.040,00	240.775.200,00	52,52	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 8	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	445.088.210,00	318.509.490,00	71,56	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 9	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	487.705.040,00	352.999.870,00	72,38	Pelaksanaan BOSDA yang semula direncanakan dengan menggunakan SIPLAH, namun belanja BOSDA tidak dapat diakomodir oleh Pusdatin pada SIPLAH serta direkomendasikan untuk menggunakan LKPP, Rekomendasi LKPP baru diperoleh pada 2 September 2024. Akibat perubahan kebijakan tsb, masih membutuhkan waktu untuk perubahan regulasi juknis Perwali BOSDA yg disahkan pd tgl 28 Okt 24 & setelah perubahan Juknis/Perwali msih butuh waktu penyesuaian terkait pejabat pengadaan melalui PBJ
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	28	28	100,00	10.065.086.239,00	9.711.589.064,00	96,49	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	90	75	83,33	110.015.000,00	71.450.000,00	64,95	Pelaksanaan evaluasi Akhir untuk BOS Jenjang SMP tidak terlaksana sudah mepet dengan batas akhir Pertanggungjawaban.
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	25	12	48,00	453.799.000,00	89.369.522,00	19,69	Belanja Perjalanan Dinas tidak terlaksana, disebabkan beberapa Undangan Koordinasi sudah dibiayai dari Pihak Penyelenggara Kegiatan
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta didik	8669	8617	99,40	369.775.000,00	300.632.500,00	81,30	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1826	1382	75,68	720.900.000,00	458.622.596,00	63,62	Realisasi Output Seragam berdasarkan hasil pemadanan DTKS Kota Probolinggo, untuk pengadaan seragam sekolah dilaksanakan dengan proses pengadaan barang dan jasa sistem mini kompetisi.
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persentase	71,14	70,83	99,56	13.509.257.740,00	13.172.505.629,00	97,51	
	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Persentase	100	89,64	89,64				
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti	Peserta	7840	8233	105,01	1.041.932.826,00	815.170.280,00	78,24	Terdapat Belanja untuk Launching ULD dan Belanja Tenaga



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
	Proses Belajar	didik							Kesehatan ULD Pendidikan sejumlah 4 Org tidak dapat terealisasi disebabkan Perwali ULD disahkan pada Bulan November 2024;
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	150	150	100,00	6.400.000,00	6.300.000,00	98,44	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	200	200	100,00	48.725.000,00	26.796.000,00	54,99	Belanja cetak buku tidak terlaksana disebabkan administrasi pengajuan ISBN belum siap,
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	235	234	99,57	7.199.769.914,00	7.178.977.041,00	99,71	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	215	215	100,00	5.121.600.000,00	5.076.636.200,00	99,12	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Dokumen	15	15	100,00	90.830.000,00	68.626.108,00	75,55	Kegiatan Blmtek bagi GPK sudah terlaksana namun belanja penyelenggaraan kegiatan tidak semua terealisasi disesuaikan dengan kebutuhan hasil pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00	92,40	92,40	2.020.174.500,00	1.909.414.066,00	94,52	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	orang	32,00	32,00	100,00	6.825.000,00	6.777.000,00	99,30	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	32,00	32,00	100,00	12.750.000,00	11.350.000,00	89,02	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah NonFormal /Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	73,00	73,00	100,00	988.990.000,00	980.360.000,00	99,13	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	4,00	4,00	100,00	600.100.000,00	545.513.400,00	90,90	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	6,00	6,00	100,00	47.381.500,00	41.589.366,00	87,78	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	620,00	620,00	100,00	364.128.000,00	323.824.300,00	88,93	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan Standar Mutu Pembelajaran	%	100,00	100,00	100,00	18.580.000,00	16.365.000,00	88,08	
	Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang menerapkan Standar Mutu Pembelajaran	%	100,00	100,00	100,00				
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan standar isi, standar proses dan	%	100,00	100,00	100,00	15.580.000,00	13.365.000,00	85,78	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
	standar penilaian								
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	30,00	30,00	100,00	15.580.000,00	13.365.000,00	85,78	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang menerapkan standar isi, standar proses dan standar penilaian	Persentase	100,00	100,00	100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	2,00	2,00	100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan ketentuan	%	100,00	90,28	90,28	1.101.960.000,00	938.702.662,00	85,18	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan	%	100,00	90,28	90,28	1.101.960.000,00	938.702.662,00	85,18	
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	71,11	70,83	99,61				
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	4	4	100,00	60.155.000,00	54.131.124,00	89,99	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Laporan	4	4	100,00	1.041.805.000,00	884.571.538,00	84,91	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan syarat dan ketentuan	%	100	100,00	100,00	13.000.000,00	8.500.000,00	65,38	
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100,00	10.000.000,00	5.500.000,00	55,00	
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan	Dokumen	4	2	50,00	10.000.000,00	5.500.000,00	55,00	Pelaksanaan monev pengawasan kelembagaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat terlaksana



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
oleh Masyarakat	Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								2 kali kegiatan dari target 4 kali kegiatan
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan	Persentase	100	100	100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	4	4	100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100,00	100,00	100,00	150.689.004.676,00	149.319.189.695,00	99,09	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	100,00	100,00	100,00	577.596.102,00	515.150.050,00	89,19	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100,00	121.814.400,00	112.885.000,00	92,67	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30	30	100,00	455.781.702,00	402.265.050,00	88,26	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	%	100	100	100,00	147.586.736.093,00	146.569.205.736,00	99,31	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	19390	19390	100,00	147.332.539.593,00	146.339.863.778,00	99,33	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4	100,00	254.196.500,00	229.341.958,00	90,22	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	%	100	100	100,00	6.400.000,00	4.350.000,00	67,97	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	100,00	6.400.000,00	4.350.000,00	67,97	Pelaksanaan rekonsiliasi BMD dilaksanakan secara daring, sehingga terdapat belanja Mamin yang tidak terealisasi
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	11.025.000,00	10.050.000,00	91,16	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	4	100,00	11.025.000,00	10.050.000,00	91,16	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	804.490.647,00	706.842.047,00	87,86	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	452.883.000,00	370.121.000,00	81,73	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	13.537.647,00	13.459.000,00	99,42	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	29.850.000,00	26.764.000,00	89,66	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100,00	170.687.500,00	159.421.400,00	93,40	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00	137.532.500,00	137.076.647,00	99,67	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang tersedia	%	100	100	100	1.210.007.731,00	1.095.829.242,00	90,56	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	533.232.580,00	446.167.244,00	83,67	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	676.775.151,00	649.661.998,00	95,99	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang yang terpelihara	%	100	100	100,00	492.749.103,00	417.762.620,00	84,78	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	52	47	90,38	171.249.103,00	121.656.755,00	71,04	terdapat Kendaraan Dinas Operasional yang sudah rusak berat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	25	100,00	9.000.000,00	8.711.000,00	96,79	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2,00	100,00	312.500.000,00	287.394.865,00	91,97	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Dalam Daerah yang dikembangkan	Persentase	100,00	100,00	100,00	800.502.334,00	765.651.601,00	95,65	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Budaya yang dibina	Persentase	100,00	100,00	100,00	256.802.334,00	234.636.601,00	91,37	
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase	100,00	100,00	100,00				
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	2,00	2,00	100,00	126.535.000,00	106.766.604,00	84,38	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	75,00	75,00	100,00	130.267.334,00	127.869.997,00	98,16	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian Tradisional Masyarakat yang dilestarikan	Persentase	100,00	100,00	100,00	543.700.000,00	531.015.000,00	97,67	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	2,00	2,00	100,00	543.700.000,00	531.015.000,00	97,67	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Persentase	100,00	100,00	100,00	12.425.000,00	12.125.000,00	97,59	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Seni yang dibina	Persentase	100,00	100,00	100,00	12.425.000,00	12.125.000,00	97,59	
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	10,00	10,00	100,00	12.425.000,00	12.125.000,00	97,59	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah Lokal yang dilestarikan	Persentase	100,00	100,00	100,00	59.940.000,00	53.354.718,00	89,01	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Sejarah Lokal yang dibina	Persentase	100,00	100,00	100,00	59.940.000,00	53.354.718,00	89,01	
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	75,00	75,00	100,00	59.940.000,00	53.354.718,00	89,01	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	Persentase	100,00	100,00	100,00	56.266.000,00	50.345.348,00	89,48	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang mendapatkan legalitas	Persentase	100,00	100,00	100,00	56.266.000,00	50.345.348,00	89,48	
Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	objek	2,00	2,00	100,00	56.266.000,00	50.345.348,00	89,48	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang dikelola	Persentase	100,00	100,00	100,00	319.340.000,00	294.426.544,00	92,20	
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kapasitas Museum Kota	Persentase	100,00	100,00	100,00	319.340.000,00	294.426.544,00	92,20	
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	11,00	11,00	100,00	319.340.000,00	294.426.544,00	92,20	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 5 Februari 2025

2. Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH						123.148.900.000,00	122.473.836.355,32	99,45	
BELANJA									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	100	217.255.041.709,00	207.456.381.478,00	95,49	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	95	100	105,3	36.287.400,00	33.912.800,00	93,46	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	100,0	25.662.400,00	23.632.800,00	92,09	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	19	19	100,0	10.625.000,00	10.280.000,00	96,75	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
	Realisasi Kinerja SKPD								
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100,0	74.974.106.573,00	73.122.877.771,00	97,53	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	803	803	100,0	74.912.728.773,00	73.077.149.571,00	97,55	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100,0	35.240.300,00	26.550.500,00	75,34	Narasumber tidak mempunyai sertifikat ahli
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	Laporan	13	13	100,0	26.137.500,00	19.177.700,00	73,37	Realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran merupakan efisiensi
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	%	90	100	111,1	24.000.000,00	23.600.000,00	98,33	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	100,0	24.000.000,00	23.600.000,00	98,33	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	80	100	125,0	583.600.000,00	540.793.255,00	92,67	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100,0	85.110.000,00	78.585.100,00	92,33	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	Paket	3	3	100,0	15.000.000,00	14.153.000,00	94,35	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	3	300,0	3.240.000,00	3.120.000,00	96,30	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100,0	11.250.000,00	10.737.000,00	95,44	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	160	164	102,5	250.000.000,00	247.600.003,00	99,04	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	5	100,0	219.000.000,00	186.598.152,00	85,20	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	95	100	105,3	3.112.400.000,00	2.863.504.000,00	92,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit	5	5	100,0	631.500.000,00	556.520.000,00	88,13	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	161	161	100,0	2.480.900.000,00	2.306.984.000,00	92,99	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	100	90	90,0	2.149.179.561,00	1.976.085.507,00	91,95	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	100,0	1.000.000,00	990.000,00	99,00	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,0	332.928.461,00	278.095.467,00	83,53	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,0	1.815.251.100,00	1.697.000.040,00	93,49	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	100	100	100,0	880.470.000,00	773.070.102,00	87,80	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	130	135	103,8	389.171.400,00	368.112.536,00	94,59	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	130	103	79,2	216.298.600,00	131.440.443,00	60,77	Realisasi BBM Genset sesuai dengan kebutuhan Dinas kesehatan unit Induk,
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	2	200,0	275.000.000,00	273.517.123,00	99,46	Perencanaan awal 1 unit namun setelah ada penyesuaian anggaran dan pemindahan anggaran, maka target menjadi 2 unit dan capaian menjadi 2 unit yang dipelihara yakni Rumah Dinas Pustu Pohsangit Kidul dan Gudang Dinas Kesehatan di PKM Jati
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas / RSUD	indeks	85	88,21	103,77	135.494.998.175,00	128.122.538.043,00	94,56	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit	7	7	100,0	135.494.998.175,00	128.122.538.043,00	94,56	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar	%	100	100	100,0	103.618.105.812,00	92.234.846.576,00	89,01	
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang sesuai standar	%	65	100	153,8	42.021.528.211,00	39.496.017.506,00	93,99	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	unit	5	3	60,0	7.930.995.331,00	6.031.477.379,00	76,05	1. Pemeliharaan pada IGD RSUD dr. Mohamad Saleh tidak dapat mencapai 100% karena : a. Adanya surat pernyataan ketidaksanggupan penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan tanggal 19 Desember 2024 b. Dilakukan pemutusan kontrak berdasarkan SCM1, SCM2 dan pernyataan pemutusan kontrak tanggal 20 Desember 2024 (sudah diajukan pencarian jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) dari Bank Jatim Bondowoso pd tanggal 23 Desember 2024) c. Proses Pengajuan Termin 3 ke BPPKAD tgl 27/12/2024 2. Pemeliharaan pada Ruang IBS dr. Mohamad Saleh tidak dapat mencapai 100% karena :



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
									a. Dalam pelaksanaan penyedia progres pekerjaannya lambat sudah dilakukan SCM1, SCM2, SCM3 ditambah peringatan 1, peringatan 2 dan peringatan 3 tetap diabaikan (tidak ada upaya yg memadai dalam mengejar keterlambatan progres) oleh penyedia hingga akhir masa pelaksanaan tgl 12 Des 2024 hanya tercapai 30,054%, dengan pertimbangan dr Jaksa Pengacara Negara, Inspektorat, UKPBJ, dan Tim Teknis dr dinas PUPR dilakukan pemutusan kontrak pada tanggal 12 Desember 2024 b. Sudah diajukan pencarian jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) dari Bank Jatim Kraksaan pada tanggal 13 Desember 2024 c. Sudah dilakukan review inspektorat dibawah Irbansus 4 untuk pencairan dana pekerjaan IBS yg sudah terpasang (Proses Pengajuan ke BPPKAD tgl 30/12/2024) 3. Rehabilitasi dan Pemeiharaan Rumah Sakit (Instalasi Air Buangan Domestik) tidak terealisasi karena : a. Sdh dilakukan proses pengadaan langsung melalui LPSE oleh pejabat pengadaan, tetapi ketika mau kontrak ditemukan fakta bahwa KBLI penyedia statusnya dicabut oleh LPJK karena Tenaga Ahlinya melakukan pencabutan sepihak b. Sudah dilakukan proses pengadaan ulang ke dua, tetapi penyedia yg diundang tidak memasukkan penawaran harga, hanya memasukkan dokumen kualifikasi saja c. Penyedia yg punya kualifikasi kibi limbah cair terbatas. d. Dengan mempertimbangkan Wktu pelaksanaan pada pengadaan kedua 45 hr yg gagal krn penyedia tidak melakukan penawaran maka waktu sudah tidak memungkinkan untk dilakukan proses pengadaan ulang yg ke tiga
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit	45	45	100,0	24.197.700.000,00	24.029.284.508,00	99,30	
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit	74	75	101,4	2.125.922.000,00	2.051.399.088,00	96,49	
Pengadaan Obat, Bahan habis Pakai , Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan habis Pakai , Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	5	5	100,0	7.766.910.880,00	7.383.856.531,00	95,07	
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang terlaksana	%	100	100	100,0	57.530.219.041,00	50.404.961.316,00	87,61	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
Daerah Kabupaten/Kota	sesuai standar								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	4013	3389	84,5	250.228.560,00	201.391.634,00	80,48	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3970	3114	78,4	128.970.000,00	95.009.000,00	73,67	Belanja yang tidak diserap adalah narasumber karena bukan ahli 2. Transport tidak diserap karena ASN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3643	3083	84,6	97.000.000,00	53.606.000,00	55,26	1. Adanya audit belanja narasumber oleh inspektorat, dengan temuan pengembalian honor narsum 50% 2. Transport tidak diserap karena ASN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18646	17703	94,9	66.500.000,00	38.600.000,00	58,05	1. Adanya audit belanja narasumber oleh inspektorat, dengan temuan pengembalian honor narsum 50% 2. Transport tidak diserap karena ASN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	34189	33937	99,3	84.700.000,00	70.910.000,00	83,72	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	161048	165969	103,1	40.550.000,00	30.952.800,00	76,33	1. Untuk sisa anggaran yang tidak terealisasi merupakan belanja Uang saku Masyarakat, dimana kegiatan ini mengundang ASN. 2. kegiatan menggunakan narasumber dari ASN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	30455	30304	99,5	776.232.000,00	736.910.200,00	94,93	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	20855	18031	86,5	20.000.000,00	11.357.000,00	56,79	untuk sisa anggaran merupan kegiatan sosialisasi hipertensi karena terkendala waktu
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8695	9482	109,1	299.883.620,00	281.633.000,00	93,91	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	448	546	121,9	132.155.000,00	119.270.000,00	90,25	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	4609	4686	101,7	549.890.000,00	407.988.000,00	74,19	1. Anggaran dana khusus BOK Puskesmas baru bisa di realisasikan pada TW II (Bulan Mei), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran (di lakukan di bulan Juni). 2. Sistem Penatausahaan Keuangan pada BOK Puskesmas mengalami perubahan (BOK langsung di salurkan ke masing - masing Puskesmas tanpa melalui RKUD, sehingga diperlukan adaptasi penatausahaan ulang)." 3. Adanya penurunan harga Cardridge TCM (Bidang P2P)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	6484	5989	92,4	170.887.500,00	141.487.500,00	82,80	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	dokumen	1	1	100,0	35.000.000,00	33.146.000,00	94,70	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	8	8	100,0	20.950.000,00	17.350.000,00	82,82	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	127	127	100,0	1.386.404.000,00	1.126.360.750,00	81,24	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	2	200,0	20.000.000,00	19.047.500,00	95,24	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	64	64	100,0	168.812.000,00	162.141.500,00	96,05	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	100,0	115.295.000,00	99.385.000,00	86,20	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	6	7	116,7	15.700.000,00	15.259.000,00	97,19	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans kesehatan	Dokumen	54	54	100,0	291.720.000,00	255.245.000,00	87,50	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	1	1	100	28.500.000,00	24.000.000,00	84,21	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	7	7	100,0	2.122.417.800,00	1.777.419.150,00	83,75	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	100,0	37.758.676.600,00	33.368.042.800,00	88,37	
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	orang	528	528	100,0	16.600.000,00	12.600.000,00	75,90	Untuk sisa anggaran yang tidak terealisasi merupakan belaja Uang saku Masyarakat, dimana kegiatan ini mengundang ASN.
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	paket	1	1	100,0	55.358.000,00	13.135.000,00	23,73	Anggaran di siapkan untuk bilamana terjadinya KLB , namun pada kenyataannya dari awal tahun s/d akhir tahun tidak terjadi KLB Ada beberapa pemeriksaan yang di tanggung oleh pusat, sedangkan anggaran BOK hanya untuk pemeriksaan AFP dan pengiriman
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	2	200,0	48.400.000,00	46.952.000,00	97,01	
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Rumah	Dokumen	2	2	100,0	11.283.626.561,00	10.041.999.224,00	89,00	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
	Sakit								
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	6	6	100,0	567.729.400,00	420.764.185,00	74,11	1. Anggaran dana khusus BOK Puskesmas baru bisa di realisasikan pada TW II (Bulan Mei), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran (di lakukan di bulan Juni). 2. Sistem Penatausahaan Keuangan pada BOK Puskesmas mengalami perubahan (BOK langsung di salurkan ke masing - masing Puskesmas tanpa melalui RKUD, sehingga diperlukan adaptasi penatausahaan ulang)."
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	4	4	100,0	85.007.000,00	64.219.198,00	75,55	Efisiensi anggaran
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang sudah terakreditasi atau Re-Akreditasi	unit	8	8	100,0	390.200.000,00	291.204.875,00	74,63	kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, memperoleh predikat akreditasi paripurna, sehingga merupakan Efisiensi anggaran
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	laporan	15	2	13,3	10.350.000,00	3.625.000,00	35,02	Tidak adanya kasus KIPi kategori berat, sehingga hanya perlu pengawasan dari nakes wilayah setempat
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	1	100,0	20.000.000,00	17.100.000,00	85,50	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1	100,0	70.000.000,00	67.725.000,00	96,75	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	978	485	49,6	21.200.000,00	17.600.000,00	83,02	Kegiatan berupa kunjungan rumah untuk mengecek kondisi kesehatan orang dengan tuberkulosis yang putus obat atau belum mendapatkan pengobatan. Untuk pasien yang rutin memeriksakan diri ke Puskesmas dan rutin mengambil obat, tidak dilakukan kunjungan rumah, sehingga pasien yang dikunjungi hanya sebagian saja. Target yang ditetapkan adalah seluruh penderita tuberkulosis baik yang rajin berobat maupun belum mendapatkan pengobatan dan putus obat. Semua pasien sudah terlayani sesuai standar baik di PKM maupun melalui kunjungan rumah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	8	92	1150,	4.625.000,00	1.375.000,00	29,73	1. Anggaran dana khusus BOK Puskesmas baru bisa di realisasikan pada TW II (Bulan Mei), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran (di lakukan di bulan Juni). 2. Sistem Penatausahaan Keuangan pada BOK Puskesmas mengalami perubahan di tahun 2023 (BOK langsung di



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
									salurkan ke masing - masing Puskesmas tanpa melalui RKUD, sehingga diperlukan adaptasi penatausahaan ulang). Capaian kinerja sebesar 92 orang (1150%) melebihi target karena adanya penemuan kasus baru di tahun 2024 dan sudah dilakukan penanganan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen	31	31	100,0	55.985.000,00	46.285.000,00	82,67	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen	221	221	100,0	320.666.000,00	273.865.000,00	85,41	
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	%	100	100	100,0	271.000.000,00	252.577.500,00	93,20	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1	1	100,0	271.000.000,00	252.577.500,00	93,20	
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Ijin Operasional Fasilitas Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang di diterbitkan sesuai ketentuan	%	100	100	100,0	3.795.358.560,00	2.081.290.254,00	54,84	1. Penyerapan anggaran sesuai kebutuhan/efisiensi anggaran 2. Hibah Klinik NU belum dapat direalisasikan karena belum terpenuhinya persyaratan penerimaan hibah
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	10	10	100,0	8.580.000,00	5.782.000,00	67,39	Penyerapan anggaran sesuai kebutuhan sehingga merupakan efisiensi anggaran
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	9	9	100,0	3.671.153.560,00	1.960.797.754,00	53,41	Hibah Klinik NU belum dapat direalisasikan karena belum terpenuhinya persyaratan penerimaan hibah
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dokumen	1	1	100,0	115.625.000,00	114.710.500,00	99,21	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	80	100	125,0	1.447.961.200,00	912.637.844,00	63,03	1. terkendala Juknis terkait dengan penyelenggaraan Pelatihan 2. Kuota Kota Probolinggo kurang sehingga tidak masuk jadwal dari Murnajati 3. belum mendapat narasumber dari Kementrian karena keterbatasan waktu narasumber 4. Penyerapan anggaran sesuai dengan target kinerja
Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Ijin Tenaga Kesehatan yang di terbitkan sesuai ketentuan	%	90	100	111,1	4.016.250,00	3.350.000,00	83,41	
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	465	545	117,2	4.016.250,00	3.350.000,00	83,41	
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Penempatan SDM Kesehatan sesuai	%	80	100	125,0	408.966.100,00	316.969.450,00	77,51	terkendala Juknis terkait dengan penyelenggaraan Pelatihan



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	standart								Kuota Kota Probolinggo kurang sehingga tidak masuk jadwal dari Murnajati Belum mendapat narasumber dari Kementrian karena keterbatasan waktu narasumber Penyerapan anggaran sesuai dengan target kinerja
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	100,0	8.092.500,00	6.391.000,00	78,97	Penyerapan anggaran sesuai kebutuhan sehingga merupakan efisiensi anggaran
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	40	40	100,0	104.000.000,00	98.387.300,00	94,60	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	3	3	100,0	296.873.600,00	212.191.150,00	71,48	Penyerapan anggaran sesuai kebutuhan sehingga merupakan efisiensi anggaran
Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan fungsional sesuai kompetensinya	%	80	100	125,0	1.034.978.850,00	592.318.394,00	57,23	terkendala Juknis terkait dengan penyelenggaraan Pelatihan Kuota Kota Probolinggo kurang sehingga tidak masuk jadwal dari Murnajati belum mendapat narasumber dari Kementrian karena keterbatasan waktu narasumber
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	124	64	51,6	1.034.978.850,00	592.318.394,00	57,23	terkendala Juknis terkait dengan penyelenggaraan Pelatihan Kuota Kota Probolinggo kurang sehingga tidak masuk jadwal dari Murnajati belum mendapat narasumber dari Kementrian karena keterbatasan waktu narasumber (sesuai juknis BOK)
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Perijinan Sarana Kefarmasian, Toko Alkes, Optik, U MOT, Produksi serta Pengelolaan Makanan dan Minuman yang terlaksana sesuai standar	%	85	100	117,6	587.651.000,00	542.743.300,00	92,36	
Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi Ijin Operasional Fasilitas Pelayanan kesehatan yang di terbitkan sesuai ketentuan	%	90	100	111,1	14.450.000,00	14.165.000,00	98,03	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	50	50	100,0	14.450.000,00	14.165.000,00	98,03	
Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase rekomendasi produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	85	100	117,6	321.210.000,00	294.587.000,00	91,71	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	1	100,0	321.210.000,00	294.587.000,00	91,71	
Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase rekomendasi TPM dan DAM yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	85	100	117,6	5.000.000,00	4.496.000,00	89,92	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	1	100,0	5.000.000,00	4.496.000,00	89,92	
Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan dan pengawasan	%	85	100	117,6	246.991.000,00	229.495.300,00	92,92	
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	unit	6	6	100,0	246.991.000,00	229.495.300,00	92,92	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Puri di Kota Probolinggo	%	65	87,21	134,2	4.171.094.860,00	3.940.125.554,00	94,46	
Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD dan Ormas yang menerapkan kebijakan Germas sesuai ketentuan	%	80	100	125,0	188.755.500,00	156.377.500,00	82,85	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Promosi kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (BOK)	Dokumen	6	6	100,0	188.755.500,00	156.377.500,00	82,85	
Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan GERMAS yang dilaksanakan sesuai ketentuan	%	80	100	125,0	58.000.000,00	55.200.000,00	95,17	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	72	72	100,0	58.000.000,00	55.200.000,00	95,17	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang aktif	%	65	100	153,8	3.924.339.360,00	3.728.548.054,00	95,01	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	28	28	100,0	3.924.339.360,00	3.728.548.054,00	95,01	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase ketersediaan data mikro keluarga yang tepat waktu	%	95	100	105,3	432.309.250,00	367.101.739,00	84,92	
Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase pendataan keluarga yang dilaksanakan	%	90	95	105,6	200.000.000,00	199.478.000,00	99,74	
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,0	200.000.000,00	199.478.000,00	99,74	
Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga) yang dilaporkan	%	90	100	111,1	232.309.250,00	167.623.739,00	72,16	1. Terkendala dengan jadwal kegiatan yang ada di Balai KB 2. Pagu harga barang tidak sesuai dengan harga penawaran di E Katalog
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	29	29	100,0	2.500.000,00	2.496.600,00	99,86	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	laporan	1	1	100,0	100.349.250,00	62.135.500,00	61,92	1. Terkendala dengan jadwal kegiatan yang ada di Balai KB 2. Pagu harga barang tidak sesuai dengan harga penawaran di E Katalog
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan	1	1	100,0	69.210.000,00	63.505.000,00	91,76	
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	50	69	138,0	50.500.000,00	29.736.639,00	58,88	Terkendala dengan jadwal kegiatan yang ada di Balai KB
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	3	3	100,0	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	%	90	100	111,1	2.183.072.070,00	1.703.684.472,00	78,04	Untuk sisa anggaran yang tidak terealisasi merupakan belanja Uang saku Masyarakat, namun pada pelaksanaan kegiatan mengundang ASN Terbentur jadwal kegiatan Adanya refokusing anggaran



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase KIE KKBPK yang dilaksanakan	%	85	100	117,6	708.860.750,00	544.871.000,00	76,87	Untuk sisa anggaran yang tidak terealisasi merupakan belaja Uang saku Masyarakat, namun pda pelaksanaan kegiatan mengundang ASN Terbentur jadwal kegiatan Adanya refokusing anggaran
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	laporan	1	1	100,0	110.490.750,00	52.163.000,00	47,21	Untuk sisa anggaran yang tidak terealisasi merupakan belaja Uang saku Masyarakat, namun pda pelaksanaan kegiatan mengundang ASN.
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan	1	2	200,0	246.600.000,00	185.733.000,00	75,32	pelaksanaan kegiatan terbentur dengan kegiatan lainnya yang ada di balai KB
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	laporan	1	1	100,0	79.000.000,00	61.200.000,00	77,47	Jadwal pelaksanaan kegiatan minilok sebanyak 4 kali kegiatan, kegiatan sudah di laksanakan sebanyak 3 kali, namun di karenakan adanya penjabaran anggaragan BOKB
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Presentase penyuluhan Advokasi dan KIE pada remaja	Dokumen	1	1	100,0	132.100.000,00	128.355.000,00	97,17	
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	1	100,0	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi	1	1	100,0	135.670.000,00	112.420.000,00	82,86	
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase penyuluhan, pergerakan pelayanan dan pengembangan program KKBPK oleh PKB/PLKB	85 %	85	100	117,6	485.923.200,00	417.919.200,00	86,01	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	267	267	100,0	485.923.200,00	417.919.200,00	86,01	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan KB yang dilaksanakan	%	85	100	117,6	760.258.120,00	544.319.272,00	71,60	1. Kurangnya Kurangnya permintaan Alat Kontrasepsi dari Faskes (Stok Alkon Di Faskes masih banyak) 2. Pelaksanaan MOW terkendala dengan jadwal dokter yang melakukan tindakan 3. Pelaksanaan survey ke Faskes terkendala dengan jadwal kegiatan yang ada di faskes
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	1	1	100,0	33.946.000,00	6.155.781,00	18,13	Kurangnya permintaan Alat Kontrasepsi dari Faskes (Stok Alkon Di Faskes masih banyak)
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	Orang	251	251	100,0	594.587.000,00	445.680.873,00	74,96	Pelaksanaan MOW terkendala dengan jadwal dokter yang melakukan tindakan
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	40	40	100,0	43.407.120,00	39.103.618,00	90,09	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	46	46	100,0	88.318.000,00	53.379.000,00	60,44	Pelaksanaan survey ke Faskes terkendala dengan jadwal kegiatan yang ada di faskes
Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		85	85	100,0	228.030.000,00	196.575.000,00	86,21	
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dokumen	1	1	100,0	7.850.000,00	7.850.000,00	100,00	
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	unit	1	1	100,0	148.780.000,00	130.765.000,00	87,89	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	kampung	29	29	100,0	71.400.000,00	57.960.000,00	81,18	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	%	90	90	100,0	2.335.494.000,00	2.129.614.900,00	91,18	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS) yang mendapatkan fasilitasi pembinaan dan pendampingan	%	85	85	100,0	1.085.364.000,00	954.357.400,00	87,93	
Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	laporan	1	1	100,0	40.000.000,00	38.800.000,00	97,00	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	unit	25	25	100,0	300.000.000,00	297.920.000,00	99,31	
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)	orang	145	145	100,0	64.400.000,00	33.220.000,00	51,58	Kegiatan Kapasitas mitra tribina sudah di anggarkan pada melalui anggaran BOKB, sehingga anggaran yang ada (pajak rokok) tidak terealisasikan.
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	kelompok	68	68	100,0	680.964.000,00	584.417.400,00	85,82	
Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan / pendampingan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	%	85	85	100,0	1.250.130.000,00	1.175.257.500,00	94,01	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	19	19	100,0	111.750.000,00	64.800.000,00	57,99	1. Karena adanya penjabaran anggaran (penjabaran IV) 2. Kegiatan Tribuna, Evaluasi dan Monitoring percepatan penurunan stunting dilaksanakan pada pertengahan bualan Oktober namun belum ada disposisi dari Bapak Pj Wali Kota
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	1	1	100,0	531.180.000,00	503.257.500,00	94,74	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	laporan	1	1	100,0	607.200.000,00	607.200.000,00	100,00	

Sumber : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, 5 Februari 2025

3. Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN						1.343.070.000,00	1.268.546.717,00	94,45%	
PENDAPATAN ASLI DAERAH						1.343.070.000,00	1.268.546.717,00	94,45%	
BELANJA									
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	%	85	85	100	2.843.218.000,00	2.737.277.831	96,27%	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dan Drainase yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	km	12	10	83,33	2.843.218.000,00	2.737.277.831	96,27%	
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	km	0,75	0,75	100	2.130.240.000,00	2.047.904.295,00	96,13%	
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	lembaga	20	16	80	50.142.000,00	46.125.054,00	91,99%	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi dan Drainase yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	km	5	5,2	104	583.786.000,00	564.968.482,00	96,78%	
Pengelolaan dan Pengawasan Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	DI	16	16	100	79.050.000,00	78.280.000,00	99,03%	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Jaringan SPAM Perpipaan	%	15	15	100	1.003.275.000,00	995.410.108,00	99,22%	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sambungan Rumah Dalam Kondisi baik	%	15	29,82	198,8	1.003.275.000,00	995.410.108	99,22%	
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Terbangun	liter/detik	275	275	100	180.400.000,00	179.244.000	99,36%	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah unit SPAM/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	140	117	83,57	112.184.000,00	109.161.108,00	97,31%	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Tertentu	SR	150	151	100,67	710.691.000,00	707.005.000,00	99,48%	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Akses Layanan Air Limbah Domestik	%	100	100	100	1.723.500.000,00	1.714.213.108,00	99,46%	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana limbah domestik yang Terbangun dan Terpelihara	Unit	14	14	100	1.723.500.000,00	1.714.213.108,00	99,46%	
Peningkatan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat skala permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	m3/hari	5	5	100	152.584.000,00	147.443.108,00	96,63%	
Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit	13	13	100	111.000.000,00	110.945.000,00	99,95%	
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	rumah tangga	164	167	101,83	1.459.916.000,00	1.455.825.000,00	99,72%	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Perkotaan dalam Kondisi Mantap	%	82	82	100	1.538.543.193,00	1.515.430.949,00	98,50%	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pematasan / Drainase Jalan Kota yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	m	7.000	7.010	100,14	1.538.543.193,00	1.515.430.949,00	98,50%	
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	m	12.000	0	0,00	879.161.693,00	878.811.691,00	99,96%	Pada Tahun 2024 tidak ada kegiatan pembangunan saluran drainase. Anggaran yang dialokasikan diperuntukkan membayar hutang Belanja Modal pekerjaan Pembangunan Kawasan Gladak Serang Tahun 2023
Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	m	7.000	7.010	100,14	659.381.500,00	636.619.258,00	96,55%	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Fasilitas Umum Sesuai Standar Jasa Konstruksi	%	90	90	100	28.757.909.646,00	27.141.373.919,00	94,38%	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Gedung	Jumlah Bangunan gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	bangunan	11	11	100	28.757.909.646,00	27.141.373.919,00	94,38%	
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Gedung (TABG), Pendataan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Gedung (TABG), Pendataan Gedung, serta Implementasi SIMBG	dokumen	240	412	171,67	108.180.000,00	106.760.000,00	98,69%	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	10	10	100	27.032.687.381,00	25.475.163.919,00	94,24%	
Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum yang dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	unit	8	8	100	1.617.042.265,00	1.559.450.000,00	96,44%	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase IMB yang Terselamatkan Tepat Waktu	%	85	85	100	188.839.000,00	186.898.449,00	98,97%	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IMB yang Terselamatkan Tepat Waktu	%	85	85	100	188.839.000,00	186.898.449,00	98,97%	
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100	188.839.000,00	186.898.449,00	98,97%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	82	82	100	7.321.711.489,00	7.274.234.639,00	99,35%	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang Terbangun dan terpelihara dengan Baik	km	20,41	20,1	98,48	7.321.711.489,00	7.274.234.639,00	99,35%	
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang terbangun	km	3	0	0,00	2.683.622.424,00	2.644.617.158,00	98,55%	Pada Tahun 2024 tidak ada kegiatan pembangunan jalan. Anggaran yang disediakan diperuntukan membayar hutang belanja modal Pembangunan Jalan Tembus Maramis - Gladak Serang, Pemeliharaan Berkala Jalan Cut Nyak Dien, Pemeliharaan Berkala Jalan Siaman Tahun 2023
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	km	20,41	20,1	98,48	2.056.839.065,00	2.051.843.098,00	99,76%	
Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan Rehabilitasi	m	10	10	100	50.000.000,00	49.975.000,00	99,95%	
Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	m	15	15	100	2.531.250.000,00	2.527.799.383,00	99,86%	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Ijin Jasa Konstruksi yang terselesaikan Tepat Waktu	%	85	0	0	2.450.000,00	0,00	0,00%	Tidak terserapnya anggaran, dikarenakan kegiatan Survey Harga Satuan dan pengawasan/monitoring terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan secara simultan dengan kegiatan pada sub kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Ijin Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Ketentuan	%	85	0	0	2.450.000,00	0,00	0,00%	
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	dokumen	60	0	0	2.450.000,00	0,00	0,00%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100	100	100	149.942.000,00	122.030.054,00	81,38%	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana tata Ruang yang Disusun sesuai Ketentuan	dokumen	2	1	50,00	120.042.000,00	97.930.054,00	81,58%	
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW kabupaten/kota	dokumen	2	1	50,00	120.042.000,00	97.930.054,00	81,58%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan tata ruang yang difasilitasi melalui TKPRD	%	100	100	100	29.900.000,00	24.100.000,00	80,60%	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	dokumen	4	4	100	29.900.000,00	24.100.000,00	80,60%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80 %	%	100	100	100	11.662.958.566,00	11.253.630.363,00	96,49%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	8.940.233.392,00	8.639.342.467,00	96,63%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bln	888	888	100	8.548.366.652,00	8.278.010.115,00	96,84%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	12	12	100	391.866.740,00	361.332.352,00	92,21%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi PD sesuai Ketentuan	%	100	100	100	1.437.532.774,00	1.364.852.412,00	94,94%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	4	100	34.016.000,00	31.176.750,00	91,65%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	100	123.214.800,00	117.445.000,00	95,32%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12	100	303.730.574,00	285.965.357,00	94,15%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	100	172.660.000,00	171.433.900,00	99,29%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	100	3.900.000,00	2.900.000,00	74,36%	Penyerapan anggaran hanya untuk membiaya langganan 2 (dua) media Surat Kabar
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	12	12	100	109.903.500,00	108.891.400,00	99,08%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	4	4	100	99.011.900,00	74.416.025,00	75,16%	Berkurangnya kegiatan penerimaan kunjungan tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	100	480.061.000,00	478.911.223,00	99,76%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12	12	100	111.035.000,00	93.712.757,00	84,40%	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	100	100	100	657.413.500,00	639.971.794,00	97,35%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	12	12	100	348.030.000,00	341.970.416,00	98,26%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	1	1	100	309.383.500,00	298.001.378,00	96,32%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang Terpenuhi	%	100	100	100	627.778.900,00	609.463.690,00	97,08%	
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	100	16.500.000,00	8.804.885,00	53,36%	Berkurangnya jumlah pemeliharaan kendaraan jabatan, dikarenakan mutasi kendaraan ke SKPD lain
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	37	37	100	265.948.900,00	260.709.400,00	98,03%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	80	80	100	216.780.000,00	216.033.750,00	99,66%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100	44.650.000,00	44.650.000,00	100,00%	
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	3	100	83.900.000,00	79.265.655,00	94,48%	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Permasalahan Pertanahan yang terselesaikan	%	95	85	89,47	189.112.000,00	103.758.554,00	54,87%	Biaya sertifikasi lahan Pantai Permata tidak dapat terserap optimal, dikarenakan masih terdapat proses yang perlu dilakukan terkait rekomendasi dari Kementerian Perhubungan tentang Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Probolinggo
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Difasilitasi	Permasalahan	2	2	100	189.112.000,00	103.758.554,00	54,87%	
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	2	100	189.112.000,00	103.758.554,00	54,87%	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ijin Site Plan yang terselesaikan Tepat Waktu	%	85	85	100	1.531.704.000,00	1.298.309.628,00	84,76%	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan fasilitasi Rehabilitasi atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100	0	0	225.000.000,00	33.400.000,00	14,84%	Tidak terserapnya anggaran secara optimal dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi
Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	unit/rumah	5	0	0	225.000.000,00	33.400.000,00	14,84%	
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Fasilitas Rumah susun Dalam Kondisi baik	%	90	90	100	1.258.504.000,00	1.216.854.628,00	96,69%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	laporan	12	12	100	1.258.504.000,00	1.216.854.628,00	96,69%	
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan	Persentase Ijin Site Plan yang sesuai Ketentuan	%	85	85	100	48.200.000,00	48.055.000,00	99,70%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	laporan	20	20	100	48.200.000,00	48.055.000,00	99,70%	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang Didukung oleh PSU	%	85	85	100	501.120.000,00	489.653.104,00	97,71%	
URUSAN Penyelenggaraan PSU PERUMAHAN	Persentase PSU Perumahan yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota	%	85	85	100	501.120.000,00	489.653.104,00	97,71%	
Penyediaan Prasarana, Sarana , dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	PSU	100	100	100	501.120.000,00	489.653.104,00	97,71%	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan dalam Kondisi Mantap	%	85	85	100	1.717.181.876,00	1.653.246.600,00	96,28%	
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase ijin site plan yang sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	176.400.000,00	150.240.000,00	85,17%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	laporan	10	10	100	176.400.000,00	150.240.000,00	85,17%	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Panjang Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	m	2.500	2.070	82,8	1.540.781.876,00	1.503.006.600,00	97,55%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	laporan	15	15	100	1.540.781.876,00	1.503.006.600,00	97,55%	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 7 Februari 2025

4. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
BELANJA									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program	%	90	90	100	9.027.237.197,00	8.837.133.986,00	97,89	
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pencapaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	90	75	83	16.600.000,00	13.200.000,00	79,52	Hanya 2 laporan realisasi kinerja yg disusun
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	2	100	11.400.000,00	10.600.000,00	92,98	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	4	2	50	5.200.000,00	2.600.000,00	50	Sesuai kebutuhan
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	7.657.502.150,00	7.549.386.642,00	98,59	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	58	56	96,67	7.245.829.284,00	7.144.847.383,00	98,61	2 orang pensiun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	15	15	100	411.672.866,00	404.539.259,00	98,27	
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	80	80	100	19.642.250,00	19.250.000,00	98,00	
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	215	215	100	19.642.250,00	19.250.000,00	98,00	
Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	%	80	80	100	323.214.500,00	308.458.180,00	95,43	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	10	83,33	116.310.000,00	104.049.995,00	89,46	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	100	42.024.500,00	41.943.000,00	99,81	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	10	100	16.075.000,00	15.902.000,00	98,92	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100	2.400.000,00	2.250.000,00	93,75	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	15	15	100	24.500.000,00	24.345.000,00	99,37	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	65	65	100	121.905.000,00	119.966.185,00	98,41	
Penyediaan jasa penunjang Urusan	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan	%	80	80	100	336.453.196,00	306.382.428,00	91,06	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
pemerintahan daerah	yang Terpenuhi								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	230.700.000,00	200.919.928,00	87,09	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	105.753.196,00	105.462.500,00	99,73	
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	80	80	100	673.825.101,00	640.456.736,00	95,04	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	25	100	344.852.681,00	316.399.726,00	91,73	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	72	100	79.737.500,00	76.400.210,00	99,37	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	249.234.920,00	247.656.800,00	99,37	
PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum yang terselesaikan	%	100	100	100	6.508.524.129,00	6.161.841.833,00	94,67	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Perda Perkada yang ditangani	kasus	206	2423	100	4.645.461.529,00	4.579.526.503,00	98,58	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	206	2224	1000	1.256.218.000,00	1.222.389.500,00	97,31	adapun kegiatan meliputi : Pengamanan Pos Pemkot, Lobby Pemkot, Meteor, Pos Alun2, Pos N1 N2, PAM Kegiatan Pemerintah
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	laporan	206	199	100	3.146.603.051,00	3.115.213.725,00	99,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	100	28.151.000,00	27.851.000,00	98,93	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	12	100	32.742.200,00	32.330.000,00	98,74	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	218	218	100	181.742.278,00	181.742.278,00	100,00	
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	ada penyesuaian anggaran
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan Perda dan perkara yang terselesaikan	%	80	80	100	1.863.062.600,00	1.582.315.330,00	84,93	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	12	12	100	501.890.860,00	484.325.000,00	96,50	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	12	11	91,67	1.361.171.740,00	1.097.990.330,00	80,67	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Kebakaran yang ditangani sesuai Responsife Time	%	100	100	100	602.106.863,00	578.816.501,00	96,13	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang ditangani	%	100	100	100,00	490.056.863,00	468.776.501,00	95,66	
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	5	5	100	454.056.863,00	433.201.501,00	95,41	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah kab/kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	60	117	100	16.000.000,00	15.925.000,00	99,53	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	127	189	100	20.000.000,00	19.650.000,00	98,25	
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang ditangani	%	100	100	100	10.000.000,00	9.850.000,00	98,50	
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	109	109	100	10.000.000,00	9.850.000,00	98,50	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase penanganan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	%	100	100	100,00	102.050.000,00	100.190.000,00	98,18 %	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	300	300	100,00	102.050.000,00	100.190.000,00	98,18 %	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 3 Februari 2025

5. Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
BELANJA									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	80	80	100	3.017.597.643	2.909.226.439	96,41	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	80	80	100	4.135.000	3.900.000	94,32	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100	2.067.500	2.027.500	98,07	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100	2.067.500	1.872.500	90,57	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	%	80	80	100	2.439.935.969	2.369.824.348	97,13	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	18	18	100	2.292.839.874	2.223.294.872	96,97	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100	143.569.595	143.052.476	99,64	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	2	2	100	3.526.500	3.477.000	98,60	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	80	80	100	274.109.174	269.499.854	98,32	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	49.115.050	47.523.200	96,76	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100	20.193.484	18.393.500	91,09	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	0	0	0	0	Penyesuaian Anggaran
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	175.370.640	174.985.462	99,78	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	100	29.430.000	28.597.692	97,17	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	80	80	100	25.000.000	24.612.792	98,45	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	Penyesuaian Anggaran
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100	25.000.000	24.612.792	98,45	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	80	80	100	75.710.000	73.179.140	96,66	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	75.710.000	73.179.140	96,66	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	80	80	100	198.707.500	168.210.305	84,65	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100	28.120.000	27.873.850	99,12	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	100	103.439.500	79.125.656	76,49	Penyerapan BBM dan Pemeliharaan (Servis) dilakukan sesuai dengan kebutuhan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	42	42	100	46.970.000	41.292.959	87,91	Penyerapan Pemeliharaan (Servis) dilakukan sesuai dengan kebutuhan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	20.178.000	19.917.840	98,71	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penanggulangan Bencana	%	90	90	100	1.018.664.700	995.082.700	97,69	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	21.853.000	21.472.000	98,26	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	60	60	100	21.853.000	21.472.000	98,26	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	100	268.558.800	265.432.300	98,84	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	2	2	100	69.819.300	67.334.300	96,44	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	29	29	100	129.100.000	129.100.000	100	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	200	200	100	31.250.000	30.665.000	98,13	
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	1	1	100	12.600.000	12.600.000	100	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	200	200	100	17.419.500	17.385.000	99,80	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	12	12	100	8.370.000	8.348.000	99,74	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	%	100	100	100	45.890.000	44.701.000	97,41	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 124 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	1	100	45.890.000	44.701.000	97,41	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana tepat waktu	%	100	100	100	682.362.900	663.477.400	97,23	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	100	22.151.900	21.205.600	95,73	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	12	12	100	39.361.000	26.821.800	68,14	Pelaksanaan Pemantauan Potensi dini bencana alam saling bergantian dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan bencana Hidrometeorologi yang dianggarkan melalui dana DSP BNPB
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana JITUPASNA dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	100	0	0	0	0	0	Penyesuaian Anggaran
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga	12	12	100	620.850.000	615.450.000	99,13	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 4 Februari 2025

6. Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
BELANJA									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	%	100	100	100	5.891.809.129,00	5.739.254.151,00	97,41	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	100	100	100	36.170.000,00	34.720.590,00	95,99	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100	8.750.000,00	7.845.000,00	89,66	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	4	4	100	27.420.000,00	26.875.590,00	98,01	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
	Realisasi Kinerja SKPD								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	4.944.376.479,00	4.820.495.750,00	97,49	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	36	36	100	4.905.558.979,00	4.783.586.412,00	97,51	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	17	17	100	38.817.500,00	36.909.338,00	95,08	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	510.000,00	510.000,00	100	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100	510.000,00	510.000,00	100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	230.405.250,00	229.455.217,00	99,59	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100	29.559.000,00	29.551.000,00	99,97	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100	8.460.000,00	8.394.500,00	99,23	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100	1.560.000,00	1.560.000,00	100	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	6	100	9.000.000,00	8.998.000,00	99,98	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24	100	131.796.250,00	131.246.188,00	99,58	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	100	50.030.000,00	49.705.529,00	99,35	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketatalaksanaan Tepat waktu	%	100	100	100	35.550.000,00	35.335.000,00	99,40	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	5	100	20.250.000,00	20.250.000,00	100	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	100	15.300.000,00	15.085.000,00	98,59	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan	%	100	100	100	366.439.380,00	356.636.784,00	97,32	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	100	1.000.000,00	1.000.000,00	100	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	122.572.500,00	116.404.225,00	94,97	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	15.555.000,00	15.536.000,00	99,88	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	227.311.880,00	223.696.559,00	98,41	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	278.358.020,00	262.100.810,00	94,16	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100	34.475.600,00	32.113.559,00	93,15	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	26	100	118.402.920,00	105.180.414,00	88,83	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	30	100	10.000.000,00	10.000.000,00	100	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	82	82	100	41.493.500,00	41.358.037,00	99,67	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	100	73.986.000,00	73.448.800,00	99,27	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	persen	80	80	100	52.264.600,00	50.825.000,00	97,25	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	persen	80	80	100	52.264.600,00	50.825.000,00	97,25	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	29	29	100	4.121.000,00	4.120.900,00	100	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	5	5	100	43.243.600,00	41.859.100,00	96,80	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Lembaga	14	14	100	3.400.000,00	3.360.000,00	98,82	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	1	1	100	1.500.000,00	1.485.000,00	99	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	persen	85	85	100	1.273.095.214,00	1.197.686.684,00	94,08	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	80	80	100	1.045.673.114,00	1.002.011.120,00	95,82	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	99	99	100	750.748.114,00	727.753.000,00	96,94	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	6	60	37.325.000,00	27.710.000,00	74,24	Sasaran penerima bantuan alat bantu berhalangan tetap sehingga bantuan tidak bisa diberikan
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	50	50	100	192.050.000,00	181.286.670,00	94,40	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendoatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	100	65.550.000,00	65.261.450,00	99,56	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	80	80	100	227.422.100,00	195.675.564,00	86,04	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	300	100	18.550.000,00	16.745.000,00	90,27	
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100	78.447.100,00	73.585.484,00	93,80	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	14	8	57	107.400.000,00	86.464.000,00	80,51	Sasaran penerima bantuan alat bantu berhalangan tetap sehingga bantuan tidak bisa diberikan



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	25	100	4.350.000,00	4.243.580,00	97,55	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20	100	4.550.000,00	4.529.650,00	99,55	
Pemberian Pelayanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20	100	6.250.000,00	3.707.000,00	59,31	Target kinerja pelayanan rujukan telah terpenuhi
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100	7.875.000,00	6.400.850,00	81,28	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persen	30	30	100	7.341.173.300,00	6.420.894.217,00	87,46	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah dilakukan verval	persen	50	50	100	7.341.173.300,00	6.420.894.217,00	87,46	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang di data	Orang	800	1804	226	328.108.200,00	322.586.988,00	98,32	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	2200	6503	296	6.942.355.400,00	6.036.284.475,00	86,95	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	97	97	100	70.709.700,00	62.022.754,00	87,71	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Bencana	persen	80	80	100	185.129.120,00	174.479.750,00	94,25	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	persen	80	80	100	185.129.120,00	174.479.750,00	94,25	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	130	130	100	185.129.120,00	174.479.750,00	94,25	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase TMP yang terkelola	persen	85	85	100	135.949.000,00	134.492.054,00	98,93	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarpras TMP dalam kondisi baik	persen	90	90	100	135.949.000,00	134.492.054,00	98,93	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	8.750.000,00	8.633.400,00	98,67	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	8	8	100	30.400.000,00	30.233.400,00	99,45	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	36	36	100	96.799.000,00	95.625.254,00	98,79	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	persen	51	51	100	153.542.000,00	151.890.554,00	98,92	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	persen	55	55	100	41.800.000,00	41.362.500,00	98,95	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	35	35	100	22.650.000,00	22.450.000,00	99,12	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG	Laporan	2	2	100	19.150.000,00	18.912.500,00	98,76	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan peran Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	persen	6	6	100	111.742.000,00	110.528.054,00	98,91	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100	56.000.000,00	55.155.000,00	98,49	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	23	23	100	55.742.000,00	55.373.054,00	99,34	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan	persen	100	69	69	224.783.000,00	198.181.025,00	88,17	Karena bergantung kebutuhan intervensi kasus dan pelaporan kasus yg masuk ke UPTD



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan diselesaikan	persen	100	100	100	46.800.000,00	46.400.000,00	99,15	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100	46.800.000,00	46.400.000,00	99,15	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	persen	100	100	100	148.367.000,00	123.666.525,00	83,35	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	24	17	71	62.867.000,00	62.674.904,00	99,69	Karena bergantung kebutuhan intervensi kasus dan pelaporan kasus yg masuk ke UPTD
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	25	26	104	85.500.000,00	60.991.621,00	71,34	Karena bergantung kebutuhan intervensi kasus dan pelaporan kasus yg masuk ke UPTD
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan yang mendapat pengawasan dan perlindungan	persen	100	7	7	29.616.000,00	28.114.500,00	94,93	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	41	3	7	29.616.000,00	28.114.500,00	94,93	Terdapat perubahan ketentuan persyaratan untuk mengikuti pelatihan yang tersertifikasi
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang terpilah	persen	30	30	100	3.500.000,00	3.495.000,00	99,86	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase data gender dan anak yang terkumpul	persen	30	30	100	3.500.000,00	3.495.000,00	99,86	
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	3.500.000,00	3.495.000,00	99,86	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	persen	90	90	100	483.949.000,00	476.499.612,00	98,46	
Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia	Persentase kelurahan yang memiliki Kampung Ramah Anak	persen	70	70	100	30.970.000,00	27.105.250,00	87,52	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
usaha kewenangan kabupaten/ kota									
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	10	10	100	12.025.000,00	8.450.000,00	70,27	Krn bergantung kebutuhan intervensi kasus dan pelaporan kasus yg masuk ke UPTD
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100	18.945.000,00	18.655.250,00	98,47	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	persen	80	80	100	452.979.000,00	449.394.362,00	99,21	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	29	29	100	28.575.000,00	28.505.500,00	99,76	
Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	100	352.000.000,00	348.520.700,00	99,01	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	72.404.000,00	72.368.162,00	99,95	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak	persen	100	100	100	244.084.000,00	206.994.137,00	84,80	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	persen	100	100	100	54.700.000,00	51.337.500,00	93,85	
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Orang	20	35	175	54.700.000,00	51.337.500,00	93,85	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	persen	100	100	100	149.980.000,00	116.831.637,00	77,90	Karena bergantung kebutuhan intervensi kasus dan pelaporan kasus yg masuk ke UPTD
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	15	26	173	149.980.000,00	116.831.637,00	77,90	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	persen	100,00	100	100	39.404.000,00	38.825.000,00	98,53	
Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan perlindungan dan penanganan bagi AMPK	Orang	20,00	70	350	39.404.000,00	38.825.000,00	98,53	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	persen	90	90	100	768.600.000,00	754.833.700,00	98,21	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berpartisipasi dalam mendapatkan Upaya - upaya Pemberdayaan Masyarakat	persen	90	90	100	768.600.000,00	754.833.700,00	98,21	
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	100	19.800.000,00	18.942.500,00	95,67	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	4	4	100	697.800.000,00	686.066.350,00	98,32	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1	100	45.000.000,00	43.825.050,00	97,39	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	100	6.000.000,00	5.999.800,00	100,00	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 4 Februari 2025



7. Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
BELANJA									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persentase	100,00	103,75	103	9.789.203.189	9.186.864.001	93,85	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persentase	100,00	100,00	100	77.220.700	76.808.754	99,47	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10,00	10,00	100	39.680.500	39.668.554	99,97	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10,00	10,00	100	37.540.200	37.140.200	98,93	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100,00	138,00	138	4.323.830.011	4.209.970.736	97,37	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	37,00	37,00	100	4.274.792.511	4.161.110.182	97,34	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	183,00	183,00	100	38.872.500	38.798.554	99,81	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	laporan	25,00	25,00	100	10.165.000	10.062.000	98,99	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100,00	100,00	100	4.500.000	4.500.000	100	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4,00	4,00	100	4.500.000	4.500.000	100	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100,00	100,00	100	214.500.000	191.225.300	89,15	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	3,00	100	58.650.000	58.150.000	99,15	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2,00	2,00	100	155.850.000	133.075.300	85,39	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100,00	100,00	100	421.337.510	411.903.790	97,76	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	100	78.712.110	77.860.500	98,92	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00	6,00	100	13.725.700	13.657.500	99,50	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72,00	72,00	100	6.110.000	6.090.000	99,67	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6,00	6,00	100	15.000.000	14.997.000	99,98	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50,00	50,00	100	221.239.700	217.376.552	98,25	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100,00	100,00	100	8.520.000	8.500.000	99,77	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12,00	12,00	100	78.030.000	73.422.238	94,09	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase	100,00	100,00	100	3.023.406.310	2.735.600.000	90,48	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	166,00	166,00	100	3.023.406.310	2.735.600.000	90,48	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	Persentase	100,00	100,00	100	920.456.158	877.658.041	95,35	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	100	358.860.000	345.077.373	96,16	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	18,00	18,00	100	561.596.158	532.580.668	94,83	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persentase	100,00	100,00	100	803.952.500	679.197.380	84,48	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16,00	16,00	100	123.190.000	108.135.089	87,78	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	186,00	186,00	100	127.262.500	98.400.000	77,32	Sisa anggaran pemeliharaan alat mesin printer kantor untuk UKK tidak terserap
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	2,00	98	553.500.000	472.662.291	85,40	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan nilai investasi	Persentase	0,41	0,09	21	100.000.000	97.406.000	97,41	Keterbatasan atas Ketersediaan Ruang / Kawasan Pengembangan Kawasan peruntukan Investasi Sektor Industri.
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab / kota	Persentase	100	100	100	100.000.000	97.406.000	97,41	
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	100.000.000	97.406.000	97,41	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi dan peluang investasi yang dipromosikan	Persentase	100	100	100	150.000.000	123.440.000	82,29	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan promosi penanaman modal	Persentase	100	100	100	150.000.000	123.440.000	82,29	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	150.000.000	123.440.000	82,29	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ijin yang terbit tepat waktu	Persentase	100	100	100	285.995.800	278.465.364	97,37	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase	100	100	100	285.995.800	278.465.364	97,37	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	50	50	100	9.550.000	8.965.000	93,87	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	2700	2700	100	186.870.400	182.793.256	97,82	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	60	60	100	4.760.000	3.510.000	73,74	Karena belanja mamin rapat menyesuaikan dengan keterlibatan peserta rapat dalam penyelesaian pengaduan yang di ajukan
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi	Kegiatan Usaha	750	750	100	84.815.400	83.197.108	98,09	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan pengendalian penanaman modal	Persentase	100	100	100	392.886.000	345.765.750	88,01	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengawasan penanaman modal	Persentase	100	100	100	392.886.000	345.765.750	88,01	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Kegiatan Usaha	10	10	100	58.933.000	50.032.000	84,90	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	60	60	100	237.988.000	205.183.750	86,22	
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	25	25	100	95.965.000	90.550.000	94,36	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi PM	Persentase	100	100	100	78.464.000	76.507.054	97,51	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase data perizinan dan penanaman modal yang dipublikasikan	Persentase	100	100	100	78.464.000	76.507.054	97,51	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	78	78	100	78.464.000	76.507.054	97,51	

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja, 3 Februari 2025

8. Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
PENDAPATAN						1.309.488.000,00	1.291.272.200,00	98,61	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						1.309.488.000,00	1.291.272.200,00	98,61	
Retribusi Daerah						907.488.000,00	889.272.200,00	97,99	
Lain - lain PAD yang sah						402.000.000,00	402.000.000,00	100,00	
BELANJA						22.184.929.643,00	21.534.572.843,00	97,07	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (%)	%	95	100	105,26	13.084.957.229,00	12.815.618.019,00	97,94	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% (%)	%	95	100	105,26	86.227.475,00	85.525.070,00	99,19	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	7	7	100	17.680.975,00	17.266.600,00	97,66	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Laporan	4	4	100	68.546.500,00	68.258.470,00	99,58	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	%	95	100	105,26	11.489.010.702,00	11.235.371.485,00	97,79	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Orang/Bulan	88	87	98,86	11.317.703.702,00	11.064.986.721,00	97,77	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen	600	1.178,00	196,33	163.807.000,00	162.958.764,00	99,48	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan	18	18	100	7.500.000,00	7.426.000,00	99,01	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	%	100	100	100	10.000.000,00	9.879.000,00	98,79	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan	1	1	100	10.000.000,00	9.879.000,00	98,79	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	%	95	95	100	374.036.545,00	373.720.689,00	99,92	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	5	16	320	103.826.100,00	103.709.800,00	99,89	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	2	7	350	26.010.000,00	25.999.000,00	99,96	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	12	12	100	244.200.445,00	244.011.889,00	99,92	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi (%)	%	95	100	105,26	732.311.007,00	725.110.526,00	99,02	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	100	302.915.499,00	300.979.958,00	99,36	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	100	429.395.508,00	424.130.568,00	98,77	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	%	95	95	100	393.371.500,00	386.011.249,00	98,13	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	1	1	100	58.770.000,00	58.570.094,00	99,66	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	56	56	100	192.300.000,00	188.727.255,00	98,14	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	55	55	100	71.841.500,00	69.276.400,00	96,43	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	100	70.460.000,00	69.437.500,00	98,55	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Ketersediaan Pangan	Skor	0,62	0,57	91,94	134.456.000,00	133.254.972,00	99,11	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat Ketersediaan Pangan Utama Masyarakat	kg/kap/thn	177	193	109,04	87.962.000,00	87.275.472,00	99,22	
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	4	4	100,00	51.107.000,00	50.669.418,00	99,14	
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	12	12	100,00	13.060.000,00	12.823.000,00	98,19	
Penyusunan Neraca Bahan Pangan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan	Dokumen	2	2	100,00	23.795.000,00	23.783.054,00	99,95	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tingkat Konsumsi Energi terhadap standart konsumsi energi	% dari 2.100 kkal/kap/hari	80	88,33	110,41	46.494.000,00	45.979.500,00	98,89	
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	1	100,00	46.494.000,00	45.979.500,00	98,89	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	100	100	100,00	18.775.000,00	18.775.000,00	100,00	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peningkatan penanganan daerah rawan pangan	Lokasi	5	5	100,00	18.775.000,00	18.775.000,00	100,00	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	2	2	100,00	18.775.000,00	18.775.000,00	100,00	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang memenuhi syarat	%	80	96,67	120,84	8.050.000,00	8.050.000,00	100,00	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok yang mendapat pengawasan keamanan pangan segar	%	8	8	100,00	8.050.000,00	8.050.000,00	100,00	
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	100,00	8.050.000,00	8.050.000,00	100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1	1,03	103,00	792.171.800,00	779.309.607,00	98,38	
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pendapatan nelayan	%	5	5,63	112,60	439.757.800,00	437.752.932,00	99,54	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	2260	2.048	90,62	439.757.800,00	437.752.932,00	99,54	
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase pelaku usaha yang mendapat layanan dari UPT TPI	%	86	90	104,65	352.414.000,00	341.556.675,00	96,92	
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	100	100	100,00	352.414.000,00	341.556.675,00	96,92	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	%	1	1,01	101,00	731.102.000,00	687.080.452,00	93,98	
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidayaan ikan yang mendapat fasilitasi (%)	%	4	4	100,00	207.210.000,00	203.989.932,00	98,45	
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	Kelompok	24	24	100,00	207.210.000,00	203.989.932,00	98,45	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pengelolaan budidaya ikan yang baik	%	25	25	100,00	523.892.000,00	483.090.520,00	92,21	
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	125	125	100,00	143.700.000,00	143.296.054,00	99,72	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	100	100	100,00	76.720.000,00	38.895.036,00	50,70	Sisa anggaran berasal dari tidak tercapainya target sasaran kegiatan untuk Sekolah Lapang Budidaya Lele
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha	8	8	100,00	303.472.000,00	300.899.430,00	99,15	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan perairan darat yang mendapat pengawasan	%	1	1	100,00	44.792.000,00	44.523.084,00	99,40	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Perairan darat yang direstocking	%	35	35	100,00	44.792.000,00	44.523.084,00	99,40	
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00	44.792.000,00	44.523.084,00	99,40	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambah Produk Perikanan	Rp./Kg	31825	32335	101,60	778.225.085,00	771.250.463,00	99,10	
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	%	20	21	105,00	79.698.000,00	78.643.994,00	98,68	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	2	2	100,00	79.698.000,00	78.643.994,00	98,68	
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	5	5,1	102,00	698.527.085,00	692.606.469,00	99,15	
Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah	Pelaku Usaha	350	350	100,00	698.527.085,00	692.606.469,00	99,15	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi								
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Ternak	%	1	0,52	52,00	667.975.750,00	667.075.500,00	99,87	Realisasi produksi ternak tidak mencapai target karena banyak peternak yang melakukan penjualan ternaknya akibat masih adanya potensi serangan wabah PMK dan LSD serta peternak tidak langsung membeli ternak pengganti (membiarkan kandang kosong)
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	%	90	90	100,00	524.500.000,00	524.500.000,00	100,00	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	1	100,00	524.500.000,00	524.500.000,00	100,00	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	0,6	1,06	176,67	143.475.750,00	142.575.500,00	99,37	
Peningkatan Kualitas SDG (Sumber Daya Genetik) Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	4	4	100,00	143.475.750,00	142.575.500,00	99,37	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	0,1	6,62	6620,00	296.640.000,00	282.520.116,00	95,24	Kelahiran pedet tidak mencapai target karena sapi calon akseptor pelayanan IB berkurang akibat penjualan ternak oleh peternak yang merasa masih adanya potensi wabah penyakit PMK dan LSD serta masih tingginya penyakit gangguan reproduksi pada ternak akibat faktor genetik dan manajemen pakan yang buruk (malnutrisi)
	Persentase Peningkatan Kelahiran Pedet	%	1	0,6	60,00				
Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	%	90	90	100,00	125.500.000,00	115.000.000,00	91,63	
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	1	100,00	125.500.000,00	115.000.000,00	91,63	
Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian	%	80	80	100,00	171.140.000,00	167.520.116,00	97,88	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	2	100,00	171.140.000,00	167.520.116,00	97,88	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak	%	1	1	100,00	1.055.170.600,00	936.139.297,00	88,72	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan	%	90	90	100,00	68.500.000,00	67.515.800,00	98,56	
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	29	29	100,00	68.500.000,00	67.515.800,00	98,56	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan yang Mendapat Pengawasan/Pendampingan	%	52,94	64,28	121,42	194.731.600,00	192.601.358,00	98,91	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	12	12	100,00	194.721.600,00	192.601.358,00	98,91	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase ternak yang terfasilitasi pemasarannya	%	70	70	100,00	791.939.000,00	676.022.139,00	85,36	
Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit	5	5	100,00	791.939.000,00	676.022.139,00	85,36	Sisa anggaran berasal dari efisiensi proses negosiasi pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan perluasan parkir pasar hewan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil pertanian	%	1	1,37	137,00	130.569.900,00	123.612.100,00	94,67	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kehilangan Hasil Pertanian	%	1	0,9	90,00	130.569.900,00	123.612.100,00	94,67	
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	100	128	128,00	130.569.900,00	123.612.100,00	94,67	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Produk dan Unit Usaha Sarana Produksi Ternak yang memenuhi legalitas	%	100	100	100,00	65.126.000,00	61.235.612,00	94,03	
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase unit usaha sarana produksi ternak yang dipantau legalitasny	%	100	100	100,00	65.126.000,00	61.235.612,00	94,03	
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Laporan	1	1	100,00	65.126.000,00	61.235.612,00	94,03	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	%	0,1	0,22	220,00	4.376.918.279,00	4.206.128.621,00	96,10	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Capaian Produktivitas Pertanian	Ton/Ha	22,54	22,96	101,86	4.376.918.279,00	4.206.128.621,00	96,10	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	5	5	100,00	885.108.500,00	879.410.888,00	99,36	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	50	70	140,00	3.491.809.779,00	3.326.717.733,00	95,27	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, 4 Februari 2025

9. Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH						778.384.275	683.385.528	87,80	
BELANJA DAERAH									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	85	77,78	91,51	15.923.608.602	15.470.686.065	97,16	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persen	85	87,5	102,94	105.239.500	101.990.638	96,91	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100	47.602.500	46.655.454	98,01	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14	14	100	57.637.000	55.335.184	96,01	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen	95	99,45	104,68	13.351.305.812	12.979.971.838	97,22	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	121	119	98,35	13.230.135.812	12.867.442.876	97,26	Terdapat Pegawai yang memasuki masa purna tugas / pensiun
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100	96.210.000	95.268.962	99,02	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	14	100	24.960.000	17.260.000	69,15	Disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan (Efisiensi Anggaran)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Persen	90	100,75	111,94	581.176.750	569.615.716	98,01	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100	105.093.000	101.124.900,00	96,22	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	100	16.730.200	15.079.000	90,13	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100	24.650.000	22.708.250	92,12	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	83	103,75	380.138.000	379.685.815	99,88	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	100	54.565.550	51.017.751	93,50	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Yang Terpenuhi	Persen	100	87,5	87,50	43.000.000	41.450.000	96,40	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	7	87,50	43.000.000	41.450.000	96,40	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persen	90	97,22	108,02	1.527.893.560	1.500.634.051	98,22	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	191.927.500	183.608.465	95,67	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	12	100,00	32.421.300	27.784.200	85,70	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
	yang Disediakan								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	11	91,67	1.303.544.760,00	1.289.241.386,00	98,90	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Terpenuhi	Persen	100	100	100	314.992.980	277.023.822	87,95	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	100	92.427.960	90.703.355	98,13	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	35	100	170.939.500	135.528.294	79,28	Sudah dilakukan pemesanan sparepart (yang sesuai dengan jenis dan tahun kendaraan) kendaraan namun sampai batas yang ditentukan belum datang
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	5	100	2.500.000	2.500.000	100	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	47.125.520	46.592.173	98,87	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	100	2.000.000	1.700.000	85	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kegiatan atau Usaha Berijin yang Mempunyai Dokumen Lingkungan	Persen	72	67,14	93,25	39.800.000	39.012.500	98,02	
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Permohonan Kajian Lingkungan Hidup Yang Telah Mendapatkan Rekomendasi Teknis	Persen	100	100	100	39.800.000	39.012.500	98,02	
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	39.800.000,00	39.012.500,00	98,02	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Mutu Air Dan Udara Dengan Kualitas Baik	Persen	85	89,5	105,29	1.196.019.330	1.184.995.163	99,08	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	85	121,43	142,86	975.439.330	971.131.225	99,56	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	3	3	100	28.525.000	28.125.000	98,60	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	3	3	100	143.610.000	142.863.398	99,48	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	370	402	108,65	803.304.330	800.142.827	99,61	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	85	80	94,12	189.430.000	184.938.938	97,63	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	5	5	100	154.230.000	150.438.938	97,54	
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	1	1	100	35.200.000	34.500.000	98,01	
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Wilayah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	85	75	88,24	31.150.000	28.925.000	92,86	
Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	100	31.150.000	28.925.000	92,86	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tutupan Lahan Publik	Persen	20	5,66	28,30	5.430.342.966	5.104.357.079	94,00	Tidak ada penambahan untuk luasan RTH publik baru
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Pengelolaan Konservasi Kehati	Persen	100	100	100	5.430.342.966	5.104.357.079	94	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	42	42	100	2.975.491.900	2.887.830.632	97,05	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	459	369	80,39	20.599.900	18.107.500	87,90	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	5	5	100	491.886.816	329.135.740	66,91	Efisiensi Anggaran dari Pagu dengan Nilai Kontrak
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	1	1	100	1.882.106.150	1.810.728.207	96,21	
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	1	1	100	60.258.200	58.555.000	97,17	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 Skala Kota	Persen	80	80	100	15.534.000	13.814.000	88,93	
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3	Persen	90	90	100,00	15.534.000	13.814.000	88,93	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	1	1	100,00	15.534.000	13.814.000	88,93	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen	80	80	100,00	129.470.000	122.469.162	94,59	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Dibina dan Diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen	90	85	94,44	129.470.000	122.469.162	94,59	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	1	1	100,00	22.025.000	21.430.000	97,30	
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	200	170	85,00	107.445.000	101.039.162	94,04	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Kelompok Masyarakat yang Berperan Aktif Dalam Pengelolaan Lingkungan	Persen	55	54,29	98,71	164.184.000	137.040.564	83,47	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Kelompok Masyarakat yang Peduli Terhadap Lingkungan Hidup	Persen	55	54,29	98,71	164.184.000	137.040.564	83,47	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	4	4	100	50.000.000	38.092.500	76,19	- Peserta kegiatan yaitu tim pembina dan tim adiwiyata kota merupakan seorang ASN sehingga tidak dapat diberikan uang saku - Tidak dapat merealisasikan Narasumber dikarenakan Narasumber yang bersangkutan sedang cuti
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	320	513	160,31	37.544.000	36.824.750	98,08	
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	4	4	100	76.640.000	62.123.314	81,06	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	65	58,82	90,49	117.150.000	117.084.900	99,94	
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keberhasilan Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	65	50	76,92	117.150.000	117.084.900	99,94	Dari target sebanyak 9 ponpen di kota probolinggo yang lolos verifikasi dalam lomba eco pesantren hanya sebanyak 4 ponpes
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	25	25	100	117.150.000	117.084.900	99,94	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Pengaduan Lingkungan Hidup Masyarakat yang Tertangani	Persen	80	100	125	31.635.000	23.624.000	74,68	Honor untuk Walikota sedangkan Walikota sudah masuk di Tim Satgas sehingga tidak bisa direalisasikan Adanya efisiensi anggaran (pada proses penawaran oleh PPBJ)
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup	Persen	90	83,33	92,59	31.635.000	23.624.000	74,68	Honor untuk Walikota sedangkan Walikota sudah masuk di Tim Satgas sehingga tidak bisa direalisasikan Adanya efisiensi anggaran (pada proses penawaran oleh PPBJ)
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengadu an	15	15	100	12.900.000	11.436.000	88,65	



URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	5	5	100,00	18.735.000	12.188.000	65,05	Honor untuk Walikota sedangkan Walikota sudah masuk di Tim Satgas sehingga tidak bisa direalisasikan Adanya efisiensi anggaran (pada proses penawaran oleh PPBJ)
PROGRAM PERSAMPAHAN PENGLOLAAN	Persentase Timbulan Sampah Yang Terlayani	Persen	80	54,46	68,08	8.283.258.445	7.664.617.798	92,53	Nilai Prosentase sampah tertangani mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena : 1. Kesadaran Masyarakat terhadap penanganan pengelolaan persampahan dari sumbernya masih sangat kurang. 2. Kurangnya sarpras pewadahan sampah (Kontainer) di wilayah selatan; 3. Armada persampahan 60% kondisi sudah tua diatas 20 thn; 4. 22.014 rumah di wilayah selatan belum menggunakan jasa Penarik Gerobak Sampah sehingga menimbulkan sampah liar. 5. Banyaknya Bank Sampah Unit yang Vakum
Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah Yang Terangkut Dan Terolah	Persen	80	50,73	63,41	8.283.258.445	7.664.617.798	92,53	Nilai Prosentase sampah tertangani mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena : 1. Kesadaran Masyarakat terhadap penanganan pengelolaan persampahan dari sumbernya masih sangat kurang. 2. Kurangnya sarpras pewadahan sampah (Kontainer) di wilayah selatan; 3. Armada persampahan 60% kondisi sudah tua diatas 20 thn; 4. 22.014 rumah di wilayah selatan belum menggunakan jasa Penarik Gerobak Sampah sehingga menimbulkan sampah liar. 5. Banyaknya Bank Sampah Unit yang Vakum
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	5	5	100	22.764.300	9.400.000	41,29	Adanya perubahan rencana kegiatan serta efisiensi anggaran
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	2	2	100	10.000.000	9.992.500	99,93	
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	22550	22441,95	99,52	2.876.423.500	2.559.197.538	88,97	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Unit	36	26	72,22	532.616.500	526.959.642	98,94	Terdapat salah satu belanja yang tidak dapat terealisasi karena terbentur dengan adanya regulasi perizinan yang belum dapat dipenuhi
Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan	4	4,00	100	2.430.958.000	2.353.042.012	96,79	
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	125	130,66	104,53	856.372.645	844.903.281	98,66	
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	25000	24098,76	96,40	1.554.123.500	1.361.122.825	87,58	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 3 Februari 2025

10. Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
BELANJA									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	100	4.698.953.374	4.297.861.031	91,46	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal	%	100	100	100	16.590.000	16.495.000	99,43	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100	8.070.000	8.025.000	99,44	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100	8.520.000	8.470.000	99,41	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	%	95	95	100	3.774.375.171	3.408.664.801	90,31	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	26	26	100	3.768.325.171	3.402.939.801	90,30	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	2	100	6.050.000	5.725.000	94,63	



Pemerintah Kota Probolinggo

Semesteran SKPD										
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	4.820.000	4.670.000	96,89		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100	4.820.000	4.670.000	96,89		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	190.959.175	182.016.023	95,32		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100	60.827.675	58.867.000	96,78		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	100	10.166.500	7.971.700	78,41	Penyerapan Anggaran sesuai dengan kebutuhan	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	3	60,00	11.510.000	8.198.000	71,23	Penyerapan Anggaran sesuai dengan kebutuhan	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	730	730	100	4.380.000	4.380.000	100		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	650.000	650.000	100		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24	100	103.425.000	101.949.323	98,57		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	100	100	100	148.000.000	146.015.000	98,66		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0		0	0		Adanya penyesuaian anggaran	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	100	130.000.000	128.015.000	98,47		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	1	100	18.000.000	18.000.000	100		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	100	100	100	456.799.228	439.873.144	96,29		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	8	80	2.000.000	874.144	43,71	Penyerapan Anggaran Menyesuaikan dengan Paket Blanko yang dikirim oleh Pusat	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	194.932.500	182.634.590	93,69		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	16	16	100	259.866.728	256.364.410	98,65		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	100	100	100	107.409.800	100.127.063	93,22		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	9	100	70.569.800	64.757.063	91,76		



Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	100	36.840.000	35.370.000	96,01	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	100	99,30	99,30	437.286.032	434.526.020	99,37	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	%	100	121,16	121,16	437.286.032	434.526.020	99,37	
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	0	0		0	0		Adanya penyesuaian anggaran
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	40000	49235	123,09	309.800.000	307.847.000	99,37	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	4000	4076	101,90	127.486.032	126.679.020	99,37	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	100	99,02	99,02	264.327.000	259.265.224	98,09	
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	%	100	106,48	106,48	259.452.000	254.390.224	98,05	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	3500	3864	110,40	46.050.000	44.557.000	96,76	
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	5000	5602	112,04	213.402.000	209.833.224	98,33	
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pencatatan sipil melalui pelayanan keliling yang terfasilitasi	%	100	100	100	4.875.000	4.875.000	100	
Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	29	29	100	4.875.000	4.875.000	100	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	196.370.000	193.914.704	98,75	
	Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik	%	100	100	100				
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase laporan dan penyajian data yang tepat waktu	%	100	100	100	39.320.000	38.874.704	98,87	
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	40	40	100	37.320.000	36.924.704	98,94	
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	12	12	100	2.000.000	1.950.000	97,50	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang tersampaikan	%	100	100	100	155.850.000	153.840.000	98,71	
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi	Laporan	4	4	100	145.050.000	143.640.000	99,03	



	Kependudukan								
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	100	10.800.000	10.200.000	94,44	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi Bimtek	%	100	100	100	1.200.000	1.200.000	100	
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	1	1	100	1.200.000	1.200.000	100	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data kependudukan dan pencatatan sipil	%	100	100	100	33.000.000	31.800.000	96,36	
Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase pemenuhan data profil kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	100	100	33.000.000	31.800.000	96,36	
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100	33.000.000	31.800.000	96,36	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 3 Februari 2025

11. Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN						3.589.000.000,00	3.854.668.500,00	107,4	
PENDAPATAN ASLI DAERAH						3.589.000.000,00	3.854.668.500,00	107,4	
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum						3.450.000.000,00	3.695.323.500,00	107,11	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah						4.000.000,00	0,00	0	dikarenakan ada perubahan pada Perda Retribusi No 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Alat telah dihapuskan
Retribusi Terminal						35.000.000,00	34.470.000,00	98,49	
Retribusi Tempat Khusus Parkir						100.000.000,00	124.875.000,00	124,88	
PELANJA									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	98	93	95	7.683.721.943,00	7.506.978.744,00	97,70	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	90	90	100	14.317.900,00	14.317.000,00	99,99	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100	12.288.300,00	12.288.000,00	100,00	



Pemerintah Kota Probolinggo

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	7	100	2.029.600,00	2.029.000,00	99,97	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan sesuai ketentuan	%	100	99	99	5.712.792.596,00	5.601.990.878,00	98,06	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	531	528	99	5.665.262.596,00	5.554.496.770,00	98,04	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100	42.130.000,00	42.097.108,00	99,92	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	7	7	100	5.400.000,00	5.397.000,00	99,94	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai ketentuan	%	100	91	91	11.350.000,00	11.140.200,00	98,15	
Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	2	100	11.350.000,00	11.140.200,00	98,15	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	%	100	48	48	19.638.000,00	9.524.600,00	48,50	Tidak mencapai target dikarenakan realisasi dalam penyerapan anggaran disesuaikan kebutuhan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Orang	6	6	100	19.638.000,00	9.524.600,00	48,50	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	491.992.000,00	479.756.639,00	97,51	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	5	100	111.042.000,00	108.082.000,00	97,33	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	6	6	100	133.950.000,00	129.262.000,00	96,50	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4	200	26.686.000,00	25.199.000,00	94,43	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	Dokumen	2	4	200	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	47.495.000,00	44.428.000,00	93,54	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	169.219.000,00	169.185.639,00	99,98	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan ketatalaksanaan yang terpenuhi	%	100	97	97	967.045.747,00	939.342.202,00	97,14	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	12	12	100	5.042.500,00	4.436.500,00	87,98	



Pemerintah Kota Probolinggo

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100	217.238.700,00	213.606.826,00	98,33	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	5	5	100	31.400.000,00	15.870.000,00	50,54	Tidak mencapai target dikarenakan realisasi dalam penyerapan anggaran disesuaikan kebutuhan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100	713.364.547,00	705.428.876,00	98,89	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100	466.585.700,00	450.907.225,00	96,64	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100	43.534.500,00	43.107.734,00	99,02	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	32	94	384.121.200,00	371.132.479,00	96,62	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	33	94	21.930.000,00	19.749.000,00	90,05	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	100	17.000.000,00	16.918.012,00	99,52	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Ruas Jalan yang terlayani Trayek Angkutan kota	%	22	0	0	6.025.000,00	5.848.750,00	97,07	dikarenakan tidak ada kegiatan terkait dengan perubahan atau penambahan jaringan trayek
	Prosentase pemenuhan Dokumen kajian Bidang perhubungan	%	100	100	100	10.189.500,00	10.189.500,00	100,00	
	Prosentase Sarana dan Prasarana Jalan sesuai standar kementerian Perhubungan	%	100	98	98	16.924.124.995,00	16.795.841.085,00	99,24	
	Prosentase kendaraan bermotor yang lulus uji berkala	%	99	99	100	518.371.500,00	507.434.364,00	97,89	
	Prosentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan	%	0,00	0	0	2.885.414.000,00	2.839.309.338,00	98,40	dikarenakan tidak ada pendataan / operasi terkait dengan pelanggaran lalu lintas
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	%	90	90	101	16.685.286.895,00	16.559.861.001,00	99,25	
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Terbangun	unit	1	1	100	295.022.000,00	291.703.776,00	98,88	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan jalan di Jalan kabupaten/kota yang tersedia	Unit	47	54	100	950.829.306,00	923.742.130,00	97,15	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1900	1499	79	15.439.435.589,00	15.344.415.095,00	99,38	dikarenakan menyesuaikan keadaan atau tingkat kerusakan yang ada di lapangan dan permintaan masyarakat



Pemerintah Kota Probolinggo

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Kendaraan yang menggunakan Fasilitas Parkir Angkutan Barang	%	90	88	98	674.200.000,00	654.851.150,00	97,13	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100	674.200.000,00	654.851.150,00	97,13	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang layak jalan	%	94	95	101	518.371.500,00	507.434.364,00	97,89	
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	Unit	8500	10826	121	30.700.000,00	30.520.000,00	99,41	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti lulus Uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Dokumen	8000	8000	100	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	unit	9	13	100	171.665.000,00	169.031.250,00	98,47	
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Laporan	12	12	100	116.006.500,00	107.883.114,00	93,00	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana jaringan jalan di wilayah kota	%	100	100	100	2.444.802.100,00	2.415.188.272,00	98,79	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100	2.201.464.000,00	2.174.933.188,00	98,79	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Laporan	6	8	133	4.500.000,00	4.275.000,00	95,00	
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	Dokumen	35	35	100	238.838.100,00	235.980.084,00	98,80	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang taat Andalalin	%	80	83	99	10.189.500,00	10.189.500,00	100,00	
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalin	Jumlah laporan rekomendasi persetujuan teknis Andalin yang terawasi	Laporan	15	15	100	10.189.500,00	10.189.500,00	100,00	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Penumpang umum di Kota Probolinggo	%	30	30	100	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang	Laporan	15	15	100	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	



Pemerintah Kota Probolinggo

Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota								
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan trayek perkotaan yang ditetapkan	%	15	15	100	4.450.000,00	4.338.750,00	97,50	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan dan tersosialisasinya rencana umum jaringan trayek perkotaan dam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen	3	5	167	4.450.000,00	4.338.750,00	97,50	dokumen yang ada adalah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi angkutan umum
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek	%	30	30	100	1.575.000,00	1.510.000,00	95,87	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	unit	10	10	100	1.275.000,00	1.210.000,00	94,90	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	1	8	300.000,00	300.000,00	100,00	dokumen untuk pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek memang sejumlah 1 laporan/dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		%	2	2	100	1.999.800,00	1.575.000	79	
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemilik kapal dibawah 7GT yang hadir dalam pembinaan keselamatan pelayaran	%	75	75	100	1.999.800,00	1.575.000	79	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan kabupaten/kota	Laporan	1	1	100	1.999.800,00	1.575.000	79	

Sumber : Dinas Perhubungan, 3 Februari 2025

12. Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH						87.676.225	50.010.000	57,04	Adapun kendala pada pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah yaitu: 1. Rata-rata perusahaan tidak mempunyai anggaran untuk publikasi di radio dan



												mereka lebih fokus pada kesejahteraan internal karyawannya. 2. Kalah bersaing dengan publikasi media sosial dan lebih banyak perusahaan lebih memasarkan lewat aplikasi atau media sosial, karena lebih praktis dan tidak memakan biaya lebih banyak. 3. Tidak adanya giat off air.
BELANJA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persentase	100	100	100,00	7.342.990.855	7.173.486.915	97,69				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persentase	90	100	111,11	3.425.000	3.345.000	97,66				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100,00	400.000	397.500	99,38				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	9	100,00	3.025.000	2.947.500	97,44				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100,00	6.207.478.214	6.105.627.703	98,36				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45	44	97,78	6.206.678.214	6.104.838.403	98,36				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Laporan	13	13	100,00	800.000	789.300	98,66				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100,00	3.500.000	3.500.000	100,00				
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,00	3.500.000	3.500.000	100,00				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD sesuai ketentuan	Persentase	100	100	100,00	5.000.000	3.996.000	79,92	Beberapa kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN tidak berbayar			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	100,00	5.000.000	3.996.000	79,92	Beberapa kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN tidak berbayar			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100,00	354.314.564	349.657.654	98,69				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00	116.846.440	112.739.550	96,49				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Dokumen	8	8	100,00	13.320.000	12.820.000	96,25				



Pemerintah Kota Probolinggo

	Disediakan								
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100,00	10.000.000	9.977.600	99,78	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00	214.148.124	214.120.504	99,99	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persentase	100	100	100,00	571.463.942	548.859.475	96,04	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	255.860.000	234.330.345	91,59	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	315.603.942	314.529.130	99,66	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	Persentase	80	80	100,00	197.809.133	158.501.083	80,13	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	100,00	123.841.633	96.441.298	77,87	Realisasi pemeliharaan kendaraan dinas operasional untuk kerusakan ringan dan sedang / tanpa penggantian spare part
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	25	100,00	41.837.500	30.712.700	73,41	Biaya pemeliharaan peralatan telah mencapai batasan nilai pemeliharaan sesuai peraturan / SBU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100,00	32.130.000	31.347.085	97,56	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase media komunikasi yang dikelola	Persentase	90	90	100,00	1.631.259.731	1.484.410.130	91,00	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase media komunikasi yang dikelola	Persentase	90	90	100,00	1.631.259.731	1.484.410.130	91,00	
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	12	100,00	48.828.000	48.075.554	98,46	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	12	100,00	513.142.731	438.771.206	85,51	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	6	6	100,00	245.700.000	244.866.250	99,66	
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	2	2	100,00	40.300.000	34.610.000	85,88	Merupakan sisa anggaran pelaksanaan pers rilis uang saku wartawan dan narasumber
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	8	8	100,00	117.539.000	108.146.120	92,01	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	750	970	129,33	665.750.000	609.941.000	91,62	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi informatika yang terintegrasi	Persentase	74	77	104,05	1.328.246.600	1.279.474.643	96,33	



Pemerintah Kota Probolinggo

Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi	Persentase	100	100	100,00	979.384.500	939.467.823	95,92	
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00	4.995.000	4.752.500	95,15	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	60	60	100,00	974.389.500	934.715.323	95,93	
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Layanan Berbasis Elektronik	Persentase	100	100	100,00	348.862.100	340.006.820	97,46	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100,00	26.530.000	26.122.464	98,46	
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	28	28	100,00	6.625.000	6.480.000	97,81	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	3	3	100,00	244.324.100	238.611.560	97,66	
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	6	6	100,00	71.383.000	68.792.796	96,37	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Release Data Statistik Tepat Waktu	Persentase	100	100	100,00	54.961.200	54.007.800	98,27	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang dirilis	Data	32	32	100,00	54.961.200	54.007.800	98,27	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	12	12	100,00	19.982.000	19.722.000	98,70	
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	187	234	125,13	34.979.200	34.285.800	98,02	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Layanan Keamanan Informasi yang Diterapkan	Persentase	58,3	58,3	100,00	205.633.000	202.812.690	98,63	
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sistem elektronik yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Persentase	9,23	36,92	400,00	205.633.000	202.812.690	98,63	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Keamanan	Perangkat Daerah	28	28	100,00	205.633.000	202.812.690	98,63	



	Informasi								
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 3 Februari 2025

13. Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH						2.413.544.145,00	2.362.027.387,00	97,87	
BELANJA									
Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persen	84	84	100,00	8.142.075.454,00	7.979.846.858,00	98,01	
Kegiatan PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persen	84	84	100,00	115.960.000,00	96.118.054,00	82,89	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00	105.335.000,00	85.808.054,00	81,46	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	100,00	10.625.000,00	10.310.000,00	97,04	
Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen	72	72	100,00	6.912.413.302,00	6.786.910.148,00	98,18	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	58	60	103,45	6.819.391.802,00	6.702.985.298,00	98,29	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00	83.853.500,00	74.924.850,00	89,35	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan namun demikian masih ada sisa anggaran honor narasumber
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	100,00	4.517.500,00	4.410.000,00	97,62	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	12	100,00	4.650.500,00	4.590.000,00	98,70	
Kegiatan ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	Persen	80	80	100,00	30.645.000,00	29.723.054,00	96,99	
Sub. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persen	80	80	100,00	30.645.000,00	29.723.054,00	96,99	
Kegiatan ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen	80	80	100,00	3.375.000,00	3.375.000,00	100,00	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Sub. Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	2	100,00	3.375.000,00	3.375.000,00	100,00	
Kegiatan ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen	85	85	100,00	34.720.000,00	34.703.054,00	99,95	
Sub. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persen	85	85	100,00	34.720.000,00	34.703.054,00	99,95	
Kegiatan ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Persen	80	80	100,00	292.907.100,00	285.087.622,00	97,33	
Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persen	90	90	100,00	27.620.900,00	27.449.600,00	99,38	
Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persen	80	80	100,00	5.496.700,00	5.456.800,00	99,27	
Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persen	80	80	100,00	795.000,00	580.000,00	72,96	Terdapat sisa anggaran pembelian bahan bakar Gas elpiji
Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persen	85	85	100,00	65.337.500,00	57.980.500,00	88,74	
Sub. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Kunjungan Tamu yang terfasilitasi	Persen	80	80	100,00	30.342.000,00	30.321.054,00	99,93	
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	Persen	80	80	100,00	163.315.000,00	163.299.668,00	99,99	
Kegiatan PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persen	80	80	100,00	576.449.460,00	569.828.730,00	98,85	
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persen	80	80	100,00	23.620.000,00	23.398.054,00	99,06	
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persen	80	80	100,00	133.470.000,00	131.897.726,00	98,82	
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persen	80	80	100,00	419.359.460,00	414.532.950,00	98,85	
Kegiatan PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD yang terpenuhi	Persen	90	90	100,00	175.605.592,00	174.101.196,00	99,14	
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persen	85	85	100,00	75.364.468,00	75.281.854,00	99,89	
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persen	80	80	100,00	73.949.500,00	72.584.362,00	98,15	
Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persen	85	85	100,00	11.000.000,00	10.995.000,00	99,95	
Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Persen	90	90	100,00	5.291.624,00	5.249.980,00	99,21	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persen	85	85	100,00	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90	
PROGRAM PELAYANAN IZIN SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	Persen	10	10	100,00	354.687.800,00	349.481.918,00	98,53	
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Menerapkan Kepatuhan Terhadap Regulasi	Unit Usaha	50	50	100,00	354.687.800,00	349.481.918,00	98,53	
Sub. Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	50	50	100,00	354.687.800,00	349.481.918,00	98,53	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat	Persen	10	10	100,00	42.650.000,00	39.025.782,00	91,50	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan namun demikian masih ada sisa anggaran dari belanja modal komputer (yang dibeli harus sesuai dengan aturan TKDN)
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yg Wilayah Keanggotaannya dlm Daerah Kab/ Kota	Jumlah Koperasi yang Menerapkan Kepatuhan Terhadap Regulasi	Unit Usaha	50	50	100,00	42.650.000,00	39.025.782,00	91,50	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan namun demikian masih ada sisa anggaran dari belanja modal komputer (yang dibeli harus sesuai dengan aturan TKDN)
Sub. Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yg wilayah keanggotaanya daerah kab / kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan da pengawasan	Unit Usaha	50	50	100,00	42.650.000,00	39.025.782,00	91,50	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan namun demikian masih ada sisa anggaran dari belanja modal komputer (yang dibeli harus sesuai dengan aturan TKDN)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase SDM Koperasi yang mendapatkan Fasilitas Diklat Perkoperasian	Persen	25	25	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	orang	115	115	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
Sub. kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	115	115	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang Mandiri	Persen	25	25	100,00	13.213.500,00	11.975.656,00	90,63	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan namun demikian masih ada anggaran jasa transaksi tunai yang tidak diserap karena perwali dagulir belum terbit



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mandiri dari Aspek Pembiayaan dan Permodalan Usaha	Koperasi dan ukm	37	37	100,00	13.213.500,00	11.975.656,00	90,63	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan namun demikian masih ada anggaran jasa transaksi tunai yang tidak diserap karena perwali dagulir belum terbit
Sub. Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya	Koperasi dan ukm	37	37	100,00	13.213.500,00	11.975.656,00	90,63	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan namun demikian masih ada anggaran jasa transaksi tunai yang tidak diserap karena perwali dagulir belum terbit
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Usaha	Persen	2,73	2,73	100,00	1.356.614.100,00	1.342.619.361,00	98,97	
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan dan kelembagaan usaha	PUM	100	100	100,00	1.356.614.100,00	1.342.619.361,00	98,97	
Sub. Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro yang terdata	Unit Usaha	350	350	100,00	4.430.000,00	4.230.000,00	95,49	
Sub. Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	350	350	100,00	361.715.000,00	352.990.907,00	97,59	
Sub. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	100	100	100,00	986.669.100,00	981.598.454,00	99,49	
Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	kali	6	6	100,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Usaha	Persen	1,04	1,04	100,00	224.205.500,00	223.984.255,00	99,90	
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang mndapatkan fasilitasi Pengembangan Produksi & Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan tehnologi	PUM	150	150	100,00	224.205.500,00	223.984.255,00	99,90	
Sub. Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta desain dan tehnologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta desain dan tehnologi	Unit Usaha	150	150	100,00	224.205.500,00	224.205.500,00	100,00	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Kebutuhan Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan	Persen	91	91	100,00	162.076.097,00	160.263.242,00	98,88	
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat dalam kondisi baik	Persen	80	80	100,00	147.076.097,00	145.442.242,00	98,89	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	6	6	100,00	147.076.097,00	145.442.242,00	98,89	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting	Persen	80	80	100,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	12	12	100,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali	Persen	82	82	100,00	1.598.423.524,00	1.562.268.697,00	97,74	
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pasar yang terstandarisasi Bersih Tertib Aman sesuai standart	Persen	80	80	100,00	1.598.423.524,00	1.562.268.697,00	97,74	
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	12	12	100,00	1.481.173.524,00	1.446.829.197,00	97,68	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting	Persen	80	80	100,00	108.250.000,00	106.814.500,00	98,67	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Laporan	12	12	100,00	108.250.000,00	106.814.500,00	98,67	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persen	80	80	100,00	9.000.000,00	8.625.000,00	95,83	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	12	12	100,00	9.000.000,00	8.625.000,00	95,83	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Persen	1	1	100,00	23.592.000,00	23.408.054,00	99,22	
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Promosi Dagang	Pelaku Usaha	30	30	100,00	23.592.000,00	23.408.054,00	99,22	
Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang lokal	Pelaku Usaha	30	30	100,00	23.592.000,00	23.408.054,00	99,22	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP yang memenuhi standar secara metrologi legal	Persen	80	80	100,00	68.964.600,00	66.002.704,00	95,71	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha yang sadar Tera dan Tera Ulang UTTP	Pelaku Usaha	1000	1000	100,00	68.964.600,00	66.002.704,00	95,71	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat	Unit	1500	1500	100,00	68.964.600,00	66.002.704,00	95,71	

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, 3 Februari 2025



14. Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH						411.411.750,00	439.043.000,00	106,72	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah									
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga						411.411.750,00	439.043.000,00	106,72	
BELANJA									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	87	88	101,15	6.605.477.417,00	6.013.034.869,00	91,03	
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	87	90	103,45	80.186.145,00	73.812.250,00	92,05	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100	48.175.145,00	43.193.150,00	89,66	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	7	100	32.011.000,00	30.619.100,00	95,65	
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	86	90	104,65	4.772.412.565,00	4.356.000.414,00	91,27	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	35	35	100	4.696.524.565,00	4.281.044.164,00	91,15	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	25	25	100	75.888.000,00	74.956.250,00	98,77	
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	82	0	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	dikarenakan belum mendapatkan persetujuan untuk penghapusan BMD dispopar
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen	5	0	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	0	0	0	0,00	0,00	0	Ada penyesuaian anggaran
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	orang	0	0	0	0,00	0,00	0	Ada penyesuaian anggaran
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	87	87	100	260.501.100,00	244.283.503,00	93,77	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6	6	100	73.671.690,00	64.511.000,00	87,57	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2	1	50	1.180.000,00	411.000,00	34,83	sudah perpenuhinya peralatan rumah tangga
Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	paket	4	4	100	46.775.000,00	43.674.000,00	93,37	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan								
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	720	720	100	10.800.000,00	10.240.000,00	94,81	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	100	100	100	128.074.410,00	125.447.503,00	97,95	
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD yang terpenuhi	%	87	100	114,94	102.000.000,00	99.800.000,00	97,84	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	7	7	100	102.000.000,00	99.800.000,00	97,84	
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	87	87	100	980.666.108,00	898.082.581,00	91,58	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	5	0	0,00%	1.500.000,00	0,00	0,00	dikarenakan unuk surat menyurat sudah menggunakan aplikasi srikandi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	3	100	478.260.000,00	412.196.690,00	86,19	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	3	3	100	120.030.000,00	108.000.000,00	89,98	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	3	3	100	380.876.108,00	377.885.891,00	99,21	
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	87	87	100	399.711.499,00	341.056.121,00	85,33	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	13	13	100	151.417.500,00	109.472.939,00	72,30	kecukupan anggaran pemeliharaan kendaraan sudah terpenuhi semua
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	65	65	100	41.712.500,00	26.747.000,00	64,12	tpemeliharaan mesin peralatan kantor sudah terpenuhi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100	206.581.499,00	204.836.182,00	99,16	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase pemuda berprestasi	%	80	80	100	77.800.000,00	77.350.200,00	99,42	
PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	presentase pemuda yang berprestasi	%	70	70	100	77.800.000,00	77.350.200,00	99,42	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan KapasitasDaya Saingnya	orang	100	100	100	75.000.000,00	74.617.000,00	99,49	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	orang	50	0	0,00	2.800.000,00	2.733.200,00	97,61	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet berprestasi	%	35	35	100	6.230.942.000,00	6.102.458.680,99	97,94	
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Olah Raga yang dibina	%	60,5	66	109,09	1.011.952.000,00	951.298.815,00	94,01	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	lokasi	6	6	100	1.011.952.000,00	951.298.815,00	94,01	
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase prestasi yang diraih tingkat daerah	%	80	97,33	121,66	218.990.000,00	217.845.000,00	99,48	
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100,00%	218.990.000,00	217.845.000,00	99,48%	
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	Presentase Atlet yang berprestasi	%	60	60	100,00%	5.000.000.000,00	4.933.314.865,99	98,67%	
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	orang	500	500	100,00%	5.000.000.000,00	4.933.314.865,99	98,67%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase organisasi pramuka yang dibina	%	100	100	100,00%	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%	
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	jumlah organisasi pramuka yang dibina	organisasi	1	1	100,00%	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%	
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	100	100	100,00%	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase Destinasi Wisata Yang Berkembang	%	10	10	100,00%	654.985.500,00	647.844.588,00	98,91%	
PENGLOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	presentase peningkatan SDM pelaku pariwisata	%	30	30	100,00%	583.985.500,00	581.649.938,00	99,60%	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	lokasi	1	1	100,00%	532.985.500,00	530.799.938,00	99,59%	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	laporan	1	1	100,00%	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00%	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	dokumen	3	3	100,00%	6.000.000,00	5.850.000,00	97,50%	
PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	Presentase usaha pariwisata yang terdaftar	%	90	90	100,00%	71.000.000,00	66.194.650,00	93,23%	
Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	usaha	3	3	100,00%	71.000.000,00	66.194.650,00	93,23%	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase angka kunjungan wisatawan	%	13	13,51	103,92%	1.481.220.606,00	1.385.005.001,00	93,50%	
PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kegiatan Pemasaran Pariwisata	%	10	10	100,00%	1.481.220.606,00	1.385.005.001,00	93,50%	
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen	14	14	100,00%	42.450.500,00	41.585.984,00	97,96%	
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	dokumen	1	1	100,00%	1.315.476.174,00	1.222.029.961,00	92,90%	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	laporan	12	12	100,00%	123.293.932,00	121.389.056,00	98,46%	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	persentase peningkatan sarpas ekonomi kreatif yang di pelihara	%	5	5	100,00%	5.000.000,00	4.200.000,00	84,00%	
PENYEDIAAN PRASARANA (ZONA KREATIF/RUANG KREATIF/KOTA KREATIF) SEBAGAI RUANG BEREKSPRESI, BERPROMOSI DAN BERINTERAKSI BAGI INSAN KREATIF DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase sarpras dalam kondisi baik	%	2	2	100,00%	5.000.000,00	4.200.000,00	84,00%	
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	unit	1	1	100,00%	5.000.000,00	4.200.000,00	84,00%	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif Yg Berkembang	%	6	6,55	109,17%	99.000.000,00	97.757.400,00	98,74%	
PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	presentase ekonomi kreatif dan kelompok sadar wisata yang aktif	%	40	43,75	109,38%	99.000.000,00	97.757.400,00	98,74%	
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang	40	40	100,00	99.000.000,00	97.757.400,00	98,74	

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 3 Februari 2025

15. Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
BELANJA									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	90	90	100,00	5.708.589.959,00	5.598.632.374,00	98,07	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	100	100	100,00	17.627.500,00	16.955.000,00	96,18	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	7	7	100,00	17.627.500,00	16.955.000,00	96,18	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100,00	4.915.053.907,00	4.832.755.686,00	98,33	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang per bulan	574	574	100,00	4.861.808.407,00	4.779.534.078,00	98,31	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	100,00	53.245.500,00	53.221.608,00	99,96	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	%	100	100	100,00	5.000.000,00	4.933.950,00	98,68	
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1	100,00	5.000.000,00	4.933.950,00	98,68	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Diadakan	%	100	0	0,00	250.000,00	0,00	-	Adanya penyesuaian anggaran
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	1	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-	Adanya penyesuaian anggaran
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang	0	0	0,00	0,00	0,00	-	Adanya penyesuaian anggaran



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan 100%	%	100	100	100,00	219.104.623,00	206.509.716,00	94,25	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	4	4	100,00	67.242.350,00	62.782.704,00	93,37	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	4	4	100,00	7.700.000,00	7.545.000,00	97,99	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen	240	240	100,00	1.560.000,00	1.560.000,00	100	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	40	40	100,00	105.972.273,00	105.499.912,00	99,55	
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12	12	100,00	36.630.000,00	29.122.100,00	79,5	Pembayaran Internet sesuai dengan tagihan
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	%	100	100	100,00	158.406.700,00	155.739.500,00	98,32	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	24	24	100,00	158.406.700,00	155.739.500,00	98,32	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan Yang Terpenuhi	%	100	100	100,00	262.592.667,00	254.059.109,00	96,75	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	12	12	100,00	100.895.000,00	93.168.078,00	92,34	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan urusan kantor yang disediakan	laporan	12	12	100,00	161.697.667,00	160.891.031,00	99,5	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpelihara	%	100	100	100,00	130.554.562,00	127.679.413,00	97,8	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	1	1	100,00	36.416.400,00	35.291.506,00	96,91	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	7	7	100,00	27.948.150,00	26.247.907,00	93,92	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	51	51	100,00	39.000.000,00	39.000.000,00	100	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	100,00	27.190.012,00	27.140.000,00	99,82	
Program Pembinaan Perpustakaan	IKM layanan Perpustakaan	Indeks	80	81,55	101,94	276.457.700,00	275.354.600,00	99,6	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
	Persentase peningkatan Perpustakaan yang dibina	%	9	9	100,00				
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang dibina	%	100	100	100,00	171.965.700,00	171.050.800,00	99,47	
Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	perpustakaan	12	12	100,00	29.845.000,00	29.145.000,00	97,65	
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eksemplar	954	1070	112,16	142.120.700,00	141.905.800,00	99,85	
Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sasaran pemasyarakatan perpustakaan	%	100	100	100,00	104.492.000,00	104.303.800,00	99,82	
Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	perpustakaan	3	3	100,00	104.492.000,00	104.303.800,00	99,82	
Program Pengelolaan Arsip	Persentase Peningkatan Arsip yang Dikelola	%	14,55	14,55	100,00	120.814.600,00	116.859.044,00	96,73	
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip sesuai Standart	%	95	95	100,00			-	
Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dikelola	%	100	100	100,00	59.132.500,00	58.712.044,00	99,29	
Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas	20000	20000	100,00	59.132.500	58.712.044	99,29	
Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang dikelola	%	100	100	100,00	15.886.500,00	12.951.400,00	81,52	
Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Berkas	3000	3000	100,00	15.886.500,00	12.951.400,00	81,52	
Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan kearsipan tingkat daerah kab/kota	%	100	100	100,00	45.795.600,00	45.195.600,00	98,69	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	laporan	30	30	100,00	45.795.600,00	45.195.600,00	98,69	

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 4 Februari 2025



Pemerintah Kota Probolinggo

16. Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
BELANJA									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	100	94,24	94	33.481.212.777,00	30.896.360.170,00	92,28	
Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	100	100,00	100	81.595.637,00	80.722.297,00	98,93	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100	73.970.637,00	73.602.297,00	99,50	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	10	100	7.625.000,00	7.120.000,00	93,38	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen	100	100,00	100	18.560.316.347,00	17.945.906.250,00	96,69	
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	147	132	90	18.500.728.947,00	17.886.407.696,00	96,68	
Pelaksanaan Penatausahaan Dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100	45.587.400,00	45.498.554,00	99,81	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	100	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	100	100,00	100	13.000.000,00	0,00	0,00	Waktu proses pelaksanaan penghapusan tidak mencukupi
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	100	13.000.000,00	0,00	0,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen	100	57,56	58	804.478.922,00	615.542.987,00	76,51	harga barang yang dibelanjakan dibawah harga yang rencanakan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	8	100	9.000.000,00	8.025.000,00	89,17	
Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	42	42	100	472.793.539,00	392.988.404,00	83,12	Kegiatan Perjalanan dinas yang sudah diagendakan tidak bisa terlaksana
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	10	0	0	80.000.000,00	0,00	0,00	Tidak ada usulan pegawai yang mengikuti diklat
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	350	186	53	242.685.383,00	214.529.583,00	88,40	Kegiatan Perjalanan dinas yang sudah diagendakan tidak bisa terlaksana
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	100	100,00	100	1.162.757.500,00	1.152.776.523,00	99,14	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	24	100	319.588.300,00	319.210.300,00	99,88	
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	24	100	195.858.200,00	191.835.000,00	97,95	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	647.311.000,00	641.731.223,00	99,14	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100,00	100	1.161.615.000,00	1.155.115.000,00	99,44	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah realisasi kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Kendaraan	4	0	0	0,00	0,00	0,00	Penyesuaian anggaran
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	5	167	135.800.000,00	132.850.000,00	97,83	
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Paket	8	13	163	1.025.815.000,00	1.022.265.000,00	99,65	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	Persen	100	100,00	100	1.706.200.000,00	1.611.597.075,00	94,46	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	1.143.350.000,00	1.067.150.075,00	93,34	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	562.850.000,00	544.447.000,00	96,73	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen	100	100,00	100	2.223.076.294,00	2.130.421.973,00	95,83	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan	14	14	100	395.611.400,00	369.626.569,00	93,43	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan	65	65	100	1.247.850.744,00	1.206.238.804,00	96,67	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel	2	2	100	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	13	108	286.558.000,00	283.405.600,00	98,90	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	342	342	100	273.056.150,00	251.151.000,00	91,98	
Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	73,33	73	912.637.049,00	684.132.988,00	74,96	karena jabatan Wali Kota diisi Penjabat Wali Kota yang berstatus ASN Pusat
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	1	50	39.837.049,00	6.504.008,00	16,33	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	9	9	100	212.800.000,00	107.628.980,00	50,58	Kebutuhan pengadaan pakaian dinas tidak sesuai yang direncanakan
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	0	0	60.000.000,00	0	0,00	Pejabat yang berhak belum berkenan untuk dilakukan medical cek up
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	1	50	600.000.000,00	570.000.000,00	95,00	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan	Persen	100	100,00	100	4.443.481.291,00	3.461.747.508,00	77,91	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	7	7	100	4.236.116.291,00	3.389.736.617,00	80,02	Beberapa belanja tidak dapat direalisasikan dikarenakan kegiatan kepala daerah yang direncanakan tidak sesuai dengan realisasi
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	3	3	100	148.282.500,00	42.214.791,00	28,47	Biaya operasional kebutuhan rumah tangga rendah sehingga beban tagihan menurun
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	3	3	100	59.082.500,00	29.796.100,00	50,43	Biaya operasional kebutuhan rumah tangga rendah sehingga beban tagihan menurun
Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	Persen	100	100,00	100	234.916.455,00	233.522.550,00	99,41	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	15	15	100	196.936.455,00	195.696.550,00	99,37	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	6	6	100	22.340.000,00	22.199.000,00	99,37	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	8	8	100	15.640.000,00	15.627.000,00	99,92	
Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	Persen	100	100,00	100	2.177.138.282,00	1.824.875.019,00	83,82	
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	12	100	1.125.271.282,00	918.032.134,00	81,58	jumlah pegawai non asn yang harusnya terisi semua untuk sekpri asisten dan staf ahli tidak sesuai dengan yang direncanakan
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	12	100	1.051.867.000,00	906.842.885,00	86,21	terdapat beberapa perjalanan dinas yang tidak dihadiri oleh walikota karena berbenturan dengan jadwal kegiatan lainnya
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan di bidang pemerintahan	Persen	100	62,59	63	15.980.433.028,00	15.288.323.774,00	95,67	
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase tata kelola pemerintahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Persen	100	100,00	100	699.678.561,00	635.169.838,00	90,78	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	7	7	100	461.661.061,00	409.261.603,00	88,65	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kegiatan/ dokumen fasilitasi administrasi kewilayahan	Kegiatan	3	3	100	191.000.000,00	180.251.000,00	94,37	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kegiatan/ dokumen fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kegiatan	7	6	86	47.017.500,00	45.657.235,00	97,11	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perumusan kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat yang terfasilitasi	Persen	100	100,00	100	13.800.589.192,00	13.201.896.562,00	95,66	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	8	8	100	2.806.831.500,00	2.768.445.864,00	98,63	
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	5	5	100	10.756.824.840,00	10.198.010.608,00	94,81	
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	2	2	100	236.932.852,00	235.440.090,00	99,37	
Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Persentase Layanan Pemerintahan Bidang Hukum Yang terselesaikan	Persen	100	100,00	100	1.455.665.275,00	1.427.815.374,00	98,09	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Produk Hukum	375	375	100	80.005.800,00	79.755.800,00	99,69	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	65	65	100	1.194.059.050,00	1.166.624.841,00	97,70	
Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Produk Hukum	370	370	100	181.600.425,00	181.434.733,00	99,91	
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase dokumen kerja sama daerah yang difasilitasi	Persen	100	100,00	100	24.500.000,00	23.442.000,00	95,68	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Naskah Kerja Sama Daerah (Dalam Negeri) yang difasilitasi	Naskah Kerjasama	73	73	100	24.500.000,00	23.442.000,00	95,68	
Program Perekonomian Dan Pembangunan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang terfasilitasi	Persen	100	100,00	100	1.284.628.457,00	1.264.799.381,00	98,46	
Koordinasi Sinkronisasi Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	9	9	100	39.034.685,00	38.993.027,00	99,89	
Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	6	8	133	352.488.443,00	345.372.109,00	97,98	
Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	2	2	100	3.152.262,00	3.148.800,00	99,89	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Koordinasi Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	3	3	100	165.023.000,00	159.996.808,00	96,95	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Laporan Pembangunan yang terselesaikan tepat waktu	Persen	100	100,00	100	63.416.340,00	61.805.419,00	97,46	
Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	12	100	63.416.340,00	61.805.419,00	97,46	
Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Persentase layanan pengadaan barang dan jasa yang terselesaikan tepat waktu	Persen	100	98,70	99	351.063.727,00	348.788.630,00	99,35	
Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	40	39	98	61.294.442,00	60.284.003,00	98,35	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	150	148	99	282.397.285,00	281.624.827,00	99,73	
Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	40	40	100	7.372.000,00	6.879.800,00	93,32	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang terfasilitasi	Persen	100	100,00	100	310.450.000,00	306.694.588,00	98,79	
Koordinasi Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	4	4	100	310.450.000,00	306.694.588,00	98,79	

Sumber : Sekretariat Daerah, 4 Februari 2025

17. Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
BELANJA DAERAH						55.252.103.808,00	49.657.778.645,00	89,87%	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	100	27.159.415.244,00	25.908.581.450,00	95,39%	
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persen	100	100	100	134.800.000,00	127.764.750,00	94,78%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	4	100	84.800.000,00	77.809.200,00	91,76%	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja	Laporan	6	6	100	50.000.000,00	49.955.550,00	99,91%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	4.765.927.625,00	4.508.382.723,00	94,60%	
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	39	39	100	4.582.795.354,00	4.353.869.880,00	95,00%	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pelaksanaan Penatausahaan Danrnnpengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1	115.897.852,00	114.185.370,00	98,52%	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	1	67.234.419,00	40.327.473,00	59,98%	Efisiensi mamin rapat dan kendala waktu luang honor narasumber yang terbatas
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	Persen	100	0	0	52.500.000,00	0,00	0,00%	Pelaksanaan penghapusan kendaraan batal dilaksanakan karena pembelian kendaraan Pimpinan dilaksanakan di APBD TA 2025
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	Laporan	1	0	0	52.500.000,00	0,00	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	584.131.479,00	482.968.500,00	82,68%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	3	3	100	206.359.500,00	196.387.500,00	95,17%	
Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan admistrasi kepegawaian	dokumen	5	5	100	5.000.000,00	4.275.000,00	85,50%	
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	20	20	100	372.771.979,00	282.306.000,00	75,73%	Pelaksanaan kegiatan ASDEKSI tidak dapan diikuti dikarenakan bersamaan dengan kegiatan Rapat-Rapat Pembahasan DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	1.194.985.730,00	1.111.446.716,00	93,01%	
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan kantor yang disediakan	paket	10	10	100	190.262.780,00	190.178.600	99,96%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket rumah tangga yang disediakan	paket	15	15	100	102.651.500,00	102.118.800,00	99,48%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	10	10	100	23.760.000,00	23.759.000,00	100,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	5	5	100	124.916.000,00	116.000.000	92,86%	
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen	0	0	0	0,00	0,00	0	Ada penyesuaian anggaran
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	80.025.000,00	79.828.600,00	99,75%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	30	100	461.366.000,00	404.262.376,00	87,62%	
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100	53.544.450,00	52.959.910,00	98,91%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	100	158.460.000,00	142.339.430,00	89,83%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	Persen	100	100	100	784.185.000,00	753.640.000,00	96,10%	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Unit	0	0	0	0,00	0,00	0	Ada penyesuaian penganggaran, dan akan dianggarkan kembali pada tahun 2025
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	0	0	0	0,00	0,00	0	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	15	15	100	58.275.000,00	50.250.000,00	86,23%	
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	71	71	100	725.910.000,00	703.390.000,00	96,90%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	1.993.634.972,00	1.934.323.125,00	97,02%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100	49.962.000,00	46.583.500,00	93,24%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	298.260.000,00	295.241.214,00	98,99%	
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	951.346.000,00	908.532.600,00	95,50%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	694.066.972,00	683.965.811,00	98,54%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	Persen	100	100	100	1.422.726.242,00	1.340.826.917,00	94,24%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	100	148.521.900,00	142.948.123,00	96,25%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	18	100	390.175.972,00	366.401.184	93,91%	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	4	100	20.000.000,00	19.131.000,00	95,66%	
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	37	37	100	364.686.250,00	327.164.912,00	89,71%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	147.082.000,00	144.690.100,00	98,37%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	12	100	352.260.120,00	340.491.598,00	96,66%	
Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan Dprd	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	Persentase	100	100	100	16.132.226.696,00	15.555.427.719,00	96,42%	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Dprd	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	30	30	100	15.757.226.696,00	15.230.139.219,00	96,65%	
Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	120	120	100	330.000.000,00	321.500.000,00	97,42%	
Pelaksanaan Medical Check Up Dprd	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	30	2	6,67	45.000.000,00	3.788.500,00	8,42%	Pelaksanaan kegiatan MCU megikuti kesediaan DPRD, Banyak yg masih enggan terkait dengan kekhawatiran hasil MCU
Layanan Administrasi Dprd	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	Persentase	100	100	100	94.297.500,00	93.801.000,00	99,47%	
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan Dprd	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	1	1	100	1.800.000,00	1.440.000,00	80,00%	Penyesuaian dan efisiensi harga kartu anggota DPRD
Fasilitasi Fraksi Dprd	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	7	7	100	49.997.500,00	49.991.000,00	99,99%	
Fasilitasi Rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	12	100	42.500.000,00	42.370.000,00	99,69%	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	74	85.07	115	28.092.688.564,00	23.749.197.195,00	84,54%	
Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Dprd	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terlaksana	persen	100	100	100	1.563.312.820,00	1.081.581.654,00	69,19%	dengan sudah tidak berlakunya PerGub Jatim No 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Propemperda
Penyusunan Dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	100	256.689.200,00	142.256.908,00	55,42%	Kabupaten/Kota, maka hasil harmonisasi propemperda tidak perlu di asistensi ke Biro Hukum Prov Jatim sehingga anggaran tidak dapat terserap secara maksimal
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	8	8	100	770.559.620,00	595.276.717,00	77,25%	dengan mobilitas tinggi pelaksanaan perjalanan dinas AKD dimana sering terbenturnya jadwal pengharmonisasian dengan giat dimaksud agar tidak terjadi double counting maka penyerapan di ambil pada kegiatan AKD, serta masih adanya beberapa raperda inisiatif yang menunggu proses fasilitasi oleh biro hukum Setda Prov. Jatim
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	1	1	100	104.598.000,00	53.370.000,00	51,02%	dengan pergantian masa jabatan DPRD dari periode lama ke periode baru, maka berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dalam penunjukan atau pendampingan Tenaga ahli dalam setiap kegiatan DPRD
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	1	1	100	325.000.000,00	281.106.629,00	86,49%	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Penyusunan Tata Tertib Dprd	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	1	100	106.466.000,00	9.571.400,00	8,99%	pembahasan perubahan tatib DPRD dilakukan oleh tim perumus tatib dimana karena belum terbentuknya AKD maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan study refrensi ke daerah lain sehingga penyerapan anggaran perdin tidak terserap maksimal
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	100	100	100	484.675.176,00	473.655.357,00	97,73%	
Pembahasan KUA Dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	100	178.358.176,00	175.491.857,00	98,39%	
Pembahasan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	1	100	5.819.000,00	4.050.000,00	69,60%	banyak kegiatan yang di kurangi sehingga terjadi penghematan belanja penggandaan dan MC
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1	100	282.160.000,00	277.463.500,00	98,34%	
Pembahasan Apbd Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	1	100	7.319.000,00	5.850.000,00	79,93%	banyak kegiatan yang di kurangi sehingga terjadi penghematan belanja penggandaan dan MC
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	1	0	0	100.000,00	0,00	0,00%	tidak ada pembahasan lap semester
Pembahasan Pertanggungjawaban Apbd	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1	100	10.919.000,00	10.800.000,00	98,91%	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	persen	100	100	100	275.970.000,00	268.725.000,00	97,37%	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	15	15	100	5.500.000,00	4.500.000,00	81,82%	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	15	15	100	4.500.000,00	4.410.000	98,00%	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	15	15	100	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	15	15	100	4.275.000,00	4.275.000	100,00%	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	15	15	100	3.825.000,00	3.825.000,00	100,00%	
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	1	100	15.420.000,00	11.025.000,00	71,50%	banyak kegiatan yang di kurangi sehingga terjadi penghematan belanja penggandaan dan MC
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	1	100	216.280.000,00	214.605.000,00	99,23%	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	1	100	21.670.000,00	21.585.000,00	99,61%	
Peningkatan Kapasitas Dprd	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100	100	100	2.397.793.800,00	1.346.451.483,00	56,15%	pelaksanaan kegiatan orientasi dilaksanakan oleh BPSDM Prov Jatim, sehingga dalam perencanaan anggaran kami maksimalkan karena kami tidak bisa memprediksi jumlah hari dan nilai kontribusi pelaksanaan orientasi tersebut
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	30	30	100	762.835.800,00	306.070.300	40,12%	
Pendalaman Tugas Dprd	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	90	90	100	1.171.394.000,00	612.306.183	52,27%	dalam pelaksanaan nya masih terdapat beberapa fraksi yang belum sama sekali melaksanakan bimtek karena bersamaan dengan tahun politik dan juga kami tidak bisa memprediksi karena penyelenggara bimtek dimaksud adalah partai politik itu sendiri
Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Ada penyesuaian anggaran
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	7	7	100	252.000.000,00	222.000.000	88,10%	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	0	0	5.165.000,00	0	0,00%	tidak dilaksanakan karena mobilitas kegiatan DPRD yang padat
Penyusunan Program Kerja Dprd	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	1	100	6.399.000,00	6.075.000	94,94%	
Publikasi Dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	40	40	100	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	
Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yg diakomodir	Persen	100	40	100	736.793.700,00	639.515.150,00	86,80%	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Dprd	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	30	30	100	20.000.000,00	19.999.500	100,00%	
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	60	60	100	716.793.700,00	619.515.650	86,43%	
Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik Dprd	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persen	100	100	100	12.470.000,00	7.470.000,00	59,90%	banyak kegiatan yang di kurangi sehingga terjadi penghematan belanja penggandaan dan MC
Penyusunan Kode Etik Dprd	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	1	100	5.000.000,00	0	0,00%	
Pengawasan Kode Etik Dprd	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	1	100	7.470.000,00	7.470.000	100,00%	
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah	Persen	100	0	0	85.828.000,00	0,00	0,00%	Dilaksanakan oleh OPD
Fasilitasi, Verifikasi, Dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	1	0	0	828.000	0	0,00%	
Penyusunan Bahan Komunikasi Dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	1	0	0	85.000.000,00	0	0,00%	dengan pergantian masa jabatan DPRD dari periode lama ke periode baru, maka berpengaruh terhadap penyerapan anggaran



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Fasilitasi Tugas Dprd	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	persen	100	100	100	22.535.845.068,00	19.931.798.551,00	88,44%	
Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	450	487	102	22.503.189.468,00	19.900.748.551	88,44%	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	1	1	100	26.715.600,00	26.550.000	99,38%	
Fasilitasi Tugas Pimpinan Dprd	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12	12	100	5.940.000,00	4.500.000	75,76%	belanja natura yang di anggarkan tidak dapat terserap karena natura sudah teranggarkan di bagian Umum

Sumber : Sekretariat DPRD, 5 Februari 2025

18. Perangkat Daerah : Inspektorat

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
BELANJA DAERAH									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	94	100	106	7.030.595.725	6.775.035.746	96,37	
Keg Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	%	90	87,5	97,2	12.183.400	11.983.589	98,36	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	4	4	100	2.381.500	2.381.500	100	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap	4	4	100	9.801.900	9.602.089	97,96	
Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	%	100	100	100	6.653.726.505	6.463.775.388	97,15	Dari delapan kegiatan, terdapat satu kegiatan yang realisasi kinerjanya kurang dari 90 persen, yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dengan realisasi sebesar 52,94% akibat faktor efisiensi.
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	%	100	87,5	87,5				
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12	100	6.503.130.078	6.318.109.050	97,15	
Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	460	417	90,65	148.916.127	144.286.338	96,89	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	12	100	1.680.300	1.380.000	82,13	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	100	100	100	135.983.320	133.304.512	98,03	
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi	%	100	100	100				
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	12	12	100	35.775.100	33.405.000	93,38	
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	2	2	100	9.750.000	9.700.000	99,49	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12	12	100	15.000.000	14.999.000	99,99	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	100	75.458.220	75.200.512	99,66	
Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	%	100	100	100	121.920.000	64.542.412	52,94	Realisasi anggaran sebesar 52,94% dari total anggaran yang disediakan karena adanya efisiensi, Dengan perincian sebagai berikut: 1. Dari anggaran penyediaan air sebesar Rp1.002.500,00 per bulan, realisasi rata-rata hanya Rp154.250,00 per bulan, mencerminkan efisiensi sebesar 84,61%. Efisiensi ini tercapai melalui pengelolaan penggunaan air yang terkendali, termasuk memeriksa instalasi pipa dan kran untuk mencegah kebocoran. 2. Dari anggaran untuk penyediaan listrik sebesar Rp7.502.500,00 per bulan, realisasi rata-rata hanya Rp3.947.592,67 per bulan, mencerminkan efisiensi sebesar 47,39%. Efisiensi ini dicapai melalui pengendalian daya listrik, penggunaan perangkat hemat energi, dan optimalisasi jam operasional peralatan listrik.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	12	12	100	121.920.000	64.542.412	52,94	
Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	100	100	100	106.782.500	101.429.845	94,99	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	13	13	100	68.754.000	64.606.845	93,97	
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	42	42	100	31.302.500	30.106.000	96,18	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung	1	1	100	6.726.000	6.717.000	99,87	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD dengan hasil evaluasi kinerja minimal memuaskan	%	75	75	100	959.442.500	930.908.203	97,03	
	Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	%	91	94,54	103				
	Persentase penanganan kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100				
Keg Pelaksanaan Pengawasan Internal	Persentase perangkat daerah memperoleh SAKIP Nilai A	%	75	75	100	827.696.300	801.367.103	96,82	Masih terdapat dua perangkat daerah yang mendapat temuan yang bersifat material.
	Persentase perangkat daerah yang telah terbebas dari temuan yang bersifat material	%	91	92,85	98				
	Persentase tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan	%	91	94,54	103				
Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	48	69	144	131.509.800	131.157.006	99,73	
Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	24	30	125	136.051.600	129.612.250	95,27	
Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	48	75	156	299.101.700	295.285.198	98,72	
Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	24	43	179	200.691.700	188.888.300	94,12	
Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100	27.911.000	26.977.000	96,65	
Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi TLHP BPK-RI Dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4	100	32.430.500	29.447.349	90,8	
Keg Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penanganan kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	131.746.200	129.541.100	98,33	masih terdapat tiga perangkat daerah yang berdasarkan hasil pemeriksaan, dikenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mempunyai terkait kerugian daerah	%	100	89,47	89,47				
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	4	4	100	304.000	303.900	99,97	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	24	24	100	131.442.200	129.237.200	98,32	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100	85.072.900	80.185.964	94,26	
Keg Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang maturitas SPIP sampai tingkat "terdefinisi"	%	66	100	152	85.072.900	80.185.964	94,26	
	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	%	64	96,84	135				



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	27	28	103	27.550.000	27.520.914	99,89	
Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	7	7	100	57.522.900	52.665.050	91,55	

Sumber : Inspektorat, 5 Februari 2025

19. Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
BELANJA									
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	95	95	100%	Rp1.340.123.500,00	Rp1.239.883.629,00	92,52%	
Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Tepat Waktu	%	95	95	100%	1.273.511.500	1.177.307.013	92,45%	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	2	100%	98.098.000	90.141.874	91,89%	
Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	4	4	100%	1.175.413.500	1.087.165.139,00	92,49%	
Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Data Dan Informasi Yang Digunakan Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100	100	100%	13.875.000	13.363.402	96,31%	
Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	4	4	100%	13.875.000	13.363.402	96,31%	
Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Laporan Hasil Pengendalian Evaluasi Yang Disusun Secara Tepat Waktu	Persentase	100	100	100%	52.737.000	49.213.214	93,32%	
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah Yang Dikoordinasikan Pelaksanaanya	Kerjasama	1	1	100%	1.575.000	1.575.000	100,00%	
Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen Laporan	4	4	100%	51.162.000	47.638.214	93,11%	
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian Dan SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan Yang Menyusun Dokumen Berkualitas Baik	%	100	100	100%	620.960.250	584.625.460	94,15%	



Pemerintah Kota Probolinggo

Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Prosentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Yang Menyusun Dokumen Berkualitas Baik	Persentase	100	100	100%	324.466.700	289.672.751	89,28%	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Pemerintahan	Laporan	30	30	100%	136.215.000	109.520.392	80,40%	Terdapat 1 Kegiatan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan, Yakni Pemutakhiran Data REGSOSEK Mengundang Narasumber Dari BAPPENAS Dimana Beberapa Belanja Mengakomodir Kegiatan Tersebut. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi : Agenda Tim BAPPENAS Melaksanakan Pemutakhiran Data Pada Kabupaten/Kota Sudah Padat Hingga Minggu III Desember 2024 Sehingga Tidak Memungkinkan Berkunjung Ke Kota Probolinggo, Masih Terdapat Proses Pemadanan Data Yang Belum Kelar Hingga Kedatangan Tim BAPPEDA LITBANG Kota Probolinggo Ke BAPPENAS (Kendala Administrasi Berita Acara Sesuai SOP) Dan Terbatasnya Jumlah Sampling Yang Ditentukan BAPPENAS Dalam Pemutakhiran Data REGSOSEK Di Jawa Timur Dikarenakan Memprioritaskan Kabupaten/Kota Pada Provinsi Wilayah Timur Indonesia).
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	6	100%	188.251.700	180.152.359	95,70%	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam)	Prosentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian Dan SDA Yang Menyusun Dokumen Berkualitas Baik	Persentase	100	100	100%	146.405.050	145.383.112	99,30%	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian	Laporan	6	6	100%	70.367.800	70.077.804	99,59%	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang SDA	Laporan	4	4	100%	76.037.250	75.305.308	99,04%	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Prosentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan Yang Menyusun Dokumen Berkualitas Baik	Persentase	100	100	100%	150.088.500	149.569.597	99,65%	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/Renstra Dengan RKPD/RPJMD Pda Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	100%	79.803.000	79.597.605	99,74%	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/Renstra Dengan RKPD/RPJMD Pda Bidang	Laporan	6	6	100%	70.285.500	69.971.992	99,55%	



Pemerintah Kota Probolinggo

Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Daerah Bidang Kewilayahan	Kewilayahan								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persentase	100	100	100%	76.120.347	76.028.508	100%	
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Program Minimal 80%	Persentase	87	95	109%	38.737.992	38.691.954	99,88%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	5	125%	37.382.355	37.336.554	99,88%	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	5	125%	1.355.637	1.355.400	99,98%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100,31	100%	5.745.815.952	5.674.709.142	98,76%	
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang	61	61	100%	5.640.961.352	5.570.126.646	98,74%	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	2	3	150%	104.854.600	104.582.496	99,74%	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100%	3.314.000	3.298.000	99,52%	
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	1	1	100%	3.314.000	3.298.000	99,52%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	90	25	28%	5.260.000	1.347.850	25,62%	
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Orang	2	0	0%	3.130.000	-	0,00%	Tidak Ada Undangan Diklat Dan Tidak Ada Anggaran Kontribusi Peserta
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	1	50%	2.130.000	1.347.850	63,28%	Undangan Bimtek Hanya 1 (Satu) Kali
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100%	292.040.005	276.942.689	94,83%	
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	5	5	100%	67.275.100	67.067.500	99,69%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	3	3	100%	5.283.800	5.188.500	98,20%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	4	4	100%	12.312.500	11.959.800	97,14%	
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Dokumen	12	12	100%	9.720.000	9.720.000	100,00%	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	6	6	100%	10.000.000	9.922.500	99,23%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Dokumen	12	12	100%	84.103.605	83.529.139	99,32%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada	Dokumen	12	12	100%	103.345.000	89.555.250	86,66%	Efisiensi Anggaran Internet



Pemerintah Kota Probolinggo

Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Skpd	SKPD								
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persentase	100	166,06	166%	159.000.000	145.175.000	91,31%	Peralatan Kantor Dan Rumah Tangga Yang Rusak Cuma Sedikit sehingga realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	4	7	175%	159.000.000	145.175.000	91,31%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan Yang Terpenuhi	Persentase	100	100	100%	411.634.443	410.227.431	99,66%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	124.325.000	123.260.294	99,14%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	287.309.443	286.967.137	99,88%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	Persentase	100	100	100%	240.899.300	231.929.362	96,28%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%	23.964.300	23.701.475	98,90%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perijinannya	Unit	12	12	100%	55.717.500	55.182.279	99,04%	
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	4	4	100%	31.000.000	23.404.000	75,50%	Peralatan Kantor Dan Rumah Tangga Yang Rusak Cuma Sedikit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	1	100%	120.325.000	119.891.608	99,64%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	1	100%	9.892.500	9.750.000	98,56%	
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan Sebagai Referensi Dalam Penyusunan Kebijakan	Persentase	90	90	100%	515.688.300	261.924.100	50,79%	
Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase	90	90	100%	425.579.500	174.336.892,00	40,96%	Kajian 250 Juta Tdk Dilakukan Karena Akan Dilakukan Pada Tahun 2025 Bersamaan Dg Penyusunan RPJMD 2025-2030
Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	3	3	100%	425.579.500	174.336.892,00	40,96%	
Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Persentase Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah	Persentase	93	93	100%	90.108.800	87.587.208,00	97,20%	
Diseminasi Jenis, Prosedur Dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur Dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	5	100%	90.108.800	87.587.208,00	97,20%	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 5 Februari 2025



Pemerintah Kota Probolinggo

20. Perangkat Daerah : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	KEERANGAN
PENDAPATAN						831.043.464.551,00	859.782.809.861,35	103,46	Dana yang ditransfer oleh propinsi Jatim Melebihi SK Gubernur tentang Pagu Pajak Daerah dan Pajak Rokok dan ditransfer sesuai realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pajak Rokok per Triwulan.
PENDAPATAN ASLI DAERAH						73.632.735.320,00	73.422.911.540,35	99,72	Penempatan Bunga Deposito dan retribusi pemakaian kekayaan daerah tidak mencapai target
PENDAPATAN TRANSFER						757.410.729.231,00	786.359.898.321,00	103,82	Dana yang ditransfer oleh propinsi Jatim Melebihi SK Gubernur tentang Pagu Pajak Daerah dan Pajak Rokok dan ditransfer sesuai realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pajak Rokok per Triwulan.
BELANJA									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persentase	97	97	100,00	38.920.442.802,00	35.146.729.357,00	90,30	
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persentase	96	96	100,00	22.006.300,00	21.307.149,00	96,82	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100,00	17.506.300,00	16.934.399,00	96,73	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	7	100,00	4.500.000,00	4.372.750,00	97,17	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persentase	95	95	100,00	35.699.536.222,00	32.086.850.061,00	89,88	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	260	260	100,00	35.546.938.922,00	31.947.909.772,00	89,88	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6132	6132	100,00	126.534.100,00	113.823.289,00	89,95	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	Laporan	33	33	100,00	26.063.200,00	25.117.000,00	96,37	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD sesuai ketentuan	Persentase	94	94	100,00	80.757.000,00	77.974.152,00	96,55	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	KEERANGAN
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	20	100,00	80.757.000,00	77.974.152,00	96,55	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persentase	95	95	100,00	808.880.192,00	753.573.193,00	93,16	
Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	180	180	100,00	747.716.393,00	747.716.393,00	100,00	
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	15	100,00	5.856.800,00	5.856.800,00	100,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	96	96	100,00	1.037.257.151,00	1.037.257.151,00	100,00	
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	60	100,00	224.450.000,00	208.194.000,00	92,76	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7	100,00	60.560.000,00	45.740.000,00	75,53	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	100,00	60.200.000,00	60.119.000,00	99,87	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00	424.887.088,00	417.828.748,00	98,34	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	100,00	325.020.000,00	305.375.403,00	93,96	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangurusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	Persentase	96	96	100,00	192.750.000,00	190.000.000,00	98,57	
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8	100,00	192.750.000,00	190.000.000,00	98,57	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusanpemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persentase	97	97	100,00	451.647.200,00	437.386.214,00	96,84	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	13	13	100,00	413.680.000,00	406.799.214,00	98,34	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	36	100,00	37.967.200,00	30.587.000,00	80,56	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara	Persentase	94	94	100,00	569.748.800,00	560.900.893,00	98,45	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	34	34	100,00	220.498.800,00	218.923.544,00	99,29	
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	235	235	100,00	226.750.000,00	225.731.500,00	99,55	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	69	69	100,00	122.500.000,00	116.245.849,00	94,89	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah Yang Tepat	Persentase	100	100	100,00	4.521.529.627,00	4.521.529.627,00	100,00	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	KEERANGAN
Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	100	100	100,00	1.580.679.932,00	1.580.679.932,00	100,00	
Koordinasi Dan Penyusunan Kua Dan Ppas	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	100,00	648.163.039,00	648.163.039,00	100,00	
Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Kua Dan Dan Perubahan Ppas	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	100,00	52.846.025,00	52.846.025,00	100,00	
Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Apbd	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	100,00	117.923.350,00	117.923.350,00	100,00	
Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tetang Perubahan Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Apbd	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	100,00	743.300.768,00	743.300.768,00	100,00	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	12	12	100,00	18.446.750,00	18.446.750,00	100,00	
Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Penatausahaan dengan Tepat	SKPD	28	28	100,00	820.208.020,00	820.208.020,00	100,00	
Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	2617	2617	100,00	95.641.000,00	93.399.108,00	97,66	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan Spd	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	632	632	100,00	77.305.500,00	77.166.273,00	99,82	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi,Supervisi,Monitoring, dan Evaluasi pengelolaan Dana perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	10	10	100,00	28.570.000,00	28.567.000,00	99,99	
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	2	2	100,00	77.136.000,00	63.506.064,00	82,33	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil rekonsilidasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi	Dokumen	20	20	100,00	16.458.000,00	16.264.650,00	98,83	
Pembinaan Pen Atau Sahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yg Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	Orang	156	156	100,00	555.992.800,00	541.304.925,00	97,36	
Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase	100	100	100,00	377.365.000,00	376.478.454,00	99,77	
Rekonsiliasi Dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendataan, Belanja, Pembiayaan,Pendapatan- Lo Dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO, dan Beban	Dokumen	492	492	100,00	152.686.000,00	152.157.108,00	99,65	
Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban	laporan	17	17	100,00	75.781.500,00	75.547.082,00	99,69	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	KEERANGAN
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan Dan Semesteran	Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran								
Konsolidasi Laporan Keuangan Skpd, BLUD Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	35	35	100,00	59.245.000,00	59.191.700,00	99,91	
Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100,00	44.562.500,00	44.544.900,00	99,96	
Penyusunan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	2	2	100,00	2.000.000,00	1.990.000,00	99,50	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	75	75	100,00	43.090.000,00	43.047.664,00	99,90	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	100	100	100,00	2.087.137.730,00	1.744.163.221,00	83,57	
Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	100	100	100,00	2.087.137.730,00	1.744.163.221,00	83,57	
Program Pengelolaan Barang Milikdaerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah yang Valid dan Akuntabel	Persentase	88	88	100,00	411.940.250,00	409.199.630,00	99,33	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah yang Valid dan Akuntabel	Persentase	88	88	100,00	411.940.250,00	409.199.630,00	99,33	
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	2	100,00	7.225.000,00	7.211.450,00	99,81	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barangmilik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	100,00	6.280.000,00	6.280.000,00	100,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan BMD	Laporan	28	28	100,00	56.698.000,00	56.484.954,00	99,62	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	35	35	100,00	241.454.250,00	240.310.558,00	99,53	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	10	10	100,00	94.483.000,00	93.242.668,00	98,69	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100,00	5.800.000,00	5.670.000,00	97,76	
Program Pengelolaan Pendapatandaerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase	100	100	100,00	1.836.650.805,00	1.747.679.582,00	95,16	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase	100	3	3,00	1.836.650.805,00	1.748.016.600,51	95,17	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	KEERANGAN
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	35	35	100,00	63.062.000,00	63.000.000,00	99,90	
Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	55	55	100,00	573.702.572,00	557.762.559,00	97,22	
Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	2500	2500	100,00	52.874.200,00	51.374.200,00	97,16	
Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang dilakukan pemutakhiran data	Obyek Pajak	3000	3000	100,00	336.847.583,00	305.068.577,00	90,57	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	75000	75000	100,00	38.176.000,00	36.956.120,00	96,80	
Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	14000	14000	100,00	47.910.300,00	46.964.318,00	98,03	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	75000	75000	100,00	507.463.150,00	488.373.808,00	96,24	
Pengendalian, Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	25	25	100,00	216.615.000,00	198.180.000,00	91,49	

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Februari 2025

21. Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
BELANJA									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	84	103,55	103,55	6.056.268.174	5.900.881.350	97,43	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	persentase	100	100	100,00	54.983.000	52.772.250,00	95,98	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	5	100,00	3.218.000	3.183.000	98,91	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	12	100,00	51.765.000	49.589.250	95,8	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persentase	100	184,87	184,87	5.260.055.919	5.133.394.473	97,59	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	43	166	386,05	5.248.694.919	5.124.978.973	97,64	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	450	455	101,11	9.781.000	6.840.500	69,94	Belanja ATK untuk Fotocopy dan Jilid Penggandaan tidak terserap karena tidak ada dokumen Penatausahaan Keuangan berupa SISDUR, SSH, dan ASB yang diterbitkan di Tahun 2024.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	2	2	100,00	1.580.000	1.575.000	99,68	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persentase	100	96,28	96,28	292.135.548	279.403.749	95,64	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	18	13	72,22	56.445.380	49.601.630	87,88	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	15	10	66,67	24.868.100	22.989.500	92,45	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	7	7	100,00	40.105.500	37.771.000	94,18	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	730	720	98,63	4.380.000	4.340.000	99,09	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	100,00	15.000.000	14.217.600	94,78	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	40	29	72,50	85.588.893	84.736.443	99	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12	12	100,00	65.747.675	65.747.576	100	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	persentase	100	100	100,00	126.098.000	125.710.000	99,69	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	14	100,00	126.098.000	125.710.000	99,69	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	persentase	100	96	96	209.547.206	203.088.442	96,92	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	100,00	112.022.500	105.826.046	94,47	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	13	12	92,31	97.524.706	97.262.396	99,73	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	persentase	100	103,17	103,17	113.448.501	106.512.436	93,89	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	100,00	25.472.500	25.284.500	99,26	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	15	15	146,67	36.863.000	35.266.936	95,67	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	109	100	91,74	26.111.070	21.261.000	81,43	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100,00	25.001.931,00	24.700.000	98,79	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Capaian Layanan Kepegawaian	%	95	100,26	105,54	532.725.730,00	365.928.605	68,69	Kegiatan belum bisa terlaksana dikarenakan terdapat pengalihan kewenangan instansi vertikal (dari KASN ke Kementerian Dalam Negeri) sehingga masih dalam proses penyesuaian.
	Persentase Capaian Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	%	77	87,59	113,75				
	Persentase Capaian Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	%	90	129,21	143,57				
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang terselesaikan	persentase	95	95,25	100,26	220.534.730,00	199.575.986	90,5	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	dokumen	2	2	100,00	2.500.000,00	2.500.000	100	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	dokumen	1562	1485	95,07	176.331.330,00	158.528.986	89,9	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	dokumen	135	133	98,52	11.705.900,00	9.050.000	77,31	Terdapat anggaran honor narasumber yang tidak terserap dikarenakan narasumber tidak hadir dalam acara.
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	5	5	100,00	29.997.500,00	29.497.000	98,33	
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan sesuai dengan Syarat Jabatan	persentase	90	116,29	129,21	155.101.602,00	26.381.771	17,01	Kegiatan belum bisa terlaksana dikarenakan terdapat pengalihan kewenangan instansi vertikal (dari KASN ke Kementerian Dalam Negeri) sehingga masih dalam proses penyesuaian.
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	dokumen	1600	1907	119,19	152.967.852,00	24.248.021	15,85	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	dokumen	500	535	107,00	2.133.750,00	2.133.750	100	
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	persentase	90	100	111,11	123.250.100,00	108.036.850	87,66	
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	dokumen	3	3	100,00	123.250.100,00	108.036.850	87,66	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur Sipil Negara yg telah dinilai dan dievaluasi kinerjanya	persentase	97	55,66	57,38	33.839.298,00	31.933.998	94,37	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen	14760	8057	54,59	5.554.498	5.554.498	100	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	orang	250	260	104,00	6.311.800	5.848.000	92,65	
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	orang	106	97	91,51	21.973.000	20.531.500	93,44	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Capaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara	%	65	81,42	125,26	436.311.100	392.506.887	89,96	
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Aparatur Sipil Negara yang	persentase	80	130,22	162,78	183.824.600	157.745.687,00	85,81	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
	mengikuti pengembangan kompetensi teknis								
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	450	586	130,22	183.824.600,00	157.745.687,00	85,81	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Persentase	80	120,00	150	252.486.500,00	234.761.200,00	92,98	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	laporan	5	6	120,00	252.486.500,00	234.761.200,00	92,98	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, 6 Februari 2025

22. Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
BELANJA									
Program Penunjang Urusan Pemerintan Daerah Kabupaten/Kota	Persen Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	97	97	100%	Rp3.813.365.920,00	Rp3.568.082.127,00	93,57	
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	persen	97	97	100%	Rp30.776.100,00	Rp30.500.000,00	99,1	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100%	Rp4.596.000,00	Rp4.596.000,00	100	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Kinerja SKPD	Laporan	8	8	100%	Rp26.180.100,00	Rp25.904.000,00	98,95	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	100	100	100%	Rp3.229.662.441,00	Rp3.022.617.518,00	93,59	
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	23	23	100%	Rp3.152.882.941,00	Rp2.947.070.453,00	93,47	
Pelaksanaan Penatausahaan Danrnnpengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	5	100%	Rp68.007.500,00	Rp67.851.065,00	99,77	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi SKPD	Laporan	5	5	100%	Rp8.772.000,00	Rp7.696.000,00	87,73	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen	95	95	100%	Rp2.487.500,00	Rp2.475.000,00	99,5	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Orang	120	120	100%	Rp2.487.500,00	Rp2.475.000,00	99,5	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Persen	95	95	100%	Rp122.842.810,00	Rp118.960.972,00	96,84	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	6	6	100%	Rp26.095.810,00	Rp25.617.300,00	98,17	
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	4	100%	Rp6.070.000,00	Rp5.410.000,00	89,13	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Laporan	8	8	100%	Rp10.000.000,00	Rp9.593.000,00	95,93	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	120	100%	Rp80.677.000,00	Rp78.340.672,00	97,1	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	Persen	100	100	100%	Rp325.877.019,00	Rp301.677.571,00	92,57	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100%	Rp88.686.737,00	Rp86.645.914,00	97,7	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100%	Rp237.190.282,00	Rp215.031.657,00	90,66	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	Persen	100	100	100%	Rp101.720.050,00	Rp91.851.066,00	90,3	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	Unit	9	9	100%	Rp53.563.800,00	Rp50.197.641,00	93,72	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	100%	Rp22.386.250,00	Rp17.658.425,00	78,88	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	20	100%	Rp15.500.000,00	Rp13.995.000,00	90,29	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	100%	Rp10.270.000,00	Rp10.000.000,00	97,37	
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase Potensi Konflik Sosial yang tidak berkembang menjadi konflik terbuka	Persen	90	90	100%	Rp751.618.000,00	Rp739.147.761,00	98,34	
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase rumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan sesuai ketentuan	Persen	90	90	100%	Rp751.618.000,00	Rp739.147.761,00	98,34	
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	125	125	100%	Rp259.155.000,00	Rp252.488.054,00	97,43	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4	4	100%	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	100	
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	75	75	100%	Rp490.963.000,00	Rp485.159.707,00	98,82	
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Presentase Lembaga Politik yang Mendapatkan Penguatan	Kali	3	3	100%	Rp31.873.263.025,00	Rp31.872.737.839,00	100	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi, Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilukada serta Pemantauan situasi Politik Daerah	Kali	3	3	100%	Rp31.873.263.025,00	Rp31.872.737.839,00	100	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi, Kelembagaan Pemerintah, Pemilu/ Pemilukada serta Pemantauan situasi Politik Daerah	Orang	760	760	100%	Rp31.459.203.025,00	Rp31.459.057.839,00	100	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Pemilu/ Pemilukada serta Pemantauan Sistuasi Politik Daerah	Laporan	8	8	100%	Rp414.060.000,00	Rp413.680.000,00	99,91	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Mendapatkan Penguatan	Kali	3	3	100%	Rp122.160.000,00	Rp121.070.054,00	99,11	
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemsyarakatan sesuai Ketentuan	Kali	3	3	100%	Rp122.160.000,00	Rp121.070.054,00	99,11	
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	180	180	100%	Rp11.270.000,00	Rp10.192.000,00	90,43	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa ormas dan Ormas Asing Daerah	Laporan	8	8	100%	Rp110.890.000,00	Rp110.878.054,00	99,99	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Partisipasi Lembaga dalam Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persen	90	90	100%	Rp877.990.000,00	Rp864.522.554,00	98,47	
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Prosentase perumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya sesuai ketentuan	persen	90	90	100%	Rp877.990.000,00	Rp864.522.554,00	98,47	
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengyat Kepercayaan di Daerah	Orang	75	75	100%	Rp576.490.000,00	Rp576.193.054,00	99,95	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	2	2	100%	Rp301.500.000,00	Rp288.329.500,00	95,63	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Kejadian Terkait Konflik Sosial	Persen	100	100	100%	Rp2.949.791.000,00	Rp2.914.057.608,00	98,79	
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase Potensi Konflik Sosial Masyarakat yang terselesaikan	Persen	100	100	100%	Rp2.949.791.000,00	Rp2.914.057.608,00	98,79	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	650	650	100%	Rp504.721.000,00	Rp502.708.108,00	99,6	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	2	2	100%	Rp17.995.000,00	Rp17.820.000,00	99,03	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	100%	Rp2.427.075.000,00	Rp2.393.529.500,00	98,62	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 4 Februari 2025

23. Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN	-	-	-	-					Target PAD Rp. 15.600.000,- Tahun 2024 tidak mencapai target dikarenakan 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 47 yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai retribusi yang berasal dari perpanjangan ijin memperkerjakan TKA wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-		15.600.000	0	0	2. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/8/PK.04/VI/2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Retribusi



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
									Daerah yang berasal dari pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan, diminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Daerah yang berasal dari pembayaran dana kompensasi pengguna tenaga kerja asing (DKPTKA) atas pengesahan rencana pengguna tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan. 3. Raperda PDRD Kota Probolinggo baru dibahas pada awal Tahun 2022 dan ditetapkan pada bulan Desember 2023. Sehingga baru pada Tahun 2024 ini bisa mengenakan retribusi penggunaan TKA. Namun demikian, karena Ijin tinggal dari TKA PT. Sumber Setia Jaya Abadi berakhir pada tahun 2024 (setelah 5 Tahun/5 kali perpanjangan) maka yang bersangkutan harus memulai ijin baru di Kementerian Ketenagakerjaan RI, sehingga pembayaran DKPTKA menjadi penerimaan Pemerintah Pusat (PNPB).
BELANJA DAERAH									
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	%	100	93,5	93,50	3.801.433.599	3.405.990.122	89,60	
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase sertifikat pelatihan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensinya	%	48	100	208,33	3.801.433.599	3.405.990.122	89,60	
Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan yang dilaksanakan	Orang	48	528	1.100,00	3.632.348.079	3.251.989.947	89,53	Pada Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 67,47 % dikarenakan ada penggantian modul, ATK, tas peserta pelatihan tidak bisa terserap karena paket pelatihan tidak bisa dilaksanakan terkait tempat dan waktu - Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 21,75 % dikarenakan belanja stopmap tidak terserap dengan maksimal - Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 88,82 % dikarenakan pelatihan yang belum dilaksanakan sehingga bahan prakteknya tidak terserap - Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Baner) 18,90 % dikarenakan dalam penyerapan banner



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
									hanya pengadaan banner pembukaan, sedangkan untuk banner kegiatan penutupan tidak terserap - Belanja Kursus Singkat / Pelatihan tidak terserap dikarenakan ketersediaan asessor waktu pelaksanaan uji kompetensi tidak sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan
Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	9	12	133,33	169.085.520	154.000.175	91,08	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	%	99,3	93,5	94,16	98.671.500	98.324.654	99,65	
Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang terlayani pada pelayanan antar kerja	Orang	820	402	49	86.686.500	86.379.554	99,65	
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	25	21	84	86.686.500	86.379.554	99,65	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair	%	80	103	129	11.985.000	11.945.100	99,67	
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang melamar melalui Job Market Fair (JMF)	Orang	1000	129	13	11.985.000	11.945.100	99,67	
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	%	70	51	72	99.175.600	97.695.884	98,51	
	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	%	56	11	19				
Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyatan kerja	%	130	112	86	18.099.800	17.355.000	95,89	
Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang difasilitasi pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Laporan	80	112	140	18.099.800	17.355.000	95,89	
Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama	%	79	79	100	81.075.800	80.340.884	99,09	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka pencegahan hubungan industrial	Perkara	17	49	290	81.075.800	80.340.884	99,09	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	100	124	124	8.417.724.393	5.825.031.154	95,55	
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	100	101	101	31.721.500	29.682.242	93,57	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen	10	12	120	20.721.500	20.706.242	99,93	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen	10	12	120	11.000.000	8.976.000	81,6	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	143	143	7.478.443.894	7.133.899.780	95,39	
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Orang	49	246	502	7.470.864.894	7.126.348.280	95,39	
Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	%	12	174	1.449	5.579.000	5.557.000	99,61	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	12	12	100	2.000.000	1.994.500	99,72	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	450.000	450.000	100	
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	12	12	100	450.000	450.000	100	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	96	96	2.500.000	2.400.000	96	
Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monev dan Penilaian Kinerja yang dilaksanakan	Laporan	12	12	100	2.500.000	2.400.000	96	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	99	99	186.074.319	180.293.910	96,89	
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	31.313.520	30.936.700	87,47	Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor- Pada Rekening Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos terserap 87,47 % dikarenakan Adanya penawaran belanja yang dilakukan oleh PPBJ pada saat transaksi belanja
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Laoran	12	12	100	7.000.000	6.972.500	99,61	
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Laporan	12	12	100	3.120.000	3.120.000	100	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	5.000.000	4.953.000	99,06	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	12	12	100	118.503.299	114.203.299	96,37	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	12	12	100	3.000.000	2.528.000	84,27	adanya penawaran harga pada transaksi E-Katalog sehingga tidak terserap secara maksimal
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	12	12	100	18.137.500	17.580.411	96,93	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	122	122	164.600.000	158.400.000	96,23	
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Laporan	1	3	300	164.600.000	158.400.000	96,23	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	%	100	97	97	343.592.648	336.476.295	97,93	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	78.560.000	72.893.665	92,79	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	265.032.648	263.582.630	99,45	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	100	93	93	210.342.032	201.246.731	95,68	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya serta bbm	Laporan	12	12	100	75.572.032	67.751.081	89,65	Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan terserap 61,09 % dikarenakan menyesuaikan jumlah tagihan pajak kendaraan - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Bermotor Penumpang terserap 72,47 % dikarenakan ada belanja BBM yang baru bisa terserap sesuai dengan pemakaian kendaraan
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Laporan	12	12	100	29.770.000	28.900.000	97,08	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor yang dipelihara	Paket	2	2	100	105.000.000	104.595.650	99,61	
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri yang difasilitasi	%	83	83,00	100	205.099.480	197.233.198	96,16	
Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah RPIK dan RAPERDA	%	80	80	100	205.099.480	197.233.198	96,16	
Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku industri yang meningkat ketrampilannya	Orang	100	100	100	91.658.800	89.694.468	97,86	
Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan fasilitas standarisasi industri	Orang	45	45	100	103.102.700	97.946.730	95,00	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan pembinaan pengembangan usaha	Orang	30	30	100	8.837.980	8.092.000	91,56	
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah laporan capaian kinerja industri yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	1	1	100	1.500.000	1.500.000	100,00	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri yang difasilitasi	%	82	82	100	7.750.000	7.090.000	91,48	
Penerbitan Izin Usaha Industri (Iui), Izin Perluasan Usaha Industri (Ipui), Izin Usaha Kawasan Industri (Iuki) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (Ipki) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase industri yang mematuhi izin usaha industri	%	82	82	100	7.750.000	7.090.000	91,48	
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaan lapangan atas izin usaha industri (IUI) yang diajukan	%	82	82	100	7.750.000	7.090.000	91,48	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Presentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	%	82	82	100	33.065.400	30.151.054	91,19	
Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk Iui, Ipui, Iuki Dan Ipki Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaku industri yang menyampaikan laporan data industri	%	82	82	100	33.065.400	30.151.054	91,19	
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas)	Persentase pelaku industri yang memenuhi kewajiban pelaporan industri	%	82	82	100	33.065.400	30.151.054	91,19	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 6 Februari 2025

24. Perangkat Daerah : Kecamatan Wonoasih

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
PENDAPATAN									-
PENDAPATAN ASLI DAERAH									-
BELANJA									-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	100	9.638.366.951	9.283.957.862	96,32	
Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	100	100	100	23.750.000,00	23.638.000,00	99,53	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100	23.750.000,00	23.638.000,00	99,53	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	9.079.163.159,00	8.737.540.497,00	96,24	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	73	73	100	8.972.758.159,00	8.631.515.609,00	96,20	
Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	12	12	100	106.405.000,00	106.024.888,00	99,64	



Pemerintah Kota Probolinggo

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	4.000.000,00	3.975.000,00	99,38	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100	4.000.000,00	3.975.000,00	99,38	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	6.000.000,00	6.000.000,00	100	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	100	100	100	6.000.000,00	6.000.000,00	100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	150.937.587,00	150.542.779,00	99,74	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100	81.593.000,00	81.416.000,00	99,78	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100	10.000.000,00	9.979.900,00	99,80	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	552	552	100	2.480.000,00	2.330.000,00	93,95	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	2.269.000,00	2.269.000,00	100,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	10	100	54.595.587,00	54.547.879,00	99,91	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	40.100.000,00	35.453.300,00	88,41	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	17	17	100	40.100.000,00	35.453.300,00	88,41	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	%	100	100	100	167.846.812,00	163.584.387,00	97,46	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	72.750.000,00	68.678.525,00	94,40	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	95.096.812,00	94.905.862,00	99,80	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	100	100	100	166.569.393,00	163.223.899,00	97,99	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100	23.271.489,00	22.584.300,00	97,05	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	23	100	66.297.904,00	63.845.599,00	96,30	



Pemerintah Kota Probolinggo

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	100	40.000.000,00	39.795.000,00	99,49	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	37.000.000,00	36.999.000,00	100	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	100	100	100	1.933.956.597,00	1.899.105.723,00	98,20	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan Kategori berkembang	%	100	100	100	1.185.600.000,00	1.182.982.700,00	99,78	
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	100	1.185.600.000,00	1.182.982.700,00	99,78	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan	%	100	100	100	748.356.597,00	716.123.023,00	95,69	
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100	748.356.597,00	716.123.023,00	95,69%	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	%	25	25%	100	481.211.500,00	479.200.652,00	99,58	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Keamanan yang difasilitasi	%	100	100	100	481.211.500,00	479.200.652,00	99,58	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	150	150	100	481.211.500,00	479.200.652,00	99,58	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	95	86,48	91,03	2.361.487.698,00	2.108.256.909,00	89,28	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	90	72,93	81,03	1.659.975.698,00	1.408.385.191,00	84,84	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang diberdayakan	LKK	30	30	100	145.879.100,00	145.879.100,00	100	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	17	6	35,29	297.740.000,00	97.799.441,00	32,85	1. Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kecamatan Wonoasih beberapa kelurahan merealisasikan sebagian unit yang dilaksanakan dikarenakan pada unit/lokasi yang lain Status kepemilikan tanah yang akan dibangun/dipelihara harus bersertifikat dan menjadi aset Pemerintah Kota Probolinggo



Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
									sedangkan dalam hal ini warga masih belum bersedia untuk menyerahkan tanahnya untuk dijadikan Aset Pemerintah Kota Probolinggo. 2. Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dalam hal ini untuk sarana dan prasarana posyandu tidak dilaksanakan dikarenakan pengadaan sarana dan prasarana posyandu telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Probolinggo
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	11	11	100	1.216.356.598,00	1.164.706.650,00	95,75	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi	%	100	100%	100	701.512.000,00	699.871.718,00	99,77	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	LKK	4	4	100	701.512.000,00	699.871.718,00	99,77	

Sumber : Kecamatan Wonoasih, 6 Februari 2025

25. Perangkat Daerah : Kecamatan Kademangan

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
BELANJA DAERAH									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80 persen	%	100	100	100	9.687.419.800	9.568.011.600	98,77	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	100	100	100	4.730.000	4.728.000	99,96	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	7	100	1.555.000	1.554.000	99,94	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	12	100	3.175.000	3.174.000	99,97	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	9.035.361.320	8.946.097.243	99,01	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	75	71	95	8.979.287.181	8.890.026.447	99,01	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	16	16	100	56.074.139	56.070.796	99,99	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	900.000	900.000	100,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	75	71	95	900.000	900.000	100,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	%	100	100	100	5.138.500	5.108.500	99,42	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	2	100	5.138.500	5.108.500	99,42	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	146.984.753	145.517.811	99,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	100	68.123.300	67.735.300	99,43	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	100	6.120.000	6.120.000	100,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	100	2.400.000	2.080.000	86,67	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	100	7.408.443	7.406.000	99,97	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	100	62.933.010	62.176.511	98,80	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	95	95	100	115.000.000	108.144.750	94,04	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	15	6	40	115.000.000	108.144.750	94,04	Karena adanya peraturan baru terkait pengadaan BMD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	%	100	100	100	232.595.227	222.525.481	95,67	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	100	104.400.000	94.399.962	90,42	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	100	128.195.227	128.125.519	99,95	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	100	100	100	146.710.000	134.989.815	92,01	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	100	34.825.000	33.163.016	95,23	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	26	23	88	58.827.500	49.360.569	83,91	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	88	48	55	25.882.500	25.723.000	99,38	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100	27.175.000	26.743.230	98,41	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	IKM	nilai/skor	84,80	97,25	100	2.118.035.226	2.080.615.828	98,23	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	%	100	100	100	1.368.583.054	1.363.339.054	99,62	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	20	20	100	1.368.583.054	1.363.339.054	99,62	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan	%	100	100	100	749.452.172	717.276.774	95,71	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	74.587.000	74.480.262	99,86	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kademangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	74.250.554	69.841.989	94,06	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ketapang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	133.150.216	129.046.887	96,92	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pilang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	99.491.208	93.034.964	93,51	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pohsangit Kidul)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	145.810.670	135.019.744	92,60	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Triwung Kidul)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	111.061.162	108.043.510	97,28	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Triwung Lor)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	111.101.362	107.809.418,00	97,04	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	%	22	22	100	434.160.000	433.394.551	99,82	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Keamanan yang Difasilitasi	%	90	90	100	434.160.000	433.394.551	99,82	
Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	116	120	100	434.160.000	433.394.551	99,82	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	95	95	100	2.506.391.989	2.397.748.945	95,67	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitas	%	100	100	100	814.027.100	803.494.954	98,71	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasya katan	21	21	100	814.027.100	803.494.954	98,71	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di berdayakan	%	100	100	100	1.692.364.889	1.594.253.991	94,20	
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan(Sub Unit Kelurahan Kademangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	5	4	80	30.000.000	30.000.000	100,00	
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Ketapang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	5	3	60	59.837.500	46.948.392	78,46	pengadaan sarana dan prasarana posyandu tidak terealisasi
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Pilang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	5	1	20	45.000.000	44.250.000	98,33	
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Pohsangit Kidul)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	5	3	60	105.750.000	103.382.058	97,76	
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Triwung Kidul)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	5	2	40	122.250.000	110.748.766	90,59	
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Triwung Lor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	5	4	80	4.900.000	4.900.000	100,00	
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Kademangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	7	2	29	300.000.000	283.382.400	94,46	
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Ketapang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	7	2	29	190.162.500	184.409.100	96,97	
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Pilang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	7	3	43	322.599.339	312.775.700	96,95	
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Pohsangit Kidul)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	7	2	29	116.615.550	101.449.850	87,00	
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Triwung Kidul)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	7	2	29	96.150.000	89.203.400	92,78	
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Triwung Lor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	7	4	57	299.100.000	282.804.325	94,55	

Sumber : Kecamatan Kademangan, 6 Februari 2025



Pemerintah Kota Probolinggo

26. Perangkat Daerah : Kecamatan Mayangan

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
BELANJA									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	100	8.181.299.732	7.993.739.960	97,7	
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	100	3.118.000	3.083.000	98,88	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	10	100	3.118.000	Rp 3.083.000	98,88	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	100,00%	7.536.457.070	7.352.167.901	97,55	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	58	58	100,00%	7.431.328.570	7.247.243.927	97,52	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72	72	100,00%	105.128.500	104.923.974	99,81	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	100	135.482.422	135.238.613	99,82	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	100	45.616.117	45.500.300	99,75	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	800	800	100,00%	3.870.000	3.840.000	99,22	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	Rp 10.000.000	Rp 9.982.500	99,83	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	Rp 75.996.305	Rp 75.915.813	99,89	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	100	Rp 44.500.000	Rp 43.725.000	98,26	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8	100	Rp 44.500.000	Rp 43.725.000	98,26	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	100	Rp 252.543.523	Rp 251.848.700	99,72	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	Rp 120.641.000	Rp 120.440.601	99,83	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	Rp 131.902.523	Rp 131.408.099	99,63	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	100	Rp 209.198.717	Rp 207.676.746	99,27	



Pemerintah Kota Probolinggo

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	100	Rp 32.649.723	Rp 32.523.208	99,61	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	100	Rp 54.008.000	Rp 52.677.538	97,54	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30	100	Rp 42.142.000	Rp 42.086.000	99,87	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	Rp 80.398.994	Rp 80.390.000	99,99	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	80	80	100	Rp 1.778.144.222	Rp 1.736.693.996	97,67	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	80	80	100	Rp 1.157.084.222	Rp 1.116.801.900	96,52	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (JATI)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	2	2	100	Rp 5.000.000	Rp 4.993.500	99,87	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (MANGUNHARJO)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	2	2	100	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (WIROBORANG)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	2	2	100	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (SUKABUMI)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	2	2	100	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (MAYANGAN)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	2	2	100,00%	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100,00%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (JATI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10	10	100,00%	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (MANGUNHARJO)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10	10	100,00%	Rp 54.600.000	Rp 50.700.000	92,86%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (WIROBORANG)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10	10	100,00%	Rp 27.500.000	Rp 27.500.000	100,00%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (SUKABUMI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10	10	100,00%	Rp 38.500.000	Rp 35.750.000	92,86%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (MAYANGAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10	10	100,00%	Rp 22.500.000	Rp 22.500.000	100,00%	
Pemberdayaan Masyarakat di (JATI)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	2	100,00%	Rp 199.000.000	Rp 197.125.000	99,06%	
Pemberdayaan Masyarakat di (MANGUNHARJO)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	2	100,00%	Rp 158.900.000	Rp 139.999.300	88,11%	



Pemerintah Kota Probolinggo

	Kelurahan								
Pemberdayaan Masyarakat di (WIROBORANG)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	2	100,00%	Rp 214.500.000	Rp 214.000.000	99,77%	
Pemberdayaan Masyarakat di (SUKABUMI)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	2	100,00%	Rp 217.484.222	Rp 209.284.100	96,23%	
Pemberdayaan Masyarakat di (MAYANGAN)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	2	100,00%	Rp 184.100.000	Rp 179.950.000	97,75%	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	80	80	100,00%	Rp 621.060.000	Rp 619.892.096	99,81%	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN MAYANGAN)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	LKK	6	6	100,00%	Rp 621.060.000	Rp 619.892.096	99,81%	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	84,9	90,5	106,60%	Rp 2.278.973.800	Rp 2.261.999.675	99,26%	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	84,9	90,5	106,60%	Rp 1.538.403.800	Rp 1.538.296.242	99,99%	
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	100,00%	Rp 1.538.403.800	Rp 1.538.296.242	99,99%	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	84,9	90,5	106,60%	Rp 740.570.000	Rp 723.703.433	97,72%	
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100,00%	Rp 21.630.000	Rp 21.618.054	99,94%	
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (JATI)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di WilayahKecamatan	Laporan	12	12	100,00%	Rp 122.812.000	Rp 118.432.600	96,43%	
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (MANGUNHARJO)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100,00%	Rp 185.311.500	Rp 178.682.113	96,42%	
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (WIROBORANG)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100,00%	Rp 113.880.000	Rp 112.178.215	98,51%	
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (SUKABUMI)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di WilayahKecamatan	Laporan	12	12	100,00%	Rp 148.193.000	Rp 146.330.579	98,74%	
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (MAYANGAN)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100,00%	Rp 148.743.500	Rp 146.461.872	98,47%	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	%	26	26	100,00%	Rp 388.736.500	Rp 387.614.554	99,71%	
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Presentase Penurunan Gangguan Keamanan	%	26	26	100,00%	Rp 388.736.500	Rp 387.614.554	99,71%	



Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (KECAMATAN MAYANGAN)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	80	80	100,00%	Rp 388.736.500	Rp 387.614.554	99,71%	

Sumber : Kecamatan Mayangan, 6 Februari 2025

27. Perangkat Daerah : Kecamatan Kedopok

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
BELANJA									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	100	9.575.687.657	9.314.267.995	97,27	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	100	100	100	12.654.000,00	12.460.000	98,47	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	27	27	100	17.125.000,00	12.460.000	72,76	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	8.928.379.180	8.717.992.992	97,64	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	80	66	83	8.133.325.396	8.617.670.276	105,96	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	18	18,00	100	104.180.500	100.322.716	96,30	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Sesuai Ketentuan	%	100	0	0	10.000.000	-	0,00	penyesuaian anggaran(refocusing)
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	0	0	10.000.000	-	0,00	penyesuaian anggaran(refocusing)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	%	0	0	0	-	-	0,00	penyesuaian anggaran(tidak ada anggaran dari awal)
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	-	-	0,00	penyesuaian anggaran(tidak ada anggaran dari awal)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	152.774.205	148.114.126	96,95	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	100	60.449.200	44.690.600	73,93	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100	9.997.500	9.398.000	94,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Dokumen	1	1	100	3.240.000	3.220.000	99,38	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
	Disediakan								
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2	17	38.000.000	35.381.500	93,11	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	14	47	58.195.010	45.315.526	77,87	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	%	100	7	7	49.000.000	64.690.000	132,02	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	15	0	0	66.300.000	64.690.000	97,57	Penyesuaian anggaran
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	7	47	20.000.000	64.690.000	323,45	
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	%	100	100	80	301.981.530	274.602.812	90,93	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	12	50	113.500.000	81.335.193	71,66	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	17	14	82	188.481.530	193.267.619	102,54	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	100	100	98	130.898.742	96.408.065	73,65	
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	19	21	111	84.947.642	66.312.862	78,06	
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	8	100	25.951.100	9.264.203	35,70	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	42	42	100	20.000.000	20.831.000	104,16	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	0	0	34.265.000	-	0,00	penyesuaian annggaran(refocusing)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	83	86	104	1.911.054.000	1.217.002.818	63,68	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan Kategori Berkembang	%	100	100	100	1.049.842.000	1.031.747.254	98,28	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	100	1.049.842.000	1.031.747.254	98,28	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan	%	97	97	100	861.212.000	185.255.564	21,51	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100	60.612.000	40.588.108	66,96	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sumber Wetan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Laporan	12	12	100	190.604.000	191.644.853	100,55	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
	Wilayah Kecamatan								
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedopok)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100	130.654.000	124.061.809	94,95	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jrebeng Lor)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100	110.084.000	106.795.634	97,01	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jrebeng Wetan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100	110.612.000	108.512.153	98,10	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kareng Lor)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100	109.380.000	101.503.635	92,80	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jrebeng Kulon)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100	171.266.000	167.094.937	97,56	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	%	82	100	122	410.770.000	410.726.868	99,99	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Keamanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	410.770.000	410.726.868	99,99	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	122	122	100	410.770.000	410.726.868	99,99	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	100	86	86	2.274.518.948	892.371.743	39,23	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitasi	Lembaga	80	80	100	791.505.200	783.623.993	99,00	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	12	12	100	801.005.200	783.623.993	97,83	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok dan lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang diberdayakan	%	80	70	88	1.483.013.748	182.419.650	12,30	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kel. Sumber Wetan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	5	5	100	25.000.000	22.813.400	91,25	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	LKK	5	4	80	25.000.000	14.308.900	57,24	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Kelurahan (Kel. Kedopok)	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kel. Jrebeng Lor)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	5	3	60	25.000.000	12.739.600	50,96	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kel. Jrebeng Wetan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	5	3	60	25.000.000	6.300.000	25,20	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kel. Kareng Lor)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	5	5	100	25.000.000	8.115.000	32,46	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kel. Jrebeng Kulon)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	5	5	100	25.000.000	9.395.000	37,58	
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Sumber Wetan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	7	3	43	177.500.000	115.003.750	64,79	
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Kedopok)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	5	2	40	152.500.000	188.248.980	123,44	
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Jrebeng Lor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	5	2	40	140.000.000	67.500.000	48,21	
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Jrebeng Wetan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	4	6	150	152.500.000	146.900.000	96,33	
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Kareng Lor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	6	6	100	155.000.000	144.102.750	92,97	
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Jrebeng Kulon)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	5	3	60	185.000.000	184.799.750	99,89	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Sub unit Kelurahan Sumber Wetan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	3	100	22.500.000	22.500.000	100,00	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Kedopok)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	3	50	47.500.000	47.500.000	100,00	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Jrebeng Lor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	0	0	60.000.000	-	0,00	tidak diserap dikarenakan titik lokasi telah dikerjakan oleh Dinas PUPR setelah diganti titik lokasi Pokmas tidak sanggup untuk mengerjakan karena keterbatasan waktu
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Jrebeng Wetan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	3	50	47.500.000	57.500.000	121,05	



Pemerintah Kota Probolinggo

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	ANGGARAN	REALISASI	%	Keterangan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Kareng Lor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	3	50	45.000.000	45.000.000	100,00	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Jrebeng Kulon)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	2	200	15.000.000	15.000.000	100,00	

Sumber : Kecamatan Kedopok, 6 Februari 2025

28. Perangkat Daerah : Kecamatan Kanigaran

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
BELANJA DAERAH									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	84,5	80,25	94,97	2.417.627.500	2.378.525.802	98,38	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan kategori berkembang	persen	100	100	100	1.744.060.000	1.741.379.708	99,85	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	5	5	100	1.744.060.000	1.741.379.708	99,85	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan	persen	95	95	100	673.567.500	637.146.094	94,59	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	61.084.000	61.023.398	99,90	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kanigaran)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	123.218.000	118.681.579	96,32	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Curahgrinting)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	104.408.000	91.336.053	87,48	Dikarenakan kelebihan anggaran pada belanja rutinitas kantor
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kebonsari Wetan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	124.098.000	119.164.161	96,02	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sukoharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	83.838.000	79.400.725	94,71	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tisnonegaran)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	64.500.000	60.308.128	93,50	



Pemerintah Kota Probolinggo

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kebonsari Kulon)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	112.421.500	107.232.050	95,38	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	persen	30	30	100	451.238.000	447.641.366	99,20	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Keamanan yang difasilitasi	persen	88	88	100	451.238.000	447.641.366	99,20	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	124	124	100	451.238.000	447.641.366	99,20	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	persen	99	99	100	9.869.874.278	9.670.396.816	97,98	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	persen	100	100	100	9.500.000	9.490.000	99,89	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	7	100	9.500.000	9.490.000	99,89	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persen	95	95	100	9.297.723.298	9.127.317.016	98,17	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	73	73	100	9.231.233.798	9.060.875.408	98,15	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	100	66.489.500	66.441.608	99,93	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	dokumen	100	100	100	103.288.999	101.475.128	98,24	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	7	7	100	52.000.000	50.295.850	96,72	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	100	3.692.999	3.675.000	99,51	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	24	24	100	4.680.000	4.670.000	99,79	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	100	7.000.000	6.929.000	98,99	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	20	20	100	35.916.000	35.905.278	99,97	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	persen	100	100	100	33.100.000	30.945.000	93,49	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	1	100	33.100.000	30.945.000	93,49	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	persen	100	100	100	289.796.880	273.175.549	94,26	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	100	164.670.000	148.378.594	90,11	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	laporan	12	12	100	125.126.880	124.796.955	99,74	



Pemerintah Kota Probolinggo

	Umum Kantor yang Disediakan								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	persen	100	100	100	136.465.101	127.994.123	93,79	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	100	26.885.500	25.865.808	96,21	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	27	27	100	44.579.601	38.377.691	86,09%	Bahwa pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan hanya mencapai realisasi 86,09% hal ini dikarenakan pada saat awal penganggaran kami memperkirakan adanya kenaikan pajak.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	52	52	100	15.000.000	14.350.000	95,67%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100	50.000.000	49.400.624	98,80%	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	persen	88	88	100	2.221.176.104	2.166.803.100	97,55%	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi	persen	95	95	100	823.605.104	822.874.600	99,91%	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga kemasya- katan	10	10	100	823.605.104	822.874.600	99,91%	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga yang diberdayakan	persen	100	100	100	1.397.571.000	1.343.928.500	96,16%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kanigaran)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	5	4	80	30.000.000	30.000.000	100,00%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukoharjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	2	100	15.000.000	15.000.000	100,00%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tisnonegaran)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	1	50	42.460.000	15.000.000	35,33%	Terdapat penolakan warga dikarenakan Perencanaan pekerjaan di DPA hanya 71 meter sedangkan yg di butuhkan saluran sepanjang 300 meter
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kebonsari Wetan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	3	1	33,33	7.500.000	7.500.000	100,00%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kebonsari Kulon)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	3	3	100	73.726.500	69.240.000	93,91%	



Pemerintah Kota Probolinggo

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Curahgrinting)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	3	3	100	44.106.000	44.106.000	100,00%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kanigaran)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	2	2	100	195.000.000	193.584.000	99,27%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukoharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	2	2	100	210.000.000	200.830.000	95,63%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tisnonegaran)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	2	2	100	208.605.000	207.705.000	99,57%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kebonsari Wetan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	3	3	100	209.900.000	205.750.000	98,02%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kebonsari Kulon)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	3	3	100,00	151.273.500	149.473.500	98,81%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Curahgrinting)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	3	3	100	210.000.000	205.740.000	97,97%	

Sumber : Kecamatan Kanigaran, 6 Februari 2025

Tabel 2. 2 Data Kinerja Anggaran 2023 – 2024

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2024			Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%		
1	PENDAPATAN DAERAH	932.272.450.324,00	968.433.112.167,29	103,88	964.190.898.946,00	992.700.935.100,29	102,96	24.267.822.933,00	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	198.177.764.901,00	209.779.956.402,29	105,85	206.780.169.715,00	206.341.036.779,29	99,79	-3.438.919.623,00	-1.68
1.1.1.	Pajak Daerah	60.429.219.278,00	56.636.986.040,36	93,72	60.341.856.147,00	63.360.763.657,57	105,00	6.723.777.617,21	11.87
1.1.2	Retribusi Daerah	14.138.419.314,00	12.202.736.808,00	86,31	16.832.371.420,00	20.581.563.691,00	122,27	8.378.826.883,00	68.66
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.470.762.667,00	1.421.600.239,43	96,66	1.609.872.868,00	1.539.068.149,53	95,60	117.467.910,10	8.26
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	122.139.363.642,00	139.518.633.314,50	114,23	127.996.069.280,00	120.859.641.281,19	94,42	-18.658.992.033,31	-13.43



Pemerintah Kota Probolinggo

1.2	PENDAPATAN TRANSFER	734.094.685.423,00	758.653.155.765,00	103,35	757.410.729.231,00	786.359.898.321,00	103,82	27.706.742.556,00	3.65
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	629.054.548.242,00	634.206.402.044,00	100,82	652.863.816.731,00	672.344.864.121,00	102,98	38.138.462.077,00	05.01
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.040.137.181,00	124.446.753.721,00	118,48	104.546.912.500,00	114.015.034.200,00	109,06	-10.431.719.521,00	21.12
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	0,00	0,00			0	0,00
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	932.272.450.324,00	968.433.112.167,29	103,88				0	
2	BELANJA DAERAH							0	0,00
2.1	BELANJA OPERASI	975.602.043.240,00	902.709.536.086,63	92,53	1.014.932.587.287,00	961.988.446.135,99	94,78	0	6.57
2.1.1	Belanja Pegawai	460.762.284.121,00	437.510.461.343,00	94,95	496.046.067.248,00	482.680.530.154,99	97,31	45.170.068.811,99	10.32
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	449.364.462.031,00	404.026.544.251,90	89,91	422.193.195.492,00	385.430.948.232,01	91,29	-18.595.596.019,89	-4.60
2.1.2004	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2.1.2005	Belanja Hibah	63.432.761.588,00	59.789.919.852,73	94,26	96.456.424.547,00	93.723.268.208,45	97,13	33.933.348.355,72	56.69
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	2.042.535.500,00	1.382.610.639,00	67,69	236.900.000,00	191.159.000,00	80,69	-1.191.451.639,00	-86.17
2.2	BELANJA MODAL	131.272.831.046,00	112.290.783.286,00	85,54	82.622.886.044,00	75.418.956.796,94	91,22	-36.871.826.489,06	-32.88
2.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.035.958.252,00	48.060.266.778,00	90,62	42.412.410.459,00	38.597.721.026,00	91,01	-9.462.545.752,00	-19.69
2.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.139.486.054,00	40.561.483.076,00	87,91	18.960.283.463,00	16.393.751.764,94	86,21	-24.167.731.311,06	-59.70
2.2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.594.401.224,00	21.310.177.902,00	72,01	19.024.796.622,00	18.229.916.560,00	95,82	-3.080.261.342,00	-14.45
2.2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.452.985.516,00	2.310.043.280,00	98,23	2.075.395.500,00	2.050.139.196,00	98,78	-259.904.084,00	-9.00
2.2.2005	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	48812250,00	50,59	150.000.000,00	147.428.250,00	98,29	98.616.000,00	39.02
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.728.519.883,00	1.894.671.500,00	19,48	2.087.137.730,00	1.744.163.221,00	83,57	-150.508.279,00	-7.94
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	9.728.519.883,00	1.894.671.500,00	19,48	2.087.137.730,00	1.744.163.221,00	83,57	-150.508.279,00	-7.94
2.4	BELANJA TRANSFER	-	-	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.116.603.394.169,00	1.016.894.990.872,63	91,07	1.099.642.611.061,00	1.039.189.025.613,39	94,49	22.294.034.740,76	2.18
	SURPLUS / (DEFISIT)	-184.330.943.845,00	-48.461.878.705,34	26,29	-135.451.712.115,00	-46.488.090.513,10	34,32	1.973.788.192,24	-4.07
3	PEMBIAYAAN DAERAH							0	0,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	184.330.943.845,00	183.913.590.820,35	99,77	135.451.712.115	135.451.712.115,01	100,00	-48.461.878.705,34	-26.35
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	184.330.943.845,00	183.913.590.820,35	99,77	135.451.712.115,00	135.451.712.115,01	100,00	-48.461.878.705,34	-26.35
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	0,00				0	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	0,00	0	0	0	0	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	0,00	0	0	0	0	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	184.330.943.845,00	183.913.590.820,35	99,77	135.451.712.115	135.451.712.115,01	100,00	-48.461.878.705,34	-26.35
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	135.451.712.115,01	0,00	0,00	88.963.621.601,91	0	-46.488.090.513,10	-34.32

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 17 Februari 2025



- Pendapatan Daerah yang bersumber pada Pajak Daerah melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 105% dan meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 11,87% dikarenakan adanya pengawasan dan penertiban bersama dengan JPN namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala diantaranya kurangnya personil untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak sehingga diharapkan adanya penambahan jumlah personil yang dapat melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak untuk tahun-tahun berikutnya
- Pendapatan Daerah yang bersumber pada Retribusi Daerah juga mengalami peningkatan dikarenakan telah dibukanya/beroperasinya RSUD Ar Rozy pada tahun 2024 namun masih ada kendala dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber pada retribusi daerah yaitu kurangnya sarana dan prasarana pada tempat-tempat rekreasi sehingga kurang menarik perhatian pengunjung selain itu juga kurangnya kesadaran Penghuni Rusunawa dalam Membayar Sewa Rusun. Sehingga Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memberikan sosialisasi kepada para pelaku wisata untuk memberikan arahan terkait penambahan Sarana dan prasarana di tempat rekreasi serta melalui DPUPR PKP untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan kesadaran kepada penghuni rusunawa terkait biaya retribusi sewa rusun yang harus dipenuhi.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami Peningkatan PAD sebesar 8,26% dari tahun 2023 sesuai dengan Laporan Keuangan PUDAM Bayuangga
- Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah yang bersumber pada Pendapatan Lain-lain yang sah capaian pada tahun 2024 sebesar 94,42% atau menurun dari tahun 2023 sebanyak 13,43% dikarenakan Pembayaran BPJS pada bulan Desember 2024 hanya satu kali dan terdapat penurunan pendapatan bunga sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan BPJS agar pencairan BPJS dapat diberikan secara teratur dan melakukan optimalisasi manajemen kas Pemerintah Kota Probolinggo.
- Untuk Capaian Pendapatan Transfer sebesar 102,98% dari target. Hal ini dipengaruhi oleh penerimaan negara yang kemudian dibagikan sebagai dana bagi hasil untuk beberapa objek pendapatan
- Untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah, hal ini dipengaruhi oleh Kerjasama atau semacam perjanjian antar daerah untuk memberikan bantuan kepada daerah lain
- Belanja Pegawai mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan adanya pengisian kekosongan jabatan struktural pada beberapa Dinas.
- Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 385.430.948.232,01 dan Rp 404.026.544.251,90 atau mengalami penurunan sebesar Rp18.595.596.019,89 dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya efisiensi nilai anggaran pada tahun 2024.



- Belanja hibah tahun 2024 mengalami peningkatan daripada tahun 2023 yang merupakan belanja hibah barang kepada Pemerintah Pusat, belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, belanja hibah Dana BOS, belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik., dan belanja hibah Dana BOSP
- Penggunaan dana Bantuan Sosial tahun 2024 adalah untuk bantuan sosial uang dan barang yang direncanakan kepada individu. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu meliputi pengembangan kapasitas nelayan kecil, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Belanja Bansos pada tahun 2024 mengalami penurunan di tahun 2024 dikarenakan terdapat banyak Bantuan Sosial yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang penyalurannya langsung kepada penerima dan tidak melalui skema APBD Kota Probolinggo
- Pada Tahun 2024, Belanja Modal di Kota Probolinggo lebih kecil daripada tahun 2023, hal tersebut sesuai dengan perencanaan APBD Tahun 2024 dan Belanja Modal bukan menjadi konsern utama pembangunan di Kota Probolinggo
- Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang dianggarkan untuk kejadian atau peristiwa yang tidak bisa diprediksi seperti Bencana Alam, jadi untuk penganggaran juga dilakukan mengacu tahun sebelumnya dan untuk realisasi tidak bisa dipastikan apakah itu mencapai target atau tidak. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang tidak pasti dan tidak bisa diprediksi untuk realisasinya
- Untuk Penerimaan Pembiayaan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya mengalami penurunan dikarenakan optimalisasi penyerapan dana-dana khusus/dana yang telah ditentukan penggunaannya berdampak pada menurunnya SILPA.



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 yaitu hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Untuk hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Permendagri 19 Tahun 2024 meliputi:

- a. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan
- b. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya
- c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Probolinggo Tahun 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan unsur penunjang urusan pemerintahan. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 menetapkan 8 (delapan) indikator tujuan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 22 (dua puluh dua) indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD). Target Indikator Kinerja dimaksud ditetapkan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2024.

3.1.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021, terdapat 6 IKU sebagai gambaran pencapaian misi pembangunan Kota Probolinggo sebagaimana tabel 3.1

Tabel 3. 1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2023	2024		
			REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,04	4-5	5,15	114,44%
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76,93	74,47	77,79	104,46%
3.	Persentase Penduduk Miskin	%	6,48	7,3	6,18	115.34%
4.	Indeks Infrastruktur	Indeks	75,53	77,28	74,66	96,61%



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2023	2024		
			REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	61,69	65,19	58,17	89,23%
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,13	73	85,85	117,6%

Sumber: Data Diolah Diskominfo, 2025

Capaian 6 (enam) Indikator Kinerja Utama / IKU yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 pada tahun 2024 rata – rata telah di atas 85% bahkan 4 indikator telah melebihi target sedangkan Dua indikator yang tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan adalah Indeks Infrastruktur dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Menurut data BPS Kota Probolinggo Tahun 2024 secara umum terjadi laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Meskipun begitu ternyata ada beberapa kategori lapangan usaha yang mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan tertinggi selama 2024 dicapai oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,66%, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 8,27%, selanjutnya penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,64%. Adapun yang mengalami penurunan paling besar adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang berkontraksi sebesar 3,87%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan iklim dengan terjadinya fenomena El Nino selama tahun 2024 sehingga mempengaruhi besarnya produksi pertanian.

2. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia di Kota Probolinggo terus mengalami kemajuan. Selama 2020–2024, IPM Kota Probolinggo rata-rata meningkat sebesar 1,32 persen per tahun, dari 74,81 pada tahun 2020 menjadi 77,79 pada tahun 2024. Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh seluruh dimensi penyusunnya, terutama dimensi pengetahuan. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,82 persen.

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020-2024, UHH telah meningkat sebesar 0,79 tahun. Pada tahun 2020, UHH Kota Probolinggo adalah 73,52 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 74,31 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,21 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024, memiliki harapan hidup selama 74,31 tahun.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. HLS tahun 2024 sebesar 13,98 tahun, meningkat 0,25 tahun dari tahun sebelumnya. Artinya, rata-rata penduduk Kota Probolinggo usia 7 tahun memiliki peluang



untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D2. Sementara RLS tahun 2024 sebesar 9,72 tahun, meningkat 0,16 tahun dari tahun sebelumnya. Artinya rata-rata penduduk Kota Probolinggo usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I).

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Kota Probolinggo mencapai 13.405 ribu Rupiah per tahun. Capaian ini meningkat 406 ribu Rupiah dari tahun sebelumnya.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan Kota Probolinggo diantaranya :

- a. Pendidikan gratis; Pemerintah Daerah menggratiskan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawabnya. Dengan adanya Pendidikan gratis ini diharapkan tidak ada lagi anak sekolah yang putus sekolah karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan, sehingga angka rata-rata lama sekolah meningkat;
- b. Pemberian seragam gratis
- c. Beasiswa dan/atau bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan Penghargaan hafidz/hafidzah
- d. Pendidikan kesetaraan (Kejar Paket A, Paket B dan Paket C); Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi kewenangan dinas pendidikan sesuai kewenangan masing-masing memperbanyak penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B dan Paket C bagi masyarakat yang putus sekolah;
- e. Sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Mengingat bahwa faktor penyebab putus sekolah tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga faktor perhatian orangtua, budaya, kurangnya minat bersekolah, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendidikan, dan sebagainya, maka upaya sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan;
- f. Penambahan jumlah guru; Pemerintah Daerah melakukan penambahan jumlah guru dengan cara pengadaan guru, baik PNS maupun Non-PNS, sesuai dengan kebutuhannya.
- g. Pelatihan dan sertifikasi guru:
- h. Pemberian tambahan tunjangan guru/tenaga pendidik: Pemerintah memberi tambahan tunjangan bagi guru, baik guru PNS terlebih lagi bagi guru non-PNS.
- i. Dari sisi sarana/prasarana pendidikan: melengkapi dan membangun sarana/prasara pendidikan guna mendekatkan akses pendidikan bagi masyarakat, dilakukan dengan kegiatan Merehabilitasi dan melengkapi sarana/prasarana sekolah, Pemerintah Daerah melakukan perbaikan atau rehabilitasi sekolah-sekolah dan melengkapi sarana/prasarana



belajar. Banyak sekolah-sekolah yang dalam kondisi rusak dan kurang layak untuk digunakan dalam proses belajar-mengajar, dan tak jarang beberapa sekolah tidak dapat melaksanakan proses belajar-mengajar pada waktu-waktu tertentu seperti musim hujan misalnya dimana sekolah bocor, banjir dan khawatir ada yang ambruk, dan sebagainya;

- j. Pengembangan Perpustakaan Keliling (Pusling) sejak 2019 keliling ke sekolah
- k. POCADI - pojok baca digital - scan barcode buku digital di perpustakaan
- l. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Pembangunan Rumah Sakit Baru (Ar Rozy) Dan Sarana Prasarana Pendukung Dan Tenaga Medis-non Medis Untuk Mendukung Operasional Ar Rozy Termasuk Ambulans Siaga Di 29 Kelurahan Ditambah Dengan 6 Ambulans Darurat Jantung Yang Dilengkapi Alat Automatic External Defibrilator (AED).
- m. Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Fasilitas Kesehatan melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan Pengembangan Aplikasi Go PMB (Praktek Mandiri Bidan dan Profil terkini Siskia Pro Cantik (aplikasi KIA untuk Ibu hamil). Tenaga Kesehatan yang sudah terorientasi Kegawatdaruratan pada Maternal sehingga ketika menemukan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas dapat langsung tertangani dengan baik. Peningkatan pengetahuan ibu hamil, keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan kelas ibu hamil mengenai faktor-faktor resiko dan komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas sehingga pengambilan keputusan tidak terlambat. Rujukan kegawatdaruratan pada ibu hamil, bersalin dan nifas dapat langsung mengakses sehingga komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas dapat tertangani dengan baik.
- n. Terlaksananya Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui BPJS memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi warga dan Penyediaan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Tahun 2023 Cakupan Universal Health Coverage (UHC) Mencapai 100 Persen Dari Jumlah Masyarakat Kota Probolinggo
- o. BPJS ketenagakerjaan bagi guru ngaji/guru sekolah minggu/ pasraman, dan klenteng
- p. Pemberian makanan tambahan pada kegiatan posyandu,
- q. Kegiatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui kegiatan sambang PAUD, sambang Posyandu
- r. Pelayanan kesehatan menggunakan kendaraan reaksi cepat - mobil kecil dan motor untuk menjangkau area tertentu yang terintegrasi dengan Call Center 112

3. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Berbagai program diluncurkan untuk mengurangi beban hidup penduduk miskin dan dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin yang merupakan target utama pemerintah, selain mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Program-program pengentasan kemiskinan antara lain program beras



bersubsidi untuk rumah tangga miskin, Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, jaminan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan modal usaha dan sebagainya.

Nilai realisasi pada tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dengan target 2024, yakni 7,3 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan yang ditargetkan, sebesar 0,3 persen. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 15,86 ribu jiwa dan pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 15,24 ribu jiwa. Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 telah berkurang sebanyak 620 jiwa dibandingkan dengan Jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo pada tahun 2023. Masalah kemiskinan, sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Namun ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Upaya kebijakan pembangunan terutama yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty Gap Index merupakan ukuran rata - rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai P1 pada tahun 2020 sebesar 1,19 kemudian mengalami fluktuasi turun menjadi 0,90 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai P1 naik kembali menjadi 1,04 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan P1 menjadi 0,98.

Indeks Keparahannya Kemiskinan/Poverty Severity Index merupakan tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di suatu wilayah. Nilai P2 pada tahun 2020 sebesar 0,28 mengalami penurunan menjadi 0,17 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai P2 kembali meningkat menjadi 0,23 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan P2 menjadi 0,24. Hingga pada tahun 2024 turun menjadi 0,21.

4. INDEKS INFRASTRUKTUR

Target Indeks Infrastruktur Kota Probolinggo tahun 2024 adalah sebesar 77,28 dengan realisasi sebesar 74,66 sehingga capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 96,61% (kategori sangat tinggi). Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,87 dari tahun 2023 yang sebesar 75,53.

Penurunan realisasi Indeks Infrastruktur disebabkan oleh penurunan realisasi persentase ketersediaan infrastruktur sebagai salah satu pembentuk Indeks Infrastruktur dari 77 pada tahun 2023 menjadi 74,98 pada tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 2,02. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya peningkatan akses dan kualitas infrastruktur guna meningkatkan capaian di tahun mendatang seperti peningkatan



pemenuhan layanan dasar (air minum, sanitasi) serta pemerataan penyediaan layanan ke seluruh wilayah.

5. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Realisasi capaian IKLH untuk tahun 2024 sebesar 58.17 dari target sebesar 65,19 atau tercapai sebesar 89.23%, dengan kriteria kualitas "Sedang". Perhitungan IKLH tahun 2024 dilakukan oleh sistem aplikasi dari IKLH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Capaian IKLH Tahun 2024 mengalami penurunan dari capaian tahun 2023 yaitu sebesar 61.69

Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak dapat mencapai target dikarenakan untuk Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan indeks Kualitas Lahan (IKL) tidak dapat mencapai target. Berdasar dari hasil perhitungan, Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Probolinggo tahun 2024 memiliki nilai sebesar 41,43 yang berada pada kategori dengan entitas "tercemar sedang", dimana untuk kategori kurang ini skornya adalah antara $25 \leq x \leq 50$. Pengujian Kualitas Air dilakukan sebanyak 14 (empat belas) data hasil uji diperoleh data rata-rata air sungai tercemar sedang oleh nitrat dan Fecal Coli. Adapun IKL Kota Probolinggo tahun 2024 tidak dapat mencapai target dikarenakan sebagian RTH yang ada tidak didominasi tutupan vegetasi pepohonan dengan tinggi minimal 2 meter, serta memiliki kerapatan yang kurang sehingga pada saat dilaksanakan verifikasi dengan menggunakan system Geographic Information System (GIS) tutupan lahan tidak dapat terdeteksi sehingga usulan tutupan lahan tidak terverifikasi.

Solusi atau upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul antara lain:

- Melakukan koordinasi yang intensif antar OPD terkait guna mengurangi pencemaran air sungai;
- Melakukan upaya pemulihan lingkungan secara periodik seperti melaksanakan sosialisasi terhadap pelaku usaha, pemasangan trashbum, memperbanyak aksi cleanup.
- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan mengeluarkan asap;
- Melakukan sosialisasi tidak membakar sampah atau limbah padat lainnya
- Perlu dilakukan penambahan Luas Lahan baru untuk Hutan Kota, RTH, kawasan lindung RTH RT/RW;
- Melaksanakan kegiatan Reboisasi sehingga memiliki Tutupan Vegetasi yang memiliki nilai kerapatan yang cukup baik agar kedepannya dapat menambah Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)

6. INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan Pelayanan Publik. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya



rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarki dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat. Dalam hal peningkatan efisiensi anggaran dan pelaksanaan reformasi birokrasi misalnya, bisa dilihat dari indeks reformasi birokrasi.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 85,85 (angka sementara) sehingga tercapai 117,6%. Namun selama 2024, terdapat beberapa kendala yang dialami diantaranya :

- 1. Terdapat Sasaran Kegiatan Utama yang belum dikawal dengan Rencana Aksi secara relevan;
- 2. Masih terdapat Indikator Output atas Rencana Aksi yang belum cukup menggambarkan Sasaran;
- 3. Terdapat target Sasaran Kegiatan Utama yang belum dikawal dalam target Output Rencana Aksi;
- 4. Rencana Aksi belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai.

Demi menjaga kualitas dan meningkatkan indeks reformasi birokrasi tersebut diperlukan perbaikan – perbaikan pada hal-hal di bawah ini, dengan catatan sebagai berikut:

- 1. Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama;
- 2. Memastikan seluruh indikator Output atas Rencana Aksi cukup menggambarkan Sasaran;
- 3. Melakukan reviu agar target atas Output didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama;
- 4. Melakukan reviu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi.

3.1.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 telah ditetapkan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Daerah (berupa indikator sasaran). Dari 22 IKD Kota Probolinggo, 3 IKD belum dapat disajikan capaian tahun 2024 baik karena belum adanya rilis oleh BPS maupun karena masih dalam proses penghitungan oleh Pemerintah Pusat. Capaian 14 indikator lainnya rata-rata telah 90% bahkan melampaui target. Namu nada beberapa indikator yang masih rendah capaiannya yaitu Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi dan Indeks Kualitas Lahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3. 2 Realisasi Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	2023	2024		
			KONDISI AWAL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	0,42	0,41	0,09	21,95%
2.	Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan	%	5,43	6,3	4,82	76,5%
3.	Persentase Pertumbuhan PDRB Perindustrian	%	6,72	2,3	3,92	170,43%
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,53	5,17	4,44	114,12%



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	2023	2024		
			KONDISI AWAL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Persentase PMKS	%	46,28	33	43,46	131,70%
6.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	81,2	85	81,4	95,76%
7	Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban	%	1,46	2	2	100%
8	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	68,74	68,45	N/A	N/A
9	Indeks Pendidikan	Indeks	0,7	0,7	0,71	101,43%
10	Indeks Kesehatan	Indeks	0,83	0,79	0,84	106,33%
11	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	%	77	80,05	74,98	93,66%
12	Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik	%	74,07	74,5	74,34	99,79%
13	Indeks Kualitas Air	Indeks	50	51,5	41,43	80,45%
14	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,64	90,6	90,74	100,15%
15	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	26,36	41,7	26,66	63,93%
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	97,72	111	94,33	115%
17	Nilai SAKIP	Skor	73,25	82	71,91	87,70%
18	Nilai LPPD	Skor	N/A	3,27	N/A	N/A
19	Indeks SPBE	Indeks	3,1	3,6	4,04	112,22%
20	Opini BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	N/A	N/A
21	Indeks Profesionalitas Aparatur	Indeks	64,04	65	78,02	120,03%
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,41	84,25	86,57	102,75%

Sumber: Data Diolah Diskominfo, 2025

1. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Persentase realisasi pertumbuhan nilai investasi Kota Probolinggo 2024 sebesar 0,09% dengan target sebesar 0,41%. Capaian pertumbuhan nilai investasi sebesar 21,95% dengan nilai investasi sebesar Rp 18.054.544.299.111,00. Dibandingkan dengan tahun 2023, nilai investasi tahun 2024 bertambah sebesar Rp 1.505.080.045.532,00. Pertambahan nilai investasi 2024 terbesar berasal dari investasi Penanaman Modal Asing pada sektor perindustrian yaitu sebesar Rp 75.200.000.000,00.

Dalam rangka peningkatan investasi di Kota Probolinggo, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain dengan memberikan kemudahan perizinan, sosialisasi, bimtek, dan pendampingan kepada para pelaku usaha. memberikan kemudahan perizinan dan promosi online dan offline (mengikuti Kegiatan).

Namun, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo tersebut, capaian pertumbuhan nilai investasi 2024 tidak dapat memenuhi target. Beberapa faktor penyebabnya antara lain :

- Tahun 2024 merupakan Tahun Politik PEMILU 2024 sehingga berdampak kepada para investor untuk berinvestasi (wait and see)
- Terbatasnya ketersediaan lahan di Kota Probolinggo (luas wilayah) yang sesuai untuk peruntukan pengembangan industri



Adapun solusi maupun upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo adalah dengan mengembangkan sistem promosi investasi berbasis teknologi serta memberikan insentif kemudahan untuk berinvestasi di Kota Probolinggo kepada investor.

2. **Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan**

Dalam pelaporan kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang meliputi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,82% dengan capaian sebesar 76,51% atau turun 0,61% dibandingkan tahun 2023. Salah satu penyebab adalah daya beli masyarakat yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Selama kurun waktu 5 tahun lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian Kota Probolinggo. Kontribusi kategori ini mencapai 4.028,61 milyar rupiah atau sekitar 26,20% terhadap PDRB Kota Probolinggo pada tahun 2024. Secara umum, laju pertumbuhan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berfluktuasi selama periode 2018-2024. Laju pertumbuhan sebesar 6,57 persen di tahun 2018 naik menjadi 6,93 persen di tahun 2019, kemudian mengalami kontraksi ekonomi sebesar 5,74 persen pada 2020, dan relatif stabil di angka 6,08 pada 2022. Selanjutnya di tahun 2023 mengalami kontraksi yaitu 5,43 % dan terkonsentrasi kembali di tahun 2024 sebesar 4,82 %.

Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan Pertumbuhan PDRB Perdagangan melalui :

- Peningkatan penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana perdagangan sesuai standard guna menjamin stabilitas daerah;
- Pengembangan kapasitas SDM pelaku usaha dalam mendukung peningkatan nilai ekspor daerah;
- Peningkatan daya saing produk unggulan usaha mikro.

Dalam mendukung strategi dan arahan kebijakan tersebut, program dan kegiatan yang dilakukan antara lain :

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Pemeliharaan Bangunan Gedung Pasar, Pujasera dan Sentra PKL & UMKM demi Peningkatan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;
- Koordinasi dan Sosialisasi dalam Rangka Pembinaan dan Pengendalian PKL Baik di Pujasera maupun Sentra;
- Revitalisasi Pasar dan Pelayanan UPT Pasar.
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah;
- Pengendalian Inflasi Daerah melalui Operasi Pasar dan Warung TPID;
- Koordinasi dan Sosialisasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi;
- Monitoring Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.
- Program Pengembangan Ekspor



- Koordinasi dan Sosialisasi Dalam Rangka Pengembangan Ekspor Produk Unggulan Daerah;
- Monitoring Data Industri/Potensi Ekspor.
- Mengikuti Misi Dagang dan Pameran bagi Pelaku Usaha Skala Ekspor Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP;
- Pengawasan UTTP dan BDKT;
- Verifikasi Standart Ukur Metrologi Legal;
- Sosialisasi Metrologi Legal Dalam Rangka Hari Konsumen Nasional.

3. Persentase Pertumbuhan PDRB Perindustrian

Dalam pelaporan kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,92% yang berarti terjadi penurunan 2,8% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Di kategori industri ini ada 16 sub kategori, ada beberapa sub kategori yang mengalami peningkatan sehingga mendongkrak pertumbuhan kategori industri. Beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan industri yaitu banyaknya momen pameran IKM lewat ajang SEMIPRO, refleksi kepemimpinan walikota dan event-event lain yang mendorong pelaku IKM agar terdongkraknya produksinya. Namun pada sub kategori industri kayu dan tekstil mengalami penurunan produksi sehingga secara umum pertumbuhan sektor lapangan usaha industri pengolahan mengalami perlambatan dibandingkan 2023.

Dalam rangka meningkatkan persentase pertumbuhan PDRB kategori perindustrian di Kota Probolinggo, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain :

- Penguatan Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha dengan memberikan kemudahan pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko;
- Digitalisasi dan Transformasi Industri 4.0 dengan mendorong adopsi teknologi digital dan otomasi dalam industri pengolahan, serta mengembangkan ekosistem inovasi melalui inkubator bisnis dan klinik IKM;
- Penguatan SDM dan Ketenagakerjaan dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan berbasis industri;
- Peningkatan Daya Saing Produk dengan memberikan fasilitasi branding kemasan dan sertifikasi produk;
- Mendorong industri untuk fokus pada hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah produk dan mengembangkan industri berbasis bahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan impor ;
- Mendorong pelaksanaan industri hijau yang ramah lingkungan.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tren tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, Pada tahun 2023 yakni 4,53 dan tahun 2024 menjadi 4,44 persen. Semakin besar persentase TPT



(Tingkat Pengangguran Terbuka), maka semakin besar jumlah pengangguran yang ada. Nilai realisasi tahun 2024 (4,44 persen) sudah lebih rendah dari target yang ditentukan yakni 5,17 dengan nilai capaian 114,12%. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat pengangguran terbuka sudah menurun dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan indikator yang menunjukkan peningkatan kesempatan kerja. Akan tetapi perlu dilihat lagi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka TPT tersebut. Beberapa program kegiatan telah dilaksanakan Pemerintah Kota Probolinggo, antara lain:

- Kegiatan Job Market Fair. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja melalui JOB MARKET FAIR, yang bertujuan untuk mempertemukan perusahaan dan pencari kerja dalam proses penempatan tenaga kerja;
- Millenial Job Center, berupa kegiatan sosialisasi kepada Pelajar dan Mahasiswa, MJC sebagai wadah pertukaran informasi dan jaringan di antara klien, mentor dan talent, yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem freelance yang kompetitif dan kondusif;
- Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dalam upaya peningkatan keterampilan dan kompetensi pencari kerja telah dilaksanakan pelatihan dalam satu tahun sebanyak 56 pelatihan.
- Beberapa penyebab timbulnya pengangguran di Kota Probolinggo menurut RPJMD 2019-2024, yakni diindikasikan bersumber dari banyaknya lulusan SMK baru yang tidak tertampung di lapangan kerja yang tersedia dikarenakan keterbatasan lapangan kerja yang ada di Kota Probolinggo serta ketidaksesuaian kompetensi ataupun spesifikasi tenaga kerja dengan lapangan kerja yang ada.

5. Persentase PMKS

Dari target RPJMD yang telah ditetapkan yaitu sebesar 33 persen, persentase PMKS terealisasi sebesar 43,46 persen. Pemerintah Kota Probolinggo sudah mampu menurunkan persentase PMKS sebesar 2,82 persen dari tahun 2023. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya penanganan dan pemberdayaan sosial. Namun, angka tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun program-program intervensi telah menunjukkan hasil positif, tetapi masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Optimalisasi strategi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta alokasi sumber daya yang lebih efektif menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian target penurunan PMKS sesuai dengan RPJMD.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menurunkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bersumber dari 3 pendanaan antara lain :

- Bantuan APBD berupa penyaluran bantuan sosial sembako bagi fakir miskin, anak yatim/piatu/yatim piatu, eks napi, rantang sehat lansia, bantuan alat bantu disabilitas dan



lansia, bantuan peralatan usaha bagi fakir miskin, bantuan langsung tunai dbhcht bagi PMKS dan stunting;

- Bantuan Provinsi berupa bantuan peralatan usaha bagi wanita rawan sosial ekonomi, bantuan peralatan usaha bagi kelompok usaha bersama, bantuan pasang listrik;
- Bantuan APBN berupa bantuan peralatan usaha, alat bantu disabilitas dan lansia dari UPT. sentra paramita mataram, BPNT, PKH, PENA.
- Kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam mendukung program penanganan PMKS menjadi kendala dalam upaya penanganan dan pemberdayaan sosial. Adapun solusi maupun upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo untuk mengatasi hal tersebut adalah :
- Evaluasi efektivitas program sosial yang sudah berjalan dan lakukan penyesuaian jika diperlukan;
- Libatkan dunia usaha melalui program CSR yang mendukung pemberdayaan PMKS;
- Gunakan data untuk menentukan intervensi yang lebih tepat sasaran.

6. Skor Pola Pangan Harapan

Realisasi skor PPH Konsumsi Tahun 2024 adalah 81,4 belum mencapai target RPJMD yaitu 85, sehingga capaiannya adalah 95,76 persen. Dari capaian tersebut konsumsi padi-padian, minyak dan lemak telah mencapai standar maksimal. Sedangkan konsumsi umbi - umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah masih di bawah skor maksimal. Diharapkan konsumsi umbi-umbian dapat ditingkatkan sebagai pengganti konsumsi padi-padian. Umbi-umbian masih memberi sumbangan energi yang kecil. Hal ini menjadi tugas dari Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo untuk lebih mensosialisasikan konsumsi umbi-umbian yang merupakan pangan lokal. Skor konsumsi pangan hewani masih di bawah skor maksimal sehingga diharapkan produksi pangan hewani dapat dipacu lebih banyak lagi dan harga ditekan lebih rendah sehingga terjangkau oleh masyarakat. Diperlukan juga upaya diversifikasi pangan hewani dari sumber-sumber lain yang belum diupayakan secara maksimal seperti budidaya kelinci, bebek, burung puyuh dan lain - lain. Dengan garis pantai hampir 12 km, maka Kota Probolinggo adalah penghasil ikan. Dengan sosialisasi gemar makan ikan, diharapkan konsumsi ikan masyarakat dapat bertambah. Skor Konsumsi kacang-kacangan juga belum mencapai skor yang diharapkan, hanya memperoleh skor 7,8 dari skor maksimal yang diharapkan yaitu 10,0. Sehingga tetap diperlukan langkah-langkah agar konsumsi kacang-kacangan tetap stabil sepanjang tahun dengan penyediaan produksi yang mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga dapat menekan harga. Edukasi kepada masyarakat tetap harus terus dilakukan tentang manfaat kacang-kacangan sebagai salah satu sumber zat gizi yang diperlukan tubuh antara lain sebagai sumber asam lemak esensial dan sebagai sumber mikro mineral penting lainnya. Skor sayur dan buah juga masih di bawah skor maksimal. Peningkatan konsumsi sayur dan buah harus menjadi prioritas utama kegiatan di semua dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas



Kesehatan P2KB , Sekolah Dasar dan Menengah karena sayur dan buah sumber mineral dan vitamin yang merupakan zat gizi mikro yang sangat diperlukan oleh tubuh. Sejak usia balita, anak harus dibiasakan mengkonsumsi buah dan sayur agar tumbuh kembang dan kesehatan anak menjadi normal.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) diperoleh pengeluaran rata-rata perkapita sebulan suatu wilayah baik pengeluaran makanan maupun non makanan. Pengeluaran rata - rata per kapita per bulan di Kota Probolinggo di kelompok makanan sebanyak 39,69 persen dan pengeluaran terbesar kelompok makanan adalah kelompok makanan/minuman jadi sebesar 14,86 persen sehingga pangan yang dikonsumsi masyarakat cenderung tidak beragam bergizi seimbang dan aman.

Adapun solusi maupun upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Peningkatan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman (B2SA) melalui sosialisasi, pelatihan olahan, kampanye makan B2SA, Lomba Cipta Menu Olahan B2SA, demo memasak B2SA dengan pelibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat, pihak swasta, akademisi, pemerintahan;

- Pelatihan Olahan Pangan Lokal B2SA dengan peserta dari Kelompok Wanita Tani/kader PKK;
- Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA dengan peserta dari Kelompok Wanita Tani/kader PKK;
- Edukasi B2SA dengan peserta perwakilan siswa;
- Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan;
- Pelatihan hidroponik sebagai bagian dari pertanian perkotaan (urban farming);
- Pelatihan budidaya tanaman pangan (padi organik) dan pasca panen;
- Sekolah Lapang (SL) Budidaya Lele;
- Pelayanan posyandu ternak berupa : pemberian vitamin, vaksinasi PMK, pemberian obat cacing, pengobatan penyakit, penanganan gangguan reproduksi, pemeriksaan kebuntingan dan penyuluhan peternakan untuk menjaga populasi ternak, mengurangi potensi terserang penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan hewan.

7. **Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban**

Realisasi persentase penurunan kasus ketenteraman dan ketertiban tahun 2024 sama dengan target yang ditentukan . Hal ini menunjukkan bahwa capaian persentase penurunan kasus ketenteraman dan ketertiban adalah sebesar 100 persen. Dari jumlah pelanggaran perda dan perkara untuk tahun 2023 sebesar 203 kasus, turun menjadi 199 tahun 2024, disebabkan oleh banyaknya langkah yang telah diambil guna mengurangi kasus pelanggar seperti peningkatan pemahaman masyarakat akan Perda Perkada.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam penurunan kasus trantibum antara lain :



- a. Peningkatan Kewaspadaan aparat Satpol PP, TNI/Polri dalam mengawasi dan menangani pelanggaran ketertiban umum;
- b. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ketertiban dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari melalui media massa, online platform digital;
- c. Mengajak masyarakat untuk aktif dalam menjaga ketertiban di lingkungan mereka melalui berbagai forum, seperti pos keamanan lingkungan (poskamling);
- d. Pemerintah Kota Probolinggo sudah menyusun Perda Perkada yang mendukung terciptanya ketertiban umum;
- e. Melaksanakan pengawasan dengan Deteksi dan cegah dini melalui kegiatan patroli;
- f. Melaksanakan kolaborasi dengan jajaran samping TNI/Polri dengan melaksanakan operasi gabungan.

Walaupun telah mencapai target namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dalam upaya penurunan kasus ketentraman dan ketertiban yaitu :

- a. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam penataan PKL;
- b. Kurangnya SDM dalam penegakan Perda Perkada (anggota PPNS);
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan bersama.

Untuk menurunkan kasus Trantibum (ketertiban umum dan ketentraman masyarakat), ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak terkait. Beberapa solusi yang bisa diterapkan adalah :

- a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi dan Edukasi akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan;
- b. Memberikan pelatihan bagi petugas aparat terkait untuk dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan tertib;
- c. Memberikan tindakan tegas kepada pelanggar guna memberikan efek jera bagi pelanggar;
- d. Adanya penerapan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran;
- e. Pengaturan kawasan publik, seperti pasar, ruang terbuka, dan jalan-jalan utama;
- f. Pengawasan yang lebih ketat bisa mencegah gangguan ketertiban;
- g. Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Ketertiban misalnya, lampu jalan yang cukup, fasilitas parkir yang memadai, serta trotoar yang aman untuk pejalan kaki akan mengurangi gangguan ketertiban dan meningkatkan kenyamanan masyarakat;
- h. Menghidupkan kembali keamanan lingkungan siskamling serta peran Tokoh Masyarakat dan agama berperan penting dalam memberi contoh yang baik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban

8. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks pemberdayaan gender (IDG) disusun berdasarkan tiga komponen yaitu keterwakilan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan teknisi, dan sumbangan pendapatan. Indeks pemberdayaan gender (IDG) digunakan untuk



mengukur keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, persamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Berdasarkan data realisasi Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2024 belum rilis.

Adapun solusi maupun upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengoptimalan pengarusutamaan gender pada lembaga swasta;
- b. Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG).

9. Indeks Pendidikan

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indeks pendidikan Kota Probolinggo Tahun 2024 sudah melampaui target menjadi 0,71. Indeks pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. HLS tahun 2024 sebesar 13,98 tahun, meningkat 0,25 tahun dari tahun sebelumnya. Artinya, rata-rata penduduk Kota Probolinggo usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D2. Sementara RLS tahun 2024 sebesar 9,72 tahun, meningkat 0,16 tahun dari tahun sebelumnya. Artinya rata-rata penduduk Kota Probolinggo usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I)

Pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo melakukan upaya dalam rangka peningkatan indeks pendidikan diantaranya :

- Membentuk ULD (Unit Layanan Disabilitas) untuk pendampingan anak2 disabilitas dan kelas inklusi;
- Membentuk Gas PRO CETAR PERKASA yaitu mendirikan Satuan Tugas Kota Probolinggo Cegah dan Tangani Perundungan dan Kekerasan pada Pendidikan yaitu untuk mencegah dan menanggulangi perundungan serta kekerasan di sekolah-sekolah Kota Probolinggo;
- Pendidikan gratis; Pemerintah Daerah menggratiskan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawabnya. Dengan adanya Pendidikan gratis ini diharapkan tidak ada lagi anak sekolah yang putus sekolah karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan, sehingga angka rata-rata lama sekolah meningkat;
- Pemberian seragam gratis;
- Penghargaan hafidz/hafidzah;
- Pendidikan kesetaraan (Kejar Paket A, Paket B dan Paket C); Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi kewenangan dinas pendidikan sesuai kewenangan masing-masing memperbanyak penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B dan Paket C bagi masyarakat yang putus sekolah;
- Sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat.(PPDB).Penerimaan Peserta Didik Baru. Mengingat bahwa faktor penyebab putus sekolah tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi



juga faktor perhatian orangtua, budaya, kurangnya minat bersekolah, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendidikan, dan sebagainya, maka upaya sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan;

- Penambahan jumlah guru; Pemerintah Daerah melakukan penambahan jumlah guru dengan cara pengadaan guru, baik PNS maupun Non-PNS, sesuai dengan kebutuhannya;
- Pelatihan dan sertifikasi guru;
- Pemberian tambahan tunjangan guru/tenaga pendidik: Pemerintah memberi tambahan tunjangan bagi guru, baik guru PNS terlebih lagi bagi guru non-PNS.
- Dari sisi sarana/prasarana pendidikan: melengkapi dan membangun sarana/prasara pendidikan guna mendekatkan akses pendidikan bagi masyarakat, dilakukan dengan kegiatan Merehabilitasi dan melengkapi sarana/prasarana sekolah, Pemerintah Daerah melakukan perbaikan atau rehabilitasi sekolah-sekolah dan melengkapi sarana/prasarana belajar. Banyak sekolah-sekolah yang dalam kondisi rusak dan kurang layak untuk digunakan dalam proses belajar-mengajar, dan tak jarang beberapa sekolah tidak dapat melaksanakan proses belajar-mengajar pada waktu-waktu tertentu seperti musim hujan misalnya dimana sekolah bocor, banjir dan khawatir ada yang ambruk, dan sebagainya;
- Pengembangan Perpustakaan Keliling (Pusling) sejak 2019 keliling ke sekolah;
- POCADI - pojok baca digital - scan barcode buku digital di perpustakaan.

10. Indeks Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi pembangunan manusia. Manusia yang sehat merupakan prasyarat untuk mewujudkan people centered development. Mengingat peran sangat penting kesehatan dalam pembangunan manusia serta dalam upaya mewujudkan people centered development, maka investasi sumber daya manusia melalui kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan siklus hidup (lifecycle approach), yang dimulai sejak sebelum bayi itu lahir sampai dengan tumbuh menjadi calon generasi yang sehat. Status kesehatan memberikan suatu kemampuan kepada seseorang untuk menjadi lebih produktif, dan dengan demikian mempunyai daya saing dalam pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak. Kesehatan yang rendah tidak akan memberikan sumbangan terhadap produktivitas dan daya saing sebagai pekerja. Jika peningkatan kualitas penduduk diabaikan, besar kemungkinan penduduk yang produktif menjadi tidak produktif, bahkan menjadi beban. Bahkan beban ini semakin besar, jika yang benar-benar produktif hanya sebagian kecil dari kelompok usia produktif. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, maka akan berdampak pada kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan kesehatan bukan semata membangun fasilitas kesehatan, namun perlu diiringi dengan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan. Kualitas kesehatan yang baik tidak hanya ditunjang oleh ketersediaan pendanaan yang memadai, namun juga oleh ketersediaan sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas.



Indeks Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2024 telah mencapai target sebesar 0,84 dengan capaian 106,33%. Indeks Kesehatan tersebut diukur dari indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup (UHH) mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Umur Harapan Hidup tinggi akan dicapai jika penduduk mempunyai derajat kesehatan yang baik. Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Probolinggo, dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Umur Harapan Hidup tahun 2020 sebesar 73,52 tahun dan meningkat menjadi 74,31 tahun pada tahun 2024. Peningkatan indikator ini menunjukkan bahwa setiap tahun derajat kesehatan penduduk Kota Probolinggo meningkat.

Berikut beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan capaian indeks kesehatan, yaitu:

1. Peningkatan fungsi Puskesmas dalam pelayanan kesehatan dasar, pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan (Community Involment dan Empowerment) dan pelibatan multistakeholder;
2. Percepatan akreditasi Rumah Sakit baik pemerintah maupun swasta, peningkatan peran Rumah sakit dalam penurunan Kematian Maternal dan Perinatal;
3. Pemenuhan pemenuhan SDM Kesehatan di Rumah sakit dan puskesmas sesuai standar, khususnya untuk pemenuhan program prioritas;
4. Penguatan perencanaan obat, penguatan e-catalog, penjaminan ketersediaan obat esensial education penggunaan obat rasional;
5. Peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait faktor risiko penyakit Tidak menular dan peningkatan skrining dan deteksi dini penyakit tidak menular di FKTP dan jejaringnya;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan kerja di dalam gedung maupun di luar gedung dengan menerapkan protokol kesehatan;
7. Peningkatan kualitas pelayanan Regulasi dan Sertifikasi Bidang Kesehatan dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan berfokus pada keselamatan pasien, kebutuhan masyarakat maupun stakeholder serta menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Dukungan dari pihak legislatif agar program dan sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo dapat diselenggarakan dengan baik dan terarah;
9. Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengawasan, khususnya berkenaan dengan kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan seperti : Puskesmas, Puskesmas pembantu, dan peralatan kesehatan dan peralatan pendukungnya;
10. Perlu diupayakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi program secara terpadu dengan instansi terkait, sehingga prioritas dan kontinuitas kegiatan dapat terlaksana dengan baik;



11. Antisipasi serta persiapan peningkatan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana alam secara cepat dan tepat;
12. Kerjasama dengan lintas sektor, LSM, kelompok masyarakat dan institusi non pemerintah lain dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Probolinggo.

11. Persentase Ketersediaan Infrastruktur

Target Persentase Ketersediaan Infrastruktur Kota Probolinggo tahun 2024 adalah sebesar 80,05% dengan realisasi sebesar 74,98% sehingga capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 93,67% (kategori sangat tinggi). Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,02% dari tahun 2023 yang sebesar 77%.

Ditinjau dari komponen penyusun Persentase Ketersediaan Infrastruktur, terdapat beberapa indikator yang belum melampaui target yaitu:

a. Prosentase sampah masuk TPA

Prosentase sampah masuk TPA dengan capaian 72.44%. Hal tersebut disebabkan terdapat perubahan metode penghitungan berupa perubahan koefisien timbulan sampah yang sebelumnya menggunakan 0,4 menjadi 0,5

b. Prosentase penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah

Prosentase penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah dengan capaian 60.95%. Hal tersebut disebabkan terdapat perubahan metode penghitungan berupa perubahan koefisien timbulan sampah yang sebelumnya menggunakan 0,4 menjadi 0,5

c. Prosentase Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan (UU No. 22 Tahun 2009)

Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan dengan capaian 68.37%. Pada tahun 2024 banyak kendaraan khususnya angkutan barang yang masih proses penyesuaian dimensi kendaraan terkait penerapan regulasi zero odol dan penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (penghapusan retribusi PKB) sehingga tidak ada denda bagi kendaraan yang tidak melaksanakan uji serta pengawasan di lapangan yang menurun.

Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo untuk mengatasi hal tersebut, antara lain:

- a. Peningkatan layanan persampahan terpadu (hulu - hilir) melalui penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan RDF, peningkatan peran serta masyarakat;
- b. Peningkatan pengawasan terhadap kendaraan khususnya angkutan barang.

Meskipun capaian persentase ketersediaan infrastruktur belum mencapai target namun Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan beberapa upaya terkait pengelolaan sampah diantaranya:

- Telah melaksanakan penyediaan sarpras berupa kontainer sampah sebanyak 3 unit;
- Telah melaksanakan pengadaan sarpras berupa gerobak sampah sebanyak 24 unit;



- Telah melaksanakan sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah kepada 4 kelompok masyarakat;
- Telah membentuk satgas penanganan sampah liar dan pembakaran sampah.

12. Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Target Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik Kota Probolinggo tahun 2024 adalah sebesar 74,50% dengan realisasi sebesar 74,34% sehingga capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 99,79% (kategori sangat tinggi). Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,27% dari tahun 2023 yang sebesar 74,07%.

Indikator-indikator pembentuk persentase infrastruktur berkualitas baik menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian di atas 90% bahkan di atas 100% (melampaui target). Indikator-indikator dengan capaian di bawah 100% meliputi:

- Tingkat pelayanan irigasi dengan capaian 98.36%. Capaian dipengaruhi adanya bencana hidrometeorologi genangan dan sedimentasi.
- Panjang Jalan lingkungan yang ditangani dengan capaian 99.44%
- Panjang Drainase lingkungan yang ditangani dengan capaian 98.51%

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan ketersediaan infrastruktur antara lain:

- Mempertahankan kinerja indikator agar tetap dalam tren positif di masa datang
- Meningkatkan kinerja indikator terkait perumahan dan kawasan permukiman (jalan lingkungan dan drainase lingkungan) khususnya dalam rangka pengentasan kawasan kumuh
- Pemantapan infrastruktur jalan melalui pemeliharaan pada ruas jalan prioritas
- Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman melalui penanganan di lokasi-lokasi prioritas, khususnya kawasan kumuh
- Untuk akses air bersih di Kota Probolinggo sudah 100% , data berdasarkan SKAMRT (Surveilans Kualitas Air minum Rumah Tangga)

13. Indeks Kualitas Air

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air Kota Probolinggo tahun 2024 memiliki nilai sebesar 41,43. Hal ini diantaranya disebabkan karena kualitas air sungai di Kota Probolinggo mengalami pencemaran terutama oleh kandungan Fecal Coli serta memerlukan waktu yang lama untuk memulihkan kondisi kualitas air sungai dan membutuhkan keterlibatan dari OPD terkait.

Capaian IKA sebesar 80,45% tersebut tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Ketidak tercapaian target ini disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya :

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah;
- Meningkatnya limbah domestik rumah tangga yang masuk ke badan air akan berakibat menurunnya kualitas air;
- Limbah dari pertanian dan peternakan diantaranya sisa penggunaan pupuk kimia berlebih, pembuangan kotoran hewan yang di buang langsung ke sungai;



- Kualitas air sungai di Kota Probolinggo mengalami pencemaran terutama oleh kandungan Fecal Coli;
- Pengambilan sampel uji kualitas air dilakukan pada bulan maret- oktober, dimana pada bulan – bulan tersebut kondisi iklimnya masih berada pada kondisi kemarau dan belum terjadi hujan sama sekali. Sehingga debit air sungainya kecil.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut antara lain :

- Melakukan koordinasi yang intensif antar OPD terkait guna mengurangi pencemaran air sungai;
- Melakukan upaya pemulihan lingkungan secara periodik seperti melaksanakan sosialisasi terhadap pelaku usaha, pemasangan trashbum, memperbanyak aksi cleanup.

14. Indeks Kualitas Udara

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Probolinggo tahun 2024 adalah 90,74 dengan capaian 100,15% yang diartikan bahwa kondisi kualitas udara pada posisi Sangat Baik. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) ini diperoleh berdasarkan data hasil uji Kualitas Udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim di Empat (4) Titik yaitu :

- Untuk kawasan transportasi dilakukan di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo;
- Untuk Kawasan Permukiman dilakukan di Perumahan Sumber Taman Indah;
- Untuk Kawasan Perindustrian dilakukan di PT Southern Marine Product (PT.SMP);
- Untuk Kawasan Perkantoran dilakukan di Komplek Kantor Walikota Probolinggo

Adapun proses pengujian serta pengampilan sampel difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sedangkan DLH Kota Probolinggo hanya melakukan pendampingan pada saat pemasangan dan pengambilan alat sampling Udara. Adapun perolehan IKU Tahun 2024 sebesar 90,74 diartikan bahwa kondisi kualitas udara pada posisi Unggul, hal tersebut diperoleh sumber dari Aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan cuaca dimana sepanjang tahun 2024 adanya angin yang bertiup cukup kencang sehingga polutan tidak terakumulasi diudara Kota Probolinggo. Selain itu mengingat Kota Probolinggo merupakan kota yang berada di posisi pesisir pantai, sehingga secara otomatis mempunyai tiupan angin yang berhembus kencang sehingga dapat mengakibatkan terjadi pembersihan polutan udara secara alami. Disamping itu kota Probolinggo juga merupakan kota yang terdapat kawasan industri yang relatif taat dalam pengendalian pencemaran udara. Selain itu Probolinggo juga mengontrol asap/ emisi dari moda transportasi melalui Uji KIR. Kota Probolinggo juga memperbanyak penanaman bersama dengan pemerintah kota, masyarakat, komunitas peduli lingkungan serta perusahaan. Sehingga hal - hal tersebut dapat menjadi pendukung atas pencapaian IKU yang masuk dalam kategori unggul

Bila dibandingkan tahun sebelumnya, nilai Indeks Kualitas Udara memang mengalami penurunan sebesar 0,9. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) turun karena pada saat pengambilan sampel udara di Semester 1 dan Semester 2 belum pernah terjadi hujan sehingga hasil uji sampel udara di dua semester tersebut sama. Dimana jika terjadi hujan maka polusi udara akan larut



bersama dengan air hujan. Namun capaian nilai Indeks Kualitas Udara tahun 2024 telah mencapai target yaitu sebesar 100,15%. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan mengeluarkan asap;
- Melakukan sosialisasi tidak membakar sampah atau limbah padat lainnya.

15. Indeks Kualitas Lahan

Nilai Indeks Kualitas Lahan Kota Probolinggo pada tahun 2024 adalah sebesar 26,66 dan mengalami kenaikan sebesar 0,3 dari tahun 2023 yang terletak pada penambahan perhitungan luasan hutan kota sebesar 15 hektar. Adapun IKLH Kota Probolinggo tahun 2024 tidak dapat mencapai target dikarenakan sebagian RTH yang ada tidak didominasi tutupan vegetasi pepohonan dengan tinggi minimal 2 meter, serta memiliki kerapatan yang kurang sehingga pada saat dilaksanakan verifikasi dengan menggunakan system Geographic Information System (GIS) tutupan lahan tidak dapat terdeteksi sehingga usulan tutupan lahan tidak terverifikasi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo antara lain:

- Perlu dilakukan penambahan Luas Lahan baru untuk Hutan Kota, RTH, kawasan lindung RTH RT/RW;
- Melaksanakan kegiatan Reboisasi sehingga memiliki Tutupan Vegetasi yang memiliki nilai kerapatan yang cukup baik agar kedepannya dapat menambah Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)

16. Indeks Risiko Bencana

Dari data diatas dapat diketahui bahwa, Pencapaian besaran Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2024 dengan nilai 94,33 (capaian 115%) menunjukkan capaian ini melampaui dari target penurunan awal yang sebesar 111, hal ini dikarenakan pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini diwakili BPBD sudah mampu mengoptimalkan peranannya khusus dalam peningkatan 2 prioritas pada perhitungan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) yaitu Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, dan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana. Disamping itu juga dengan adanya pola perhitungan IRB berbasis kolaborasi dengan IRB Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan perbandingan 60% (Kab./Kota) : 40% (Provinsi) turut mendorong capaian IRB menjadi lebih meningkat.

Keberhasilan capaian IRB pada tahun 2024 ditunjang oleh beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya :

- Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan Stake holder kebencanaan di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo
- Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
- Peningkatan kapasitas relawan PB
- Gladi lapang / Simulasi Bencana
- Pelaksanaan Jitupasna

Adapun kendala yang dihadapi adalah adanya dokumen-dokumen kebencanaan yang ada di Kota Probolinggo masih tetap belum di review kembali meski telah melampaui batas masa



berlakunya dan itu menjadi indikator prioritas yang menyebabkan nilai pengukuran IKD semakin sulit ditingkatkan.

Upaya yang akan dilakukan kedepannya adalah melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) yang diharapkan akan mampu mendongkrak capaian IKD pada Tahun 2025 dan Tren pengarusutamaan pelaksanaan pelayanan dasar di bidang kebencanaan semakin meningkat. Tidak terkecuali pula adanya jenis dan jumlah ancaman bencana yang meningkat di semua tempat, seiring dengan perubahan iklim global pada saat ini. Disamping itu akan melakukan pembenahan internal dalam hal pemenuhan dan perbaikan Standart Operating Procedure (SOP) dari setiap pelaksanaan kegiatan yang sudah ada.

17. Nilai SAKIP

Data diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo belum berhasil secara sempurna dalam mencapai realisasi dari target yang telah ditetapkan. Meskipun Pemerintah Kota Probolinggo telah berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan belum optimal, dan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Probolinggo mengalami penurunan. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan nilai sebesar 71,91 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan evaluasi AKIP internal pada seluruh Perangkat Daerah. Namun, masih terdapat catatan pada evaluasi AKIP internal sebagai berikut:

- c. Laporan hasil evaluasi AKIP internal belum menyajikan catatan dan rekomendasi yang tajam sesuai dengan kondisi implementasi SAKIP PD, utamanya pada aspek kualitas dan pemanfaatan, sehingga hasil evaluasi belum mampu memberikan perbaikan yang signifikan terhadap peningkatan kualitas implementasi SAKIP oleh PD;
- d. Belum terdapat kebijakan pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal sebagai pemberian reward and punishment sehingga hasil evaluasi belum cukup untuk mendorong peningkatan komitmen setiap PD dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Desk IKU semua Perangkat Daerah
- b. Melaksanakan Desk IKU semua Perangkat Daerah
- c. Melaksanakan reviu POKIN
- d. Melaksanakan reviu POKIN
- e. Melaksanakan Desk IKU semua Perangkat Daerah
- f. Rapat koordinasi antara diskominfo, bppkad, bagian organisasi
- g. Desk LKJIP



- h. Desk LKJIP
- i. Diklat dan Bimtek terkait Evaluasi AKIP
- j. Penyusunan perwali tentang pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal untuk dijadikan dasar pemberian reward and punishment sehingga dapat mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal masih terdapat beberapa kendala dalam hal :

1. Perencanaan kinerja

Pemerintah Kota Probolinggo telah berupaya memperbaiki kualitas perencanaan, utamanya perbaikan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD. Namun demikian, masih terdapat catatan dalam perencanaan yang perlu diperhatikan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Masih ditemukan penetapan sasaran strategis pada perjanjian kinerja (PK) kepala PD yang belum sesuai dengan kondisi/kinerja yang ingin dicapai, misalnya sasaran strategis "Meningkatnya Manajemen Perkantoran" yang terdapat pada sebagian besar PK PD;
- b. Masih ditemukan indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART, utamanya relevan, dan cukup pada level PD, misalnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat" yang diukur dengan indikator "Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan" dan "Total Fertility Rate (TFR)";
- c. Pohon kinerja, utamanya pada level PD, belum seluruhnya disusun secara logis dengan mempertimbangkan seluruh critical success factor (CSF) yang mendukung pencapaian kinerja sehingga hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat belum dibangun dengan baik;
- d. Pohon kinerja yang telah disusun belum dituangkan dengan baik ke dalam dokumen perencanaan sehingga terdapat ketidakselarasan antara pohon kinerja dan dokumen perencanaan, utamanya pada level PD. Hal tersebut juga berpengaruh pada penetapan sasaran pada perjanjian kinerja level Eselon III dan IV, misalnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala tiap triwulan melalui aplikasi SINERGI HANDAL dan melakukan perbaikan IKU dengan menyempurnakan indikator serta formulasi dan definisi operasionalnya. Namun, masih terdapat catatan dalam pengukuran kinerja sebagai berikut:

- a. Beberapa indikator kinerja dalam dokumen IKU yang telah disusun belum seluruhnya dilengkapi dengan formulasi dan definisi operasional yang tepat menggambarkan tercapainya kondisi/sasaran strategis
- b. Hasil pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara triwulanan pada aplikasi SINERGI HANDAL belum dimanfaatkan seluruhnya untuk perbaikan strategi pada triwulan



selanjutnya. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian kinerja triwulanan yang masih rendah pada beberapa PD, misalnya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Upaya yang dilakukan kedepannya agar nilai SAKIP mencapai target diantaranya :

- a. Melakukan reviu kembali untuk memastikan setiap sasaran strategis pada dokumen perencanaan telah sesuai dengan kondisi/kinerja yang ingin diwujudkan;
- b. Melakukan reviu pada indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART dan cukup sehingga indikator kinerja dapat menggambarkan ketercapaian kondisi/kinerja yang ingin diwujudkan;
- c. Melakukan reviu kembali terhadap pohon kinerja pada level perangkat daerah agar memiliki kausalitas atau hubungan sebab-akibat secara logis dan critical success factor (CSF) dalam menjawab kondisi kinerja diatasnya, khususnya pada level kinerja taktikal sampai kinerja operasional;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan pohon kinerja baik di level pemerintah daerah dan level PD dengan menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan sehingga meningkatkan keselarasan sasaran kinerja, khususnya pada level kinerja taktikal dan kinerja operasional;
- e. Melakukan perbaikan IKU pada beberapa PD agar memiliki formulasi dan definisi operasional yang tepat sehingga indikator menjadi selaras dengan sasaran kinerja yang diukur;
- f. Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja triwulanan dalam aplikasi SINERGI HANDAL sebagai pertimbangan dalam melakukan perubahan strategi untuk mencapai target kinerja di tahun berjalan;
- g. Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan memberikan hasil analisis yang konkret dan mendalam terkait faktor pendukung dan penghambat pencapaian target kinerja;
- h. Mendorong pemanfaatan laporan kinerja PD secara optimal sebagai bahan pertimbangan perencanaan ke depan, utamanya dalam penetapan strategi dan target kinerja;
- i. Mendorong APIP untuk memberikan catatan dan rekomendasi yang tajam pada laporan hasil evaluasi AKIP internal sehingga PD dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang konkret sesuai dengan kondisi yang ada;
- j. Mendorong adanya kebijakan pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal untuk dijadikan dasar pemberian reward and punishment sehingga dapat mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

18. Nilai LPPD

Hasil LPPD Tahun 2023 masih belum ada penetapan dari kemendagri. Namun evaluasi dari Timda Provinsi Jawa Timur telah dilakukan dengan rincian dari 125 IKK outcome, 44 IKK capaiannya naik, 28 IKK capaiannya turun dan 53 IKK capaiannya tetap.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyusunan LPPD yaitu :



1. Pemahaman akan indikator kinerja yang akan di input masih belum sesuai dengan pedoman umum yang telah disampaikan;
2. Masih ada kelengkapan bukti dukung yang kurang sesuai dengan pedoman umum penyusunan LPPD;
3. Ada beberapa OPD yang melakukan pelaporan capaian LPPD dengan data seadanya.

Dalam menjaga maupun meningkatkan nilai LPPD tersebut, langkah-langkah yang diambil yaitu sebagai berikut:

1. Akan melakukan sosialisasi terkait pemahaman indikator kinerja output maupun outcome;
2. Akan melakukan penataan ulang indikator kinerja urusan sesuai dengan OPD pengampu karena ada OPD baru yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang semula untuk urusan perindustrian berada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
3. Melakukan desk ulang antara capaian dan kelengkapan bukti dukung pada tiap-tiap indikator kinerja.

19. Indeks SPBE

Berdasarkan Keputusan Menpan RB Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Indeks SPBE Kota Probolinggo mengalami kenaikan dari 3,10 menjadi 4,04. Kenaikan tersebut mencapai 112% dari target 3,60 pada tahun 2024. Keempat domain; Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE dan Manajemen SPBE rata-rata mengalami kenaikan. Domain Layanan SPBE merupakan domain yang signifikan capaiannya dari 3 (tiga) domain yang lain, yakni sebesar 4,63. Hal ini merupakan dukungan dari aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Dalam menunjang keberhasilan tersebut, adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pada setiap indikator penilaian indeks SPBE;
- b. Memperkuat koordinasi dan peran tim teknis SPBE.

Meskipun realisasi Indeks SPBE sudah mencapai target, namun terdapat kendala yang dialami pada tahun 2024 yaitu kurangnya koordinasi dan pemahaman terkait pemenuhan indikator penilaian dalam SPBE. Untuk mengatasi hal tersebut maka solusi kedepannya akan diadakan rapat koordinasi bersama tim teknis, Kepala Perangkat Daerah dan Sekretaris Daerah, melaksanakan sosialisasi dan bimtek internal serta mendatangkan narasumber dari KEMENPAN RB.

20. Opini BPK Terhadap LKPD

Data diatas menjelaskan bahwa Opini BPK terhadap LKPD Kota Probolinggo tahun 2024 masih belum terbit. Saat ini Pemerintah Daerah sedang melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang ditargetkan dapat diselesaikan pada tanggal 31 Januari 2025 dan



penyerahan LKPD Unaudited TA 2024 ke BPK dijadwalkan 3 Maret 2025 sesuai SE Walikota Nomor No. 100.3.4.3/1459/425.209/202.

Berdasarkan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, terdapat satu dari dua puluh delapan OPD yang belum selesai melaksanakan rekonsiliasi pemeliharaan dengan bidang BMD sehingga dapat diperkirakan 94% SKPD dapat menyusun Laporan Keuangan SKPD tepat waktu. Opini atas Laporan Keuangan dinyatakan setelah pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Dalam menjaga Opini BPK Terhadap LKPD, Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan beberapa hal, antara lain:

- c. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Modul Akuntansi dan Pelaporan;
- d. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua;
- e. Memberikan pementasan pemahaman bagi penyusun laporan keuangan SKPD (LK-SKPD) Tahun Anggaran 2024 secara berkala;
- f. Melaksanakan Pendampingan finalisasi penyusunan LK-SKPD TA 2024 dan konsolidasi LK SKPD;
- g. Melaksanakan percepatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024 dengan menyusun time schedule dan Surat Edaran Nomor : 100.3.4.3/1459/425.209/2024 tentang Langkah-Langkah Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024;
- h. Melaksanakan Rekonsiliasi Dana Non RKUD secara berkala;
- i. Melaksanakan pendampingan terkait tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kota Probolinggo terkait Penghapusan Piutang dan Penertiban Administrasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR);

Dalam penyusunan LKPD TA 2024 terdapat beberapa hal yang menjadikan perhatian khusus, antara lain:

- a. Penerapan SIPD dalam penyusunan LKPD;
- b. Penerapan Laporan SIASAD sesuai Permendagri 47;
- c. Penerapan Kebijakan Properti Investasi.

Beberapa kegiatan yang mendukung Opini BPK :

- a. Melakukan Rekonsiliasi Data Akuntansi, Kas dan Persediaan;
- b. Melakukan verifikasi atas Laporan Keuangan SKPD;
- c. Melakukan koordinasi dan pendampingan mengenai hasil reviu LK SKPD Unaudited untuk segera dilakukan tindak lanjut;
- d. Melakukan konsolidasi atas LK SKPD Unaudited untuk disusun menjadi LKPD Kota Probolinggo;



- e. Memberikan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penerapan SIPD dalam Penyusunan LK SKPD.

21. Indeks Profesionalitas Aparatur

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur diamanatkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN sebagaimana yang dimaksud, maka diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN guna melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Realisasi Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kota Probolinggo Tahun 2024, dari target awal yang telah ditetapkan yaitu 65 terealisasi sebesar 78,02 (kategori sedang) untuk Jenis Pegawai ASN berdasarkan hasil perhitungan dari Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Nasional yang ditarik secara real time pada bulan September 2024.

Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 nilai Indeks Profesionalitas Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo telah melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena terdapat perubahan perumusan perhitungan Indeks Profesionalitas Aparatur pada Tahun 2024.

Meskipun perolehan nilai Indeks Profesionalitas Aparatur pada Tahun 2024 sudah melebihi target, namun masih terdapat beberapa permasalahan terkait pengoptimalan Indeks Profesionalitas Aparatur yaitu antara lain :

- Belum adanya prioritas pengelolaan anggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi dengan intensitas yang tinggi bagi para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Kurangnya kesadaran para Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan Kualifikasi Pendidikan;
- Rendahnya kualifikasi pendidikan yang dimiliki pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mengakibatkan jumlah pelaksana yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah juga rendah.

Upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan adalah dengan menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor : 893/927/425.203/2021 tanggal 11 Februari 2022 perihal Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pedoman



bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan sekaligus peningkatan kualifikasi pendidikan serta untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar yang dilakukan secara selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Selain meluncurkan surat edaran dan Perwali, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pada tahun 2024 adalah dengan melaksanakan Inovasi BKPSDM Kota Probolinggo, yaitu giat DOU ASN (Dari Oleh Untuk ASN) yang mana tidak ada batasan jumlah peserta karena bisa diikuti secara daring serta giat pengembangan kompetensi manajerial dan kompetensi teknis lainnya untuk peningkatan kapasitas ASN. Selain DOU ASN yang juga merupakan inovasi kebanggaan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, terdapat juga upaya untuk mendongkrak kualifikasi Pendidikan dengan mengakui ijazah terakhir melalui Penyesuaian Ijazah.

22. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam mengukur Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik maka Survey kepuasan masyarakat wajib disusun oleh unit penyelenggara pelayanan publik. Survei tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dan juga sebagai evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik kedepannya.

Pada tahun 2024 nilai IKM Kota Probolinggo ada kenaikan dari 85,41 menjadi 86,57 ini dikarenakan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat selaku pengguna layanan terhadap penyelenggara pelayanan yang ada di Kota Probolinggo tinggi.

Beberapa faktor yang menyebabkan IKM Kota Probolinggo mengalami kenaikan diantaranya :

- Faktor Pelayanan : Peningkatan kualitas pelayanan, Pengurangan waktu tunggu, Peningkatan aksesibilitas;
- Faktor Komunikasi : Peningkatan transparansi, Penggunaan media sosial, Peningkatan umpan balik;
- Faktor Infrastruktur : Peningkatan kualitas infrastruktur, Pengembangan teknologi;
- Faktor Lainnya : Peningkatan partisipasi masyarakat, Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target adalah melakukan koordinasi serta meningkatkan komunikasi dengan Perangkat Daerah terkait Pelaporan IKM (Semester I dan Semester II), melakukan pendampingan serta melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat pada masing-masing Perangkat Daerah.

Meskipun realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sudah mencapai target, namun terdapat kendala yang dialami pada tahun 2024 meliputi :

- Kendala Teknis : keterbatasan sumber daya, keterbatasan akses, keterbatasan teknologi;



- b. Kendala Non-Teknis : kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kepercayaan masyarakat, keterbatasan pengetahuan, bias responden;
- c. Kendala Analisis : keterbatasan data, keterbatasan metode analisis.

Solusi yang harus dilakukan dari kendala yang dialami, antara lain seperti di bawah ini:

- a. Solusi Teknis : menggunakan teknologi survei online, menggunakan aplikasi survei mobile, menggunakan metode pengambilan sampel yang tepat
- b. Solusi Non-Teknis : meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun kepercayaan masyarakat, menggunakan bahasa yang sederhana
- c. Solusi Analisis : menggunakan metode analisis yang tepat, menggunakan software analisis yang tepat, menginterpretasikan hasil analisis dengan tepat

3.1.1.3 Realisasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

3.1.1.3.1 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup penyelenggaraan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, serta ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Adapun data capaian indikator kinerja Tahun 2024 sebagaimana penjelasan di bawah ini:



A. URUSAN PENDIDIKAN

Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pendidikan juga mengacu pada realisasi capaian IKU perangkat daerah, dimana dalam hal ini terkait capaian IKU Urusan Pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Perwali Nomor 49 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Jika ditinjau dari capaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk urusan Pendidikan terdapat 5 Indikator Kinerja Utama. 4 IKU telah memenuhi target yang telah ditetapkan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI,Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs, Angka Melek Huruf dan Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sudah Bersertifikat Pendidik. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM)PAUD (3-6) Tahun namun capaian sudah di atas 80% menunjukkan adanya kinerja yang baik.Capaian IKU Urusan Pendidikan Sebagaimana Tabel 3.3

Tabel 3. 3 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Pendidikan)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI / paket A.	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	96,72	98,33	1) Kondisi sarana prasarana fisik beberapa satuan pendidikan sudah tidak memenuhi kelayakan (prasana dalam kondisi rusak); 2) Kualitas Pembelajaran masih belum merata; 3) Belum maksimalnya penanganan ATS (Anak Tidak Sekolah)	1) Penyediaan Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Tidak Mampu; 2) Penyediaan BOSDA bagi Satuan Pendidikan Dasar SD/MI; 3) Pemenuhan bertahap terhadap prasarana fisik satuan pendidikan SD yang rusak, melalui kegiatan Pembangunan Ruang Pusat Sumber SD, Rehabilitasi UKS, Rehabilitasi Toilet Siswa, Rehabilitasi Ruang Perpustakaan, TIK pada tahun 2024; 4) Penguatan Kompetensi Pendidik Jenjang SD Negeri / Swasta untuk peningkatan capaian Numerasi Peserta Didik bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang; 5) mengupayakan pemenuhan sarana prasarana melalui dana APBD (pada tahun 2025, dan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
							pengusulan pada tahun 2026) 6) telah dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data ATS yang ada pada satuan pendidikan, namun terkendala banyak data yang tidak diketahui (tidak tersedia data penelusuran dari satuan pendidikan terakhir ATS), pada tahun 2025 akan dilanjutkan untuk verifikasi dan validasi data ATS status Belum Pernah Bersekolah (BPB) dengan pelibatan Kelurahan; 7) Berkoordinasi dengan SKPD (Dinsos PPA, Dispenduk Capil, Kemenag, UPT Cabang Dinas Pendidikan Menengah) untuk penanganan lebih lanjut terhadap ATS di Kota Probolinggo	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTs / Paket B		92,28	95,74	1) Kondisi sarana prasarana fisik beberapa satuan pendidikan sudah tidak memenuhi kelayakan (prasana dalam kondisi rusak); 2) Kualitas Pembelajaran masih belum merata	1) Penyediaan Bantuan Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang SMP/MTs; 2) Penyediaan BOSDA SMP / MTs Negeri Swasta; 3) Rehabilitasi Sarana prasarana Laboratorium Sekolah, 4) mengupayakan pemenuhan sarana prasarana melalui APBD (alternatif dari dana BOSDA APBD untuk pemeliharaan ringan dan sedang) 5) Penguatan Kompetensi Tenaga Pendidik jenjang SMP dalam rangka peningkatan capaian Numerasi Peserta Didik Jenjang SMP bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang	
		Angka Partisipasi Murni (APM)PAUD (3-6) Tahun.		68,44	58,56	1) Belum maksimalnya penguatan terhadap masyarakat agar putra - putrinya usia 3 - 6 untuk bersekolah di PAUD; 2) Minimnya pemenuhan sarana prasarana bagi satuan PAUD khususnya sarana prasarana fisik, dikarenakan 99% merupakan satuan PAUD yang diselenggarakan oleh	1) Penyediaan BOP PAUD Daerah dan tambahan Jasa Tenaga Pendidik 2) Penyediaan Jasa Guru Pendamping Taman Posyandu; 3) Sosialisasi Pembelajaran PAUD dengan pelibatan masyarakat (PKK dan Posyandu Kelurahan)	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						masyarakat. 3) Rendahnya distribusi Pendidik disebabkan 99% PAUD merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga pemenuhan PTK berdasarkan kebijakan dari Yayasan.		
		Angka Melek Huruf		99,41	96,64	capaian AMH berdasarkan data BPS, dan Indikator Angka Melek Huruf sudah tidak lagi menjadi indikator untuk menentukan dimensi pengetahuan untuk menentukan IPM suatu daerah, dan digantikan dengan Indikator Harapan Lama Sekolah		
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sudah Bersertifikat Pendidik	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	54,90	56,58	1. Belum maksimalnya penerapan Inovasi Pembelajaran oleh Guru, guru cenderung kembali menerapkan kepada pola- pola pembelajaran konvensional; 2. Belum maksimalnya pembelajaran berbasis IT, disebabkan terdapat Guru yang belum bisa menerapkan pembelajaran yang berbasis IT utamanya guru yang sudah mendekati masa purna	1) meningkatkan peran komunitas belajar dalam kegiatan pelatihan ttg pembelajaran paradigma baru; 2) menyediakan sarpras yg berbasis IT sekaligus pelatihan untuk pengaplikasian media IT dalam pembelajaran 3) Bimbingan Teknis untuk peningkatan kompetensi bagi Pendidik PAUD, SD dan SMP 4) Pengimbasan Metode Pembelajaran oleh Pendidik yang melaksanakan Bimtek kepada Pendidik yang lain.	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 5 Februari 2025

B. URUSAN KESEHATAN

Pelaksanaan urusan kesehatan di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB. Sesuai dengan Perwali Nomor 49 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo terdapat 3 IKU untuk Urusan Kesehatan yaitu



Pemerintah Kota Probolinggo

Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan, Total Fertility Rate (TFR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Jika ditinjau dari capaian IKU Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan KB untuk urusan Kesehatan telah menunjukkan kinerja baik. Akan tetapi masih diperlukan peningkatan kinerja dari dinas kesehatan yang terkait dengan pemenuhan SPM serta peningkatan kepuasan masyarakat. Sebagaimana tabel 3.4

Tabel 3. 4 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Kesehatan)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Kesehatan	Presentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90	87,13	Dinas Kesehatan PPKB Kota Probolinggo : 1. Perbedaan persepsi definisi operasional antara puskesmas dan bidang pelaksana terkait dengan perhitungan capaian SPM 2. Data pembanding dari bidang lama diperoleh melebihi jangka waktu deadline	Dinas Kesehatan PPKB Kota Probolinggo : 1. Menyamakan persepsi melalui Forum Diskusi Teknis (pertemuan koordinasi rutin antara puskesmas dengan bidang pelaksana untuk menyepakati definisi operasional) 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM 3. Mengimplementasikan proses validasi data berkala 4. Meningkatkan koordinasi antar bidang	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					
2		Total Fertility Rate (TFR)	Program Pengendalian Penduduk	2	2,03			
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)					
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)					



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
3		Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	86	88,21	Unsur persyaratan : 1. Informasi persyaratan pelayanan sudah ada melalui media sosial namun informasi persyaratan secara konvensional (banner, poster, flyer, dll) belum tersedia secara masif. Hal ini disebabkan oleh tidak semua pengguna layanan memiliki akses atau literasi digital yang memadai 2. Antrian menumpuk disebabkan oleh ketidaktahuan pengguna layanan terhadap informasi persyaratan pelayanan 3. Informasi persyaratan terdapat tambahan persyaratan yang dikarenakan oleh perubahan kebijakan belum tersosialisasikan pada masyarakat Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur: Ketersedian informasi mengenai alur	Unsur persyaratan : 1. Menyediakan informasi persyarakat melalui media konvensional seperti banner, poster, atau leaflet pada tempat strategis sesuai ketersediaan anggaran 2. Evaluasi antrian online dan implementasi sistem notifikasi dan tracking antrian real time 3. Sosialisasi persyaratan pelayanan Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur : 1. Merancang alur pelayanan dalam bentuk diagrama sederhana dan visual di lokasi strategis 2. Upload versi digital pada website/aplikasi untuk akses yang lebih luas Unsur Waktu Penyelesaian : 1. Review ulang pelaksanaan berdasarkan SOP, sosialisasi kembali dan feedback loop untuk memantau perubahan 2. Evaluasi berdasarkan akar penyebab masalah dan pelaksanaan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi pada unit yang dituju 3. Koordinasi penjadwalan, analisis durasi tiap	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman					



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						pelayanan dan kemudahan akses informasi hampir di semua unit tidak tersedia Unsur Waktu Penyelesaian : 1. Terjadinya perbedaan persepsi mengenai waktu pelayanan pasien dan belum tersosialisasikan dengan baik 2. Waktu penyelesaian pada unit pelayanan melebihi waktu yang ditetapkan di SOP 3. Terdapat keterlambatan pada jadwal visite 4. Masalah teknis (keterbatasan petugas, koneksi internet dan peningkatan jumlah pasien)	visite dan implementasi sistem yang memonitor real time 4. Manajemen petugas, evaluasi dengan unit bermasalah, komunikasi dengan pengguna layanan dan evaluasi rutin Unsur Biaya/Tarif: Sosialisasi terkait biaya/tarif pada pengguna layanan Unsur Produk Layanan : - Unsur Penanganan Pengaduan : 1. Menyediakan sarana pengaduan di setiap unit (kotak saran, hotline, atau aplikasi). 2. Melakukan sosialisasi mekanisme pengaduan secara luas kepada pengguna layanan Unsur Kompetensi Pelaksana : Melaksanakan pelatihan pelayanan berkala dan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pasca pelatihan Unsur Perilaku Pelaksana : Penerapan SOP standar perilaku dan evaluasi Unsur Sarana Prasarana : 1. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi jadwal pemeliharaan rutin serta pelaporan kerusakan 2. Optimalisasi kinerja dari bagian CS dan kesling yang bertanggung jawab dalam masalah kebersihan 3. Pengajuan pengadaan sarana prasarana Unsur Transparansi Pelayanan : - Unsur Integrasi Pelayanan : -	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Unsur Biaya/Tarif: Belum tersosialisasi tarif/biaya kepada pengguna layanan Unsur Produk Layanan : - Unsur Penanganan Pengaduan : Tidak ada informasi yang lengkap mengenai penanganan pengaduan berupa ketersediaan sarana untuk melakukan pengaduan Unsur Kompetensi Pelaksana : 1. Pemberi pelayanan kurang komunikatif dan cekatan 2. Komunikasi antar unit belum terjalin dengan baik Unsur Perilaku Pelaksana : Pelaksana kurang ramah dan komunikatif dalam memberikan penjelasan kepada pasien		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Unsur Sarana Prasarana : 1. Belum/kurangnya dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana 2. Terdapat sarana dan prasarana kurang layak dan lingkungan tidak bersih Unsur Transparansi Pelayanan : - Unsur Integrasi Pelayanan : -		

Sumber : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, 5 Februari 2025

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Ruang lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 11 (sebelas) sub urusan, yaitu: sumberdaya air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang. Dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024, pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditujukan untuk mendukung Misi Pembangunan Ketiga yaitu: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Sesuai dengan Perwali Nomor 49 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo terdapat 4 IKU untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagaimana tabel 3.5



**Tabel 3. 5 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	96 %	97,52 %	Masih terdapat beberapa ruas jalan yang rusak, meskipun target kinerja telah tercapai	Mengusulkan pendanaan untuk pemeliharaan jalan melalui sumber dana APBN	
2		Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Kontruksi	Program Penataan Bangunan Gedung	90 %	90 %	Masih terdapatnya bangunan gedung yang memerlukan pemeliharaan untuk mengatasi kerusakan dan sesuai dengan standar konstruksi	Melaksanakan pemeliharaan bangunan gedung fasilitas umum sesuai dengan skala prioritas	
3		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	100 %	100 %	Regulasi terkait rencana tata ruang yang ditetapkan dengan Perda No 2 Tahun 2020 tentang RTRW 2020 - 2040, baru memiliki RDTR untuk 3 wilayah Kecamatan, yaitu Mayangan, Kanigaran dan Kademangan	Melaksanakan penyusunan RDTR wilayah Kecamatan Kedopok dan Wonoasih	
4		Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	92,5 %	90,98 %	Masih terdapatnya kondisi prasarana sumber daya air yang perlu dilakukan pemeliharaan, agar meningkatkan kualitas jaringan irigasi/sungai dan cakupan pelayanannya	Melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi dan sungai sesuai dengan skala prioritas	
5	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Belum memadainya sumber daya manusia baik dari aspek kualitas maupun kuantitas	Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan tugas secara rutin dan intensif	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 7 Februari 2025



D. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman menjadi urusan wajib pemerintah yang terkait dengan kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum serta mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun ruang lingkup penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 (lima) sub urusan, yaitu: (1) Perumahan (meliputi Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)), (2) Kawasan Permukiman (meliputi Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha), (3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh), (4) Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan, serta (5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024, penyelenggaraan urusan permukiman ditujukan untuk mendukung Misi Ketiga, yaitu Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Sesuai dengan Perwali Nomor 49 Tahun 2023 tentang tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo terdapat 1 IKU untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebagaimana tabel 3.6

**Tabel 3. 6 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	Program Kawasan Permukiman	85 %	41,20 %	Pelaksanaan pembangunan di lokasi kumuh masih terkendala pada status lahan, yang sebagian besar berada di sempadan sungai maupun tanah aset milik BUMN	Melakukan sertifikasi terhadap lahan sempadan sungai dan juga koordinasi untuk solusi perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman kumuh di lahan aset BUMN	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 7 Februari 2024



E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan bidang urusan pemerintahan wajib yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan (1) ketentraman dan ketertiban umum, 2) bencana serta (3) kebakaran. Penyelenggaraan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum oleh pemerintah Kabupaten / Kota diarahkan untuk penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda Kabupaten/Kota serta pembinaan PPNS. Penyelenggaraan sub urusan ini terkait dengan usaha pemenuhan hak dasar masyarakat yang terkait dengan rasa aman dalam melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur tanpa adanya potensi gangguan terhadap kepentingan umum. Sedangkan penyelenggaraan sub urusan bencana dan kebakaran diarahkan untuk penanggulangan bencana serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan bencana dan kebakaran. Penyelenggaraan sub urusan ini merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dimana masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil dampak / risiko akibat kejadian bencana ataupun kebakaran. Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Probolinggo dibagi untuk sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, serta sub urusan bencana dilaksanakan oleh Badan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah. Sebagaimana tabel 3.7

Tabel 3. 7 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani sesuai ketentuan	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2%	2%	Masyarakat yang belum paham tentang aturan Perda Perkada sehingga banyak PKL yang masih menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berjualan	Berkoordinasi dengan DKUP sebagai PD yang berperan dalam penataan PKL serta Dishub dalam Upaya Melakukan penertiban secara rutin.	
2		Persentase penanganan kebakaran yang ditangani sesuai responsive time	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	65%	65%	Jumlah APD dan petugas belum seimbang	Pengadaan APD dan menjaring CSR dalam upaya kontribusi/partisipasi pengadaan APD	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 3 Februari 2025



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	Program Penanggulangan Bencana	0,63	0,43	salah satu yang dominan mempengaruhi ketidaktercapaian target besaran nilai IKD ini adalah adanya dokumen-dokumen kebencanaan yang ada di Kota Probolinggo masih tetap belum di review kembali meski telah melampaui batas masa berlakunya dan itu menjadi indikator prioritas yang menyebabkan nilai pengukuran IKD semakin sulit ditingkatkan	Pada alokasi anggaran Tahun 2025 telah dianggarkan kegiatan untuk penyusunan dokumen kajian risiko bencana (KRB) yang diharapkan akan mampu mendongkrak capaian Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2025 dan Tren pengarusutamaan pelaksanaan pelayanan dasar di bidang Kebencanaan semakin meningkat. Tidak terkecuali pula adanya jenis dan jumlah ancaman bencana yang meningkat disemua tempat, seiring dengan perubahan iklim global yang terjadi saat ini. Disamping itu akan melakukan pembenahan internal dalam hal pemenuhan dan perbaikan Standart Operating Procedure (SOP) dari setiap pelaksanaan kegiatan yang sudah ada.	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 4 Februari 2025

F. URUSAN SOSIAL

Penyelenggaraan urusan sosial merupakan jenis urusan wajib bagi pemerintah kabupaten/kota untuk penyediaan pelayanan dasar yang terkait dengan pemberdayaan sosial, penanganan tindak kekerasan, rehabilitasi sosial perlindungan jaminan sosial dan penanganan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019–2024, penyelenggaraan urusan sosial ditujukan untuk mendukung Misi Pembangunan Kota Probolinggo Kedua, yaitu “Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas”. tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan Sosial juga mengacu pada realisasi capaian IKU PD, dimana dalam hal ini terkait capaian IKU dari Dinas Sosial, sebagaimana tabel 3.8



Tabel 3. 8 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Sosial)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Pemberdayaan Sosial	90%	97,64%	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat masih belum maksimal	Optimalisasi kegiatan dan menggalakkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam rangka peningkatan perlindungan dan jaminan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	
			Program Rehabilitasi Sosial					
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial					
			Program Penanganan Bencana					
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 4 Februari 2025

3.1.1.3.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar berkaitan dengan penyelenggaraan pada bidang tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; pangan; pertanian; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; serta kearsipan. Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar di Kota Probolinggo telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang berkaitan hampir seluruhnya mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan penjabaran pencapaian pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah urusan wajib non pelayanan dasar Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2024.



A. URUSAN TENAGA KERJA

Tabel 3. 9 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Tenaga Kerja)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	Program Penempatan Tenaga Kerja	98.3%	98.3%			
		Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja		70%	130%			
		Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial		57%	19%	menurunnya angka realisasi dari target kasus perselisihan dimaksudkan bahwa pembinaan yang kita laksanakan berhasil dan kasus perselisihan di kota probolinggo menurun		
		Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan		90%	90%			

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 6 Februari 2025

B. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tabel 3. 10 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Utama	N/A	Belum semua Perangkat Daerah melaksanakan PPRG	Mengadakan Pelatihan PUG untuk Perangkat Daerah dan pendampingan	-



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak				penyusunan dokumen PPRG	
2		Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	Program Perlindungan Perempuan Program Perlindungan Khusus Anak	100%	100%	Rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dilihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT	Sosialisasi terhadap keluarga, perempuan dan anak tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	
3		Kategori Kota Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Utama	N/A	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti hak tumbuh kembang, mendapatkan pendidikan yang layak, mengemukakan pendapat, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas	Sosialisasi terhadap perangkat daerah, keluarga, perempuan dan anak tentang pemenuhan hak anak	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 4 Februari 2025

C. URUSAN PANGAN

Tabel 3. 11 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Bidang Pangan)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pangan	Persentase Peningkatan Angka Ketersediaan Energi (AKE) (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan	22	18	Belum tercapainya target persentase peningkatan AKE dan AKP disebabkan karena belum idealnya pola konsumsi pangan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kecukupan energi dan protein antara lain tinggi badan, berat	1. Peningkatan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui pemberian makanan tambahan bagi semua kalangan masyarakat mulai bayi, balita, anak sekolah/pelajar, ibu, bapak,	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			Masyarakat			badan, jenis kelamin, pertumbuhan dan perkembangan (usia), serta energi cadangan bagi anak dan remaja	lansia sehingga kualitas konsumsi pangan dapat meningkat ; 2. Pengenalan nsumsi pangan yang B2SA ke sekolah - sekolah dan masuk ke dalam kurikulum sekolah agar siswa/i dan warga sekolah juga orangtua mulai peduli terhadap pangan yang B2SA mulai dini ; 3. Kampanye Konsumsi Pangan B2SA secara masif dan intensif di masyarakat ; 4. Peningkatan teknologi tepat guna dengan mengolah pangan pokok lokal unggulan daerah (sumber karbohidrat lainnya pengganti beras) menjadi produk olahan yang berdaya saing dan memiliki nilai manfaat bagi tubuh dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga.	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan					
			Program Pengawasan Keamanan Pangan					
2		Persentase Peningkatan Angka Ketersediaan Protein (AKP) (%)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	30	29,24			

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, 4 Februari 2025



D. URUSAN PERTANAHAN

Penyelenggaraan urusan pangan dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 ditujukan untuk mendukung Misi Pembangunan Ketiga, yaitu Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan. Urusan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman akan tetapi masih dengan ruang lingkup yang terbatas, pada pengelolaan pertanahan. Oleh karena itu pada Tahun 2043 belum ada IKU PD urusan pertanahan sehingga kinerja penyelenggaraan urusan mengacu pada capaian pelaksanaan program dan kegiatan.

**Tabel 3. 12 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Pertanahan)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Bidang Pertanahan		Program Pengelolaan Izin Lokasi					

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 7 Februari 2025

E. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

**Tabel 3. 13 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Lingkungan Hidup)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	53,40	41,43	Nilai Indeks Kualitas Air Kota Probolinggo pada tahun 2024 adalah sebesar 41,43 dengan capaian 77,58% dan mengalami penurunan sebesar 8,57 dari tahun 2023. Kendala yang masih ditemui dalam upaya peningkatan Indeks Kualitas Air diantaranya : 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam	Solusi atau upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul antara lain : 1. Melakukan koordinasi yang intensif antar OPD terkait guna mengurangi pencemaran air sungai; 2. Melakukan upaya pemulihan lingkungan secara periodik seperti	
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup					



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						pengelolaan sampah dan limbah. 2. Meningkatnya limbah domestik rumah tangga yang masuk ke badan air akan berakibat menurunnya kualitas air 3. Limbah dari pertanian dan peternakan diantaranya sisa penggunaan pupuk kimia, pembuangan kotoran hewan yang di buang langsung ke sungai 4. Kualitas air sungai di Kota Probolinggo mengalami pencemaran terutama oleh kandungan Fecal Coli 5. Pengambilan sampel uji kualitas air dilakukan pada bulan maret- oktober (mewakili musim kemarau dan musim penghujan), dimana pada bulan – bulan tersebut kondisi iklimnya masih berada pada kondisi kemarau dan belum terjadi hujan sama sekali. Sehingga debit air sungainya kecil	melaksanakan sosialisasi terhadap pelaku usaha, pemasangan trashbum, memperbanyak aksi cleanup.	
2		Indeks Kualitas Udara	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan	91,64	90,74	Nilai Indeks Kualitas Udara Kota Probolinggo pada tahun 2024 adalah sebesar 90,70 dengan capaian 98,97%. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)	1. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan mengeluarkan asap, 2. Melakukan sosialisasi tidak	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			Hidup (Pplh)			turun karena pada saat pengambilan sampel udara di Semester 1 dan Semester 2 belum pernah terjadi hujan sehingga hasil uji sampel udara di dua semester tersebut sama. Dimana jika terjadi hujan maka polusi udara akan larut bersama dengan air hujan.	membakar sampah atau limbah padat lainnya	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					
3		Prosentase Sampah Tertangani	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	80%	54,62%	Nilai Prosentase sampah tertangani mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena : 1. Kesadaran Masyarakat terhadap penanganan pengelolaan persampahan dari sumbernya masih sangat kurang. 2. Kurangnya sarpras pewadahan sampah (Kontainer) di wilayah selatan; 3. Armada persampahan 60% kondisi sudah tua diatas 20 thn; 4. 22.014 rumah di wilayah selatan belum menggunakan jasa Penarik Gerobak Sampah sehingga menimbulkan sampah liar. 5. Banyaknya Bank Sampah Unit yang Vakum	1. Mengusulkan Penambahan Sarana Prasarana; 2. Penambahan SDM Petugas Persampahan dan Menata Ulang Pembagian Tugas dari Petugas Kebersihan	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					
			Program Pengelolaan Persampahan					
4		Indeks Kualitas Lahan	Program Pengelolaan	36,5	26,66	Nilai Indeks Kualitas Lahan Kota	1. Perlu dilakukan penambahan Luas Lahan baru untuk	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			Keanekaragaman Hayati (Kehati)			Probolinggo pada tahun 2024 adalah sebesar 26,66 dengan capaian 73,04% dan mengalami kenaikan sebesar 0,3 dari tahun 2023 yang terletak pada penambahan perhitungan luasan hutan kota sebesar 15 hektar. Adapun Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target dikarenakan salah satunya adalah Data RTH/ Tutupan Vegetasi yang sudah tercantum pada Perwali, namun saat penginputan data pada Aplikasi IKLH dan Penandaan titik pada Lampiran Peta Goegle Earth (kmz), ada beberapa titik yang sudah disampaikan tetapi saat ini tidak memiliki vegetasi pepohonan . Pada titik koordinat yang sudah disampaikan (RTH yang tertuang di Perwali) tidak didominasi tutupan vegetasi pepohonan (kerapatan kurang) . Vegetasi yang nampak pada GIS yaitu pohon dengan ketinggian minimal 2 meter.	Hutan Kota, RTH, kawasan lindung RTH RT/RW; 2. Melaksanakan kegiatan Reboisasi sehingga memiliki Tutupan Vegetasi yang memiliki nilai kerapatan yang cukup baik agar kedepannya dapat menambah Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 3 Februari 2025



F. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tabel 3. 14 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk memiliki KTP-el	Program Pendaftaran Penduduk	100%	99,30%	perubahan usia penduduk pemula selalu bergerak	Melaksanakan Pelayanan perekaman keliling /jemput bola di sekolah-sekolah secara rutin	
2		Persentase penduduk memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun	Program Pencatatan Sipil	100%	99,03%			
3		Persentase Penyajian Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang valid	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100.00%			
4		Persentase Permintaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti		100%	100.00%			

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 3 Februari 2025

G. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tabel 3. 15 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Pemberdayaan Masyarakat)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	80%	80%			

Sumber : Kecamatan Mayangan, 6 Februari 2025



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	80%	85,71%			-

Sumber : Kecamatan Wonoasih, 6 Februari 2025

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	95	95			

Sumber : Kecamatan Kademangan, 6 Februari 2025

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	45%	100%	Pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat: a. warga yang keberatan untuk dilaksanakan pembangunan sarpras dari dana kelurahan terkendala ukuran yang tidak sama dengan usulan mengingat pagu anggaran pada dana kelurahan juga terbatas sehingga pengerjaannya pun disesuaikan dengan kemampuan anggaran b. Perlu berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait lokasi yang dikerjakan oleh dana kelurahan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan fisik khususnya pavingisasi c. Pokmas belum memiliki kemampuan teknis dalam melaksanakan pekerjaan fisik	a. Memberikan pemahaman yang jelas pada waktu Musrenbang tentang syarat pengajuan titik lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan b. Berkoordinasi dengan DPUPR dan Bidang Aset BPPKAD untuk mengetahui status dan kewenangan titik lokasi setiap pekerjaan c. Melakukan Pendampingan dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan berkoordinasi intern dengan APIP	

Sumber : Kecamatan Kanigaran, 6 Februari 2025



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	85%	Pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat : a. warga yang keberatan untuk dilaksanakan pembangunan sarpras dari dana kelurahan terkendala ukuran yang tidak sama dengan usulan mengingat pagu anggaran pada dana kelurahan juga terbatas sehingga pengerjaannya pun disesuaikan dengan kemampuan anggaran b. Perlu berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait lokasi yang dikerjakan oleh dana kelurahan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan fisik khususnya pavingisasi c. Pokmas belum memiliki kemampuan teknis dalam melaksanakan pekerjaan fisik	a. Memberikan pemahaman yang jelas pada waktu Musrenbang tentang syarat pengajuan titik lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan b. Berkoordinasi dengan DPUPR dan Bidang Aset BPPKAD untuk mengetahui status dan kewenangan titik lokasi setiap pekerjaan c. Melakukan Pendampingan dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan berkoordinasi intern dengan APIP	

Sumber : Kecamatan Kedopak, 6 Februari 2025

H. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tabel 3. 16 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	Program Pengendalian Penduduk	2	2,03			
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)					
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)					
2		Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	86	88,21	Unsur persyaratan : 1. Informasi persyaratan pelayanan sudah ada melalui media sosial	Unsur persyaratan : 1. Menyediakan informasi persyaratan melalui media	



			Kesehatan Masyarakat			namun informasi persyaratan secara konvensional (banner, poster, flyer, dll) belum tersedia secara masif. Hal ini disebabkan oleh tidak semua pengguna layanan memiliki akses atau literasi digital yang memadai 2. Antrian menumpuk disebabkan oleh ketidaktahuan pengguna layanan terhadap informasi persyaratan pelayanan 3. Informasi persyaratan terdapat tambahan persyaratan yang dikarenakan oleh perubahan kebijakan belum tersosialisasikan pada masyarakat Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur : Ketersedian informasi mengenai alur pelayanan dan kemudahan akses informasi hampir di semua unit tidak tersedia Unsur Waktu Penyelesaian : 1. Terjadinya perbedaan persepsi mengenai waktu pelayanan pasien dan belum tersosialisasikan dengan baik 2. Waktu penyelesaian pada unit pelayanan melebihi waktu yang ditetapkan di SOP 3. Terdapat keterlambatan pada jadwal visite 4. Masalah teknis (keterbatasan petugas, koneksi internet dan peningkatan jumlah pasien) Unsur Biaya/Tarif: Belum tersosialisasi tarif/biaya kepada pengguna layanan	konvensional seperti banner, poster, atau leaflet pada tempat strategis sesuai ketersediaan anggaran 2. Evaluasi antrian online dan implementasi sistem notifikasi dan tracking antrian real time 3. Sosialisasi persyaratan pelayanan Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur : 1. Merancang alur pelayanan dalam bentuk diagrama sederhana dan visual di lokasi strategis 2. Upload versi digital pada website/aplikasi untuk akses yang lebih luas Unsur Waktu Penyelesaian : 1. Review ulang pelaksanaan berdasarkan SOP, sosialisasi kembali dan feedback loop untuk memantau perubahan 2. Evaluasi berdasarkan akar penyebab masalah dan pelaksanaan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi pada unit yang dituju 3. Koordinasi penjadwalan, analisis durasi tiap visite dan implementasi sistem yang memonitor real time 4. Manajemen petugas, evaluasi dengan unit bermasalah, komunikasi dengan pengguna layanan dan evaluasi rutin	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman					
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					



						Unsur Produk Layanan : - Unsur Penanganan Pengaduan : Tidak ada informasi yang lengkap mengenai penanganan pengaduan berupa ketersediaan sarana untuk melakukan pengaduan Unsur Kompetensi Pelaksana : 1. Pemberi pelayanan kurang komunikatif dan cekatan 2. Komunikasi antar unit belum terjalin dengan baik Unsur Perilaku Pelaksana : Pelaksana kurang ramah dan komunikatif dalam memberikan penjelasan kepada pasien Unsur Sarana Prasarana : 1. Belum/kurangnya dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana 2. Terdapat sarana dan prasarana kurang layak dan lingkungan tidak bersih Unsur Transparansi Pelayanan : - Unsur Integrasi Pelayanan : -	Unsur Biaya/Tarif: Sosialisasi terkait biaya/tarif pada pengguna layanan Unsur Produk Layanan : - Unsur Penanganan Pengaduan : 1. Menyediakan sarana pengaduan di setiap unit (kotak saran, hotline, atau aplikasi). 2. Melakukan sosialisasi mekanisme pengaduan secara luas kepada pengguna layanan Unsur Kompetensi Pelaksana : Melaksanakan pelatihan pelayanan berkala dan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pasca pelatihan Unsur Perilaku Pelaksana : Penerapan SOP standar perilaku dan evaluasi Unsur Sarana Prasarana : 1. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi jadwal pemeliharaan rutin serta pelaporan kerusakan CS dan kesling yang bertanggung jawab dalam masalah kebersihan 3. Pengajuan pengadaan sarana prasarana Unsur Transparansi Pelayanan : - Unsur Integrasi Pelayanan : -	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, 5 Februari 2025



I. URUSAN PERHUBUNGAN

Tabel 3. 17 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Perhubungan)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	69	60.93	Penambahan persediaan sarpras dan fasilitas LLAJ belum menambah ke ruas jalan pada tepi Kota, masih terfokus pada Kawasan Tertib Lalu Lintas di Alun-alun Kota dalam rangka MRLL (Manajemen Rekayasa Lalu Lintas) dan Kebutuhan di sekitar lingkungan RS yang baru sehingga Sarana dan prasarana pada ruas jalan Kota Probolinggo sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal	melakukan pengecekan kembali di lapangan untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan fasilitas LLAJ yang berada di luar area tertib lalu lintas	
		Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo		21	46.43	Tingkat pelanggaran angkutan jalan di Kota Probolinggo cenderung meningkat dikarenakan biaya operasional dan perawatan terhadap angkutan orang tinggi dan adanya regulasi/kebijakan pelaksanaan Operasi Gabungan terhadap pengawasan, penindakan dan penertiban terhadap angkutan jalan ditentukan oleh jajaran Satlantas Polres Kota Probolinggo sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
		Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi standar keselamatan		99	85.27	Pada pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2023 terjadi kerusakan dan pemeliharaan pada unit Alat Uji Kendaraan Bermotor di Bulan Maret-April sehingga Pelayanan Uji Berkala dihentikan dan penerapan regulasi Surat Edaran terkait ODOL (Over Dimensi dan Over Load) pada angkutan jalan		
		Prosentase Angkutan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan	Program Pengelolaan Pelayaran	88	100	Kewenangan untuk pengawasan dan pengendalian operasi kelautan sudah bukan pada dinas Perhubungan Kota Probolinggo hanya kegiatan sosialisasi pembinaan pada nelayan pemilik kapal di bawah 7GT	Penyesuaian pada IKU PD pada tahun 2025	

Sumber : Dinas Perhubungan, 3 Februari 2025

J. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tabel 3. 18 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Komunikasi dan Informatika)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Persentase E-Goverment Perangkat Daerah Yang Terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	89,29	100	-		
	Urusan Pemerintahan		Program Penyelenggaraan					



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Bidang Persandian		Persandian Untuk Pengamanan Informasi					
2	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik Sesuai Standar	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	96,43	100,00	-		
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase capaian pengelolaan administrasi perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	100,00	Minimnya Sumberdaya Manusia yang kompeten di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian	Pelaksanaan Bimtek dan Keikutsertaan pada Diklat terkait Keamanan Informasi	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 3 Februari 2025

K. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Tabel 3. 19 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Koperasi dan UKM	Persentase Koperasi Sehat	Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam	59	54,43	Masih adanya sejumlah koperasi yang teridentifikasi sebagai koperasi yang tidak aktif baik secara kelembagaan maupun manajemen usahanya	Melaksanakan Pendampingan dan pelatihan secara intensif bagi pengurus koperasi dalam melaksanakan kewajibannya melaksanakan RAT secara rutin	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian					
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi			masih adanya Koperasi yang belum berstandar sehat Dagulir sebagai penguatan	Melaksanakan pengawasan Koperasi untuk mengetahui sejauhmana pengelolaan	



			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi			akses pembiayaan / permodalan pengembangan usaha masih belum bisa diakses pelaku usaha dan koperasi dikarenakan Perwali belum terbit	Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus, apakah pengelolaan Koperasi telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agar Koperasi bisa lebih baik dan sehat yang mampu memberikan kemanfaatan bagi seluruh Anggotanya. Percepatan Penerbitan Perwali dengan perubahan skema eksekuting bekerjasama dengan Bagian Hukum dan Bank Jatim	
		Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mandiri	Program Pengembangan Umkm Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	2%	2,39%	Banyaknya jumlah pelaku usaha mikro di Kota Probolinggo pada Tahun 2024 sebesar 21.253 sedangkan yang memiliki Kartu E-UMKM hanya 9.508 pelaku usaha	Pendataan melalui Kartu E-UMKM diharapkan lebih optimal dengan menggandeng Kelurahan dan Kecamatan dan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif sehingga dengan adanya kartu E-UMKM maka pelaku usaha tersebut akan terdata baik data produksi, data usaha dan data permasalahan yang dihadapi usaha mereka sebagai dasar untuk melakukan Kebijakan dalam Pemberdayaan dan Pengembangan usaha UMKM di kota probolinggo.	
	Penunjang	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	90	90			

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, 5 Februari 2025



L. URUSAN PENANAMAN MODAL

Tabel 3. 20 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Penanaman Modal)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1.	Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0,41	0,09	1. Tahun 2024 merupakan Tahun Politik PEMILU 2024 sehingga berdampak kepada para Investor untuk berinvestasi (wait and see) 2. Terbatasnya Ketersediaan Lahan di Kota Probolinggo (luas wilayah) yang Sesuai untuk Peruntukan Pengembangan Industri. 3. Dalam Pencapaian Realisasi Pertumbuhan di Kota Probolinggo Tahun 2024 adalah Target capaian Realisasi Investasi yang terlalu Tinggi atas : 1. Potensi dan Peluang Investasi yang ada di Kota Probolinggo. 2. Kondisi dan Situasi Politik di Masa PEMILU Tahun 2024 3. Keterbatasan atas Ketersediaan Ruang / Kawasan Pengembangan Kawasan peruntukan Investasi Sektor Industri.	1. Membuat / Menyusun tentang Kajian atas Target dan Perolehan Realisasi Pertumbuhan Investasi di Kota Probolinggo dalam 5 (lima) Tahunan. 2. Membuat atau Mengembangkan sistem Promosi Investasi berbasis Teknologi. 3. Insentif Kemudahan atas Investasi di Kota Probolinggo bagi Investor untuk Menanamkan Modalnya	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP	Program Pelayanan Penanaman Modal	83,39	83,39			
		Persentase capaian pengelolaan administrasi perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	103,75			

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja, 3 Februari 2025

M. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Tabel 3. 21 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Pemuda dan Olahraga)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pemuda Dan Olahraga	Persentase Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga Yang Dicapai	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	44,36%	97,33	dijelaskan bahwa di tahun 2024 terdapat 146 Kejuaran yang di ikuti selama 1 tahun yang terdiri dari 30 Cabor yang meraih prestasi keolahragaan yakni Cabor Tenis Lapangan, Cabor Basket, Cabor Pencak Silat, Cabor Tenis Meja, Cabor Drum Band, Cabor Taekwondo, Cabor Bulu tangkis, Cabor Catur Cabor Bridge, Cabor Renang, Cabor Balap sepeda, Cabor Anggar, Cabor Senam, Cabor Selam, Cabor Sepak Takraw, Cabor Atletik, Cabor Panjat Tebing, Cabor Biliar, Cabor Wushu Cabor Petanque, Cabor Tinju,		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Cabor Panahan, Cabor Muaythai, Cabor Berkuda, Cabor Sepatu Roda, Cabor Hapkido, Cabor Kurash, Cabor Paramotor, Cabor IBCA MMA, Cabor Triatlon dan dibagi dengan 150 ajang kejuaraan yang di ikuti dari 30 Cabor mengikuti ajang prestasi di tahun 2024 lalu dikalikan 100%.		

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 3 Februari 2025

N. URUSAN STATISTIK

Tabel 3. 22 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Statistik)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Persentase E-Goverment Perangkat Daerah Yang Terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	89,29	100	-		
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi					
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik Sesuai Standar	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	96,43	100,00	-		
	Urusan Pemerintahan		Program Penyelenggaraan					



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Bidang Statistik		Statistik Sektoral					
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase capaian pengelolaan administrasi perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	100,00	Minimnya Sumberdaya Manusia yang kompeten di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian	Pelaksanaan Bimtek dan Keikutsertaan pada Diklat terkait Keamanan Informasi	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 3 Februari 2025

O. URUSAN PERSANDIAN

Tabel 3. 23 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Persandian)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Persentase E-Government Perangkat Daerah Yang Terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	89,29	100	-		
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi					
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik Sesuai Standar	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	96,43	100,00	-		
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					
	Urusan Pemerintahan	Persentase capaian pengelolaan administrasi perkantoran yang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100,00	100,00	Minimnya Sumberdaya Manusia yang kompeten di	Pelaksanaan Bimtek dan Keikutsertaan pada Diklat	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Bidang Komunikasi dan Informatika	ditangani sesuai ketentuan	Daerah Kabupaten/Kota			bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian	terkait Keamanan Informasi	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 3 Februari 2025

P. URUSAN KEBUDAYAAN

Tabel 3. 24 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Kebudayaan)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dikelola menjadi daya saing daerah	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman	96,29	90,24	1) minimnya SDM Pelatih Seni Budaya 2) minimnya Ruang Ekspresi Kebudayaan	1. Melaksanakan pelatihan bagi pelatih 2. Pembinaan sanggar/kelompok seni 3. Menampilkan / mengadakan event baik ditingkat kota, provinsi atau nasional	
	Kesekretariatan	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	1) belum maksimalnya pengelolaan BMD khususnya pada satuan pendidikan; 2) belum maksimalnya tindak lanjut dari evaluasi kinerja	1) pelaksanaan rekonsiliasi terhadap penatausahaan keuangan dan BMD secara berkala; 2) evaluasi kinerja dan hasil tindak lanjut secara berkala	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 5 Februari 2025



Q. URUSAN PERPUSTAKAAN

Tabel 3. 25 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Perpustakaan)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Perpustakaan	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pembinaan Perpustakaan	4,10	6,15	Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan	Mengajukan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana perpustakaan	

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 4 Februari 2025

R. URUSAN KEARSIPAN

Tabel 3. 26 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Kearsipan)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Kearsipan	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Program Pengelolaan Arsip	12,80	12,90	Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana kearsipan khususnya sarana depo arsip serta Mobil Layanan Kearsipan untuk mendukung usaha tertib arsip dan layanan restorasi arsip masyarakat	Mengajukan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana kearsipan	

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 4 Februari 2025



3.1.1.3.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

A. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 3. 27 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Kelautan Dan Perikanan)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Kelautan Dan Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan (%)	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	4,2	6,1			
		Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kecil (indeks)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	0,86	97,18	Dalam renstra tahun 2019-2024 target yang dicantumkan untuk IKU urusan kelautan dan perikanan (NTN dan NTPi) sebesar 0,86 dan 1,17 namun basis data yang digunakan pada provinsi dan nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan Dan Perikanan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan maka untuk capaian NTN dan NTPi Kota Probolinggo Tahun 2024 menggunakan perhitungan dengan formulasi yang baru mengacu pada provinsi dan nasional yaitu 97,18 dan 94,93		
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (indeks)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, 4 Februari 2025



B. URUSAN PARIWISATA

**Tabel 3. 28 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Pariwisata)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pariwisata	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	13,50%	13,51%			
			Program Pemasaran Pariwisata					
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intektual					
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata					

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 3 Februari 2025

C. URUSAN PERTANIAN

**Tabel 3. 29 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Pertanian)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pertanian	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian (%)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0,57	1,37			
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian					
		Nilai Tukar Petani (NTP) (indeks)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	111,3	111,33			
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian					
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					



			Program Perizinan Usaha Pertanian					
			Program Penyuluhan Pertanian					

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, 4 Februari 2025

D. URUSAN PERDAGANGAN

Tabel 3. 30 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Perdagangan)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Perdagangan	Peningkatan Nilai Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	500 Milyar	4.117.784.112.233	hanya 3 dari 11 Pasar di Kota Probolinggo yang telah Di Revitalisasi Pasar menuju Pasar SNI	DKUP butuh anggaran Revitalisasi Pasar untuk 8 Pasar lainnya sehingga sarana prasarana perdagangan bisa memadai dan bisa bersaing dengan Toko Modern	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting					
			Program Pengembangan Ekspor					
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen					

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, 5 Februari 2025

E. URUSAN PERINDUSTRIAN

Tabel 3. 31 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Perindustrian)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Perindustrian	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Perencanaan dan pembangunan industri	50.000.000.000	49.970.000.000			
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri					
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 6 Februari 2025



3.1.1.3.4 Pelaksanaan Unsur Staf

A. SEKRETARIAT DAERAH

Tabel 3. 32 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Unsur Staf)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Unsur Staf	Persentase Perangkat daerah yang memperoleh Nilai Reformasi Birokrasi BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100			
			Program Perekonomian Dan Pembangunan					
		Persentase Keterpenuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam LPPD sesuai ketentuan perundangan-undangan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100	100			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80,00	85,36			
		Indeks Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,5	4,15			

Sumber : Sekretariat Daerah, 4 Februari 2025



B. SEKRETARIAT DPRD

Tabel 3. 33 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Unsur Staf)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Non Urusan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat DPRD	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	74,00	85,07	➤ Belum Optimalnya kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD ➤ Peran ganda yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD sebagai lembaga yang melayani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekaligus sebagai OPD yang berdiri sendiri di bawah Kepala Daerah (Wali Kota) dimana kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda yaitu sebagai Badan Pembentukan Perda dan sebagai eksekutif akan menjadikan posisi Sekretariat DPRD harus bisa menjadi mediator untuk menyesuaikan kepentingan kedua lembaga tersebut ➤ Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang ditetapkan, sehingga alokasi waktu pembahasan bahan acara tidak dapat diseragamkan ➤ Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang sering terjadi perlu disosialisasikan kepada semua pihak sehingga tidak menghambat kelancaran dan tertib administrasi.	- Peningkatan Kapasitas SDM dengan melaksanakan Bimtek, ASDEKSI, Sosialisasi dan Pelatihan - Peremajaan dan Pemeliharaan secara berkala sarana dan prasarana kantor dlm mendukung kegiatan DPRD - Pemenuhan Penyediaan Anggaran Program dan Kegiatan DPRD - Koordinasi percepatan pencairan UPD DPRD - Koordinasi dan penginformasian terkait perencanaan dan realiasi anggaran kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD - Perlu adanya kegiatan harmonisasi terkait layanan dan tupoksi Sekretariata DPRD kepada DPRD - Persiapan Kegiatan Rapat telah dilaksanakan satu jam sebelumnya - Koordinasi secara intens terkait pelaksanaan dan ketepatan waktu rapat maupun kegiatan lainnya	-

Sumber : Sekretariat DPRD, 5 Februari 2025



3.1.1.3.5 Pelaksanaan Unsur Pengawasan

Tabel 3. 34 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Pengawasan)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi kinerja minimal memuaskan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	75%	75%	1. Rumusan indikator kinerja yang dimiliki oleh perangkat daerah, serta kecukupan indikator kinerja dalam mengawal sasaran Pemda, belum dilakukan reviu secara menyeluruh. 2. 2. Menyempurnakan kualitas penjenjangan kinerja di tingkat Pemda maupun perangkat daerah dengan memastikan bahwa penjenjangan kinerja yang disusun telah memperhatikan hubungan sebab-akibat dalam proses penentuan faktor yang mempengaruhi kinerja pada setiap jenjang level	Melakukan Desk SAKIP ke masing-masing perangkat daerah dengan membentuk tim yang terdiri dari Inspektorat, Bappeda, dan Bagian Organisasi.	
2		Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	91%	94,54%	1. Temuan pada tahun-tahun sebelumnya terkait perjanjian kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan aset oleh Pemerintah Daerah. 2. Temuan mengenai piutang pada tahun sebelumnya yang belum diverifikasi serta proses penghapusan piutang yang telah jatuh tempo namun belum dilaksanakan. 3. Temuan atas pekerjaan fisik yang hingga saat ini belum dilakukan pelunasan oleh pihak penyedia. Temuan terkait sertifikasi dan permasalahan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah	1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin kepada perangkat daerah yang menangani BMD, guna memastikan bahwa setiap perjanjian kerja sama telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan sesuai ketentuan. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah untuk menginventarisasi dan memverifikasi piutang yang ada. dengan tujuan untuk	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Daerah yang memerlukan penelusuran lebih lanjut serta percepatan proses penyertifikatan.	menentukan apakah piutang tersebut masih dapat ditagih atau sudah tergolong macet, sehingga langkah penghapusan piutang yang sudah jatuh tempo dapat segera dilakukan sesuai prosedur. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penagihan dilakukan dengan tegas kepada pihak penyedia. Upaya ini penting dilakukan agar pelunasan dapat diselesaikan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Melakukan monitoring dan evaluasi yang intensif terhadap pelaksanaan penyertifikatan aset Pemda, serta menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pensertifikatan dan memastikan bahwa semua aset Pemda tercatat dengan sah dan jelas.	
3		Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	100%	100%	1. Terdapat kekhawatiran di kalangan masyarakat dan/atau penyelenggara Negara mengenai kebocoran identitas pelapor saat menyampaikan pengaduan, terutama terkait permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Pemerintah Kota	1. Mengembangkan dan menerapkan mekanisme perlindungan identitas pelapor yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan/atau Penyelenggara Negara dalam menyampaikan pengaduan,	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Probolinggo. 2. Masyarakat dan/atau Penyelenggara Negara belum sepenuhnya memahami tata cara pelaporan pengaduan masyarakat. Sumber daya manusia yang bertugas mengelola pengaduan masih terbatas.	khususnya terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Probolinggo. 2. Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada Penyelenggara Negara mengenai tata cara penerimaan dan pengelolaan pelaporan pengaduan, baik melalui kegiatan langsung maupun media komunikasi yang mudah diakses. Menambah dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang bertugas mengelola pengaduan, sehingga proses penanganan pengaduan dapat dilakukan secara lebih optimal, cepat, dan efisien.	
4		Level Maturitas SPIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	3	3	1. Pimpinan di perangkat daerah belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko dan proses bisnis secara terintegrasi, sehingga pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi belum berjalan secara optimal. 2. Proses monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan di perangkat daerah masih belum optimal. Selain itu, perubahan dan penyesuaian kebijakan belum dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pelaksanaan kebijakan cenderung kurang adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan organisasi.	1. Penerapan manajemen risiko dan proses bisnis dimulai dengan memberikan pelatihan serta sosialisasi kepada pimpinan dan pegawai perangkat daerah untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, dilaksanannya pengawasan melalui kegiatan monitoring penerapan manajemen risiko melalui analisis kegiatan utama guna mengidentifikasi risiko yang	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
							relevan serta menetapkan langkah mitigasinya. 2. Optimalisasi proses monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap kebijakan di perangkat daerah dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis terkait metode evaluasi kebijakan yang berbasis data. Hasil Monev harus diintegrasikan ke dalam perencanaan kebijakan berikutnya agar lebih relevan dan efektif. Selain itu, optimalisasi tim SPIP di setiap perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk memantau dan merekomendasikan perubahan kebijakan secara berkelanjutan melalui forum evaluasi rutin untuk membahas keberhasilan, tantangan, serta rencana perubahan kebijakan di masa mendatang.	

Sumber : Inspektorat, 5 Februari 2025



3.1.1.3.6 Pelaksanaan Fungsi Penunjang

A. Perencanaan

Tabel 3. 35 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Perencanaan)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Perencanaan	Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan berkualitas baik	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	95%	95%			
		Persentase Program dengan capaian minimal 80%	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	89%	Adanya penyesuaian anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan baru bisa dilaksanakan pada triwulan IV	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan PD yang dilaksanakan secara berkala	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 5 Februari 2025

B. Keuangan

Tabel 3. 36 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Keuangan)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Keuangan	a. Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,60%	-1,67%	Terdapat penurunan Realisasi PAD dari Lain-Lain PAD yang Sah karena 1. Pembayaran BPJS pada bulan Desember 2024 hanya satu kali 2. Menurunnya penempatan besaran Dana Deposito Pemerintah Kota Probolinggo	1. Mengatur Aliran Kas Pemerintah Kota Probolinggo dengan lebih optimal	
		b. Persentase OPD dengan Realisasi Diatas 90%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	60%	96,43%	Terdapat 1 SKPD yang realisasinya 89,87%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
		c. Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%			
		d. Persentase OPD yang Memiliki Kevalidan Data Aset	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	98%	98%	Semua SKPD sudah melaksanakan proses inventarisasi secara tepat dan menyeluruh (Kesesuaian keberadaan, lokasi, kondisi dan pemanfaatan)	Melaksanakan Rekonsiliasi BMD setiap bulan dan updating database BMD (meliputi penghapusan, pemindahtanganan, dan penyusutan BMD) pada tiap OPD setiap 3 bulan	

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 17 Januari 2024

C. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Tabel 3. 37 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	Indeks Profesionalitas Aparatur	Program Kepegawaian Daerah	65	78,02	Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur diamanatkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN sebagaimana yang dimaksud, maka diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN guna melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Realisasi Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kota Probolinggo Tahun 2023,	Upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan adalah dengan menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor : 893/927/425.203/2021 tanggal 11 Februari 2022 perihal Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan sekaligus peningkatan	
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						dari target awal yang telah ditetapkan yaitu 64,50 terealisasi sebesar 78,02 (kategori sedang) untuk ASN, sebesar 78,32 (kategori sedang) untuk PNS, dan sebesar 74,88 (kategori sedang) untuk PPPK. Nilai ini didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Nasional yang telah dirilis secara resmi berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 395/B-AK.04/SD/KR.II/2024 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional II BKN Surabaya. Sedangkan untuk Tahun 2024 target IP ASN sebesar 65 dan terealisasi sebesar 78,02 untuk ASN, 78,32 untuk PNS, dan 74,88 untuk PPPK (nilai masih sama dengan Tahun 2023). Nilai indeks pada Tahun 2024 merupakan hasil sementara yang ditarik secara real time dari Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Nasional. Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 nilai Indeks Profesionalitas Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo telah melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena terdapat perubahan perumusan perhitungan Indeks Profesionalitas Aparatur pada Tahun 2024. Meskipun perolehan nilai Indeks Profesionalitas Aparatur pada Tahun 2024 sudah melebihi target, namun masih terdapat beberapa permasalahan terkait pengoptimalan Indeks Profesionalitas Aparatur yaitu antara lain : 1. Belum adanya prioritas pengelolaan anggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi dengan intensitas yang tinggi bagi para	kualifikasi pendidikan serta untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar yang dilakukan secara selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Selain meluncurkan surat edaran dan Perwali, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pada tahun 2024 adalah dengan melaksanakan Inovasi BKPSDM Kota Probolinggo, yaitu giat DOU ASN (Dari Oleh Untuk ASN) yang mana tidak ada batasan jumlah peserta karena bisa diikuti secara daring serta giat pengembangan kompetensi manajerial dan kompetensi teknis lainnya untuk peningkatan kapasitas ASN. Selain DOU ASN yang juga merupakan inovasi kebanggaan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, terdapat juga upaya untuk mendongkrak kualifikasi Pendidikan dengan mengakui ijazah terakhir melalui Penyesuaian Ijazah. Pada tahun 2023 telah diselenggarakannya Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Daerah. Dengan diadakannya giat tersebut, maka ijazah para Pegawai Negeri Sipil yang telah didapatkan pada tahun-tahun sebelumnya dapat diakui dan membantu menaikkan pada indeks kualifikasi.	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); 2. Kurangnya kesadaran para Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan Kualifikasi Pendidikan; 3. Rendahnya kualifikasi pendidikan yang dimiliki pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mengakibatkan jumlah pelaksana yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah juga rendah		

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, 4 Februari 2025

D. Penelitian dan Pengembangan

Tabel 3. 38 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 (Urusan Penelitian dan Pengembangan)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	Penelitian dan Pengembangan	90%	100%			

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 5 Februari 2025



E. Fungsi Penunjang Lainnya

Tabel 3. 39 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Fungsi Penunjang)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Fungsi Penunjang	Persentase Orkemas yang aktif	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	87%	99,11%	Kurangnya partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Sosialisasi program dan kegiatan Pemerintah kepada masyarakat perlu ditingkatkan	-
2		Prosentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Umum	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	81%	100%	Kurangnya pemahaman masyarakat terutama para pemilih pemula dalam hal pendidikan, etika dan budaya politik demokrasi sehingga tingkat partisipasi politik masyarakat	Peningkatan Peran aktif Forum Lintas Sektoral dan Agama dan Parpol	-
3		Persentase Potensi Konflik Sosial Masyarakat yang terselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	Semakin beragamnya sumber – sumber potensi konflik	Meningkatkan Forum-forum lintas sektoral dan lintas agama yang selama ini berkontribusi terhadap pembangunan di Kota Probolinggo	-
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	90%	90%			
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	90%	90%	Melemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan	Meningkatkan Forum-forum lintas sektoral dan lintas agama yang selama ini berkontribusi terhadap pembangunan di Kota Probolinggo	
4	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97%	97%			-	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 4 Februari 2025



3.1.1.3.7 Pelaksanaan Fungsi Koordinasi

Tabel 3. 40 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024
(Fungsi Koordinasi)

A. Kecamatan Mayangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	84,90	90,50			
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
2	Non Urusan	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

Sumber : Kecamatan Mayangan, 6 Februari 2025

B. Kecamatan Kademangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	84,80	97,25	-	-	-
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
2	Non Urusan	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	-	-	-



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
		Sesuai ketentuan.						

Sumber : Kecamatan Kademangan, 6 Februari 2025

C. Kecamatan Kanigaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Kewilayahan	IKM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	84,50	80,25	a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat layanan b.Perlu peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	a.Pelaksanaan Sosialisasi tentang layanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial b.Pembinaan dan Monitoring secara berkala terhadap hasil pelayanan	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			a.Perlu Peningkatan sistem Data terpadu Pelaporan Pengaduan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi secara berkala	
2	Non Urusan	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang perkantoran seperti Lap top dan PC	Membuat usulan kepada TAPD	

Sumber : Kecamatan Kanigaran, 6 Februari 2025

D. Kecamatan Wonoasih

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Fungsi Koordinasi (Kecamatan)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	94,14	94,17	-	-	-
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			-	-	-



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
2	Non Urusan	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-

Sumber : Kecamatan Wonoasih, 6 Februari 2025

E. Kecamatan Kedopok

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Kewilayahan	IKM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	83	86	a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat layanan b. Perlu peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan a. Perlu Peningkatan sistem Data terpadu Pelaporan Pengaduan Masyarakat	a. Pelaksanaan Sosialisasi tentang layanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial b. Pembinaan dan Monitoring secara berkala terhadap hasil pelayanan Monitoring dan Evaluasi secara berkala	
2	Non Urusan	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang perkantoran seperti Lap top dan PC	Membuat usulan kepada TAPD	

Sumber : Kecamatan Kedopok, 6 Februari 2025



3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam tabel 3.41 sebagai berikut :

Tabel 3. 41 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
1	Penyelenggaraan BOSDA dan BOP PAUD Daerah	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah	Pengelolaan Anggaran Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
2	Penyelenggaraan BOSDA dan BOP PAUD Daerah	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah	Pengelolaan Anggaran Pendidikan BOSDA dan BOP PAUD, pengadaan Barang dan Jasa melalui Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Probolinggo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
3	Penguatan Pendidikan Karakter Jenjang Pendidikan Dasar	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan di Jenjang Pendidikan Dasar	Penguatan Karakter bagi peserta didik berdasarkan Profil Pelajar Pancasila	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
4	Penyediaan Bantuan Seragam bagi Peserta Didik Tidak Mampu	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Bantuan Pakaian Seragam Gratis bagi Siswa yang Tidak Mampu di Kota Probolinggo	Peningkatan Akses Pendidikan bagi penduduk yang kurang mampu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
5	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2024/2025	Peningkatan akses dan kesetaraan bagi penduduk untuk memperoleh hak layanan pendidikan sesuai dengan usia sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
6	Penetapan Status Cagar Budaya Kota Probolinggo	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Probolinggo	Pelindungan terhadap Cagar Budaya di Kota Probolinggo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
7	Pengembangan Inovasi Pelayanan Pendidikan	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Sistem Informasi	Peningkatan akses layanan pendidikan khususnya pelayanan	Dinas Pendidikan dan



NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Ijazah Online Ramah Disabilitas dan Kesetaraan	Ijazah Online	Kebudayaan Kota Probolinggo
8	Peningkatan Kualitas Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Kota Probolinggo	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan khususnya bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
9	Peningkatan Kualitas Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas	Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 100.3.3.3/27 4 / KEP / 425.012/2024 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo	Tim Pelaksana ULD Pendidikan Kota Probolinggo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
10.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	keputusan Wali Kota No. 100.3.3.3/202/KEP/425.012/2024 tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Berupa Uang Dari dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	Pengentasan Kemiskinan dan stunting	Dinsos P3A
11	Rehabilitasi Sosial	Keputusan walikota No. 100.3.3.3/277/KEP/425.012/2024 tentang Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial Tahun 2024	Penanganan PMKS	Dinsos P3A
12	Upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah guna mendukung kebutuhan pangan nasional dengan mengurangi alih fungsi lahan pertanian pangan produktif di Kota Probolinggo menjadi non pertanian	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
13	Pedoman dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 75 Tahun 2024 tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Probolinggo Tahun 2024	Menyediakan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang Terintegrasi	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
14	Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat / Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Kota	Perwali No. 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kota baik dalam aspek fisik maupun	Kecamatan Mayangan



NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	non fisik	
15	Optimalisasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Perwali No. 46 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah	Meningkatnya kualitas hidup keluarga pra sejahtera melalui terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan nyaman	Kecamatan Mayangan
16	Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat / Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Kota	Perwali No. 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kota baik fisik maupun non fisik	Kecamatan Wonoasih
17	Optimalisasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Perwali No. 46 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah	Tersedianya kebutuhan primer masyarakat yang layak	Kecamatan Wonoasih
18	Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat / Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Kota	Perwali No. 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kota baik fisik maupun non fisik	Kecamatan Kademangan
19	Optimalisasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Perwali No. 46 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah	Tersedianya kebutuhan primer masyarakat yang layak	Kecamatan Kademangan
19	Perwali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah	PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah	Penetapan Inovasi Daerah	Bappeda Litbang
20	Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/210/KEP/425.01 2/2024 Tentang Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024	Perpres RI No 142 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025	Upaya Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Probolinggo	Bappeda Litbang
21	Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/207/KEP/425.01 2/2024 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Probolinggo Tahun 2024	Perpres RI No 96 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan	Bappeda Litbang



NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
22	Program Strategis prioritas pembangunan daerah kota Probolinggo Tahun 2024	KeputusanWalikota Probolinggo Nomor 100.3.3.3 / 369/ KEP/425.012/2023	Program Strategis prioritas pembangunan daerah kota Probolinggo Tahun 2024	Bappeda Litbang
23	Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024	Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 100.3.3.3/177/KEP/425.012/2024 tentang Tim Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024	Untuk melaksanakan Penyusunan Kebutuhan dan Penataan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo
24	Penataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo melalui Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024	Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 100.3.3.3/326/KEP/425.012/2024 Tentang Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024	Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dinamis, khususnya pemenuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo
25	Optimalisasi Capaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024	Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 100.3.3.3/313/KEP/425.012/2024 tentang Tim Implementasi Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024	Untuk akselerasi perwujudan pengawasan dan pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo
26	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Promosi, dan Mutasi Kepegawaian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam formasi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024	Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 100.3.3.3/86/KEP/425.012/2024 Tentang Tim Penilai Kinerja dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja juncto Pasal 47 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo



NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
			Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; Untuk optimalisasi pelaksanaan Pengisian Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.	
27	Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Untuk Mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 139) dan dinyatakan tidak berlaku.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Tabel 3. 42 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
1	a. Masih banyaknya jumlah anak putus sekolah pada Tingkat SD dan SMP yang menjadi permasalahan di Kota Probolinggo, tentunya dapat menghambat kemajuan dan daya saing siswa. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar melaksanakan strategi dalam meminimalisir angka putus sekolah dengan cara kejar program meminimalisir angka putus sekolah dengan cara kejar program	Adapun strategi dalam rangka meminimalisir Angka Putus Sekolah antara lain : 1) memberikan kesempatan kepada Anak yang Putus Sekolah untuk melanjutkan ke Satuan Pendidikan Kesetaraan / Satuan Pendidikan Non Formal (PKBM) yang ada di Kota Probolinggo, dengan biaya gratis. 2) Telah menganggarkan untuk penanganan ATS pada Renja 2025 yang antara lain diperuntukkan untuk Program Inklusi Pendidikan Kesetaraan, Pendataan ATS bekerja sama dengan Kelurahan dan BPS Kota Probolinggo.	Penanganan dan Pencegahan Anak Tidak Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
	paket. Sehingga siswa dapat memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ijazah setara dengan SD dan SMP untuk dimanfaatkan kedepannya.			
	b. Dengan cukup banyaknya siswa SD Negeri yang tidak tertampung disekolah SMP Negeri saat pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, tentunya akan menyebabkan banyak siswa yang akan bersekolah di Swasta dengan biaya yang cukup banyak. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sekolah SMP Negeri 11 di wilayah Barat Kota Probolinggo.	Dalam rangka pembangunan SMP Negeri 11 di wilayah Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, pada tahun anggaran 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dalam taraf pelaksanaan Kajian Pembangunan SMP Negeri 11 yang dilaksanakan oleh Pihak Universitas Negeri Malang. Dan pada tahun anggaran 2025 sudah dianggarkan untuk FS dan DED Pembangunan SMP Negeri 11	Pemerataan Akses dan Kesenjangan Kualitas Pendidikan di Kota Probolinggo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	c. Realisasi dan perhitungan gaji PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat selisih antara pagu dan jumlah pegawai lapangan. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar perencanaan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya dilakukan dengan matang, sehingga realisasi anggaran dapat dimaksimalkan dengan baik.	Perhitungan Gaji ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dihitung berdasarkan Jumlah ASN sebagaimana pada Simpeg Kota Probolinggo, dan dihitung untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan ditambah rencana Gaji 13 dan 14, serta Accress sebesar 2,5%. Selain itu juga pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat anggaran Tunjangan diantaranya Tunjangan Gaji ASN, TPP dan TPG serta Tamsil.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sesuai dengan kebutuhan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	d. Pada perencanaan anggaran pengadaan TIK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat	Pengadaan TIK sudah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari anggaran DAK Fisik SD 2024, dan dalam pelaksanaannya	Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Dasar SD yang bersumber DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
	kendala pada proses E-Katalog di PBJ, sehingga anggaran pengadaan TIK tidak terealisasi. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan supaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi untuk perencanaan pengadaan TIK pada Pemerintah Kota Probolinggo.	dengan pendampingan dari pihak APH Kota Probolinggo dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Probolinggo. Adapun pelaksanaan pada tahun anggaran 2024 pada Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0042 - PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TIK, dengan anggaran total sebesar Rp. 500.000.000,- . Sasaran penerima adalah SD Negeri Jrebeng Lor 1, SD Negeri Jrebeng Lor 7, SD Negeri Kebonsari Wetan 1, SD Negeri Kedopok 2 dan SD Negeri Mangunharjo 6. Untuk rencana tindak lanjut pemenuhan sarana prasarana TIK pada Satuan Pendidikan Dasar tetap kami usulkan melalui aplikasi KRISNA yang sebelumnya berdasarkan identifikasi kebutuhan TIK pada Satuan Pendidikan Dasar dari DAPODIK, usulan satuan pendidikan dan verifikasi lanjutan / lapangan.	Fisik	
	e. Terkait dengan masih terdapat sekolah SD/MI dan SMP/MTS yang tidak memiliki ruang UKS dan juga adanya ruang UKS yang ada tetapi sudah rusak/tidak layak. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendata dan menganggarkan untuk Pembangunan ruang UKS dan perbaikan ruang UKS.	Ketersediaan Ruang UKS pada satuan Pendidikan mulai Satuan PAUD, SD dan SMP diidentifikasi melalui Data Sarana Prasarana pada masing-masing DAPODIK Satuan Pendidikan dengan dilengkapi dokumen kondisi Ruang UKS masing-masing Satuan Pendidikan tersebut. Pada Tahun Anggaran 2024, sudah dianggarkan dengan sasaran locus adalah SD Negeri Jrebeng Lor 7, SD Negeri Sukabumi 2. Dan untuk mengakomodir / memfasilitasi pemenuhan kebutuhan Ruang UKS tersebut maka dilaksanakan identifikasi ulang / verifikasi terhadap Data Sarana Prasarana khususnya kondisi dan kebutuhan Ruang UKS Pada Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP agar dapat diusulkan pada Renja 2025 melalui aplikasi KRISNA.	Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Dasar SD yang bersumber DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	f. Kurang baiknya Tata Kelola Kepegawaian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat pegawai yang	Penataan kepegawaian yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyesuaikan dengan Analisis Beban Kerja (ABK), sehingga beban kerja masing-	Penataan Manajemen dan Peningkatan Kinerja ASN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
	ditugaskan kurang nyaman dengan pekerjaannya. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu menata manajemen kepegawaian kembali.	masing orang sudah disesuaikan jabatan yang ada. Evaluasi pelaksanaan kinerja personil dilakukan setiap bulan untuk mengetahui kinerja yang harus tingkatkan dalam rangka mencapai target organisasi. Selain itu dilakukan evaluasi kinerja Sekretariat dan evaluasi kinerja tiap bidang yang dilakukan secara rutin untuk menciptakan kondisi yang nyaman dan kondusif di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu factor penguatan integritas menjadi perhatian dalam pengelolaan manajemen pegawai untuk mewujudkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menuju Zona Integritas (ZI).		
2	a. Pemanfaatan 29 Ambulan sebagai fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Probolinggo secara garis umum masih terdapat banyak kendala, di antaranya kurang cepatnya penanganan pasien dan keterlambatan merespon aduan dari masyarakat. Hal tersebut karena parkir Ambulan tidak ditempatkan pada masing-masing kelurahan. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar memfasilitasi sarana dan prasarana untuk lahan parkir 29 ambulan dan Ambulan harus ditempatkan pada masing-masing kelurahan serta mengoptimalkan kinerja pegawai supaya masyarakat merasakan manfaatnya.	Ambulans Siaga sebanyak 29 unit yang saat ini terdistribusi di 6 wilayah Puskesmas pada 5 kecamatan adalah jenis Ambulans Transport. Menurut Pedoman Teknis Ambulans yang diterbitkan oleh Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019, Ambulans jenis ini harus dilengkapi dengan peralatan Bantuan Hidup Dasar dan petugas dengan kompetensi Bantuan Hidup Dasar. Pedoman tersebut menjadi dasar bagi Dinas Kesehatan PPKB untuk menyerahkan pengelolaan Ambulans Siaga kepada fasilitas Kesehatan (Faskes) yang ada di wilayah tersebut yaitu Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) mengingat syarat yang ditetapkan dalam pedoman teknis tersebut, meskipun peruntukannya tetap untuk 29 kelurahan sesuai tujuan awal. Bahwa adanya Ambulans Siaga di beberapa kelurahan tidak parkir di kelurahan peruntukannya, hal ini dikarenakan : 1. Tidak semua kelurahan memiliki Faskes (Puskesmas/Pustu) sehingga untuk keamanannya (mengingat di dalam Ambulans ada peralatan	Pemanfaatan 29 Ambulan sebagai fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Probolinggo	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		medis Kesehatan), maka untuk parkirnya lalu ditempatkan di Puskesmas Induk. Data Dinkes PPKB, dari 29 Kelurahan ternyata ada 4 kelurahan yang tidak ada faskesnya (2 kelurahan di Kec.Wonoasih, 1 kelurahan di Kec.Kedopok dan 1 kelurahan di Kec.Kademangan) 2. Tidak semua kelurahan yang mempunyai Faskes (Puskesmas/Pustu) memiliki lahan untuk dibangun garasi sebagai penyimpanan Ambulans Siaga sehingga dengan pertimbangan yang sama yaitu keamanan maka Ambulans peruntukkan kelurahan tersebut di parkir/disimpan di Puskesmas Induknya. Dinkes PPKB telah berupaya dengan berkonsultasi ke Inspektorat dan Bagian Aset terkait kemungkinan untuk membangunkan garasi di lahan umum (kantor kelurahan atau tanah warga), terkendala karena asset tersebut bukan milik Dinkes PPKB maka secara aturan tidak diperbolehkan Adapun respontime yang dianggap lambat, akan menjadi bahan evaluasi Dinkes PPKB untuk melakukan perbaikan pelayanan dan pembinaan kepada petugas. Selain itu pula, permintaan Ambulans Siaga melalui aplikasi Call Center 112 harus melalui server yang dikelola oleh PD lain sehingga ketika server mengalami kendala (Error) maka informasi permintaan sampai ke petugas juga terkendala/melambat. Untuk selanjutnya, Dinkes PPKB akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk membantu kepastian server bekerja dengan baik agar kecepatan informasi dari permintaan warga ke petugas pelaksana juga cepat sampai. Demikian, terima kasih.		
	b. Terkait pengelolaan lahan parkir di RSUD dr. Moh Saleh yang	Rumah sakit Moh Saleh telah melakukan kajian appraisal sewa lahan parkir dan sedang	Pengelolaan lahan parkir di RSUD dr. Moh Saleh	RSUD dr. Moh. Saleh



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
	dikelola oleh pihak ketiga. Hal tersebut akan menyebabkan terjadinya pungutan liar di area RSUD dr. Moh Saleh. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar pihak RSUD dr. Mohamad Saleh membuat perencanaan untuk pembangunan portal parkir elektronik.	berproses dengan pihak penyedia yang memiliki ijin pengelolaan parkir untuk melakukan pengelolaan lahan parkir		
	c. Banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan RSUD dr. Moh Saleh yang kurang baik dalam pelayanan, sehingga penilaian publik terhadap pelayanan pasien di RSUD dr. Moh Saleh dinilai buruk. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar mengevaluasi pegawai termasuk tenaga satpam untuk menerapkan fungsi pelayanan yang baik.	1. Rumah sakit sudah melakukan pelatihan service excellent kepada SDM rumah sakit terutama sdm bagian front office. 2. Akan melakukan evaluasi dan monitoring secara intensif pada karyawan agar bisa memberi pelayanan yang lebih baik 3. melakukan pembinaan terhadap karyawan yang mempunyai Atitude kurang baik	pelayanan RSUD dr. Moh Saleh	RSUD dr. Moh. Saleh
3.	Pada tahun 2023 banyak program pembangunan seperti lampu hias danugu-tugu miniatur yang kurang bermanfaat bagi masyarakat. Mengingat banyak dijumpai banjir karena selokan yang tersumbat, jalan rusak, dan lain-lain. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo agar mendahulukan kepentingan masyarakat untuk perbaikan drainase, perbaikan jalan, dan lain-	Pembangunan lampu hias tugutugu miniatur merupakan salah satu upaya untuk memperindah Kota Probolinggo dan mendukung impressive probolinggo city sebagai city branding. Pada tahun 2023 juga telah dianggarkan untuk kegiatan pemeliharaan jalan, drainase, jaringan irigasi dan sungai, fasilitas umum bangunan dan gedung, termasuk sarana air minum dan sanitasi serta infrastruktur lainnya yang menjadi tugas fungsi DPUPR PKP. Selain itu telah dilakukan koordinasi pemeliharaan infrastruktur yang menjadi aset Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang ada di Kota Probolinggo.	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur Kota Probolinggo	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
	lain, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya Kota Probolinggo.			
4.	a. Perlu diketahui, adanya kemacetan yang ada di Jalan Supriadi Kelurahan Curahgrinting terjadi karena banyaknya pedagang liar yang berjualan dan parkir sepeda motor para penjemput dibahu jalan. Sehingga sering terjadi macet diarea tersebut. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan supaya Satuan Polisi Pamong Praja bertindak sesuai peraturan daerah yang berlaku. Selain itu, perlu adanya koordinasi dengan DISHUB dan DKUMP dalam mentertibkan pedagang liar dan penertiban para penjemput, sehingga tidak terdapat lagi kemacetan yang terjadi di area tersebut.	1. Satpol PP akan berkoordinasi dengan PD terkait (Dishub, DKUMP) Untuk melaksanakan kembali Sosialisasi dan pembinaan kepada PKL yang berada di jalan Supriadi 2. Satpol PP akan berkoordinasi dengan OPD terkaitdan mengajak Satlantasuntuk melaksanakan penertiban PKL yang berada di jalan supriadi belakang Eratex dengan memberikan tindakan yustisi(Tilang kendaraan) 3. Berkoordinasi dengan OPD terkait dan manajemen PT Eratex djaja untuk mencari solusi kemacetan di jalan supriadi belakang eratex dengan menyiapkan tempat parkir dalam dan di buatjalur satu arah. dan menyiapkan kendaraan antar jemput pegawai.	1. Mengingatkan kembali kepada PKL yang lama dan atau baru agar paham dan mengerti bahwa tidak di peroleh berjualan di jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena melanggar dan dapat menyebabkan kemacetan 2. Diadakan penertiban dengan mengajak Satlantas dengan Tindakan Yustisi(tilang kendaraan) agar ada efek jera dan tidak berjualan di jalan yang dapat menyebabkan menyempitkan lajur jalan sehingga timbul kemacetan 3. Dengan adanya parkir dalam dan di buat lajur satu arah tentunya akan dapat mengurangi antrian sepeda yang parkir dijalan, sehingga arus bisa lancar dan dapat mengurangikemacetan	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo
	b. Banyaknya terjadi kebakaran di Kota Probolinggo yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti korsleting listrik, keteledoran manusia, maupun karena terdapat bahan mudah	Terkait keterbatasan anggaran pada tahun 2024 sehingga pengadaan APAR belum bisa terlaksana pada tahun 2024. Satpol PP akan melakukan evaluasi kembali dan berkoordinasi dengan kelurahan dan BPPKAD bidang BMD terkait regulasi aset untuk	Mengurangi terjadinya kebakaran di Kota Probolinggo yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti korsleting listrik, keteledoran manusia, maupun	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
	terbakar. Sedangkan, jarak antara pemadam kebakaran dan lokasi kebakaran cukup jauh, sehingga kebakaran tidak cepat tertangani karena harus menunggu datangnya kendaraan pemadam kebakaran. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan supaya menganggarkan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) yang direalisasikan ke tiap kelurahan.Selain itu, perlu adanya pelatihan penanganan kebakaran menggunakan media APAR kepada tiap kelurahan. Sehingga dapat dilakukan penangan dini terjadinya kebakaran.	penganggaran APAR pada tahun selanjutnya.	karena terdapat bahan mudah terbakar. Sedangkan, jarak antara pemadam kebakaran dan lokasi kebakaran cukup jauh, sehingga kebakaran tidak cepat tertangani karena harus menunggu datangnya kendaraan pemadam kebakaran	
5.	Perlu diketahui bahwa penyaluran bantuan dana dari pusat, provinsi maupun daerah yang akan segera direalisasikan. Mengingat bantuan yangisalurkan banyak yang tidak tepat sasaran, maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan penyaluran bantuan supaya lebih teliti, sehingga bantuan dapat tepat sasaran dan tersalurkan dengan baik.	Dilakukan pemadanan data sasaran penerima bantuan pusat dan provinsi dengan sasaran penerima bantuan daerah	Meminimalkan data ganda dan tidak tepat sasaran	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo
6.	a. Pada tahun 2023 para petani dan nelayan yang sulit mendapatkan solar	Fasilitasi dan pendampingan DKPPP terkait Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Minyak Solar) berupa penerbitan	Penyaluran Bahan Bakar Minyak Tertentu (Solar) untuk petani dan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
	subsidi, disisi lain pembelian solar harus menggunakan barcode berdasarkan rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar mendata para petani dan nelayan yang ada di Kota Probolinggo untuk memberikan kemudahan melalui Fasilitas dari Dinas Pertanian, dan memberikan pendampingan dalam mencukupi kebutuhan solar untuk keperluan pertanian di Kota Probolinggo.	rekomendasi pembelian Solar kepada petani dan nelayan berpedoman kepada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan melalui aplikasi Xstar BPH Migas. Selain itu DKPPP juga melakukan koordinasi dengan Bagian Perekonomian dan Pom Bensin agar melayani petani/nelayan pada saat pengambilan solar bersubsidi dan memberikan alokasi solar yang diterima sesuai dalam rekomendasi selama rekomendasi masih berlaku. Untuk usulan kebutuhan solar bagi petani dan nelayan berdasarkan data kepemilikan alat/mesin pertanian, luas lahan serta data kapal.	nelayan	Dan Perikanan Kota Probolinggo
	b. Kelangkaan pupuk pada sektor pertanian menjadi salah satu keresahan yang dihadapi oleh para petani. Oleh karena itu, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan supaya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan membuat tim satgas dan harus Pro-aktif dalam membantu para petani mendapatkan pupuk.	Penetapan Alokasi pupuk bersubsidi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota. Untuk tingkat Pusat sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Untuk tingkat Provinsi sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/751/KPTS/013/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023. Sedangkan untuk tingkat Kota Probolinggo sesuai Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 188.45/315/KEP/425.012/2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor	Kelangkaan Pupuk Bersubsidi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		Pertanian Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023 Dalam hal pengawasan, Pemerintah Kota Probolinggo sudah memiliki Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang diketuai oleh Kepala DKUP untuk melakukan pengawasan dalam peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk/pestisida. Untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan mendukung pertanian ramah lingkungan, DKPPP melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pelatihan pembuatan dan penggunaan pupuk organik dan pestisida alami bagi petani.		
	c. Tidak adanya program sapi kreman di tahun 2023, membuat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kesulitan mendorong para peternak untuk mengisi kandangnya setelah 2 tahun terakhir banyak sapi yang terjangkit bermacam-macam penyakit. Berkaca dari tahun 2023, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan untuk mendorong Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan agar menganggarkan program sapi kreman untuk kedepannya.	Program sapi kreman ke depan dipertimbangkan untuk dilaksanakan lagi dengan memperhatikan beberapa hal antara lain : 1. Kondisi perkembangan dan potensi kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). 2. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 311 tahun 2023 Tentang Penetapan Status Situasi Penyakit, maka Kota Probolinggo dinyatakan sebagai daerah tertular PMK dan LSD. 3. Teknis pelaksanaan pengadaan sapi kreman sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa melalui e-catalog dan non tunai. 4. Kemampuan dan prioritas keuangan daerah.	Program sapi kreman sebagai salah satu bentuk pemberdayaan dan peningkatan perekonomian masyarakat dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo
7.	Banyak terdapat sampah yang masih belum tertangani oleh Dinas Lingkungan Hidup karena volume sampah yang terus	Timbulan sampah di Kota Probolinggo per hari 97 Ton. Adapun sampah yg masuk di TPA sekitar 70 Ton/hari, sisanya dikelola masyarakat sebesar 19	Sampah di Kota Probolinggo dapat tertangani dengan baik dan memiliki nilai tambah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
	naik. Oleh karena itu, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar Dinas Lingkungan Hidup menganggarkan pembelian alat Incinerator untuk pembakaran sampah, sehingga pengelolaan sampah dapat maksimal.	Ton/hari dan yang msh tercecerc sekitar 8 Ton/hari. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 3, dimana pengelolaan sampah perlu dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Incenerator tidak ekonomis dan tidak memiliki nilai tambah ekonomi karena sampah di Kota Probolinggo didominasi oleh sampah rumah tangga yang mengandung banyak air. Sehingga butuh BBM yg banyak dan tidak ramah lingkungan karena emisi tinggi, serta incenerator banyak menghasilkan abu hasil pembakaran. DLH Kota Probolinggo berencana menggunakan teknologi pengolahan sampah berupa Mesin RDF karena hasil pengolahan sampah yang dihasilkan berupa RDF memiliki nilai ekonomi dan dapat dijual sebagai bahan bakar pengganti di PLTU dan Pabrik Semen serta sudah mengusulkan anggaran pembelian Mesin RDF pada TAPD untuk anggaran tahun 2025 sesuai Nota Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tanggal 5 April 2024 Nomor : 600.4.15/463/425.116/2024 Perihal : Laporan Rencana Penanganan Sampah Kota Probolinggo Tahun 2024 s.d 2025.	ekonomi sehingga dapat menambah PAD Kota Probolinggo.	



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
8.	Lampu hias yang sebelumnya diadakan tahun 2022 telah banyak yang rusak/mati, sehingga fungsi memperindah kota probolinggo kurang maksimal. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar Dinas Perhubungan menganggarkan pemeliharaan lampu hias kota sehingga masyarakat kota probolinggo bisa menikmati fungsi dari lampu hias itu sendiri.	Direncanakan untuk dilakukan pemeliharaan/perbaikan lampu hias yang mengalami kerusakan pada usulan perubahan anggaran (PAPBD) TA 2024	Tujuan : menunjang estetika dan keindahan kota, masalah yang akan diselesaikan akan diadakan pemeliharaan dan perbaikan	Dinas Perhubungan
9	Bantuan internet untuk Lembaga keagamaan dari pemerintah kota probolinggo yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sasarannya tidak merata. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar realisasi menambah sasaran bantuan tersebut sehingga penerimanya lebih merata.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaksanakan survei penggunaan internet bagi lembaga keagamaan.	Kebutuhan internet dapat terpenuhi sebagai dukungan dalam proses pengelolaan informasi dan publikasi kegiatan pada lembaga keagamaan.	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Perlu diketahui, dari tahun 2015 adanya piutang retibusi di Pasar Gotong Royong yang cukup banyak dan piutang tersebut ada di setiap tahun berjalan. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan supaya piutang dihapuskan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Sehingga piutang tersebut tidak muncul pada tiap tahunnya.	kita sudah melaksanakan Rapat Teknis dengan BPPKAD dan Inspektorat untuk Proses Penghapusan Piutang, tahapan awal kita akan mengidentifikasi dan memetakan piutang data pedagang Pasar Gotong Royong untuk daftar usulan penghapusan piutang kemudian dijadwalkan reviu dengan inspektorat untuk dibuatkan BA dan sesuai dengan Perwali 143 Tahun 2021 akan diajukan permohonan penghapusan kepada Walikota	Besarnya piutang retribusi dalam proses penghapusan piutang sehingga akan mengurangi beban piutang retribusi UPTD Pasar	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
11	Pendapatan dari sektor wisata kolam renang mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan karena minimnya minat pengunjung masyarakat	Menanggapi rekomendasi DPRD Kota Probolinggo Tahun 2023 terkait Pendapatan dari sektor wisata kolam renang mengalami penurunan, yang mana DPRD Kota Probolinggo	Optimalisasi Pendapatan dari sektor wisata kolam renang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
	kota probolinggo di beberapa kolam renang yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. oleh karena itu, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melakukan perbaikan fasilitas-fasilitas yang ada di beberapa kolam renang tersebut sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung.	merekomendasikan agar Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melakukan perbaikan fasilitas-fasilitas yang ada di beberapa kolam renang tersebut sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung, terkait hal tersebut Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di tahun 2024 telah melakukan pemeliharaan secara rutin diantaranya melalui penyediaan air kolam yang berkualitas sehingga aman digunakan oleh pengguna kolam renang dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar area kolam renang agar pengguna layanan kolam renang merasa nyaman, begitu pula dengan terpeliharanya fasilitas penunjang berupa permainan anak-anak disekitar area kolam renang untuk meningkatkan minat bermain pengunjung anak-anak. Kedepan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata akan terus berupaya untuk melakukan penambahan fasilitas penunjang sehingga fasilitas kolam renang akan semakin beragam dan diharapkan pengunjung kolam renang dapat meningkat.		Probolinggo
12	Bantuan KONI di tiap Cabor dirasa masih kurang merata dan maksimal, masih banyak cabor yang belum menerima bantuan ataupun bantuannya sangat minim. Karena hal tersebut DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar KONI bisa membantu dan memfasilitasi cabor yang sudah terdaftar ataupun cabor yang belum terdaftar di KONI Kota Probolinggo.	Alokasi anggaran pada masing – masing Pengkot Cabor melalui Dana Hibah kepada KONI Kota Probolinggo mempertimbangkan, sebagai berikut: 1. Besaran Dana Hibah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk KONI Kota Probolinggo. 2. Usulan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pengkot Cabor yang diajukan kepada KONI Kota Probolinggo. 3. Program dan kegiatan di Sekretariat KONI Kota Probolinggo yang	Alokasi anggaran melalui Dana Hibah kepada KONI	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Probolinggo



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		peruntukannya untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Pengkot Cabor, sebagai berikut: ➤ Bantuan Event Cabang Olahraga ➤ Penghargaan dan Media Apresiasi Prestasi Olahraga ➤ Kontingen Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur ➤ Pemusatan Latihan Kota (Puslatkot) PORPROV ➤ Pengadaan Sarana Prasarana/Alat Olahraga Pengkot Cabor 4. Sehubungan dengan organisasi Pengkot Cabor berkaitan dengan: ➤ Prestasi yang telah diraih/dicapai oleh Pengkot Cabor ➤ Jumlah atlet yang dibina oleh Pengkot Cabor ➤ Jumlah pelatih/asisten pelatih yang ada di Pengkot Cabor ➤ Inovasi program – program yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pengkot Cabor dalam pembinaan dan Peningkatan prestasi atlet ➤ Ketertiban dan kepatuhan administrasi Pengkot Cabor dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibahnya masing – masing. 5. Usulan program dan kegiatan Pengkot Cabor dibahas / diverifikasi oleh Pengurus dan Bidang – Bidang yang ada di KONI Kota Probolinggo. 6. Jumlah Pengkot Cabor yang sudah terdaftar dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kota Probolinggo. B. Jumlah Pengkot Cabor tahun 2023 yang ditetapkan		



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kota Probolinggo sebanyak 42 Pengkot Cabor, namun demikian yang mendapatkan alokasi Dana Hibah sebanyak 32 Pengkot Cabor. Sedangkan yang sebanyak 10 Pengkot Cabor pada tahun 2023 belum mendapatkan alokasi Dana Hibah karena Kepengurusannya baru terbentuk pada tahun 2023 berjalan dan telah mendapat alokasi Dana Hibah pada tahun 2024. Pengkot Cabor yang belum mendapatkan alokasi Dana Hibah dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Umum KONI Kota Probolinggo dan akan dibantu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan KONI Kota Probolinggo, melalui pos anggaran: 1. Bantuan Event Cabang Olahraga 2. Pengadaan Sarana Prasarana/Alat Olahraga Pengkot Cabor		
13	Adanya penyaluran dana hibah pada tahun 2023 kepada salah satu pondok pesantren yang menelan anggaran yang cukup banyak. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah supaya mendahulukan urusan wajib terlebih dahulu.	Siap akan menjadi perhatian untuk selanjutnya	Bagian Kesra Setda Kota Probolinggo akan mengkoordinasikan dengan TAPD agar kedepannya lebih mengutamakan urusan wajib terlebih dahulu	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
	Permasalahan setoran parkir di 138 titik wajib pajak selalu tidak tepatsasaran, sehingga PAD dari sektor parkir tidak bisa maksimal. Maka DPRD Kota	Pemerintah Kota Probolinggo telah menyusun regulasi, khususnya di bidang Pajak Daerah, agar dapat menerapkan e-parking. Melalui Peraturan Wali Kota Nomor 71 tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Pasal 46 yang	Pelaksanaan e-Parking dengan membuat portal di tiap wajib pajak	BPPKAD Kota Probolinggo



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
	Probolinggo merekomendasikan agar BPPKAD segera melaksanakan e-parking dengan membuat portal di tiap titik wajib pajak sehingga lebih praktis efisien, terutama yang ada di bawah naungan Pemerintah Kota Probolinggo.	menyebut bahwa Wajib Pajak Parkir dengan peredaran usaha dari Jasa Parkir lebih dari Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dalam 1 Masa Pajak, wajib menggunakan karcis dengan sistem elektronik. Sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota, dari 138 titik parkir yang terdata, tidak semua titik dapat diterapkan e-parking, karena 26 titik parkir merupakan parkir insidentil yang hanya berlangsung kurang dari 1 (satu) minggu. Selanjutnya, atas 112 titik parkir yang merupakan parkir permanen juga tidak dapat serta merta diterapkan e-parking karena mempertimbangkan jenis penyediaan parkir (misal, tidak dipungut parkir seperti minimarket) beserta layout atau tata ruang dari tempat usaha yang menyediakan tempat parkir. Adapun titik parkir yang berada di lahan Pemerintah Kota yakni pada RSUD Dr Saleh dan Pasar Pelelangan Ikan Mayangan. Pemerintah Kota telah melakukan sosialisasi dengan mengundang pemilik titik parkir yang paling potensial untuk diterapkan e-parking, namun perwakilan pemilik titik parkir menyampaikan untuk penerapan e-parking membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga menyarankan agar Pemerintah Kota yang melakukan pengadaan melalui APBD. Sementara ini, titik parkir yang telah menggunakan portal yakni: - RSAB Muhammadiyah - RSIA Amanah - Keraton - Wizzmie - Sam's Studio		

3.4 PRESTASI YANG TELAH DIRAIH

Tabel 3. 43 PRESTASI YANG TELAH DIRAIH TAHUN 2024

NO	JENIS PRESTASI/PENGHARGAAN	TINGKAT PROVINSI/NASIONAL	PERANGKAT DAERAH
1	Penghargaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari	Nasional	Dinas Pendidikan dan



NO	JENIS PRESTASI/PENGHARGAAN	TINGKAT PROVINSI/NASIONAL	PERANGKAT DAERAH
	Kemenkumham RI		Kebudayaan
2	Juara I MTQ KORPRI Tingkat Nasional mewakili Provinsi Jawa Timur di Palangka Raya - Kalimantan Tengah	Nasional	
3	Harapan III Senam Irama - HAN PAUD Provinsi Jawa Timur 2024	Provinsi Jawa Timur	
4	OSN Sains an Nur Izzah Ayatul Husna (SDN Mangunharjo 6) meraih Medali Emas	Nasional	
5	Daerah Pelopor Kategori Berkembang	Nasional	
6	STBM AWARD	Nasional	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo
7	Piagam Penghargaan ODF	Jawa Timur	
8	Piagam Kota Sehat	Jawa Timur	
9	Penghargaan Universal Health Coverage Kepada Pemerintah Daerah oleh Wakil Presiden RI	Nasional	
10	Pemenang I Lomba Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Kebinamargaan untuk Penyelenggaraan Jalan	Nasional	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo
11	Predikat PUSPAGA Ramah Anak sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Nomor 660 Tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Terstandar di Tingkat Provinsi/Kab/Kota Tahun 2024	Tingkat Nasional	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
12	Juara harapan 1 atas proyek pasar agrobisnis dalam kegiatan est java investment tahun 2023	Tingkat Provinsi	DPMPTSP
13	Penghargaan atas Dedikasi dalam melaksanakan kegiatan Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizii untuk Siswa (GENIUS) Tahun 2024 dengan Baik	Tingkat Nasional	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
14	Forum Peningkatan Konsumsi Ikan yang Berperan Aktif dalam Pengembangan Akses Pasar UKM Pengolah dan Pemasar Sektor Kelautan dan Perikanan	Tingkat Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
15	Juara 3 Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional IX Tahun 2024	Nasional	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
16	Penghargaan Pengelolaan Kearsipan Kategori BB (Sangat Baik)	Tingkat Kota	Dinas Lingkungan Hidup
17	PPID Award Kategori Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Kota	Dinas Lingkungan Hidup
18	Nirwasita Tantra	Tingkat Nasional	Dinas Lingkungan Hidup
19	ADIWIYATA MANDIRI a.SDN TISNONEGARAN 1 b. SMPN 5	Tingkat Mandiri	Dinas Lingkungan Hidup
20	ADIWIYATA NASIONAL		
	a. SMPN 9	Tingkat Nasional	Dinas Lingkungan Hidup
	b. SDN KANIGARAN 3	Tingkat Nasional	Dinas Lingkungan Hidup
	c. SDN KANIGARAN 1	Tingkat Nasional	Dinas Lingkungan Hidup



NO	JENIS PRESTASI/PENGHARGAAN	TINGKAT PROVINSI/NASIONAL	PERANGKAT DAERAH
	d. SDN KEBONSARI KULON 1	Tingkat Nasional	Dinas Lingkungan Hidup
	e. MTSN	Tingkat Nasional	Dinas Lingkungan Hidup
26	ADIWIYATA PROVINSI		Dinas Lingkungan Hidup
27	a. SDN JATI 1	Tingkat Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
28	b. SDN MANGUNHARJO 7	Tingkat Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
29	c. MTS RIYADLUS SHOLIHIN	Tingkat Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
30	d. SDN TRIWUNG KIDUL 3	Tingkat Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
	e. SDN JREBENG KIDUL	Tingkat Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
	f. SDN POHSANGIT KIDUL 2	Tingkat Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
	g. SD TAHFIDZ BINTANGKU	Tingkat Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
	h. SDN SUKABUMI 1	Tingkat Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
31	PIALA ADIPURA 2023	Tingkat Nasional	Dinas Lingkungan Hidup
32	Apresiasi Pembina PROKLIM Kota Probolinggo	Tingkat Nasional	Dinas Lingkungan Hidup
33	PROKLIM RW. 03 KEL. TRIWUNG KIDUL KEC. KADEMANGAN (Tingkat Utama)	Tingkat Nasional	Dinas Lingkungan Hidup
34	PROKLIM RW. 06 KEL. SUMBER WETAN KEC. KEDOPOK (Tingkat Utama)	Tingkat Nasional	Dinas Lingkungan Hidup
35	PROKLIM RW. 02 KEL. JATI KEC. MAYANGAN (Tingkat Utama)	Tingkat Nasional	Dinas Lingkungan Hidup
36	BERSERI RW. 07 RW. 08 KEL. KEDUNG ASEM KEC. WONOASIH (Tingkat Pratama)	Tingkat Provinsi Jawa Timur	Dinas Lingkungan Hidup
37	BERSERI RW. 01 RW. 04 KEL. KADEMANGAN KEC. KADEMANGAN (Tingkat Pratama)	Tingkat Provinsi Jawa Timur	Dinas Lingkungan Hidup
38	Global Winner We love Cities (WLC)	Nasional OPCC dan Global Winner WLC	Dinas Lingkungan Hidup
39	WTP TAHUN 2023	Nasional	BPPKAD
40	Program Kampung Iklim Kategori Utama	Tingkat Provinsi	Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan
41	BERSERI tingkat PRATAMA	Provinsi	Kelurahan Kedung Asem
42	Juara 3 Lomba Lampu Hias Lingkungan Kota Probolinggo Tahun 2024	Tingkat Kota	Kelurahan Sumbertaman
43	Juara Harapan 1 Lomba Lampu Hias Lingkungan Kota Probolinggo Tahun 2024	Tingkat Kota	Kelurahan Sumbertaman
44	Evaluasi Keterbukaan Infomasi Publik Kota Probolinggo Tahun 2024	Kota Probolinggo	Kecamatan Wonoasih
45	Berperan Dalam Mendukung Upaya Penurunan Stunting Terbaik	Kota Probolinggo	Kecamatan Wonoasih
46	Pengelolaan Kearsipan	Kota Probolinggo	Kecamatan Wonoasih
47	Program Kampung Iklim Tingkat Kota Probolinggo	Kota Probolinggo	Kelurahan Wonoasih



NO	JENIS PRESTASI/PENGHARGAAN	TINGKAT PROVINSI/NASIONAL	PERANGKAT DAERAH
	Tahun 2024		
48	Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Kota Probolinggo	Kota Probolinggo	Kelurahan Jrebeng Kidul
49	Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan	Provinsi	Kecamatan Kademangan
51	Lomba Kelurahan Berseri	Provinsi	Kelurahan Kademangan
52	Penghargaan dari Komisi Informasi Awards 2024 sebagai Badan Publik Informatif Tingkat Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2024	Provinsi	Dinas Komunikasi dan Informatika
53	JUARA 1 LOMBA ADI KARYA WASTRA NUSANTARA 2024 - PERAJIN BATIK LARASATI	Nasional	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
54	PENGHARGAAN PENGGERAK KOPERASI MADYA	Nasional	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
55	PENGHARGAAN APRESIASI TOKOH INDONESIA 2024 BIDANG KOPERASI UMKM	Nasional	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
56	PENGHARGAAN NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN KATEGORI PASAR TERTIB UKUR	Nasional	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
56	PENGHARGAAN JUARA 2 UNTUK PONPES AZIDAN PADA ACARA SANTRI INOVATION AWARD	Nasional	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
57	Piagam penghargaan dan penyematan Lencana Hasta Brata Surya Majapahit kategori emas dari Pj. Wali Kota Mojokerto M. Ali Kuncoro. Penghargaan diberikan atas kontribusinya bagi Pemerintah Kota Mojokerto dalam penguatan kerja sama antar daerah. (Kegiatan Penyediaan Distribusi dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Penting dan Fasilitas Promosi dan Pemasaran) Tgl. 23 Desember 2024	Provinsi Jawa Timur	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
58	Tanda Kehormatan Lencana Pura Baya Prasiddhi Emas untuk Pj. Wali Kota Probolinggo, M. Taufik Kurniawan, S.Sos dari Pemerintah Kota Madiun (Kegiatan Misi Dagang) tgl. 23 Desember 2024	Provinsi Jawa Timur	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
59	Juara Harapan III Lomba Bertutur bagi Siswa-siswi SD/MI Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Tingkat Propinsi Jawa Timur	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
60	Meraih Kategori AA (Sangat Memuaskan) dengan Peringkat 17 Besar Nasional dan 6 Besar Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan surat pengumuman ANRI nomor: AK.01.00/28/2024 tentang hasil pengawasan kearsipan tahun 2024	Tingkat Propinsi Jawa Timur	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
61	10 Besar Inovasi Daerah Bidang Sosial Budaya	Provinsi Jawa Timur	Bappeda Litbang
62	Innovative Government Award dengan predikat Kota Sangat Inovatif	Nasional	Bappeda Litbang



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Terkait Tugas Pembantuan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pemberian tugas pembantuan pada dasarnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Probolinggo tidak menerima Tugas Pembantuan baik yang berasal dari Pemerintah maupun Provinsi Jawa Timur.



BAB V

PENUTUP

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Probolinggo Akhir Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Probolinggo Akhir Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo sebagaimana diamanatkan undang-undang.

LKPJ ini disusun dengan lebih memfokuskan pada pelaksanaan berbagai urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan melalui program dan kegiatan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai hasil dan permasalahan selama tahun 2024 yang telah dituangkan dalam LKPJ Walikota Probolinggo Akhir Tahun Anggaran 2024 diharapkan menjadi bahan masukan untuk mengarahkan perbaikan-perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut patut disyukuri, mengingat capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dijelaskan dalam LKPJ ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara Pemerintah Kota Probolinggo, DPRD dan masyarakat berlandaskan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Hal tersebut dilakukan demi mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan pencapaian pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat berperan sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja tahun berikutnya.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita dalam membangun kota Probolinggo yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi.

Probolinggo, Februari 2025

WALIKOTA PROBOLINGGO

dr. H. AMINUDDIN, Sp. OG., (K), M. Kes

The image shows the front cover of a budget book. The background is a grayscale photograph of the Probolinggo City Government building, a modern structure with large glass windows and a tiled roof. In the foreground, there is a paved area and a covered seating area with many small, dark chairs. The cover is decorated with bold, diagonal stripes in blue and yellow on the left and right sides. The text 'PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO' is printed in a bold, sans-serif font across the middle of the building's facade. At the bottom, a blue banner contains the text 'PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO' and '2025' in white.

**PEMERINTAH KOTA
PROBOLINGGO**

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

2025